

DUNIA KETIGA DARI - DAN KE MANA?

Negara Protektif versus Pasar
Agresif

Wim F. Wertheim

Oey's Renaissance

**Dunia Ketiga Dari - dan Ke Mana?
Negara Protektif versus Pasar Agresif**

Wim F. Wertheim
Third World Whence and Whither?

Het Spinhuis, 1997.

Penerjemah: Oey Hay Djoen

Pengutipan untuk keperluan resensi dan keilmuan dapat
dilakukan setelah memberitahukan terlebih dulu
pada Penerjemah/Penerbit
Memperbanyak atau reproduksi buku terjemahan ini dalam bentuk
apa pun untuk kepentingan komersial tidak dibenarkan

Hak Cipta dilindungi Undang-undang
All Rights Reserved

Modified & Authorised by: Edi Cahyono, Webmaster
Disclaimer & Copyright Notice © 2007 *Oey's Renaissance*

DUNIA KETIGA DARI - DAN KE MANA?

Negara Protektif versus Pasar
Agresif

Wim F. Wertheim

Penerjemah: Oey Hay Djoen

Oey's Renaissance

ISI

Introduksi	1
Bagian Satu - Utara versus Selatan	13
Bab I Nomor Satu, Amerika: Monopoli Merkantilis	14
Introduksi	14
Pola Kolonial	15
Doktrin Monroe	21
Perang Dingin sebagai Dalih	26
Kekecualian Asia Timur	29
Bagian Dua - Kaum Tani Empat puluh Abad	33
Bab II Kepadatan Penduduk di Asia Tenggara: Kemandegan Agraria	34
Bab III Makna Abadi Model-Mao bagi Dunia Ketiga?	44
Tiongkok Sebelum-Perang	44
Kunjungan Pertama: 1957	48
Lompatan Jauh Ke Depan	59
Kunjungan Kedua: 1964	63
Kunjungan Ketiga: 1970/71	74
Kunjungan Keempat: 1979	78
Kecenderungan-kecenderungan Dewasa ini di Dunia Ketiga	88
Bagian Tiga - Syarat-syarat Politik bagi suatu Terobosan	93
Bab IV Negara dan Dialektika Emansipasi	94
Introduksi	94
Merkantilisme Dini	99
Negara sebagai Sebuah Motor Emansipasi	102
Negara sebagai suatu Rem terhadap Emansipasi	106
Negara dan Emansipasi di Dunia Ketiga	110
Kesimpulan	117

Bab V Kegagalan-kegagalan Demokrasi yang dipaksakan	121
Urgensi Dunia Ketiga	121
Demokrasi-demokrasi yang Berdaya-hasil	121
Latar-Belakang Sistem-sistem Parleментар	124
Demokrasi-demokrasi dalam Krisis	125
Otokrasi-otokrasi dalam Krisis	128
Erosi Demokrasi secara Langsung	130
Berfungsinya Pemerintahan Sovyet	131
Demokrasi yang Dipaksakan di Eropa Timur	133
Demokrasi Parleментар di Dunia Ketiga	135
Ciri-ciri Khas Ekonomi Dunia Ketiga	137
Faktor Urgensi	140
Kediktatoran-kediktatoran Militer	142
Komunisme sebagai suatu Alternatif?	145
Kasus Tiongkok	146
Hak-hak Azasi Manusia	150
Bagian Empat – Strategi-strategi Negara Emansipatorik	155
Bab VI Bertaruh pada Elit atau Bertaruh pada Massa	156
Elit dan Massa: Observasi-observasi Teoritis	156
Kaum Elit di Dunia Ketiga	158
Anti-Elitisme di Tiongkoknya Mao	161
Kekuasaan Politik di Tiongkoknya Mao	166
Stratifikasi Sosial di Tiongkoknya Mao	177
Pembalikan Besar	184
Penilaian Kembali Revolusi Kebudayaan	188
Bab VII Legislasi versus Edukasi di Dunia Ketiga	193
Efek-efek Sosial dari Hukum	193
Dapatkah Masyarakat Manusia Diolah?	196

vi | W.F. Wertheim

Legislasi Emansipatorik di Dunia Ketiga	199
Faktor-faktor yang Menentukan Efektivitas Legislasi	210
Legislasi Emansipatorik dan Revolusi Sosial	215
Kesimpulan – Akhir Mitos taun-tahun 1970-an: Kemenangan Mammon dengan Biaya Terlalu Mahal	223
Krisis Kapitalisme	223
Asia Timur yang Bangkit Kembali?	229
Punyakah Sosialisme suatu Hari Depan?	232
Bibliografi & Penjelasan	238



Introduksi

Pendidikan akademik saya sebenarnya bidang hukum. Seandainya, di tahun-tahun 1920-an, sosiologi telah diakui sebagai suatu disiplin akademik di negeri Belanda, maka pilihan saya mungkin ke arah situ; namun, kemungkinan ini tidak ada hingga se usai Perang Dunia Kedua. Tetapi, ketika saya belajar hukum di Leiden, saya menyadari bahwa saya lebih tertarik pada dampak hukum atas masyarakat, ketimbang pada segi-segi yurisprudensi yang semata-mata bersifat legal.

Disertasi saya, yang pada tahun 1930 menghasilkan gelar doktor, memberi kesempatan pada saya untuk mengungkapkan keterpukauan saya pada masalah akibat-akibat hukum atas kehidupan sosial. Sekalipun tesisnya mengenai bidang hukum *civil*, argumen pokoknya ialah bahwa orang jangan mencari akibat-akibat dalam kasus-kasus aktual penerapan kaidah-kaidah hukum, tetapi lebih baik mencari dampak psikologis dari keberadaan sebuah undang-undang atas perilaku para warganegara, entah itu sebagai suatu insentif bagi, atau sebagai suatu penangkal dari, tipe-tipe perilaku tertentu. Dalam sebuah penerbitan kemudian, saya dapat menekankan bahwa pandangan ini sesuai dengan cara Jeremy Bentham, yang seabad sebelumnya, telah menganalisis kedayah-hasilan perundang-undangan.¹

Pada awal 1931 saya diangkat menjadi anggota peradilan Hindia-Belanda. Pengangkatan diri saya, yang kemudian dalam tahun itu juga, sebagai seorang staf *Departemen Kehakiman*, yang disertai administrasi pusat peradilan di Batavia, memberi kesempatan kepada saya untuk mendapatkan pengalaman praktis di bidang pekerjaan hukum.

Lima tahun kemudian, di tahun 1936, saya menjadi seorang profesor pada Akademi Hukum Batavia, untuk mengajar, di antara subyek-subyek lainnya, 'Introduksi pada Hukum.' Sebagai hasil riset saya mengenai 'akibat-akibat' hukum dalam sebuah masyarakat, saya semakin tertarik pada problem filosofis tentang kausalitas. Pada waktu itu, sejumlah penting kaum intelektual Barat masih menganut azas falsafah mengenai azas 'determinisme,' yang menyatakan bahwa setiap sesuatu yang terjadi di dunia, termasuk kegiatan-kegiatan manusia dan perjalanan sejarah manusia, telah 'ditentukan' oleh hukum kemutlakan kausalitas.

Saya dikejutkan oleh kenyataan bahwa bahkan di kalangan kaum sosial-demokrat gagasan-gagasan yang sama itu berdominasi. 'Hukum-hukum' ekonomi, yang ditegakkan oleh Marx dan Engels, diterima sebagai dogma-dogma, dengannya masa depan dapat diramalkan. Saya telah mengira bahwa kaum sosialis secara pasti akan percaya pada kemungkinan perubahan jalannya sejarah. Pada suatu kesempatan, ketika saya bertanya pada salah-seorang pemimpin sosial-demokrasi di negeri Belanda mengenai sumbangan gerakan sosialis menuju jenis masyarakat yang mereka berharap akan capai, jawabannya ialah: "Tugas kami hanyalah berfungsi sebagai semacam bidan untuk memuluskan jalan menuju suatu masyarakat sosialis yang bagaimanapun pasti akan lahir."

Bagi saya hal ini sangat tidak bisa diterima. Sikap-sikap seperti itu dengan gampang sekali akan menghasilkan suatu keadaan pikiran yang pasif, dengan mereka yang menganut ideologi itu percaya bahwa apapun yang mereka lakukan atau tidak lakukan, "dunia baru yang gemilang" itu tetap akan lahir. Pada waktu bersamaan saya menyaksikan bagaimana kaum Nazi Jerman berhasil dalam usaha-usaha aktif mereka untuk mengubah dunia ke dalam suatu arah yang berbeda sekali dari yang dicita-citakan kaum sosialis. Setelah mempelajari dasar filosofis determinisme, saya mendapatkan kepercayaan pada suatu alam-semesta yang ditentukan-sebelumnya adalah didasarkan pada suatu salah-pemahaman mengenai makna-dasar 'kausalitas.' Sudah tentu saya sepenuhnya menyadari, bahwa seluruh bangunan ilmiah itu dibangun di atas arti-penting yang luar-biasa dari ulangan, baik di dunia alam dan di dalam kehidupan sosial.

Namun saya menolak untuk menerima bahwa segala sesuatu yang terjadi di dalam alam-semesta ditentukan oleh sekedar ulangan: jika itu benar, maka penciptaan keutuhan-keutuhan struktural (seperti atom-atom, molekul-molekul atau elektron-elektron), maupun evolusi dari "alam yang hidup," pastilah mustahil adanya. Segala sesuatu yang terjadi dalam alam merupakan suatu kombinasi dari ulangan dan kebaruan. Pengulangan mendominasi alam semesta, tetapi hanya sejauh kondisi-kondisi sepenuhnya sama. Banyak dari perilaku manusia dapat diramalkan dalam batasan-batasan psikologis – tetapi menurut pendapat saya adalah sepenuhnya tidak-ilmiah untuk menolak kemungkinan akan pilihan

bebas/sukarela, baik itu oleh khewan atau oleh makhluk manusia (Wertheim 1974).²

Walaupun dengan menyadari ketidak-adilan mendasar dari kolonialisme, saya menjadi semakin kritis terhadap praktek-praktek dan kebijakan-kebijakan kapitalis, tesis-tesis dogmatik tertentu, yang diderivasi dari konsep-konsep Marxian oleh aliran-aliran/ajaran-ajaran sayap kiri yang diakui, tidak pernah menjadi keterima oleh saya sebagai suatu landasan teoretis bagi suatu analisis ilmiah mengenai sejarah manusia.

Setelah akhir perang, saya diangkat di Universitas Amsterdam pada jurusan yang baru dibentuk mengenai sejarah dan sosiologi Indonesia modern. Dalam “Prakata Pengarang” pada buku saya *Indonesian Society in Transition: A Study of Social Change*, yang diterbitkan di tahun 1956, saya merumuskan pandangan umum saya mengenai metodologi yang akan diterapkan pada studi sejarah sosial masyarakat-masyarakat Asia dengan kata-kata berikut ini:

Pada umumnya, siapapun yang mencoba memulangkan perkembangan-perkembangan Asia pada keteraturan-keteraturan dan proses-proses kausal yang dicatat di tempat-tempat lain, tidak melihat unsur yang baru, yang karakteristik dalam setiap perkembangan masyarakat manusia bahkan apabila bagian besar peristiwa-peristiwa berjalan paralel dengan proses-proses yang dikenal/diketahui dari masa-lalu. Hanya suatu konsep sosiologikal yang memandang umat-manusia sebagai suatu keutuhan dinamik yang telah mengambil nasibnya –di dalam batas-batas tertentu– ke dalam tangannya sendiri dan yang sejarahnya tidak pernah secara sepenuhnya berulang sendiri, dapat membantu kita pada suatu pemahaman yang lebih baik mengenai peristiwa-peristiwa zaman sekarang di Asia. Proses-proses dari masa-lalu merupakan pelajaran-pelajaran untuk diteliti dengan sangat serius. Namun, itu semua bukan hukum-hukum yang tidak-dapat-ditentang yang mesti diterima secara pasif oleh umat manusia. Itu semua tidak lebih daripada keteraturan-keteraturan yang hanya berlaku di dalam suatu pola sosial, pada suatu kurun sejarah tertentu.

Sejarah manusia merupakan suatu interaksi terus-menerus dari ulangan dan kebaruan, pengulangan senantiasa muncul dalam suatu busana baru dan kebaruan senantiasa cocok bagi suatu skema pengulangan (Wertheim 1959).³

Dalam prakata itu juga saya menyatakan hutang saya pada Max Weber, yang, hingga batas yang jauh, “memiliki kebesarannya sebagai seorang ahli sosiologi berkat penguasaannya atas sejarah ekonomi.”

Selama tahun-tahun 1970-an dan awal 1980-an baik teori 'modernisasi' yang menganggap bahwa semua negeri kurang-berkembang harus dibangun menurut pola yang ditetapkan oleh sejarah dunia Barat, dan teori-teori 'ketergantungan' neo-Marxis dan 'Sistem Dunia,' yang menyatakan bahwa 'cara produksi kapitalis sudah,' selama berabad-abad, berdominasi di seluruh dunia, sedikit atau banyak membayangi dampak tipe analisis Weber yang jauh lebih sempurna. Namun sekarang ini tampak suatu kebangkitan kembali dalam perhatian/minat pada Weber (Wertheim 1995). Satu aspek penting dari kecenderungan neo-Weberian ini, yaitu perspektif-perspektifnya akan studi masyarakat-masyarakat Dunia Ketiga, telah didiskusikan dalam sebuah karangan oleh Peter Vandergeest dan Frederick H. Buttel (Vandergeest 1988). Dalam karangan mereka itu mereka mencoba menunjukkan betapa kebangkitan baru-baru ini dalam minat akan tulisan-tulisan Weber dapat mengiyur pada 'sosiologi pembangunan,' yang, menurut pandangan mereka, telah mencapai suatu jalan buntu sebagai suatu akibat dari 'teori modernisasi' maupun 'neo-Marxian' yang gagal memberikan suatu penyelesaian/pemecahan yang secara sosiologis memuaskan atas masalah mengenai bagaimana memahami perkembangan-perkembangan aktual di apa yang disebut Dunia Ketiga.

Hingga batas yang jauh saya dapat setuju dengan kritik Vandergeest dan Buttel atas (teori-) 'ketergantungan' neo-Marxis, pertama-tama:

Karena di dalam kenyataan tidaklah mungkin untuk menangkap segala sesuatu yang menarik dan yang penting dalam pengalaman masa-kini negeri-negeri kurang berkembang dengan (cara-)deduksi dari dinamika dan dampak-dampak diferensial cara produksi kapitalis.⁴

Karangan mereka itu menyebutkan sejumlah pertanyaan penting yang merupakan suatu pendekatan neo-Weberian dengan memperhitungkan bukti historis yang menyajikan suatu citra realitas yang multi-kausal, kadang-kadang dalam kombinasi dengan azas-azas Marxis, dapat memberikan suatu jawaban yang menjanjikan.

Dalam pandangan saya, suatu kelemahan yang lebih mendasar dari aliran-aliran pikiran Marxis tertentu ialah penafsiran mono-kausal atas sejarah sosial dalam batasan-batasan suatu dasar ekonomis dan suatu bangunan ideologis. Saya ingin, pertama-tama sekali, menegaskan, bahwa bagi saya Karl Marx dan Friedrich Engels tetap merupakan

Bapak-bapak Pendiri analisis sosiologi dan ekonomi yang kritis. Agar supaya dapat menyatakan berhutangnyanya diri saya pada mereka, dapat saya memakai kata-kata Newton: “Apabila aku melihat lebih jauh, maka itu karena aku berdiri di atas bahu-bahu raksasa.” Betapapun, mungkin terdapat sama banyaknya aliran-aliran Marxis seperti banyaknya gereja atau sekte yang mengklaim memiliki versi otentik gagasan-gagasan Jesus Kristus. Adalah Marx sendiri yang pernah mengatakan: “Aku bukan seorang Marxis.”

Saya senantiasa menekankan arti-penting mendasar dari sikap-sikap mental, yang sedikitnya adalah sama pentingnya seperti faktor-faktor material. Saya sepenuhnya setuju dengan Peter Worsley (1984), ketika ia berbicara tentang “Mitos mengenai Dasar dan Bangunan-atas.” Ia menulis:

Imago mengenai dasar dan bangunan-atas ‘adalah’ sebuah imago, sebuah metafor yang menggunakan analogi-analogi ekstra-sosial untuk menggambarkan pengaturan-pengaturan sosial. Semua imago seperti ini, apapun nilainya dalam menerangi subyek, sepenuh-penuhnya mendistorsi juga (Worsley 1984: 22, 28).

Kausalitas tidaklah mono-kausal, ia selalu multi-kausal. Faktor-faktor material dan mental selalu berinteraksi.⁵

Arti-penting faktor-faktor mental, misalnya, telah ditekankan dengan konsep mengenai kontrapunkt yang saya perkenalkan sebagai suatu unsur penting dari gerakan-gerakan protes yang potensial; James Scott lebih belakangan ini menekankan “Transkripsi-transkripsi Tersembunyi” di dalam bukunya *Domination and The Arts of Resistance*.⁶ Vandergeest dan Buttel juga menyiratkan

Bahwa para ahli sosiologi pembangunan mesti memperhitungkan mengapa orang berbuat sebagaimana mereka berbuat dalam pengertian makna subyektif yang dikaitkan pada yang mereka lakukan, lebih ketimbang sekedar menjelaskan semua aksi dengan naik-banding (lari) pada hukum-hukum ekonomis atau formal lainnya sebagai model-model masyarakat.⁷

Saya juga tidak setuju dengan arti-penting berlebihan yang oleh sementara kaum Marxis dikaitkan pada ‘perjuangan kelas.’ Penelitian-penelitian sosiologis dan antropologis yang lebih belakangan ini telah mendemonstrasikan peranan luar-biasa yang dimainkan dalam sejarah manusia oleh kesetiaan dan solidaritas vertikal, seperti yang terjadi, misalnya, dalam hubungan-hubungan patronase. Perkembangan-

perkembangan politik sekarang di Eropa Timur semakin menunjukkan dampak luar-biasa dari solidaritas-solidaritas kelompok dengan suatu dasar etnik atau religius.

Telah juga saya tunjukkan bahwa hubungan-hubungan ras tidak harus semata-mata dipahami dalam batasan-batasan konflik-konflik kelas, sekalipun ini jelas layak dalam kasus-kasus eksploitasi kolonial terhadap tenaga kerja murah atau hubungan-hubungan perbudakan (Cox 1970); aslinya 1948). Namun konflik-konflik rasial yang gawat dapat pula dihasilkan oleh persaingan ekonomik antara kelompok-kelompok yang bersaing atas dasar solidaritas vertikal. Di sini contoh-contoh dapat dijumpai dalam 'pengejaran etnik' dan pembasmian yang diderita oleh kaum yahudi di Eropa Tengah, atau ledakan-ledakan anti-Tionghoa di Asia Tenggara, kedua-duanya terjadi di masa lalu yang jauh dan pada waktu-waktu lebih belakangan ini.⁸

Arti-penting yang berlebihan mengenai konflik kelas dalam literatur Marxis juga mengakibatkan bentuk-bentuk solidaritas kelompok dan perjuangan-perjuangan kolektif lain yang amat penting, sepertinya yang berkaitan dengan isu gender, kurang mendapat perhatian. Bagi masyarakat-masyarakat Asia, maka Wieringa (1995), dan Schenk-Sandbergen dan Choulamany-Khamphoui (1995) merupakan perbincangan-perbincangan bagus sekali mengenai arti-penting aspek gender ini.

Khususnya bagi negeri-negeri Dunia Ketiga, saya tidak pernah sepenuhnya terikat, seperti banyak kaum Marxis dini, pada suatu 'kelas proletarian.' Perjuangan kaum tani adalah sama pentingnya seperti perjuangan kaum buruh industrial perkotaan. Saya tidak dapat memandang emansipasi bangsa manusia mencapai puncaknya dalam suatu kemenangan proletariat industrial. Menurut pemahaman saya mengenai emansipasi, maka perjuangan itu akan selalu bersifat terbuka/belum selesai (*open-ended*) [Wertheim 1992].⁹

Lagi pula, konsep Marxian mengenai suatu 'kelas pada dirinya sendiri,' jika diterapkan pada suatu kategori yang para anggotanya masih belum secara sadar memiliki suatu solidaritas bersama, dengan gagal memperhitungkan kesadaran subyektif para anggotanya ini, tidak terelakkan lagi akan menderita suatu 'reifikasi' tak-selayaknya dari 'imago-imago kolektif.' Di sini kembali kita menjumpai pengabaian

oleh banyak orang Marxis terhadap sikap-sikap mental yang bersifat menentukan bagi kegiatan manusia.

Vandergaest dan Buttel juga menyebutkan tradisi neo-Weberian untuk menarik perhatian pada aspek-aspek pendayagunaan negara, berlawanan dengan kecenderungan (yang dipengaruhi Marxis) untuk memandang negara sebagai selalu menindas. Dalam hubungan ini mereka dapat saja merujuk pada kecenderungan dewasa ini di dalam komunitas bisnis dan kemantapan politis di dunia Barat untuk menyangkal adanya suatu peranan positif dari negara dalam masalah-masalah ekonomi. Dewasa ini, banyak negeri Dunia Ketiga juga dikuasai oleh pemerintahan-pemerintahan yang dalam kebijakan-kebijakan mereka hanya sedikit sekali memperhatikan suatu peranan sebagai pelindung dan stimulator seperti itu, padahal suatu komitmen seperti itu adalah sangat penting sekali bagi pembelaan kepentingan-kepentingan massa agrarian di Asia Selatan dan Tenggara!

Menurut pandangan saya suatu kelemahan mendasar dari berbagai aliran pikiran Marxis atau neo-Marxis ialah bahwa peranan negara dalam kehidupan ekonomi tidaklah secukupnya diakui arti-pentingnya. Peranan menentukan dalam sejarah ekonomik sebagaimana yang dijulukkan oleh sementara pengarang neo-Marxis pada *cara produksi kapitalis* (yang menurut pandangan mereka mendominasi seluruh dunia sejak abad ke XVII), secara sangat melebih-lebihkan kekuasaan perusahaan swasta. Pandangan ini mengabaikan kenyataan bahwa sebab utama bagi keberhasilan revolusi industrial di Inggris di abad XVIII bisa ditemukan dalam kebijakan-kebijakan 'merkantilis' yang dijalankan oleh pemerintah Inggris, yang, dengan memaksakan hambatan-hambatan serius pada pengimportan tekstil buatan dari India, telah memberikan perlindungan kuat pada industri tekstil Inggris.

Bukan kaum Marxis saja yang meremehkan peranan ekonomis dari negara dalam sejarah ekonomi Eropa. Sudah sejak publikasi *The Wealth of Nations* Adam Smith, seluruh gagasan mengenai merkantilisme telah dikesampingkan di dunia Anglo-Sakson sebagai suatu tipe kebijakan ekonomi yang merusak, walaupun adanya kenyataan bahwa peningkatan 'kekayaan nasion Inggris' hingga batas sangat jauh adalah berkat kebijakan-kebijakan merkantilis itu. Bahwa Max Weber sangat dipengaruhi oleh arti-penting berlebihan yang diberikan pada peranan

perusahaan swasta, walaupun kuatnya desakan Friedrich List yang menganjurkan kebijakan-kebijakan neo-merkantilis dari pemerintah sebagai dukungan bagi pembangunan suatu industri nasional.

Dalam buku saya *East-West Parallels*, yang diterbitkan pada tahun 1964, saya menyerang, untuk pertama kalinya, pandangan unilateral mengenai pertumbuhan ekonomik ini yang dijulukkan semata-mata pada kapitalisme 'swasta' (privat). Saya menulis:

Apabila intervensi negara merupakan suatu unsur menentukan dalam menghasilkan pertumbuhan ekonomi dalam dunia dewasa ini, maka sangatlah mungkin bahwa perkembangan-perkembangan yang lalu di dunia Barat tidaklah semata-mata disebabkan oleh kapitalisme swasta sebagaimana umumnya dianggap oleh para pemantau Barat yang tumbuh dalam suatu dunia yang memandang prakarsa/inisiatif swasta sebagai kunci penentu bagi pertumbuhan ekonomi.¹⁰

Dalam tulisan-tulisan lain saya juga berargumentasi bahwa sasaran utama kebijakan-kebijakan kolonial negara-negara Barat ialah mempertahankan suatu monopoli di bidang industrial dengan mencegah bangkit dan bertumbuhnya nasion-nasion industrial baru yang bersaing (Wertheim 1992).

Dalam buku ini saya menunjukkan bagaimana politik-politik (kebijakan-kebijakan) 'neo-kolonial,' yang dijalankan negara-negara Barat, dan khususnya di Amerika Serikat, sejak akhir Perang Dunia Kedua, pada dasarnya merupakan suatu pelanjutan kebijakan-kebijakan kolonial negara-negara Eropa-Barat sebelum-perang. Seperti kebijakan-kebijakan yang, dengan berjubahkan 'Beban Bangsa Kulit Putih,' mengklaim motif-motif altruistik (mementingkan orang lain) dalam memperkenalkan 'kebijakan-kebijakan kesejahteraan' di koloni-koloni, sedangkan tujuan pokoknya ialah melestarikan monopoli industrial Barat, maka demikian pula, kebijakan-kebijakan yang dijalankan oleh pemerintahan-pemerintahan Amerika Serikat pasca-perang telah dirancang untuk mencegah negeri-negeri Amerika Latin membangun/mengembangkan ekonomi-ekonomi industrial yang bersaing. Dengan berjubahkan promosi perdagangan bebas, pemerintahan-pemerintahan A.S. secara berturut-turut telah menjalankan segala macam perlindungan bagi 'kepentingan-kepentingan nasional' mereka sendiri, dan bersamaan waktu dengan itu memaksa negeri-negeri Dunia Ketiga membatalkan/melepaskan segala kemungkinan digunakannya kekuasaan negara dalam

membangun ekonomi-ekonomi nasional yang sejati.

Dalam tinjauannya mengenai sejarah Amerika, Gabriel Kolko telah menganalisis secara sangat rinci suatu strategi neo-merkantil yang secara mendasar dijalankan Amerika Serikat untuk mempertahankan ketundukan/ketergantungan ekonomi-ekonomi Amerika Latin pada kepentingan-kepentingan kapitalis Amerika Utara (Kolko 1988). Campur-tangan (intervensi) negara yang menentukan ini acapkali telah diremehkan oleh para sarjana neo-Marxis, yang berpuas diri dengan menjulukkan penundukan neo-kolonial imperialistik dari Dunia Ketiga pada kapitalisme semata-mata.¹¹

Namun kesinambungan mendasar dari praktek-praktek merkantil secara sadar seperti itu selama seluruh lima abad, sejauh-jauh yang saya sadari, telah untuk pertama kalinya ditunjukkan oleh Noam Chomsky dalam bukunya *Year 501*, yang diterbitkan pada tahun 1993 (Chomsky 1993).

Ini menjelaskan mengapa buku ini, yang mencekam diri saya karena orijinalitas dan ketajaman pandangannya, memainkan peranan yang begitu penting dalam bab pertama buku ini, “Nomor Satu, Amerika.” Akhirnya, suatu kelemahan dalam banyak tulisan Marxis ialah anggapan umum bahwa jalan menuju sosialisme selalu harus melalui suatu tahap peralihan kapitalisme. Akibatnya ialah kegagalan untuk memahami bahwa suatu periode peralihan seperti itu, khususnya dalam kasus kolonial, mungkin bahkan akan menjadi suatu halangan bagi sesuatu perkembangan ekonomi. Anggapan mengenai ketidak-terelakkannya suatu intermezo kapitalis menjadi alasan untuk membiarkan perkembangan-perkembangan pada suatu arah kapitalis di masyarakat-masyarakat Dunia Ketiga. Buku saya, *Evolution and Revolution* (Wertheim 1974) [*De Lange Mars der Emancipatie*, terjemahan dalam bahasa Indonesia: *Pasangnya Gelombang Emansipasi*, penerjemah Ira Iramanto, 1997] mencurahkan banyak perhatian pada “gejala pelompatan dalam sejarah manusia” sebagai suatu terobosan, atau penyimpangan dari urutan ‘klasik,’ yang diterima oleh para Marxis dini sebagai sejenis ‘hukum.’ Strategi agrarian Mao Zedong telah membuktikan betapa suatu periode peralihan kapitalis seperti itu dapat dilompati.

Tujuan dasar buku ini ialah menganalisis situasi sekarang dan prospek-prospek masa depan bagi negeri-negeri Dunia Ketiga dengan suatu cara

yang menghindari segala simplifikasi dan peranggapan-peranggapan seperti itu mengenai keberadaan hukum-hukum yang kaku-ilmiah, tanpa melupakan masalah-masalah mendasar yang dihadapi mayoritas luas rakyat yang hidup di negeri-negeri ini. Bagi saya pandangan-pandangan sekarang dari golongan 'kanan' atas kemenangan gagasan-gagasan mereka sama sekali tidaklah dapat diterima. Bersamaan dengan itu, saya tidak dapat sepenuhnya menerima analisis dewasa ini yang manapun oleh para ahli teori golongan 'kiri' yang didasarkan pada dogma-dogma yang sudah kedaluwarsa. Dalam analisis saya, konsep dasarnya ialah 'emansipasi,' yang dilihat sebagai suatu gejala umum yang sangat penting dalam sejarah manusia, namun bukan sebuah yang secara khusus berkaitan dengan suatu kelas tertentu ke mana seseorang harus mencari suatu pemecahan atas masalah-masalah dunia sekarang. Buku saya, karenanya, tidak berawal dari suatu perspektif proletarian, melainkan dari suatu perspektif 'emansipatori' yang terbuka.

Atas dasar penelitian-penelitian saya sendiri di lapangan mengenai masalah-masalah agraria, baik itu dilakukan di Indonesia dan Tiongkok, dilengkapi dengan penelitian sejumlah mantan mahasiswa saya di India dan Filipina, saya telah berusaha mencapai suatu pandangan yang didasarkan pada penulisan-kembali secara menyeluruh terhadap sejarah ekonomi dan sosial dunia. Situasi dunia sekarang, dan khususnya kondisi dewasa ini dari sebagian besar negeri Dunia Ketiga, menuntut agar rakyat-rakyat yang menderita karena 'keterbelakangan' (kurang-berkembang) dan ancaman akan "perkembangan lebih lanjut dari keterbelakangannya," dibekali dengan alat-alat teoretis baru "sebagai senjata-senjata kaum lemah" yang sesungguhnya, agar supaya meneruskan perjuangan mereka bagi emansipasi dari Mamon maupun Leviathan-leviathan palsu.

Catatan:

¹Pada awal abad ke XIX Jeremy Bentham sudah menunjukkan arti-penting efek perangsang dari 'harapan-harapan' yang ditimbulkan oleh legislator di kalangan warga; secara khusus ia menyebutkan bahwa 'legislasi' yang memberikan harapan pada seorang pemilik bahwa dirinya dapat dengan aman menikmati hak-miliknya. Dengan cara serupa ia mendasarkan hukum kontrak pada azas 'jaminan': "Mengapa kita mesti memenuhi perjanjian-perjanjian kita? (...) Tidak akan ada lagi keamanan di antara orang-orang, tiada perdagangan, tiada

kepercayaan-akan menjadi perlu untuk kembali ke hutan-hutan jika perjanjian-perjanjian tidak memiliki suatu kekuatan pengharusan" (Bentham, 1931m hal.82). Saya merujuk pada Bentham dalam tulisan saya *Kernvragen van wetgeving* (Basic problems of legislation), dalam Wertheim, 1935, hal.716-792.

² Wertheim, 1974, *Epilogue: Repetition and Uniqueness in an Open-Ended Universe*.

³ Wertheim, 1956; "Pengantar Penulis" yang asli telah juga dimasukkan dalam edisi kedua yang diperbarui tahun 1959.

⁴ Dikutip oleh para penulis dari David Booth, "Marxism and Development Sociology: Interpreting the Impasse," *World Development*, Vol.13 (1985), hal.773.

⁵ Wertheim, 1974, hal.99 ff.; Saya juga dapat merujuk pada peringatan Mao Zedong: -Jiwa sedang ditransformasi menjadi materi, yang didiskusikan dalam 6 dari buku ini.

⁶ Baca saya punya "Society as a Composite of Conflicting Value Systems," yang aslinya diterbitkan dalam Wertheim, 1964, 1964, hal.23 ff; juga dimasukkan dalam Wertheim, 1993, hal. 6-16; Scott, 1990.

⁷ Vandergeest dan Buttel, 1988: para pengarang dapat merujuk pada Scott, 1985.

⁸ Saya ingin merujuk pada esai saya "The Trading Minorities in Southeast Asia," dalam Wertheim, 1964, hal.38-82; lihat juga tulisan saya "Netherlands-Indian colonial racism and Dutch home racism," dalam: Breman et al. (eds), 1990, hal.71-88.

⁹ Wertheim, 1992; lihat juga Bab.4 buku ini.

¹⁰ Lihat karya saya "Religion, Bureaucracy, and Economic Growth," dalam Wertheim, 1964, hal. 153. Artikel itu juga dimasukkan dalam Wertheim, 1993, lihat hal.49.

¹¹ Sebuah contoh dari yang banyak: Barratt Brown, 1974.

BAGIAN 1:
UTARA VERSUS SELATAN

Bab I, Nomor Satu, Amerika: Monopoli Merkantil

Introduksi

Pada suatu usia muda, ketika saya sangat berminat pada permainan catur, pernah saya mendengar kisah berikut mengenai seorang grandmaster terkenal – biar aku menyebut namanya Loewenstein. Seorang pecatur amatir telah berkata pada *grandmaster* Tartakower, bahwa dirinya telah memainkan pembukaan yang belum lama berselang direkomendasikan oleh Loewenstein dalam sebuah majalah catur – dengan hasil malapetaka. Tartakower menjawab: “Jangan kau memainkan yang ditulis Loewenstein. Yang mesti kau mainkan ialah yang ia mainkan!”

Saya teringat akan kisah ini selagi membaca buku Noam Chomsky *Year 501* (Chomsky 1993). Dalam buku yang luar-biasa menarik ini, sang ahli linguistik termashur, yang telah menjadi seorang ahli terkemuka mengenai sejarah dunia, mendemonstrasikan kesinambungan – selama lima abad sejak penemuan Amerika oleh Columbus – dalam keberhasilan cara ‘Utara’ memaksakan dominasi politis dan militernya atas ‘Selatan.’ Bahwa Selatan itu dikalahkan di sektor ekonomi tidaklah disebabkan oleh ‘perdagangan bebas’ atau, memakai suatu istilah ekonomi yang lebih modern, suatu ‘perekonomian pasar bebas,’ melainkan berulang-kali karena dukungan pemerintahan yang kuat pada kekuatan-kekuatan ekonomi ‘Utara’ sendiri. Dengan dukungan negara seperti itu, perekonomian-perekonomian ‘Utara’ mencapai suatu kedudukan monopoli, baik di bidang industri maupun agrikultur, di atas dan terhadap ‘Selatan’-agrarian yang miskin.

Permainan catur itu berlanjut. Dari akhir *Perang Dingin* dan seterusnya, ‘Utara,’ sebagaimana yang diwakili oleh Bank Dunia dan IMF, memuji-muji kebaikan-kebaikan suatu ‘perekonomian pasar bebas’ bagi negeri-negeri Eropa Timur yang telah dibebaskan dari ‘sosialisme-negara,’ sekalipun Utara itu sendiri tidak pernah mempraktekkan suatu ‘perekonomian pasar bebas’ seperti itu, juga tidak bersedia untuk

memraktekannya di masa depan.

Hasilnya ialah, bahwa Timur yang ‘dibebaskan’ itu dengan cepat terpuruk jatuh pada posisi ekonomis dari suatu wilayah *Dunia Ketiga*.

Bab ini dimaksudkan untuk mengungkapkan kesinambungan penundukan ‘Selatan’ secara merkantilis atau ‘neo-merkantilis’ oleh ‘Utara,’ baiuk dalam dimensi-dimensi politisnya maupun ekonomisnya. Suatu keterkaitan akan ditegakkan antara penundukan kolonial oleh Eropa atas bagian-bagian Asia dan Afrika, dan penundukan neo-kolonial oleh Amerika Serikat atas Amerika Latin dan bagian-bagian lain dunia.

Pola Kolonial

Di abad-abad yang lalu, permainan ‘Monopoli’ adalah karakteristik dari kebijakan Inggris. Chomsky, dalam bab pertama bukunya, menolak gambaran tradisional mengenai sebuah Inggris Raya yang terutama berhutang keberhasilan-keberhasilan ekonominya pada tradisi perdagangan bebasnya. Dengan terutama merujuk pada buku John Brewer *Sinews of Power* (Brewer 1989), Chomsky mengemukakan bahwa sudah sedini sekitar tahun 1750, Inggris telah menjadi sebuah ‘negara kuat,’ yaitu “sebuah negara militer-fiskal, berkat suatu peningkatan radikal dalam perpajakan dan suatu administrasi umum yang besar” (Brewer 1989: 9). Negara telah menjadi ‘faktor tunggal terbesar di dalam perekonomian’; pada akhir abad XVIII, tingkat perpajakan di Kerajaan Inggris adalah dua-kali lipat dari Perancis –yang umumnya dianggap sebagai sebuah negara yang terlalu disentralisasikan dan serba-berkuasa– di bawah *Ancien Regime*.

Negara lari pada tarif-tarif import yang tinggi dan embargo-embargo perdagangan untuk melindungi industri tekstil yang sedang berkembang, suatu aspek dari merkantilisme Inggris yang sering dilupakan dalam studi-studi mengenai sejarah ekonomi Eropa. Menurut pandangan baku, maka periode Revolusi Industrial di Eropa Barat:

Mesti dikarakterisasi, pertama-tama dan yang terutama, sebagai suatu perubahan masyarakat secara radikal dan dadakan [...] Dua dari ciri-ciri esensial transformasi radikal dan dadakan itu pada umumnya dianggap menjadi kedaruratan suatu sistem produksi baru, pabrik, dan lahirnya

seorang produser baru, sang industrialis (Rutten 1994: 14).

Kaum industrialis Eropa masa-dini adalah:

Dianggap sebagai orang-orang bisnis yang bebas. Apapun laba yang mereka dapatkan adalah disebabkan oleh kerja keras mereka sendiri. Tiada bantuan pemerintah; kesemua mereka itu harus bertahan hidup dalam sebuah perekonomian pasar-bebas dengan persaingan yang sengit (Rutten 1994: 20)

Pandangan-pandangan simplistik seperti itu mengenai 'para industrialis baru' dan mengenai watak sesungguhnya dari Revolusi Industrial di Inggris, kini telah ditinjau kembali secara menyeluruh.

Berbeda dengan pengertian mengenai Revolusi Industrial sebagai suatu transformasi masyarakat secara radikal dan dadakan, penelitian dan analisis baru-baru ini mendukung pandangan bahwa industrialisasi di Inggris adalah berangsur-angsur selama periode revolusi industri klasik (Rutten 1994: 30).

Menurut F. Crouzet (sebagaimana dikutip oleh Rutten) akan

Menyesatkan sekali memandang kaum industrialis akhir abad XVIII dan awal abad XIX sebagai *superman-superman* heroik, Titanik, Protean dan Promethean. Terjadi sedikit romantisasi dalam tulisan-tulisan mengenai 'kapten-kapten industri'.¹

Peranan negara dalam melindungi industri tekstil Inggris yang sedang bangkit agaknya telah luput dari perhatian para pengarang yang mencoba menulis kembali sejarah ekonomi dunia. Bahkan studi-studi yang lebih belakangan seperti Crouzet (1985) dan Ton Kemp (1985, orijinal 1969) pada umumnya melalaikan studi seminal oleh R. Mukherjee, *The Rise and Fall of the East India Company*, yang diterbitkan di Berlin (Mukherjee 1958) mengenai cara merkantilisme Inggris mendukung industri tekstil yang sedang bangkit dengan tujuan jelas untuk menyingkirkan pesaing utamanya, sub-kontinen India, di mana industri tekstil telah bertumbuh-subur di abad XVII.

Sudah pada menjelang akhir abad XVII para penenun sutera Spittlefields (di Middlesex, tepat di luar kota London) telah memrotos dengan keras pengimporan sutera tenunan India oleh East India Company (Mukherjee 1958: 397). Menjelang tahun 1720 para fabrikasi (pengusaha manufaktur)

Inggris

Telah berhasil menjamin pelarangan total terhadap pengimporan sutera dan kaliko cetakan India ke Inggris, dan bea-cukai yang semakin tinggi dikenakan pada semua barang katun hasil manufaktur India (Mukherjee 1958: 397/8).

Industri tekstil Inggris yang menggunakan mesin sesungguhnya mulai bertumbuh di sekitar tahun 1760, tahun ketika Raja George III naik ke atas takhta. Hingga waktu itu perusahaan-perusahaan tenun katun Lancashire nyaris tidak dilengkapi secara lebih baik daripada rekan-rekanimbangan mereka yang bangsa India. Menyusul Pertempuran Plassey (1757), yang menghasilkan kekuasaan Inggris atas Bengal, hubungan-hubungan ekonomi dengan India berubah secara mendasar. East India Company menggunakan cara-cara politis untuk mengurangi pembuatan tekstil-tekstil buatan di Bengal. Dan lebih khususnya, industri rumahan di pedesaan India. Ahli sejarah ekonomi India, Romesh Dutt, dengan mengutip dari sebuah surat yang ditulis oleh para Direktur East India Company di tahun 1769, mencatat suatu

Rencana kebijakan (politik) yang sempurna, baik yang bersifat pemaksaan maupun yang bersifat himbuan, yang dengan derajat yang sangat kuat mesti beroperasi secara menghancurkan atas manufaktur-manufaktur Bengal. Akibat-akibat mesti (sejauh itu dapat beroperasi tanpa tipu-daya) mengubah seluruh wajah negeri industrial itu, agar menjadikannya suatu medan produksi bahan-bahan kasar yang ditundukkan pada para manufaktur Inggris Raya (Dutt 1970: 45; orijinal 1904).

Dengan kata-kata lain, selama periode *Revolusi Industrial* itu, strategi merkantilis dari masa-masa sebelumnya dilanjutkan dalam suatu bentuk yang diperparah. Pada tahun 1813 tarif-tarif impor atas tekstil-tekstil dari India dinaikkan hingga luar-biasa tingginya “untuk mempromosikan industri-industri Inggris di India dan akhirnya untuk menghancurkan industri-industri India” (Mukherjee 1958: 404).

Konsekuensi-konsekuensi sosial dari strategi kolonial Inggris ini sudah sangat terkenal. Pada tahun 1757, tahun pertempuran di Plassey, Clive (jenderal yang mengomandoi pasukan-pasukan Inggris) melukiskan pusat pertekstilan Dacca “sebagai seluas, berpenduduk-banyak, dan sekaya kota London.” Menjelang tahun 1840, menurufut kesaksian Sir Charles Trevelyan di muka Select Committee of the House of Lords, penduduk

Dacca telah jatuh dari 150.000 orang menjadi 30.000 orang, “dan hutan-belukar dan malaria dengan cepat datang mengurung [...] Dacca, Manchesternya India, telah jatuh dari sebuah kota yang bertumbuh-subur menjadi sebuah kota kecil dan sangat miskin” (Chomsky 1993: 12).

Sebuah pernyataan lain oleh seorang Inggris yang berwenang telah acapkali dikutip, oleh antara lain Jawaharlal Nehru: Gubernur-Jendral Lord William Bentinck menyatakan bahwa sebagai akibat penghancuran industri pertenunan maka “kesengsaraan nyaris tidak menemukan kesamaannya dalam sejarah perdagangan. Tulang-tulang penenun katun memutihkan dataran-dataran India” (Nehru 1956: 298).

Jelaslah bahwa penelitian sejarah aktual tidak memperkenalkan kita untuk menjulukkan keberhasilan industri modern Eropa-Barat kepada perusahaan swasta semata-mata, tetapi bahwa pengertian ini mengandung unsur-unsur dari sebuah mitos yang disanjung di dunia Barat selama dua abad. Kebenarannya ialah bahwa pembangunan suatu industri nasional agar bersaing dengan wilayah-wilayah yang secara industrial sudah berkembang, hanya dapat dilaksanakan dengan dukungan kuat oleh pemerintah.

Menjelang pertengahan abad XIX, ketika para pengusaha Inggris telah berhasil mendapatkan –bagi industri Inggris– suatu nyaris-monopoli, yang menyeluruh dunia, terdapatlah penurunan kebutuhan akan perlindungan negara. Dengan hasrat Inggris untuk tetap menjadi ‘bengkel dunia,’ maka para pengusaha semakin bercenderung untuk menganjurkan ‘perdagangan bebas,’ dengan begitu memungkinkan industri menarik keuntungan sebesar-besar mungkin dari kedudukan menguntungkan yang ketika itu telah dicapainya. Tidak ada keperluan lagi bagi negara untuk memainkan suatu peranan aktif dalam kehidupan perekonomian: negara dapat membatasi diri pada peranan seorang ‘penjaga malam,’ yang memelihara hukum dan ketertiban.

Namun, negara-negara Barat lainnya tidak bersedia menerima kedudukan monopoli Inggris, dan dengan begitu diberi bagian status sejenis koloni Inggris. Pada tahun 1841, ahli ekonomi Jerman, Friedrich List, menerbitkan *Das nationale System der politischen Okonomie*, di dalam

mana ia menganjurkan suatu strategi tarif-tarif impor yang protektif – di balik mana sebuah industri nasional Prussia dapat dikembangkan – untuk menindak-balasi kesukaan Inggris akan perdagangan bebas (List 1920).

Menurut Bairoch (1993: 17):

Proteksionisme bagi List (dan bagi arus-utama ajaran proteksionisme) tidaklah merupakan tujuan, melainkan suatu kebijakan sementara agar memungkinkan sebuah negeri membangun suatu perekonomian yang kuat melalui industrialisasi. Di sini lahirlah soal utamanya: sebuah negeri mesti mengindustrialisasi tanpa dikalahkan, pada tahap pertama proses ini, oleh persaingan industri-industri asing yang lebih dewasa.²

Bismarck, sang ‘Kanselir Besi,’ bersesuaian dengan anjuran List bagi suatu strategi neo-merkantilis, mendorong perkembangan suatu industri Jerman yang modern, tidak hanya dengan cara tarif-tarif protektif, tetapi juga bentuk-bentuk dukungan pemerintah lainnya, seperti fasilitas-fasilitas kredit yang diberikan melalui Deutsche Bank. Demikian pula, Amerika Serikat, sesudah kemenangan Utara yang industrial atas Selatan yang agrarian dalam Perang Saudara di awal tahun-tahun 1860-an, telah menggunakan tarif-tarif impor yang tinggi untuk memajukan perluasan industrial. Undang-undang Tarif tahun 1864, yang cepat-cepat disahkan dalam waktu lima hari oleh House of Representatives maupun Senat, telah menaikkan tarif-tarif yang di tahun 1857 berada pada tingkat rata-rata 19% menjadi 47%. Seluruh persoalan tarif-tarif itu telah menjadi salah satu faktor penting yang mengakibatkan Perang Saudara (Bairoch 1993: 35).

Kebijakan-kebijakan yang dijalankan oleh negeri-negeri kapitalis Barat dalam ‘hubungannya dengan negeri-negeri Asian’ pada dasarnya adalah sama. Strategi kolonial Inggris di India diikuti – di negeri-negeri Asia lainnya, oleh negara-negara kapitalis barat lainnya. Kebijakan-kebijakan ekonomi yang dijalankan oleh Belanda di Hindia Belanda dapat berguna sebagai sebuah contoh.

Pada awal abad XX, pertimbangan-pertimbangan humanitarian mulai memainkan suatu peranan dalam kebijakan-kebijakan pemerintah kolonial Belanda. Ratu Wilhelmina, setelah naik ke atas takhta di tahun

1898, pada tahun 1901 menyebutkan di dalam ‘pidato-takhta’-nya mengenai ‘merosotnya kesejahteraan’ yang berlaku, khususnya, di pulau Jawa. Pidato ini juga merupakan nada-kunci bagi yang disebut *Politik Etis* pada awal abad XX. Salah-satu motif bagi perubahan arah ini adalah ekonomikal: industri tekstil dalam negeri di Twente di bagian Timur Negeri Belanda berharap bahwa dengan meningkatkan kesejahteraan rakyat di Jawa, maka pasar bagi kain-katun Belanda akan menjadi luas. Namun, kebijakan pemerintah Hindia-Belanda tidak memasukkan promosi perkembangan industrial sebagai suatu unsur program kesejahteraan bagi kepulauan Indonesia. Prioritas masih tetap diberikan pada perusahaan-perusahaan Barat yang telah menanamkan modal mereka dalam perkebunan-perkebunan dan pertambangan, dengan menatap pada ekspor produk-produk agraria, dan bahan mentah untuk industri-industri metropolitan. Kaum industrialis di Twente, dengan pandangan-pandangan mereka ditujukan pada suatu peningkatan daya beli penduduk tani Jawa, gagal menyadari bahwa penanaman dalam produksi industrial di Jawa merupakan satu-satunya metode yang menentukan yang mungkin dapat mendatangkan hasil itu. Bagi Twente, ini tak usah diragukan lagi, lahirnya pesaing-pesaing baru sama sekali bukan suatu prospek yang menarik (Wertheim 1962)! Seorang wartawan Belanda yang tinggal di Hindia-Belanda, seorang Sosial-Demokrat, J.E. Stokvis, pada awal 1920-an sudah mencatat bahwa reform-reform Politik Etis lebih banyak “menghasilkan kesuburan ketimbang buah” (Stokvis 1922: 107).

Kondisi sosial dan ekonomi angkatan kerja Jawa di perkebunan-perkebunan gula dan dari para petani di daerah sekitarnya, sesudah krisis ekonomi duinia tahun-tahun 1930-an, secara tegas menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah yang dijalankan di Hindia-Belanda, yang didasarkan pada dukungan terus-menerus pada perkebunan-perkebunan gula Barat, telah membawa pada suatu kemerosotan aktual dari kesejahteraan rakyat di Jawa. Sebuah penyelidikan resmi dalam kondisi nutrisi di kalangan pekerja-pekerja lapangan di daerah-daerah penanaman tebu, khususnya di Jawa Tengah, mengungkapkan suatu tingkat rata-rata dari sekitar 1000 kalori per hari – suatu angka yang jauh di bawah semua standar yang diterima secara internasional

(Wertheim 1956).

Bairoch juga mengklaim bahwa tidak disangsikan lagi pemberlakuan liberalisme ekonomi pada Dunia Ketiga di abad XIX merupakan faktor utama untuk menjelaskan tertundanya industrialisasi. Dari dasawarsa-dasawarsa paling awal abad XIX, terus-menerus diimpornya jumlah-jumlah besar produk-produk manufaktur yang murah telah mengakibatkan proses deindustrialisasi. “India cuma merupakan korban utama pertama dalam sebuah daftar yang sangat panjang” (Bairoch 1993: 53/54)

Namun, tidak hanya di daerah-daerah kolonial, negara-negara Barat itu berusaha mendirikan sebuah monopoli industrial. Di kerajaan Tiongkok, Inggris – sebagai hasil *Perang-Perang Candu* yang berturut-turut dilancarkan di pertengahan abad XIX telah mencapai tingkat kekuasaan yang sedemikian rupa di pelabuhan-pelabuhan Tiongkok sehingga para pejabat Inggris sendiri yang menentukan tingkat tarif-tarif impor yang harus dipungut atas produk-produk industrial dari Eropa. Akibatnya ialah bahwa Inggris dapat mencegah tarif-tarif ini dinaikkan di atas 5%, yang di dalam praktek berarti bahwa kain-kain tekstil Inggris dapat dengan bebas memasuki Tiongkok, sehingga secara serius melambatkan pertumbuhan suatu industri nasional. *Perang-perang Candu* boleh juga diganti namanya menjadi *Perang-perang Tekstil*. Dengan cara ini, Tiongkok, tanpa kehilangan kemerdekaannya, telah dimerosotkan menjadi sebuah negara ‘semi-kolonial.’

Jaepang, sebaliknya, tahu bagaimana harus menentang monopoli industrial Barat: setelah *Restorasi Meiji* dari kekuasaan Kaisar Jepang di tahun 1868, pemerintah, selama perempat-terakhir abad XIX, telah membangun suatu aparatus industrial yang dalam perjalanan waktu akan mampu bersaing dengan negara-negara industrial Barat atas suatu kesederajatan yang sejajar.

Doktrin Monroe

Pada waktunya, Amerika Serikat, dengan cara-cara politik yang dapat disamakan dengan cara-cara negara-negara kolonial Eropa-Barat, mencapai penundukan rakyat-rakyat Belahan-dunia Barat secara politis

dan ekonomis. Proses historis itu dimulai di tahun 1823, ketika Presiden James Monroe atas desakan Menteri Luar-negerinya, John Quincy Adams, mengklaim suatu kedudukan berhak istimewa di seluruh Belahan-dunia Barat bagi Amerika Serikat, yang dapat dipersamakan dengan yang diklaim negara-negara Eropa di Asia dan Afrika. Motif di balik Doktrin Monroe telah dirumuskan-kembali pada awal abad XX oleh Robert Lansing, Menteri Luar-negeri pemerintah Presiden Woodrow Wilson (1913-21):

Dalam menyokong Doktrin Monroe itu, Amerika Serikat mempertimbangkan kepentingan-kepentingannya sendiri. Integritas nasion-nasion Amerika lainnya adalah sebuah insiden, bukan suatu tujuan. Sementara hal ini mungkin tampak didasarkan pada egoisme saja, pencipta Doktrin itu tidak mempunyai motif lebih tinggi atau lebih bermurah-hati dalam deklarasinya.

Menurut Chomsky, Lansing itu mengungkapkan tujuan-tujuan Amerika Serikat yang sebenarnya, walaupun adanya peringatan Wilson bahwa adalah “tidak-bertanggung-jawab” dan “tidak-politis” untuk secara terbuka mengakui hal itu (Chomsky 1993: 157). Setelah Perang Dunia Pertama (1914-18), strategi Doktrin Monroe – dengan sebagai tujuannya, dominasi atas Belahan-bumi Barat, –tidak meluas– dalam praktek sesungguhnya – hingga di luar Karibia. Pada akhir abad XIX, Menteri Luar-negeri James Blaine sudah menyatakan, dan ini penting sekali, bahwa “di Selatan, Brazil secara sangat sama menguasai hubungan dengan negeri-negeri lain sebagaimana Amerika melakukan itu di Utara” (Chomsky 1993: 156).

Gabriel Kolko, dalam bukunya yang penting *Confronting the Third World* (Kolko 1988: 35) mencatat bagaimana

Nasion-nasion utama Amerika Latin telah menyambut Depresi tahun-tahun 1930-an dengan menempuh –dengan berbagai cara– kebijakan-kebijakan pembangunan ekonomi yang menun-tut penanaman-penanaman dan regulasi-regulasi pu-blik secara strategikal, khususnya untuk mendorong substitusi import dan industrialisasi.³

Menurut Kolko dan David Green, Perang Dunia Kedua menambahkan kekuatan baru pada dorongan ke arah industrialisasi kapitalis yang disponsori negara. Namun –sudah sedini bulan Februari 1945– tiga bulan sebelum akhir perang – Konferensi Inter-Amerika mengenai Perang dan

Perdamaian di Mexico City mengungkapkan bahwa politisi Amerika yang terkemua sudah membayangkan suatu perluasan dari Doktrin Monroe ke seluruh Amerika Selatan. Amerika Serikat menganjurkan suatu *Piagam Ekonomi Negara-negara Amerika*, yang akan melarang nasionalisme ekonomi “dalam segala bentuknya” (Green 1971: 175ff.), yang jelas-jelas bertentangan dengan kebijakan-kebijakan yang disokong negeri-negeri Amerika Latin. Dalam kata-kata penasehat politik Menteri Luar-negeri, Laurence Duggan:

Nasionalisme ekonomis merupakan denominator umum dari aspirasi-aspirasi baru akan industrialisasi. Orang-orang Amerika Latin yakin bahwa ‘penerima-penerima pertama keuntungan’ pengembangan sumber-sumber sesuatu negeri mestilah rakyat negeri itu (Green 1971: 188).

Pendirian ini tidak dapat diterima oleh politisi terkemuka Amerika. Dalam pandangan mereka, yalah investor-investor dari Amerika Serikat yang mesti paling pertama menarik keuntungan dari pembangunan ekonomi di Amerika Latin. Sebagaimana dinyatakan oleh Wakil Menteri Luar-negeri bagi Amerika Latin, Spruille Braden, dalam suatu serangan terhadap perundang-undangan nasional di bulan September 1946, pinjaman-pinjaman Amerika “hanya akan diperuntukkan proyek-proyek yang membuka jalan bagi modal swasta,” teristimewa di nasion-nasion yang tidak “nasionalistis secara berlebih-lebihan.” Sebagaimana dijelaskan oleh Kolko, “Adalah perspektif ekonomis yang sangat dominan ini yang mewarnai kebijakan dan tindakan Amerika Serikat di wilayah ini selama tahun-tahun berikutnya. Amerika Latin merupakan suatu sumber kekayaan bagi bahan-bahan mentah dasar, dan Departemen Luar-negeri berniat melihat produksi berada di tangan-tangan swasta [...] Modal asing tidak akan berusaha, dan dalam kenyataannya tidak dapat beroperasi, dalam keadaan-keadaan di mana berkukuh nasionalisme yang berlebihan” (Kolko 1988: 37).

Walau program Empat Pasal Presiden Truman dari tahun-tahun 1940-an yang banyak dipuji, dengan himbauan humani-tariannya untuk meringankan penderitaan “Lebih dari setengah penduduk dunia [...] yang hidup dalam kondisi-kondisi yang mendekati kesengsaraan,” Kolko sampai pada kesimpulan berikut ini:

Bagi Amerika Serikat, dengan kepercayaan resminya pada sifat ekonomi-ekonomi nasional yang dianggap pelengkap [...] ketidak-pedulian pada pembangunan-pembangunan di daerah-daerah lebih miskin adalah masuk-akal. Amerika Serikat tidak –sebenarnya– terutama peduli dengan masalah-masalah ekonomi ataupun politik di sana (Kolko 1988: 15).

Pengakuan yang tulus, oleh politisi Amerika, tentang tujuan-tujuan mereka yang sebenarnya, menonjolkan suatu aspek yang luar-biasa pentingnya dari usaha ‘revisionis’ Kolko maupun Chomsky untuk secara mendasar menulis-kembali sejarah ekonomi Amerika. Jika, dalam publikasi-publikasiku sebelumnya, saya berusaha menganalisis gaya ‘Utara’ berulang-kali tidak saja mempromosikan industrialisasinya sendiri, tetapi juga berusaha menghambat pesaing-pesaing baru yang potensial di ‘Selatan,’ saya memperkirakan kstrategi ini tidaklah ditempuh secara sadar, melainkan lebih dikarenakan ketidak-tahuan mengenai akibat-akibat kebijakan-kebijakan kolonial atau semi-kolonial bagi massa luas penduduk-penduduk di ‘Selatan.’ Karenanya, aku tidak menjulukkan kebijakan-kebijakan ini pada sesuatu jenis ‘teori konspirasi.’ Dalam kata-kata David Green, dalam Kata Pengantar bukunya, *The Containment of Latin America*:

Politik Bertetangga Baik, sebagaimana itu dikembangkan oleh Franklin Roosevelt dan kawan-kawannya dan berlanjut terus pada tahun-tahun Truman, sebenarnya dimaksudkan untuk mewujudkan kebijakan-kebijakan tetangga-baik—bahkan, dari kebajikan (Green 1971: X).

Sekarang kita mengetahui bahwa bahkan para politisi Amerika dengan suatu reputasi sebagai negarawan-negarawan demokratik yang terbuka dengan penuh kesengajaan mengambil sikap yang pada hakekatnya sovunistik.

Gabriel Kolko, tanpa menyangkutkannya pada suatu periode khusus atau pada situasi internasional yang berlaku, menganalisis seluruh strategi Dunia Ketiga pemerintahan-pemerintahan Amerika pasca-perang sebagai berikut:

Yang jelas paradoksal bahwa bentuk-bentuk ekonomis dan sosial yang dicoba dipaksakannya pada pihak-pihak lain, melebihi ideologi Pintu Terbuka yang tak-henti-hentinya diulanginya, tiada hubungan apapun dengan kelakuan dan kebijakan-kebijakannya sendiri sama sekali tidaklah mengherankan jika orang dengan sangat mengurangi arti-penting doktrin Pintu Terbuka itu [...] Satu-

satunya ketetapan aksi-aksi mereka dan kebijakan Amerika Serikat ialah nafsu mereka akan kekuasaan –ekonomis, politis dan militer, dalam urutan begitu– dan mereka semakin siap untuk menggunakan cara-cara apapun yang diperlukan, hingga sejauh itu diperlukan, untuk mencapainya [...] Dalam kenyataannya, paham-paham mengenai Pintu Terbuka, internasionalisme, atau anti-komunisme yang dipakainya secara seenaknya itu adalah kadang-kadang tulus, kadang-kadang renungan-renungan ritual, tetapi pada umumnya sangat menyesatkan manakala terlibat di situ pengejaran kepentingan-kepentingan nasionalnya, teristimewa kepentingan-kepentingan ekonomisnya (Kolko 1988: 123).

Konsekuensi-konsekuensi politik Amerika Serikat yang menentang pembangunan nasional melalui industrialisasi, bahkan oleh pihak pemerintahan-pemerintahan Amerika Latin yang jelas-jelas kanan, dapat digambarkan dengan melihat pada kasus Brazil, di mana, sebelum tahun-tahun 1940-an, prospek-prospek ekonominya luar-biasa menjanjikan. Lalu, apakah hasil strategi Amerika pasca-perang dalam hubungannya dengan Brazil yang, di waktu-waktu sebelumnya, telah dikagumi sebagai ‘Raksasa dari Selatan’? Thomas Skidmore telah menggambarkan perkembangan-perkembangan di Brazil selama perjalanan dua dasawarsa kekuasaan militer (dari pertengahan tahun-tahun 60-an hingga pertengahan tahun-tahun 80-an). Ia menunjukkan bahwa walaupun adanya pertumbuhan ekonomi, kesenjangan antara yang kaya dan yang miskin telah mencapai proporsi-proporsi luar-biasa besarnya. Kesengsaraan kaum miskin kota maupun penduduk pedesaan hingga batas sangat jauh disebabkan oleh tingkat hutang, dipadukan dengan tindakan-tindakan yang dipaksakan oleh Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional (Skidmore 1988: 285ff.).

Menurut Chomsky, Brazil dalam banyak hal, seperti dalam hal kesehatan dan pendidikan, berada pada tingkat dari beberapa negeri paling miskin di dunia. Ia menyebutkan sebuah laporan FAO bulan Oktober 1990, yang menyatakan bahwa 40% dari penduduk, yang jumlahnya k.l. 53 juta orang, menderita kelaparan. Menteri Kesehatan Brazil telah melaporkan bahwa setiap tahun ratusan ribu anak-anak mati karena kelaparan. Sedangkan yang mengenai pendidikan, menurut UNESCO (1990) hanya Guinea-Bissau dan Bangladesh yang berada pada suatu tingkat lebih rendah dalam pencapaian-pencapaiannya (Chomsky 1993: 168).

Apabila soalnya sampai pada pinjaman-pinjaman dari Dana Moneter Internasional, maka Brazil, dan negeri-negeri Amerika Latin lainnya, mesti menerima persyaratan-persyaratan yang diimlakkan menurut suatu kebijakan ekonomi yang dipaksakan oleh Amerika Serikat. Ini tidak meliputi subsidi-subsidi pemerintah bagi sasaran-sasaran sosial seperti bahan-pangan pokok yang murah-harganya. Tiada tindakan-tindakan protektif boleh dilakukan terhadap impor-impor asing. Dengan cara ini, setiap usaha ke arah pembangunan ekonomi nasional yang efektif menjadi terhalang. Chomsky meminjam dari Jeremy Seabrook istilah tajam dan mengena, *Fundamentalisme Moneter Internasional*.

Perang Dingin sebagai Dalih

Suatu aspek penting dari analisis Kolko dan Chomsky mengenai sejarah pasca-perang Amerika adalah keterkaitan antara Perang Dingin dan strategi Amerika bagi Dunia Ketiga. Pada bulan Mei 1950, tidak seberapa lama setelah Truman memproklamasikan program ‘Empat Pasal’-nya, Sekretaris-Jendral PBB, Trygve Lie, menetapkan azas bahwa program-program PBB untuk menaikkan tingkat kesejahteraan mesti dilakukan atas suatu dasar non-politis, dan beroperasi untuk keuntungan semua negara anggota, tanpa memandang Perang Dingin. Dalam peristiwa itu, pemerintahan-pemerintahan Amerika yang silih-berganti secara konsisten mengabaikan azas ini. Dari tahun 1950 hingga 1990, ‘bahaya Komunis’ dijadikan kaidah dalam memutuskan *siapa yang akan mendapatkan kue, siapa cambuk* – ini untuk memakai sebuah ungkapan Belanda.

Sebagaimana dinyatakan oleh Kolko, yang menulis tentang sikap Amerika Serikat terhadap Amerika Latin:

Di wilayah-wilayah ini persosalan komunisme dan Uni Sovyet tidaklah ada atau, paling banter, bersifat marjinal; masalah-masalah utamanya ialah dengan pihak-pihak yang, sementara menjadi sekutu-sekutu ideologis, adalah juga pesaing-pesaing ekonomis [...] Mereka yang menerima fraseologi Pintu Terbuka sebagaimana itu diucapkan sebagai suatu gambaran yang sepadan mengenai maksud-maksud Amerika Serikat, mengabaikan pengabdian Amerika yang jauh lebih mendalam pada kepentingan-kepentingannya sendiri dalam pengertian nasionalis yang paling klasik dari istilah itu dan peranan dari ideologinya tidak sekedar sebagai suatu pencerminan

kepercayaan tetapi juga sebagai sebuah alat untuk menetralisasi sekutu-sekutunya yang ragu-ragu [...] Ironi dari kebijakan Amerika Serikat di Dunia Ketiga ialah, bahwa sementara ia selalu telah membenarkan sasaran-sasaran dan usaha-usahanya yang lebih besar atas nama anti-komunisme, tujuan-tujuannya sendiri telah membuatnya tidak mampu menenggangi perubahan dari sudut mana saja yang secara menentukan mengganggu kepentingan-kepentingannya (Chomsky 1993: 292).

Menurut Chomsky, para politisi Amerika tidak hanya mengkhawatirkan ancaman militer khusus dari negeri-negeri di bawah dominasi Komunis, tetapi juga mengenai bahaya 'infeksi' oleh 'virus' ideologi Komunis. Berkali-kali, alasan yang diberikan untuk menahan 'kue'-nya dan mengenakan 'cambuk'-nya ialah bahaya yang diwakili oleh 'virus' itu, dengan mana sebutir 'apel busuk' dapat menginfeksi 'sekeranjang penuh apel segar.' Dengan kata-kata lain, dalam pengertian 'teori-domino,' selembur (kartu-)domino demi selembur (kartu-)domino akan rontok (Chomsky 1993: 36). Misalnya, rezim sosial-demokratik Allende di Chili mesti digulingkan, menurut Henry Kissinger, agar mencegah infeksi lebih lanjut di Amerika Latin dan bahkan Eropa Selatan.

Chomsky, seperti juga Kolko, meyakini bahwa Perang Dingin, dan bahaya virus Komunis, tidak lebih daripada sebuah dalih berguna yang dipakai untuk menghalangi segala usaha negara-negara yang beraspirasi menjalankan suatu proses pembangunan nasional yang sejati –termasuk industrialisasi– yang dapat membikin frustrasi ambisi Amerika untuk mendominasi perekonomian dunia. Peranan dari 'Selatan' ialah untuk melayani, menyediakan bahan-bahan mentah dan peluang-peluang untuk investasi (Chomsky 1993: 43ff.) 'Rezim-rezim radikal, nasionalis,' yang membuktikan diri mereka peka pada tekanan rakyat "untuk perbaikan segera di tingkat kehidupan massa-rakyat bawah," dan untuk pembangunan yang dirancang untuk menyediakan kebutuhan-kebutuhan hidup dalam negeri yang bersifat segera, dipandang sebagai ancaman utama (Chomsky 1993: 36/37).

Bahwa pihak Amerikka tidak terutama mencemaskan 'bahaya Komunis,' tetapi lebih mencemaskan ancaman terhadap kedudukan mereka sendiri yang berhak-istimewa, telah dibuktikan, menurut Chomsky, oleh yang terjadi di bekas Uni Svoyet dan di negeri-negeri Eropa-Timur lainnya

setelah runtuhnya Tembok Berlin, disintegrasi Uni Sovyet dan bubarnya Pakta Warsawa. Pertama-tama sekali, Chomsky menggambarkan konsekuensi-konsekuensi diperkenalkannya suatu 'perekonomian pasar bebas' bagi rakyat-rakyat Eropa Timur.

Perekonomian-perekonomian Eropa Timur mandeg atau merosot sepanjang tahun-tahun 80-an, tetapi melakukan terjun-bebas ketika krejimen Dana Moneter Internasional dijalankan bersama berakhirnya Perang Dingin di tahun 1989 ... Di Russia, keambrokan ekonomi telah menghasilkan banyak penderitaan dan kekurangan ... (Chomsky 1993: 80).

Dalam sebuah paragraf berjudul Setelah Perang Dingin, Chomsky mendiskusikan konsekuensi-konsekuensi 'keambrokan Sovyet' bagi kebijakan Amerika. Efek pertamanya ialah, seperti sudah kita lihat, memaksakan bentuk ketundukan neo-liberal pada suatu 'perekonomian pasar bebas' pada seluruh Eropa Timur. Efek kedua ialah, bahwa Amerika Seriukat terpaksa mencari dalih-dalih baru untuk membenarkan intervensi yang melampaui perbatasan-perbatasan negerinya sendiri. Sudah pada tahun-tahun 1980-an, masalah dalih yang menghilang –yaitu melemahnya Komunisme dunia– telah mulai muncul. Ancaman-ancaman internasional baru mesti ditemukan: terorisme, lalu-lintas obat-obat bius, fundamentalisme Muslim, kesemuanya dikerahkan untuk menginjeksikan suatu ketakutan akan suatu Iblis baru yang besar.

Konfrontasi-konfrontasi teratur diproduksi dengan karung-pukul Libia yang empuk-tersedia itu; Grenada bersiap-siap memotong jalur-jalur lautan dan membom kita dari sebuah basis-udara yang dibangun oleh Kuba; Noriega (setelah dipecat) sedang memimpin kartel Kolombia untuk meracuni anak-anak kita; Saddam Husein telah melangkahi garis dan menjadi Binatang Baghdad (Chomsky 1993: 87).

Dalih-dalih baru mesti ditemukan untuk mempertahankan produksi persenjataan dengan tingkat teknologis yang tinggi, sejak Russia telah lenyap dari panggung (Chomsky 1993: 93).

Tampaknya pernyataan-pernyataan terbuka dan senantiasa diulang-ulang oleh para politisi Amerika (dan secara berlimpah dikutip oleh Chomsky) mendukung tesis bahwa mempertahankan monopoli industrial 'Utara' telah menentukan, sejak akhir Perang Dunia Kedua, pola dasar strategi Amerika, tak-peduli segala yang dikatakan Truman mengenai 'bantuan

pembangunan,' atau Roosevelt mengenai 'bertetangga baik.' Chomsky secara tepat mengkonstraskan dukungan kuat negara yang diberikan pada dunia bisnis dan investor Amerika, dengan penggunaan segala cara yang ada untuk menahan nasion-nasion Dunia Ketiga selemah-lemah mungkin, demi untuk mencegah mereka membangun industri-industri mereka sendiri.

Jenis kritik ini tidak hanya dilancarkan oleh para ahli sejarah Amerika, tetapi juga oleh para penulis dari Dunia Ketiga. Sebuah analisis piawai telah diberikan oleh Rajni Kothari dalam *Poverty* (Kothari 1995). Dalam buku ini Kothari memandang penggerowotan peranan negara sebagai mungkin akibat paling serius dari pemikiran ekonomi baru, baik di skala global maupun di tingkat nasional. Tetapi ia juga sepenuhnya menyadari kenyataan bahwa untuk memungkinkan negara-negara Dunia Ketiga menunaikan peranan mereka, misalnya di bidang-bidang kebijakan sosial atau penuntasan kemiskinan, "restrukturisasi sifat Negara dan hubungannya dengan masyarakat madani" disyaratkan. Yang diperlukan ialah pemberdayaan "sosial, yang memungkinkan rakyat memperoleh keahlian-keahlian dan kapasitas-kapasitas yang bersifat mendasar bagi harga-diri mereka maupun bagi kedudukan politis dan sosial dan kapasitas tawar-menawar mereka." Masukan-masukan masif dalam pendidikan, kesehatan, nutrisi, perumahan dan pemeliharaan lingkungan menjadi sangat menentukan dalam pemberdayaan seperti itu (Kothari 1995: 72/73).

"Di lain pihak, globalisasi maupun penyesuaian struktural di bawah IMF dan Bank Dunia serta berbagai anggaran dan tindakan-tindakan fiskal lainnya yang secara dipaksakan mesti kita telan akan [...] mendorong kaum miskin ke arah kepapaan, pemiskinan lebih lanjut dan peminggiran (Kothari 1995: 75). Namun, Kothari menyatakan suatu optimisme tertentu: Metode-metode jagoan yang dipakai oleh Amerika Serikat dan lembaga-lembaga yang didominasi Amerika Serikat seperti IMF, Bank Dunia dan GATT sudah menimbulkan reaksi-reaksi keras" (Kothari 1995: 30).

Kekecualian Asia Timur

Satu-satunya kekecualian penting dalam kebijakan-kebijakan neo-

kolonial Amerika, sebagaimana yang dikembangkan dalam paruh kedua abad XX, diberikan oleh ‘dua macam’ kecil di Asia-Timur yang diguyur bantuan-bantuan ekonomi secara berlimpah: Korea Selatan dan Taiwan. Kedua kasus khusus ini berkaitan dengan kepentingan-kepentingan politis khusus Amerika Serikat. Pada tahun-tahun 1950-an dan 1960-an Amerika Serikat, dengan memberikan ‘kue’-nya, gantinya menggunakan ‘cambuk’-nya, telah memajukan pembangunan industrial di NIC (*Newly Industrial Countries* = Negeri-negeri Industrial Baru) ini dan dengan begitu menegakkan mereka sebagai sebuah etalase mengenai pembangunan industrial yang berhasil, melebihi dan diperhadapkan pada keberhasilan di bidang pembangunan industrial di Republik Rakyat Tiongkok dan Korea Utara (Nolan 1990). Namun haruslah dicatat, bahwa basis industrial orisinil di Taiwan, Korea dan Manchuria telah dibangun selama periode dominasi Jepang di paruh pertama abad XX. Berbeda dengan kebijakan kolonial nasion-nasion Eropa-Barat, Jepang yang kekurangan akan bahan-bahan mentah, memajukan perkembangan industrial dengan menciptakan industri-industri baru di koloni-koloninya yang berdekatan, yang kaya pula akan bahan-bahan mineral. Namun ini tidak berarti bahwa kekuasaan kolonial Jepang adalah lebih humanitarian daripada dari negara-negara kolonial Eropa-Barat!⁴

Bagaimanapun, keberhasilan relatif perekonomian sejumlah negara Asia Timur (termasuk, terutama Jepang dan Tiongkok) ‘bukan’ hasil penterapan doktrin ‘perekonomian pasar bebas’ yang dipropagandakan oleh dunia Barat, Bank Dunia dan IMF – dengan persyaratan-persyaratan dibongkarnya negara sebagai sebuah instrumen ekonomi maupun penswastaan secara besar-besaran atas perusahaan-perusahaan negara. Hal ini dibikin jelas dalam sebuah buku berikutnya oleh Chomsky (1994), *World Order, Old and New*.

Negara-negara Industrial Baru di periferi Jepang melanjutkan pembangunan ekonomi yang sedang berlangsung di bawah kolonialisme Jepang, dengan mengambil sebuah model serupa. Terdapat sejumlah besar contoh-contoh lain yang melukiskan: “penggabungan positif antara campurtangan negara dan percepatan pertumbuhan ekonomi yang kini umumnya diterima keberlakuannya dalam kasus-kasus perkembangan kapitalis Dunia Ketiga” (Alice Amsden), seperti, memang benar adanya, bagi masyarakat-masyarakat industrial utama sepanjang sejarah-sejarah mereka

(Chomsky 1994: 147).

Analisis di muka membuktikan bahwa tekanan terus-menerus –pada waktu ini terutama dilakukan melalui cara-cara ekonomis yang menjadi pembawaan Fundamentalisme Moneter Internasional– untuk membujuk, kalau bukan untuk memaksa, negeri-negeri di Dunia Ketiga maupun di Eropa-Timur untuk menerima suatu ‘perekonomian pasar bebas,’ adalah semata-mata versi sekarang dari strategi yang sudah berabad-usianya guna menegakkan dan mempertahankan monopoli industrial Barat yang disokong oleh negara-negara Barat. Sasarannya ialah tidak memungkinkan bagian-bagian dunia yang lebih miskin berkembang secara ekonomis dengan menggunakan kekuatan-kekuatan mereka sendiri, tetapi untuk mencegah mereka mengikuti pola merkantilis yang secara berhasil dijalankan oleh Barat sepanjang seluruh sejarah ekonomi mereka.

Satu-satunya nasehat yang dapat diberikan pada rakyat di bagian-bagian dunia yang lebih miskin ialah yang telah diberikan pada seorang pemain-catur amatir oleh *grandmaster* Tartakower: “Jangan kau memainkan yang diresepkan Utara; yang mesti kau mainkan ialah yang mereka sendiri telah mainkan sepanjang sejarah mereka sendiri!”

Catatan:

¹ Rutten (1994) hal. 30; lihat Crouzet (1985), hal.ii ff.

² Buku List dari tahun 1841 muncul dalam terjemahan Inggris dengan judul *The National System of Political Economy*, Longmans (London), 1928. Bairoch, *Economics and World History* (1993), berkomentar: “Tanggal 15 Mei 1846 secara tepat dianggap menandai awal era perdagangan bebas di Kerajaan Inggris, dan, oleh salah-satu dari kebetulan sejarah, tahun itu (enam bulan kemudian, di bulan November) adalah juga tanggal bunuh-dirinya Friedrich List, rasul proteksionisme yang sakit-sakitan dan dikejar-kejar masalah keuangan” (hal. 12).

³ Orang dapat juga merujuk pada Green (1971), hal. 38/39.

⁴ Chomsky (1994), hal.118/9, dan Amsden (1989).

BAGIAN 2:
KAUM TANI EMPATPULUH
ABAD

Bab II, Kepadatan-penduduk di Asia Tenggara: Kemandegan Agrarian

Bab I menunjukkan pengaruh-pengaruh mencelakakan 'Selatan' yang bersumber dari strategi-strategi kolonial atau neo-kolonial yang dipakai oleh negara-negara 'Utara' untuk menghalangi pembangunan industri-industri di negeri-negeri Dunia Ketiga yang dapat bersaing dengan monopoli industrial 'Utara.' Tetapi agar sepenuhnya memahami dampak tidak menguntungkan atas perekonomian negeri-negeri 'Selatan' ini, kita mesti mempelajari mengapa bagi mereka itu pertumbuhan industrial secara spontan adalah jauh lebih sulit dicapai daripada di Eropa Barat atau di Amerika Utara.

Di berbagai daerah Asia Tenggara kepadatan-kepadatan penduduk yang luar biasa, merupakan masalah-masalah yang berat sekali. Sekalipun terutama terdiri atas masyarakat-masyarakat pedesaan, di beberapa daerah dengan kultivasi beras secara intensif di ladang-ladang beririgasi, kepadatan-kepadatan penduduk ternyata dari tatanan sama dengan yang berada di daerah-daerah Eropa yang sepenuhnya industrial, seperti Negeri Belanda, Belgia, atau daerah Ruhr.

Pada awal abad ini, F.H. King, seorang agronomis Amerika, menulis sebuah buku mentgenai daerah-daerah Asia Timur, yang dikarakterisasi denganm suatu pola agrikultural yang tidak terlalu berbeda dengan yang berlaku di pulau Jawa atau semenanjung Tonkion, dengan judul *Kaum Tani Empatpuluh Abad* (King 1911). Ia menunjukkan betapa kondisi-kondisi yang sama seperti yang masih dapat disdaksikan di Jawa dengan mudah dapat dijumpai di daerah yang sangat jauh terpisah seperti Jepang, Korea, Tiongkok Tengah dan Selatan; ia dapat secara sama mengutib semenanjung Tonkin, atau Vietnam atau pulau Luzon di Filipina.

Menurut King, pola-pola agrikultur yang khas ini telah ada selama empatpuluh abad. Sudah tentu [polanya tidak begitu dominan pada waktu 4.000 tahun berselang, juga tidak tersebar-luas seperti dewasa ini; namun begitu sifat-sifat utamanya sudah tampak. Prof. King sangat mengagumi kerajinan dan wawasan biologis yang memungkinkan 'orang-orang Timur' mendapatkan panen-panen yang luar-biasa tinggi dari

sebidang tanah yang sangat terbatas:

Dengan memilih beras sebagai tanaman utama mereka; dengan membangun dan memelihara sistem-sistem perpaduan irigasi dan pengeringan mereka, sekalipun adanya curah hujan musim panas yang tinggi; dalam sistem-sistem tanaman ganda mereka; dalam penggunaan tanaman palawija mereka secara ekstensif dan penuh keuletan; dalam penggiliran pupuk hijau untuk mempertahankan humus bagi tanah mereka untuk pengkomposan; dalam kesetiaan mereka yang nyaris bersifat religius dengan mengembalikan ke ladang-ladang mereka semua sampah/buangan yang dapat menggantikan makanan tanaman yang disedot-habis oleh panen-an panen-an, nasion-nasion ini telah membuktikan daya-tangkap hakiki-hakiki dan azas-azas dasar yang boleh membuat nasion-nasion berhenti sejenak dan berpikir (King 1991: 274-276).

Bersamaan dengan itu King juga memberi tekanan pada kepadatan-kepadatan kependudukan pedesaan yang telah dimungkinkan oleh jenis agrikultur ini:

Ketiga pulau utama Jepang ini di tahun 1907 mempunyai penduduk sebanyak 46.977.003 orang yang hidup di atas 20.000 mil persegi tanah garapan. Ini berarti lebih dari tiga orang per setiap are, dan 2.349 orang untuk setiap mil persegi

Dan

Penduduk di pulau besar Chungming di mulut sungai Yangtse, dengan wilayah seluas 270 mil persegi, memiliki –menurut sensus resmi tahun 1902– sivatua kepadatan 3.700 orang untuk setiap mil persegi dan sekalipun begitu cuma terdapat satu kota besar di pulau itu, sehingga penduduknya terutama adalah penduduk pedesaan (King 1911: 2, 4).

Biarpun begitu, Profesor King tidak memandang kepadatan-kepadatan penduduk yang tinggi ini sebagai sebuah gejala negatif semata-mata. Ia yakin bahwa Amerika Serikat dapat belajar banyak dari ‘orang-orang Timur’ ini. Dalam sebuah kata-pengantar pada buku –yang mungkin sekali belum selesai– (yang diserbutkan baru sesudah meninggalnya King), L.H. Bailey menulis:

Syarat pertama bagi pertanian ialah menjaga kesuburan. Kondisi ini telah dipenuhi oleh rakyat-rakyat Timur, dan mereka telah membereskannya dengan cara mereka. Kita tidak pernah memakai metode-metode tertentu, tetapi kita dapat menarik keuntungan sangat besar dari pengalaman mereka. Dengan meningkatnya kebutuhan-kebutuhan pribadi pada waktu-waktu belakangan ini, negeri-negeri lebih baru mungkin tidak akan pernah mencapai kepadatan penduduk seperti yang dicapai oleh Jepang dan Tiongkok; tetapi betapapun kita mesti belajar pelajaran pertama dalam pelestarian sumber-sumber alam, yang adalah sumber-sumber tanah itu. Inilah

pesan yang dipancarkan oleh Profesor King dari Timur.

Dalam perjalanan abad sekarang ini, bahaya-bahaya pembawaan dalam jenis agrikultur ini telah menjadi semakin terbukti.

Pada awal Perang Dunia Kedua, ahli geografi Perancis, Pierre Gourou, memberikan sebuah analisis bagus sekali mengenai kondisi-kondisi di semenanjung Tonkin di Vietnam (Gourou 1940):

...adalah di dataran-dataran rendah yang berpenduduk luar-biasa padatnya, di mana pertanian itu dilakukan secara intensif, yang menghadapkan masalah-masalah penggunaan tanah secara paling tajam. Di daerah-daerah itu tingkat kehidupan adalah yang paling rendah; dan kewajiban kita dalam kesetia-kawanan kemanusiaan memaksakan pada kita tugas untuk memberikan kepada penduduk itu alat-alat/cara-cara agar mereka dapat memenuhi kebutuhan akan pangan mereka secara lebih baik.

Dalam kaitannya dengan dataran-dataran rendah Tonkin dan Annam Utara sudah tentu istilah ‘kepadatan penduduk’ (kelebihan penduduk)segera mengingatkan kita. Adakah dataran-dataran rendah ini berpenduduk terlalu padat, dan terutama, apakah yang diartikan dengan istilah berpenduduk terlalu padat ini? (Gourou 1940: 431).

Gourou sampai pada kesimpulan bahwa Semenanjung Tonkin gagal memberikan makan secukupnya pada penduduknya: “Sudah pasti bahwa dalam suatu tahun yang normal, penduduk hanya mengkonsumsi minimum yang diperlukan untuk hidupnya” (Gourou 1940: 432).

Penulis itu mendaftar sejumlah metode untuk memperbaiki landasan agrikultur itu. Namun, walaupun itu dapat dilaksanakan, masalah-masalah dasarnya masih tidak terpecahkan. Metode-metode ini,

Jika diterapkan dengan cara yang bijaksana dan tidak terburu-buru, akan membuahkan hasil-hasil yang diharapkan: perkembangan produktivitas agrikultural dan perbaikan dari tingkat hidup kaum tani. Tetapi, harapan-harapan orang, janganlah diletakkan terlampau tinggi. Nasib rakyat Tonkin dapat dilunakkan melalui tindakan-tindakan yang dianjurkan itu hingga suatu batas yang berarti, tetapi akan berbahaya sekali jika percaya bahwa orang akan mampu dengan cara seperti itu mengubah gaya hidup mereka. Kaum tani Tonkin, secara keseluruhan, adalah miskin dan akan tetap begitu. Tetapi usaha itu masih tetap layak jika kondisi-kondisi kehidupan mereka akan menjadi sedikit lebih stabil dan bahaya kelaparan itu dapat tersingkirkan.

Kepadatan penduduk yang luar-biasa tingginya di semenanjung Tonkin itu adalah sebuah penyakit yang tak dapat disembuhkan: penduduk itu setiap tahunnya bertambah dengan 10 hingga 15 orang

per seribu (Gourou 1940: 443).

Gourou telah memberikan pada kita suatu gambaran jelas sekali mengenai kemandegan sosial dan ekonomis yang adalah hasil pola penggunaan tanah secara intensif yang berdominasi di suatu wilayah di mana penggarapan sawah basah dilakukan secara besar-besaran. Bagi suatu studi teoretis mengenai faktor-faktor yang bertanggung-jawab atas kemandegan ini, kita mesti berpaling pada suatu studi situasi di Jawa yang diterbitkan pada tahun-tahun 1960-an oleh ahli antropologi kebudayaan Clifford Geertz.

Pola dasar pembangunan pedesaan Jawa digambarkan oleh Geertz dalam penelitiannya yang termashur mengenai Jawa pasca-perang sebagai suatu proses ‘involusi’ (Geertz 1963). Konsep ‘involusi’ ini mengandung arti bahwa kaum tani Jawa selalu mampu bertahan hidup, sekalipun ini tidak berarti lebih daripada “sekedar menginjak-injak air, yang cuma suatu keadaan nyaris sama dengan tenggelam kecuali kalau pada saat yang tepat ada pertolongan segera” (Geertz 1963: 145). Jika cuma ‘menginjak-injak’ air yang dimungkinkan oleh keadaan, maka perbaikan yang sesungguhnya dari kondisi-kondisi dasar adalah suatu kemustahilan – yaitu, involusi sebagai kebalikannya evolusi sesungguhnya. Menurut Geertz, involusi itu menunjukkan suatu sistem ‘berbagi kemiskinan,’ dengan penyempurnaan dan perluasan terus-menerus pola-pola sosial yang ada untuk mempertahankan konsumsi rata-rata *per kapita* sekalipun adanya kependudukan yang meningkat – sebuah proses yang memerlukan pembagian kembali secara terus-menerus atas tanah menjadi bidang-bidang yang semakin kecil. Sebagai akibatnya, sistem-sistem sewa-menyewa tanah menjadi semakin rumit, hubungan-hubungan sewa-menyewa tanah semakin komplikasi, dan pengaturan kerja koperatif makin lama makin kompleks.

Kita mesti lebih mendalam meneliti dasar-dasar pikiran konsep involusi Geertz itu. Inheren dalam konsep ekologis ini ialah azas bahwa agrikultur di sawah-sawah beririgasi merupakan, secara tertentu, suatu terobosan yang menyimpang dari pola umum berubah-ubahnya ukuran suatu kependudukan dalam hubungan dengan tanah yang tersedia.

Selama sebagian besar abad XIX hukum ‘hasil yang menurun’ dari David Ricardo telah menguasai pemikiran ekonomi, khususnya di Inggris.

Menurut hukum ini, manakala suatu jumlah kerja yang lebih besar dikerahkan pada suatu bidang tanah tertentu, maka setiap unit kerja tambahan menghasilkan suatu peningkatan dalam produksi yang tidak sepadan dengan masukan yang ditambahkan itu. Sebagai akibatnya, suatu peningkatan dalam jumlah pengklaim sebidang tanah tidak dapat dikompensasi melalui eksploitasi lebih intensif atas tanah yang sudah dalam penggarapan itu; para pendatang baru mesti mengerjakan tanah yang kesuburannya lebih rendah – ‘kalau’ itu ada tersedia. Anjuran Malthus akan pengendalian kependudukan pada tahun-tahun itu diperkuat oleh huklum Ricardo, karena dapatlah dinyatakan bahwa apabila suatu kependudukan bertumbuh melampaui batas-batas yang ditentukan oleh alam, maka pembalasan akan menyusul dalam ujud suatu peningkatan laju kematian yang disebabkan oleh peperangan-peperangan, epidemi-epidemi dan kelaparan-kelaparan. Pada pokoknya, teori menetapkan bahwa tidaklah mungkin memproduksi lebih daripada yang dimungkinkan/diperkenankan oleh hukum hasil yang menurun.

Dalam pandangan Malthus, umat-manusia hanya dapat menyadari sepenuhnya potensial reproduktifnya, dengan jumlahnya meningkat dalam pertambahan secara geometrikan, di ruang-ruang yang dalam perbandingan kosong seperti yang dapat dijumpai pada zamannya di Amerika Utara. Dalam prakteknya ini akan berarti bahwa jumlah penduduk akan berlipat ganda dengan setiap generasi baru. Di Eropa Barat langkahnya tanah agrikultur menjadikan mustahilnya pertumbuhan seperti itu. Menurut Malthus, produksi agrikultural hanya dapat meningkat dalam pertambahan secara aritmetikal. Hal ini sudah umum diketahui.

Teori-teori Ricardo dan Malthus mengandung sejumlah kelemahan mendasar, seperti misalnya, pengabaian mereka terhadap potensial perubahan teknologis. Namun, sungguh menarik untuk dicatat, bahwa Malthus mempunyai seorang pendahulu di Tiongkok. Pada akhir abad XVIII, seorang sarjana Tiongkok, Hong Liang-qi, menjadi salah seorang dari penasihat utama kaisar Qian Long. Berdasarkan perhitungan-perhitungan yang sama dengan yang digunakan oleh Malthus, ia memperingatkan bahwa, dengan terbatasnya persediaan tanah garapan, penduduk berlipat-ganda secara terlalu cepat, dengan resiko terjadinya kelaparan-kelaparan serius di masa mendatang (Silberman 1961).

Tetapi, apabila Malthus menyatakan suatu penduduk dapat berlipat ganda dengan suatu laju yang kcepat hanya di sesuatu daerah seperti Amerika Utara, yaitu boleh dikata di sesuatu wilayah yang kosong, Hong Liang-qi mengedepankan suatu laju perlipat-gandaan yang sangat mencengangkan bagi penduduk Tiongkok di bagian-bagian luas negeri itu. Ia menyatakan betapa “Pada waktu sekarang terdapat sepuluh kali lipat lebih banyak petani jika dibandingkan adanya seabad yang lalu, sedangkan jumlah tanah yang tersedia tidaklah meluas” (Silberman 1961: 257ff.).

Laju perlipatgandaan ini sesuai dengan progresi geometrikal Malthus. Kita sekarang mengetahui bahwa di Tiongkok ‘ledakan kependudukan’ di abad ke XVIII telah mengakibatkan erosi tanah yang gawat. Tanaman-tanaman makanan baru, seperti jagung dan ubi-manis, telah diperkenalkan dari Amerika Selatan. Tanaman ini dibudidayakan di atas landaian-landaian bukit, karena tiada tersedianya tanah dataran. Kebutuhan untuk membersihkan bukit-bukit itu dari pepohonan yang menutupi landaian-landaian itu mengakibat erosi tanah secara besar-besaran. Menjelang akhir abad XVIII situasinya telah menjadi gawat sekali (Ping-ti Ho 1967). Hong Liang-qi, sekarang diketahui, bukanlah orang Tionghoa pertama yang melaporkan perlipat-gandaan kependudukanm dalam satu generasi saja. Sudah sedini tahun 1604, Xu Guang-qi menerbitkan sebuah karya tulisan di dalam mana ia mengklaim bahwa di negerinya laju pertambahan ini telah benar-benar terjadi (*Beijing Review*, 16/3/81, merujuk pada sebuah tulisan oleh Wu Deduo, yang diterbitkan dalam *Wanhui Bao*).

Maka tampak bahwa suatu proses yang oleh Malthus dianggap hanya mungkin dalam kondisi-kondisi khusus seperti yang dapat dijumpai di tanah-tanah kosong Amerika Utara, ternyata umum sekali di lain bagian dunia, di mana budi-daya sawah-basah merupakan bentuk agrikultur yang dominan. Karenanya kita mendapatkan konfirmasi historis mengenai teori ekologis Geertz bahwa dengan kultivasi padi sawah-basah penggunaan tanah secara lebih intensif adalah mungkin tanpa berlakunya ‘hukum hasil-hasil menurun’ sebagai suatu halangan yang tak-tertanggulangi. Khususnya di Jawa, kenyataan bahwa irigasi dari sungai-sungai yang berasal dari aliran-aliran gunung senantiasa menambahkan partikel-partikel lava vulkanik pada tanah sebagai sejenis

pupuk alam telah memungkinkan hasil-hasil panen yang selalu melimpah dari setiap bidang tanah. Kemampuan budidaya sawah basah untuk membekali peningkatan-peningkatan kependudukan secara pesat mungkin untuk bagian besar mendasari proses involusioner Geertz, secara pesimistik, oleh karenanya telah mengkarakterisasi Jawa sebagai sebuah ‘Masyarakat yang Karam,’ atau sebuah masyarakat yang secara “Permanen bersifat Peralihan: Baik tradisi maupun modernitas tampaknya menyusut pada laju yang meningkat, dengan hanya meninggalkan relik-relik dari yang tersebut duluan dan simulakre dari yang tersebut kemudian” (Geertz 1965: Introduksi, dan hal. 152).

Pesimisme Geertz nyaris menyamai pesiomisme ahli ekonomi Belanda J.H. Boeke pada tahun-tahun belakangan, ketika, sebagai seorang profesor Leiden, ia mengajarkan ‘Tropical-colonial Economics.’ Dalam sejumlah karangan Boeke menggambarkan perkembangan budidaya sawah di atas daerah-daerah yang terus meluas di Jawa dan pulau-pulau lain yang berdekatan –proses yang kemudian didefinisikan oleh Geertz sebagai ‘involusi’ –sebagai ‘perluasan statik,’ yang memustahilkan setiap kemungkinan akan perkembangan ekonomi yang sesungguhnya atau ‘evolusi’ (Boeke 1942: 162). Dalam bukunya pasca-perang *The Interests of the Voiceless Far East*, Boeke bahkan menyatakan, dengan pesimisme ekstrim yang karakteristik dalam pikiran-pikirannya di tahun-tahun itu, bahwa

Menjadi perlu untuk menyetujui tanpa membantah mengenai tak-dapat-berubahnya watak dualistik negeri-negeri Timur yang berpenduduk padat itu, mengenai terus berlangsungnya perekonomian di bawah garis kemiskinan massa pedesaan itu (Boeke 1948: 88).

Sekalipun Boeke khusus memikirkan mengenai Jawa, Filipina dan Delta Tonkon, Thailand, dan Tiongkok Selatan dan Tengah, ia juga –sungguh aneh– mencakup Jepang di antara wilayah-wilayah yang ‘tak-berpengharapan’ seperti itu, sekalipun negeri itu sudah jauh dalam perjalanan memecahkan masalah kepadatan-penduduknya dengan suatu strategi ekonomis yang terarah. Ia cuma tidak mau mengakui bahwa pembangunan industrial dalam secara efektif menyumbang pada suatu pemecahan atas kemandegan agrarian itu.

Kita kini sampai pada masalah pokoknya: mengapa iuran pembangunan industrial bagi suatu pemecahan seperti itu begitu penting, dan mengapa

–lalu– ia menjumpai begitu banyak halangan di wilayah-wilayah yang paling padat kependudukannya. Hubungan antara produksi agregat, jumlah penduduk sesuatu negeri tertentu dan tingkat kesejahteraan mereka dapat dinyatakan berdasarkan sebuah rumusan yang diusulkan Boeke (Boeke 1940: 164ff.):

$$\text{Tingkat kesejahteraan} = \frac{\text{Produksi}}{\text{Jumlah rakyat}}$$

Saya memandang perumusan ini sangat berguna untuk menjelaskan hubungan yang sesungguhnya antara ketiga faktor itu. Itu berarti bahwa suatu peningkatan produksi agregat dalam sesuatu masyarakat tertentu, misalnya dengan menduduki tanah baru yang masih tersedia iuntuk penggarapan, tidak dengan sendiri cukup untuk meningkatkan tingkat kesejahteraan. Metode-metode yang biasa dipakai di daerah-daerah di mana penggarapan sawah-basah berdominasi, ialah meningkatkan jumlah tanaman per tahunnya. Ini berarti meningkatkan produktivitas per satuan tanah, sementara membiarkan produksi *per kapita* pada dasarnya tidak berubah. Selama laju pertambahan jumlah penduduk menyamai produktivitas itu, yang pada gilirannya menuntut para penggarap dibekali dengan alat-alat baru. Ini hanya mungkin dengan mekanisasi atau rasionalisasi produksi pedesaan.

Ini merupakan penjelasan yang sangat disederhanakan mengenai hubungan antara ketiga faktor itu – namun menurut pandanganku kesimpulannya jelas sekali. Meningkatkan daerah yang digarap atau penambahan jumlah tanaman per tahun tidaklah cukup, jika tidak ada perubahan dalam sistem dasar agrikultur itu. Lagi pula, mekanisasi dalam pola masyarakat ‘involusioner’ yang berlaku itu hanya akan mengakibatkan pengangguran besar-besaran menggantikan kurangnya-pekerjaan yang berlaku dalam kondisi-kondisi yang ada. Ketika Geertz mengumumkan *Agricultural Involution* pada awal tahun-tahun 1960-an, Jepang sudah jauh sekali menuju pemecahan kemandegan agrarian yang menjadi pembawaan berdominasinya penggarapan sawah-basah yang karakteristik sebuah lingkungan pedesaan yang mandeg.

Menurut Geertz, pemecahan seoperti itu hanya mungkin karena Jepang, dengan sebuah pemerintahan yang didominasi oleh pertimbangan-pertimbangan kepentingan-kepentingan patgriotik yang berakar dalam

kesadaran nasional, menjalankan suatu kebijakan re-investasi surplus-surplus yang dihasilkan oleh sektor agrikultur dalam perekonomiannya. Surplus-surplus ini ditanamkan dalam pemnbangunan industrial maupun penyempurnaan teknik-teknik agrikultural. Ini memungkinkan surplus-surplus itu tetap di dalam negeri, dengan kelebihan tenaga manusia pedesaan terserap di dalam suatu sektor industrial yang terus bertumbuh. Dalam pandangan Geertz, kenyataan bahwa Jawa merupakan sebagian dari suatu koloni selama seluruh akhir abad XIX dan awal abad XX memustahilkan pemecahan semacam ini, semata-mata sebagai akibat kebijakan Belanda yang mengangkut laba-laba pertambangan dan pekebunan pulang ke negeri Belanda.

Betapapun, perbandingan Geertz mengenai sejarah ekonomi Jawa dengan sejarah ekonomi Jepang, membenarkan kesimpulan bahwa faktor-faktor ekologis itu sendiri tidaklah menentukan sebagai suatu sebab kemandegan yang menahun (chronic). Namun, dalam menganalisis perkembangan-perkembangan di Jawa selama paroh kedua abad XX, kita mesti memperhitungkan kenyataan bahwa selang seabad penuh setelah Jepang menempuh strategi yang dilukiskan di atas telah menjadikannya semakin sulit bagi Jawa untuk menjalankan suatu pemecahan yang didasarkan pada model Jepang itu, walaupun itu cuma dikarena proses mengisi pulau itu – gejala yang dilukiskan oleh Boeke sebagai ‘perluasan statik.’ Juga dalam kasus Tiongkok, keharusan untuk menempuh suatu strategi pembangunan nasional baru, seabad sesudah Jepang, berarti bahwa kesulitan-kesulitan yang jauh lebih besar telah dijumpai dalam menanggulangi halangan-halangan ekologis yang menjadi pembawaan dalam pola agrikulturalnya.

Teori-teori Boeke dan Geertz mengenai kemandegan yang menjadi pembawaan/terkandung dalam masyarakat-masyarakat agrarian di Asia telah dikembangkan lebih jauh oleh Ritjof Tichelman dalam bukunya yang cemerlang mengenai *Cara Produksi Asia*, yang agaknya telah diabaikan sama sekali oleh dunia kesarjanaaan. Menurut Tichelman (1980), terpisah jauh dari faktor-faktor kolonial dan pasca-kolonial tersebut yang diteliti dalam Bab Satu, negara-negara awal Asia Tenggara yang memusat, yang menguasai wilayah-wilayah luas dengan dominasi penggarapan sawah basah, juga memainkan suatu peranan penting dalam menciptakan kemandegan dewasa ini. Dalam sebuah bab

berjudul “Kontinuitas-kontinuitas,” Tichelman memperluas teori ‘invulasi’ Geertz sebagai berikut:

Pengaruh pembatasan kemandegan yang kurang-lebih bersifat *Asiatik* menjadi semakin gawat ketika dikotomi antara pedalaman agrarian dan pinggiran komersial menjadi dipolitikkan dan diperkuat oleh berbagai penyusupan asing.

Masalah ‘invulasi agraria’ di daerah-daerah padi yang subur mesti dipandang dalam konteks ini. Kita mengkhitsarkan unsur-unsur esensial dalam rumusan-rumusan kita sendiri: masyarakat desa yang rapat-terjalin, yang kolektivitas tradisionalnya baru runtuh ketika pengaruh kapitalisme Barat telah merambah sangat jauh, dan di mana unsur-unsur dari zaman relatif-tiadanya-kelas dan kerja kolektif masih samar-samar bertahan hingga pertengahan abad XX; agrikultur dengan irigasi yang, bagi sebuah masyarakat agrarian, telah berkembang sangat tinggi dan yang kadang-kadang memungkinkan suatu kepadatan kependudukan yang cukup tinggi, bahkan pada masa awal pra-kolonial; “*sebuah negara yang secara tradisional kuat, yang dalam suatu atau lain bentuk, menguasai dan memusatkan bagian lebih besar dari surplus, sekalipun modal asing kemudian mengklaim suatu bagian besar dari produk surplus sosial itu*” (kursif, W. Wertheim); kesinambungan komparatif antara sosok-sosok pra-kolonial dan pasca-kolonial berhadap-hadapan dengan masyarakat-masyarakat desa; suatu penerusan isolasi ekonomi relatif desa-desa itu yang disebabkan oleh sifat periferal proses-proses ekonomi non-agrarian dan banyaknya perantara-perantara (mediator) yang parasitik antara petani dan pasar; suatu kecenderungan yang kuat ke arah kemandegan sosio-ekonomis yang, dalam pengertian tertentu, menyerap dan meniadakan (menegasi) hampir semua tindakan pembangunan eksternal. Kekuasaan dan eksploitasi kolonial mengkonsolidasi dan meningkatkan kecenderungan-kecenderungan kemandegan yang masih bertahan dari masa-lalu Asiatik (Tichelman 1980: 44).

Kita mengetahui bagaimana Jepang, bahkan dalam abad XIX, berhasil dalam menanggulangi faktor-faktor penghambat yang terkandung dalam latar-belakang agrikultural dan politisnya. Bab berikutnya meneliti bagaimana cara Tiongkok, seabad kemudian, telah berhasil –setidak-tidaknya untuk sebagian– dalam menanggulangi setiap gangguan sejenis.

Bab III, Makna Abadi Model-MAO Bagi Dunia Ketiga?

Tiongkok Sebelum-Perang

Republik Tiongkok sebelum Perang Dunia Kedua yang diperintah oleh Chiang Kai-shek, merupakan bagian dari ‘Sebagian Besar Dunia,’ di mana kesengsaraan ekstrim menjadi nasib rakyat jelata. Di dalam bukunya *Land and Labour in China* yang diterbitkan pada tahun 1932, sejarawan termashur Inggris R.H. Tawney mengkarakterisasi situasi umum kaum tani Tiongkok sebagai berikut:

....sulit menentang kesimpulan bahwa sebagian besar kaum tani Tiongkok senantiasa berada di pinggir jurang kepapaan. Mereka adalah, boleh dibilang, suatu proletariat yang bermilik yang diselamatkan –kalau diselamatkan– sebagian oleh akalnya yang banyak dan keuletannya yang mengagumkan, sebagian lagi oleh komunisme keluarga Tiongkok, sebagian dengan mengurangi konsumsi kebutuhan-kebutuhannya dan dengan demikian menghabiskan modal fisiknya (Tawney 1932:72/73).

Tawney, yang mengutip pandangan ahli Tiongkok yang terkenal, John Lossing Buck bahwa:

Pendapatan-pendapatan kecil memerosotkan kebanyakan kaum tani dan keluarga mereka hingga kehidupan yang paling dasar. Dalam kenyataan rakyat menghidupi diri mereka di musim dingin [...] dengan mengonsumsi makanan sesedikit mungkin (Tawney 1932: 73)

menambahkan sendiri bahwa:

Benar [...] di sebagian besar wilayah Tiongkok, penduduk pedesaan secara mengerikan menderita karena ketidak-pastian kehidupan dan pemilikan [...] Kelaparan merupakan ciri kehidupan perekonomian Tiongkok yang paling banyak didengar oleh Barat. Itu merupakan keburukan yang begitu mengerikan sehingga semua masalah lainnya tampak –pada penglihatan pertama– sungguh remeh [...] Bukti-bukti sejarah seperti yang tersedia seperti itu menunjukkan bahwa kesengsaraan yang dikarenakan oleh banjir dan kekeringan, pada skala yang cukup besar untuk menarik perhatian umum, telah menjadi ciri yang selalu kembali dalam sejarah Tiongkok (Tawney 1932: 73-75).

Tawney merujuk pada kepadatan penduduk sebagai salah-satu sebab

utama dari kesengsaraan pedesaan:

Perjuangan segerombolan makhluk manusia demi sekedar kehidupan fisik merupakan suatu realitas yang selalu hadir. Semua gejala kesukaran pedesaan –bidang-bidang tanah yang sempit, pendapatan yang minim, pembunuhan bayi-bayi perempuan, kelaparan– menjadi akibat yang tak-terelakkan olehnya. Bencana-bencana yang mengguncangkan Barat cuma sekedar pengungkapan-pengungkapan sensasional dari suatu proses penyesuaian yang bersifat bersinambungan dan tidak terelakkan. Itulah kejadian-kejadian yang –boleh dikatakan– menjadi bukti-bukti peranan alam. Kelaparan adalah pengungkapan ekonomi, perang saudara ungkapan politik dari tekanan kepadudukan atas alat-alat kehidupan (Tawney 1932: 103/4).

Gambaran Tawney mengenai kondisi-kondisi kehidupan para pekerja industrial di kota-kota bahkan jauh lebih mengerikan lagi:

Jika boleh ditarik kesimpulan-kesimpulan dari penelitian-penelitian yang dilakukan hingga kini, maka menjadi masuk akal untuk mengatakan, bahwa, dengan pengecualian lembaga-lembaga individual tertentu yang telah menjalankan suatu kebijakan yang lebih intelijen, maka keadaan-keadaan yang umumnya berlaku dalam pengerjaan pabrik mengingatkan pada tahap pertama dan paling buruk dari Revolusi Industrial di Inggris. Tidak saja jam-jam (kerja) luar-biasa panjangnya dan rendahnya upah nyaris bisa dibayangkan, tetapi sebagian dari kerja itu seringkali dilakukan dengan memperluas pekerja anak-anak yang murah atau tanpa-dibayar, kadang-kadang diimpor dari desa, dan kadang-kadang –demikian dinyatakan– sebenarnya dijual kepada pemberi-pemberi kerja, di bengkel-bengkel kerja yang seringkali tidak lebih besar dari sebuah gudang, dan di mana syarat-syarat kesehatan dan keselamatan yang paling elementer pun diabaikan (Tawney 1932: 149).

Gambaran Tawney mengenai kondisi-kondisi di Tiongkok sebelum-perang sepenuhnya diperkuat oleh gambaran-gambaran yang terus menghantui Rewi Alley, Edgar Snow dan Han Suyin selama hidup mereka.

Selama tahun-tahun pertamanya di Shanghai, Rewi Alley menulis tentang kondisi-kondisi kehidupan industrial yang mengerikan, yang terkait dengan gangsterisme, dan dengan itu ia hari demi hari bersentuhan (Airey 1970: 66/67). Melihat kembali dari tahun 1951 pada tahun-tahun pertamanya di Shanghai itu, Rewi Alley menambahkan bahwa:

Perajutan-perajutan sutera di Shanghai adalah di antara tempat-tempat yang mengerikan yang

saya teliti, dengan barisan-barisan panjang anak-anak, yang banyak di antaranya tidak lebih dari berusia delapan atau sembilan tahu, berdiri selama 12 jam di depan kuili-kuili perebus kepompong mendidih, dengan jari-jari tangan yang bengkak kemerah-merahan, mata yang meradang, otot-otot mata yang luruh, banyak yang menangis karena sabetan-sabetan oleh sang mandor, yang berjalan mondar-mandir di belakang mereka dengan sepotong kawat meteran ukuran no. 8 sebagai sebuah cambuk; dengan lengan-lengan tangan kurus yang sering dengan luka-bakar sebagai hukuman jika mereka mengulurkan benang rajutan secara tidak tepat; dalam ruangan-ruangan yang begitu penuh uap sehingga dalam panas Shanghai berada dalam ruangan-ruangan itu untuk beberapa menit saja sudah tak-teranggungkan oleh saya. Kami telah berusaha memasang sistem-sistem pendidihan pusat, tetapi pihak pengelola tidak setuju. Upah-upah di situ mengengaskan sekali.

Pekerjaan yang dituntut dari anak-anak itu ialah berdiri di depan air-mendidih itu, sepanjang hari memunguti kepompong-kepompong sutera (yang direbus) itu. Mereka itu tampak terlalu sengsara untuk digambarkan dengan kata-kata. Sungguh suatu pekerjaan yang membangunkan bulu roma, demikian Rewi menulis pada tahun 1928 (Airey 1970: 67).

Edgar Snow menguraikan pengalaman-pengalamannya, selama periode yang sama, di pedesaan wilayah Timur Laut yang dikunjunginya bersama Rewi Alley (yang untuk pertama kali dijumpainya di sana):

Di sana untuk pertama kalinya aku melihat anak-anak mati dalam jumlah ribuan, dalam suatu wabah kelaparan yang akhirnya mengambil korban lebih dari lima juta jiwa, namun nyaris tidak diperhatikan di Barat. Menyaksikannya adalah sebuah titik-gugah dalam kehidupanku; hal itu tetap menjadi yang paling mengguncangkan dari semua pengalamanku dengan peperangan, kemiskinan, kekerasan dan revolusi, sampai, limabelas tahun kemudian, aku menyaksikan tungku-tungku pembakaran dan kamar-kamar gas di mana kaum Nazi, yang tidak sabaran untuk menunggu kematian karena sekedar kelaparan, membasmi enam hingga tujuh juta orang [...] Ratusan orang penggali liang duduk atau terbaring di jalan-jalan atau tangga-tangga pintu dalam sekarat atau mati di depan mataku. Para keluarga terlalu lemah untuk mengubur mereka, tetapi di malam hari mereka semuanya menghilang. Daging manusia dijual secara terang-terangan di beberapa desa.

Duapuluh juta orang dengan gawat terkena dalam musim dingin 1929-30 dan pada musim-musim berikutnya yang sama mengerikan sebelum kekeringan itu mengakhiri limbasan-tiga-tahunan itu. Lahan-lahan luas berpindah tangan pada kaum mindring dan tuan-tuan-tanah absen, dari Tembok

Besar ke arah selatan hingga Lembah Sungai Wei. Selama duabelas tahun berikutnya nyaris tidak ada waktu tanpa serangan kelaparan, banjir atau peperangan atas wilayah-wilayah Tiongkok yang luas. Pada setiap kejadian berlaku kembali perekonomian pensitaan yang sama, eksploitasi yang sama berupa tragedi manusia berjalan terus tanpa dapat dihentikan, pemurukan yang sama para petani, pertumbuhan terus-menerus jumlah kaum tani tidak bertanah, dan lahirnya para rekrut bagi revolusi mendatang.

Edgar Snow menambahkan bahwa:

Di seluruh Tiongkok para petani yang lebih miskin terus-menerus diusir/terusir dari tanah oleh pajak-pajak pensitaan dan sewa yang ekseseif. Di wilayah-wilayah Barat-laut dengan kekeringan yang berlarut-larut, berjuta-juta orang hidup melarat sekali dan penjualan anak-anak khususnya terjadi di mana-mana (Snow 1963: 46-48).

Snow sedang melukiskan akibat-akibat kekeringan yang berkepanjangan. Han Su-yin menyaksikan –sebagai seorang anak bernama “Rosalie”– kesengsaraan yang disebabkan oleh banjir-banjir:

Banjir kemiskinan yang adalah Tiongkok, dan kereta-kereta api, megah, yang dengan gagahnya berlalu menerjang [...] Kereta-kereta api melalui tanah dalam banjir, air yang coklat-tanah di mana-mana kecuali landasan (rel) kereta-api yang lebih tinggi, air yang dengan malas meliuk-liuk coklat di sekeliling puncak-puncak pohon yang terkejut dan menjulang di atas permukaan transparan yang berkaca-kaca; maut diam bermalas-malas dari air di atas ladang-ladang; tiada tampak rumah-rumah, tetapi di cabang-cabang pohon yang menjorok: orang-orang, bertengger bagaikan burung-burung, tanpa bergerak. Kereta-api itu menderu berlalu, tinggi di atas landasan relnya yang tinggi itu, bahkan berteriak-teriak pada mereka itu. Mereka tidak mengangkat tangan, karena mengetahui bahwa kereta itu tidak akan berhenti untuk mereka, tiada seorang pun yang akan berhenti untuk mereka. Mereka mati dengan kematian-bermalas-malas dari air, dan tidak seorangpun peduli. Ber-mil-mil air itu, bermil-mil dan bermil-mil. Mama membuka keranjang makanan; anak-anak makan. Sepanjang hidupnya, Rosalie akan melihat itu, setiap kali ia naik kereta api, selama hidupnya; makan dan memandang pada maut coklat yang diam itu dan orang-orang yang bungkam, menanti dan tidak lain dan tidak bukan: kematian yang dinantikan itu (Han Su-yin 1966: 16/17).

Kenangan-kenangan mengenai Tiongkok di bawah Chiang Kaishek seperti itu sesungguhnya tidak memungkinkan perbandingan dengan Tiongkok jaman-sekarang, melainkan lebih sesuai dengan India atau Bangladesh masa-kini. Selama tahun-tahun 1920-an, bahkan, kondisi-

kondisi di Tiongkok Utara sama buruknya. Dalam sebuah penelitian baru-baru ini mengenai sejarah sosial propinsi Hebei, yang berjudul *Chinese Village, Socialist State*, pengarangnya menulis:

Kekeringan dan kelaparan di Tiongkok Utara pada tahun 1920-21 telah menewaskan sepuluh juta orang, dalam suatu wilayah yang meliputi empat propinsi, meninggalkan hampir separuh dari jumlah delapan-belas juta rakyat Zhili itu dalam kesengsaraan. Isteri-isteri dan anak-anak dijual; jutaan orang lari ke Mancuria.

Seterusnya ditambahkan bahwa:

Menurut data yang dihimpun oleh John Buck, rata-rata 8,8% penduduk setiap generasi mati karena kelaparan di Tiongkok Utara di tahun-tahun 1850-1932, dua kali lipat rata-nasionalnya. Kematian-kematian terkonsentrasi di wilayah-wilayah termiskin (Friedman 1990: 10).

Kritik apapun yang ditujukan kepada Tiongkok selagi Tiongkok telah berkembang sejak kematian Mao, itu tidak dapat digambarkan lagi dalam pengertian-pengertian yang berlaku bagi kebanyakan negeri agrarian yang besar dari Dunia Ketiga. Kesengsaraan luar biasa di Tiongkok pada tahun-tahun akhir 1920-an itu, setengah abad kemudian sudah merupakan sesuatu dari masa lalu. Model pembangunan Mao telah secara mendasar mengubah gambaran pemandangan negeri Tiongkok.

Kunjungan Pertama: 1957

Aku pertama kali berkunjung ke Tiongkok di tahun 1957, selama suatu tahun Sabath (liburan) yang dilewatkan sebagai seorang gurubesar-berkunjung pada Fakultas Pertanian di Bogor (Indonesia), mengajarkan sosiologi pedesaan dan demografi. Sebelum perang dunia kedua aku telah melewati lebih dari satu dasawarsa sebagai seorang anggota dinas kehakiman Hindia Belanda, dan selanjutnya, sebagai seorang gurubesar dalam ilmu hukum; sesudah perang aku diangkat menjadi gurubesar sosiologi dan sejarah Indonesia di Universitas Amsterdam; pada tahun 1956/67, untuk pertama kalinya, aku menikmati kesempatan untuk meneliti pedesaan Indonesia secara lebih mendalam. Kunjungan-kunjungan singkat ke India dan Tiongkok selama periode itu memberikan kesempatan pada ku untuk membuat perbandingan-perbandingan antara cara-cara ketiga negeri Asia yang padat penduduk ini berkembang sejak

akhir peperangan, dengan Indonesia dan India tidak lagi menderita di bawah pengawasan kolonial dan Tiongkok melakukan usaha serius untuk melepaskan dirinya dari sisa-sisa status sebelumnya sebagai sebuah semi-koloni.

Dengan disertai isteriku, Hetty, aku dapat mengunjungi sejumlah koperasi agrikultur di wilayah selatan Tiongkok yang menanam padi, yang ketika itu dapat aku perbandingkan dengan yang telah ku lihat di daerah-daerah pedesaan di Jawa. Aku memberikan perhatian khusus pada kepadatan kependudukan pedesaan, suatu hal-ikhwal yang sudah kukenal sebagai hasil penelitian ku mengenai masalah-masalah yang timbul di bagian-bagian Jawa yang berpenduduk padat sekali, di mana padi ditanam di sawah-sawah beririgasi. Aku bertanya apakah Tiongkok juga berusaha menempatkan kembali penduduk dari daerah-daerah seperti itu ke daerah-daerah yang berpenduduk kurang padat, mengikuti praktek yang pertama diselenggarakan di Indonesia pada pergantian abad ini terutama di Sumatra Selatan (yang aku sendiri sudah ikut memantaunya sejak tahun 1931). Namun, tampaknya Tiongkok pada waktu kunjungan ku itu baru saja memulai eksperimen-eksperimen pertama mereka dalam hal pemindahan pedesaan; dan karenanya aku melepaskan gagasan untuk mencoba mengunjungi suatu daerah seperti itu.

Memenuhi undangan Academia Sinica, aku menyampaikan ceramah di Beijing mengenai masalah-masalah kependudukan di Indonesia, di mana aku memberikan penekanan khusus pada perbedaan-perbedaan antara Jawa dan Sumatra. Aku sebelumnya sudah mengetahui, bahwa itu akan merupakan sebuah subyek yang peka untuk diperkenalkan di Tiongkok. Di Hongkong, dalam perjalanan dari Indonesia ke Tiongkok, telah ku baca dalam sebuah surat-kabar bahwa Profesor Ma Yinchu, Rektor Universitas Beijing, telah berusaha meyakinkan para pejabat bahwa Tiongkok juga menghadapi masalah kepadatan penduduk yang gawat. Akibatnya ialah bahwa ia terlibat dalam suatu pertentangan dengan para ahli teori Marxis yang menyangkal bahwa terlalu-padatnya penduduk dapat menjadi sebuah masalah sungguh-sungguh; yang menjadi soal cuma masalah kekurangan-produksi, dan para ahli neo-Malthusian telah mengarang-ngarang istilah keterpadatan penduduk itu hanya untuk

menghindari pemecahan masalah-masalah ekonomi yang mendasar dalam bidang produksi bahan makanan.

Demi keherananku, adalah Profesor Ma Yinchu yang memandu ceramahku mengenai Indonesia, membaca dalam bahasa Inggris dan menerjemahkannya ke dalam bahasa Tionghoa. Sudah dengan sendirinya saya menghindari rujukan apapun pada masalah-masalah kependudukan di Tiongkok, sekalipun saja sudah mengenal sejumlah studi penting yang diumumkan oleh Profesor Chen-ta, ahli terkenal mengenai demografi Tiongkok. Tetapi, Profesor Ma, yang pada waktu itu sudah berusia 77 tahun, kelihatan gembira sekali menemukan dalam diriku seseorang yang berbagi dalam gagasan-gagasannya mengenai masalah-masalah kependudukan. Merujuk pada argumentasi ku, ia menekankan bahwa Tiongkok juga menderita masalah-masalah kelebihan-penduduk yang sama seperti yang dihadapi Indonesia. Ku sadari bahwa sebagai akibatnya, para hadirin itu bereaksi dengan cadangan tertentu atas pidatoku.

Sesungguhnya, kepadatan-kepadatan penduduk yang ekstrim yang dijumpai di bagian-bagian Selatan Tiongkok, di mana penanaman sawah basah merupakan praktek umum, sudah menarik perhatian para pengembara Eropa sejak paruh pertama abad XVIII. Sekalipun sudah sangat diketahui bahwa bankir dan ahli ekonomi Inggris, Richard Cantillon, yang melewati banyak waktu di Paris, telah melakukan pengembaraan yang sangat luas, aku masih belum yakin apakah uraiannya mengenai medan Tiongkok didasarkan atas pemantauan-pemantauannya sendiri, atau merupakan kisah-kisah yang diceritakan oleh pengembara-pengembara lain.¹ Tetapi, gambarannya mengenai pedesaan Tiongkok-Selatan sepenuhnya sesuai dengan laporan F.H. King mengenai *Farmers of Forty Centuries* (Petani Selama Empatpuluh Abad) yang diperbincangkan dalam Bab.2.

Dalam *Essai sur la nature du commerce en general*-nya yang termashur, yang diterbitkan setelah wafatnya di tahun 1755, Cantillon menulis:

Tiada negeri di mana perlipat-gandaan umat-manusia telah berlangsung sejauh seperti yang terjadi di Tiongkok. Rakyat miskin itu semata-mata hidup dari padi dan persawahan. Mereka

bekerja nyaris bertelanjang, dan di provinsi-provinsi sebelah selatan mereka panen padi tiga kali dalam setahun secara berlimpah, berkat pemeliharaan cermat yang mereka lakukan dalam agrikultur. Tanah di sana tidak pernah dibiarkan menganggur, dan setiap kali memproduksi tanaman yang seratus-kali lipat benih yang ditebarnya [...] Melalui kerja keras dan ulet, dari sungai-sungai mereka menangkap jumlah ikan yang melimpah-ruah, dan dari tanah mereka menarik apa saja yang dapat dihasilkan. Namun begitu, setiap kali terjadi tahun-tahun gersang, mereka mati karena kelaparan dalam jumlah ribuan, walaupun adanya perhatian sang Kaisar, yang untuk kasus-kasus seperti itu menumpuk persediaan-persediaan beras (Cantillon 1952: 37/38).

Sambil berkunjung ke pedesaan, dengan sendirinya aku berhasrat memantau cara-cara yang dipakai untuk memecahkan masalah-masalah kepadatan penduduk di daerah-daerah padi itu. Traktor-traktor dan alat-alat mekanik lainnya, yang kebanyakan diimpor dari Uni Sovyet dan negeri-negeri Eropa-Timur lainnya, sudah dipergunakan secara sporadis di daerah-daerah penanam gandum di Utara yang lebih jarang penduduknya. Traktor-traktor yang cocok bagi penggunaan di lumpur ladang-ladang padi beririgasi jelas belum tersedia.

Aku gembira mengetahui bahwa Mao, yang lahir dari sebuah keluarga desa, telah memahami bahwa Tiongkok jangan mengikuti sistem Sovyet yang sepenuhnya bersandar pada mekanisasi pertanian. Ia sudah menyatakan bahwa *Tiongkok harus belajar berjalan atas dua kaki*: pembangunan industrial plus mekanisasi mesti dipadukan dengan peningkatan secara berangsur-angsur dari alat-alat tradisional yang masih umum dipakai. Walaupun jelas terbukti akan adanya perubahan dramatis, masih juga terdapat kesinambungan yang kuat dalam sejarah Tiongkok masa belakangan ini.

Tiongkok selama tahun-tahun 1950-an dihadapkan pada jenis masalah-masalah yang sama seperti yang dihadapi Indonesia dan untuk itu pemerintahan Indonesia sejauh ini belum mampu menemukan pemecahan-pemecahannya. Strategi pedesaan secara menyeluruh yang dijalankan oleh pihak Tiongkok, betapapun, sejak awal sudah berbeda. Reform-reform agraria yang dijalankan pada awal tahun-tahun 1950-an sudah jauh lebih radikal daripada reform-reform tahun 1960 di Indonesia. Jelas sekali bahwa reform-reform itu sendiri, tidak dapat diharap

akan memecahkan masalah-masalah yang diperbincangkan dalam bab di muka. Apabila segala yang dilakukan itu ialah untuk membagikan tanah secara lebih merata, dengan bagian-bagian dibagikan pada suatu jumlah besar kaum tani tak bertanah atau nyaris tak bertanah, maka ini sendiri tidak akan menjamin suatu peningkatan dalam taraf produksi yang mencukupi bagi suatu perbaikan yang berarti dalam situasi pangan secara menyeluruh. Pembagian kembali tanah itu sendiri tidak dapat menciptakan suatu landasan bagi perkembangan ekonomi lebih lanjut. Pengaruh utama reform tanah bersifat psikologis; arti-pentingnya terutama disebabkan oleh perasaan yang ditimbulkan dalam hati para petani yang kepadanya telah dibagikan sebidang tanah, yang seterusnya mereka yang akan menjadi tuan atas tanah-mereka sendiri. Pada waktu itulah mereka akan menyadari bahwa di masa mendatang mereka tidak akan bekerja untuk kepentingan tuan-tanah atau petani kaya, melainkan untuk kepentingan mereka sendiri.

Namun, lebih banyak yang diperlukan untuk menciptakan kondisi-kondisi bagi perbaikan, dan pada waktunya, sebuah pemecahan bagi masalah-masalah pokok perekonomian. Kepemimpinan Tiongkok yakin bahwa atas dasar *minifundia* tiada pemecahan akhir yang praktis sifatnya. Sederhana sekali, tidak terhitung banyaknya galangan-galangan yang diperlukan untuk membatasi setiap bidang lahan akan memustahilkan pengerjaan bidang-bidang tanah yang lebih luas dengan metode-metode baru; lagi pula, galangan-galangan itu, yang berfungsi sebagai garis-garis demarkasi akan berarti hilangnya banyak sekali tanah garapan dalam sebuah negeri di mana tanah itu langka dan sangat berharga. Maka itu, perlu untuk secara berangsur-angsur mengembangkan koperasi-koperasi bentuk baru, dimulai dengan tim-tim saling bantu, dan berakhir dengan koperasi-koperasi besar, yang di masa depan dapat mengakhiri segala jenis persengketaan mengenai prioritas-prioritas dalam hal pemakaian air, atau mengenai banyaknya air yang diperkenankan pemakaiannya.

Maka itu kepemimpinan Tiongkok pada umumnya memandang kolektivisasi tanah sebagai suatu pemecahan akhir. Dalam jangka panjangnya itu akan memungkinkan lahan-lahan yang terpisah-pisah

itu dipadukan menjadi unit-unit yang jauh lebih besar, dan dengan begitu menciptakan kondisi-kondisi bagi mekanisasi di masa depan, bahkan di daerah-daerah persawahan di Tiongkok Selatan dan Tengah.

Kolektivisasi juga akan menjamin tingkat persamaan yang lebih tinggi. Ini tidak berarti bahwa para pemimpin Tiongkok adalah ‘pemerata-pemerata’ yang mengarah pada suatu distribusi kekayaan secara merata. Untuk suatu jangka waktu yang panjang, azas ‘sosialis’ masih akan berlaku, yaitu bahwa setiap orang akan mendapatkan sesuai pekerjaannya. Namun begitu, pemilikan kolektif atas tanah, ternak dan alat-alat kerja sudah pasti menyumbang pada suatu pengurangan praktis dari ketidakadilan-ketidakadilan yang ada.

Sebuah efek lain yang penting ialah bahwa kolektivisasi akan menjamin penggunaan tenaga manusia yang tersedia secara lebih baik, misalnya dalam membangun atau memperbaiki bangunan-bangunan infra-struktur seperti galangan-galangan irigasi dan saluran-saluran di musim lengang. Tenaga manusia tambahan ini juga akan meliputi tenaga kerja perempuan sebagai suatu faktor penting. Di masa lalu, di banyak bagian Tiongkok, banyak wanita, bahkan yang di pedesaan, dibesarkan dengan kaki mereka terikat, yang membuat mereka kurang cocok untuk pekerjaan pertanian. Di masa pasca-revolusi, para wanita untuk pertama kalinya dapat berpartisipasi penuh dalam kerja produktif di luar-rumah.

Kita kini harus bertanya pada diri sendiri mengapa kepemimpinan Tiongkok memutuskan untuk melaksanakan kolektivisasi ‘secara paksa.’ Menurut *Chinese Village, Socialist State* (Friedman 1991: bab.7) orang Tionghoa melakukan itu dengan secara membudak mengikuti model Sovyet. Pandangan ini terlampau sederhana. Sebenarnya, para penasihat Sovyet telah memperingatkan terhadap kolektivisasi yang dimulai sebelum Tiongkok memiliki permesinan yang memadai untuk memperkenalkan pertanian yang dimekanisasi. Liu Shaoqi, yang pada masa itu menjadi ketua Komite Tetap Kongres Nasional, juga mendesak agar kolektivisasi itu ditunda, sekalipun ia, juga, menyadari bahwa dalam jangka panjangnya pertanian yang dimekanisasi tidak dapat dijalankan pada lahan-lahan kecil (Lilliputian). Tetapi Mao mempunyai alasan-alasan untuk ‘tidak’ mengikuti nasehat Sovyet. Ia mengetahui bahwa,

apabila Uni Sovyet dapat memadukan penggunaan traktor-traktor dengan praktek mengirimkan kelebihan tenaga kerja agrikultur bekerja di industri kota yang modern, maka kepadatan penduduk pedesaan, setidaknya yang di daerah-daerah penanam padi, akan menjadikan hal itu mustahil dilakukan di banyak bagian Tiongkok.

Mao juga menyadari bahwa akan memerlukan berdasawarsa waktu untuk membangun dan memperkenalkan mesin-mesin secukupnya bagi kolektivisasi berdasarkan model Sovyet. Ia juga mengkhawatirkan bahwa sekali petani Tiongkok sadar telah menjadi petani yang sejahtera, mereka tidak akan bersedia untuk menerima kolektivisasi.

Analisis Friedman dan para mitra-pengarangnya tidak memiliki pemahaman yang sungguh-sungguh mengenai kesulitan-kesulitan yang luar biasa besarnya yang dihadapi kepemimpinan Tiongkok pada tahun-tahun 1950-an. Sederhananya, memang tidak ada sesuatu pun model yang cocok untuk memperkenalkan sosialisme di sebuah negeri agrarian dengan masalah-masalah kepadatan kependudukan yang dijumpai di Tiongkok dan negeri-negeri Asia Timur lainnya. Model Sovyet itu merupakan satu-satunya model yang tersedia – dan jelas sekali bahwa itu tidak dapat dijalankan di Tiongkok.

Mungkin sekali kolektivisasi kurang cocok bagi Tiongkok Utara jika dibandingkan dengan daerah-daerah berpenduduk padat dari Tiongkok Selatan yang didominasi oleh penggarapan sawah basah. Tetapi studi Friedman dan para mitra-pengarangnya mengenai sejarah sosial perkembangan-perkembangan selama tahun-tahun 1950-an di provinsi Hebei, mengesankan bahwa strategi ekonomi kepemimpinan Tiongkok tidak didasarkan pada suatu kepercayaan ‘fundamentalis’ mengenai kolektivisasi sebagai semacam obat mujarab untuk segala penyakit, melainkan lebih melihatnya sebagai suatu proses terus-menerus dengan percobaan dan pembetulan, melakukan usaha-usaha mengoreksi kesalahan-kesalahan sesegera kesalahan-kesalahan itu disadari.

Kita juga harus mengingat bahwa tujuan kepemimpinan Tiongkok, di masa itu, bukanlah secara langsung memperbaiki tingkat kehidupan seluruh penduduk – yang, seperti sudah kita lihat, adalah tidak mungkin.

Satu-satunya kebijakan yang layak ialah berusaha mempertahankan produksi agrikultur pada suatu tingkat yang cukup untuk memberi pangan pada seluruh penduduk Tiongkok, yang sudah merupakan suatu sasaran yang cukup sulit!

Satu penyimpangan mencolok dari model Sovyet di awal tahun-tahun 1950-an dapat dijumpai dalam pengarahannya kerja dan pengalokasian dana untuk membangun atau memperbaiki bangunan-bangunan konservasi air, seperti bendungan-bendungan, saluran-saluran dan basin-basin sungai. Dr. E.B. Vermeer, dalam disertasi doctoralnya yang istimewa, *Water Conservancy and Irrigation in China* (Vermeer 1977), memberikan banyak rincian mengenai keberhasilan-keberhasilan pemerintah Tiongkok segera setelah tahun 1950:

...di daerah pedesaan Tiongkok, dengan tingkat teknologinya yang rendah dan kelebihan tenaga kerja musiman, maka masukan-masukan yang paling tersedia untuk meningkatkan produksi pertanian adalah tenaga kerja dan air. Dalam konteks ini, prioritas tertinggi yang diberikan oleh pemerintahan baru di tahun 1949 pada proyek-proyek konservasi air dan mobilisasi massa petani yang bersamaan dengan itu adalah sepenuhnya wajar [...] Selama tahun-tahun awal, mobilisasi kaum tani secara besdar-besaran bagi kerja konservasi air difasilitasi oleh kenyataan mobilisasi politik dalam gerakan reform tanah, wewenang yang besar sekali dari Negara *vis-a-vis* komunitas agrikultur yang telah guncang, kebutuhan mencolok akan perlindungan terhadap banjir-banjir dan banyaknya korban banjir, para pengungsi yang tidak sabar untuk memulihkan tanah mereka ke kapasitas produktif masa sebelumnya. Kontras antara Tiongkok Komunis dan Tiongkok pra-perang barangkali tak ada yang lebih kena daripada di bidang penanggulangan bencana (Vermeer 1977: 1/2).

Vermeer juga memberikan angka-angka menarik sekali:

Investasi negara dalam konservasi air mengambil suatu bagian besar dari anggaran ekonomi (8 hingga 10%) di tahun 1950 dan 1951; investasi-investasi itu bertahan pada tingkat yang cukup konstan (400-500 juta *yuan*) selama 1952-1955, walaupun banjir-banjir besar tahun 1954 mengharuskan diversifikasi dana investasi ke reparasi-reparasi besar-besaran. Tahun-tahun 1956 dan 1957 menyaksikan suatu peningkatan mutlak dalam investasi konservasi air, dan pada tahun 1958 suatu peningkatan tajam terjadi ke suatu tingkat yang dipertahankan hingga tahun 1960 (Vermeer 1977: 282).

Unsur yang sangat penting dalam strategi pedesaan Tiongkok Komunis

ini sama sekali diabaikan dalam buku yang terbit baru-baru ini dan yang sebenarnya sangat informatif, *Politics, Economy and Society in Contemporary China*, oleh Bill Brugger dan Stephen Reglar (Brugger 1994). Para pengarang itu tampaknya mengisyaratkan bahwa, pada tahun-tahun 1950-an, pemerintah Tiongkok secara membudak mengikuti model Sovyet, dengan tekanan yang nyaris eksklusif pada industri berat, dengan mengorbankan agrikultur (Brugger 1994: 16).

Menurut ahli agronomi Perancis yang terkenal, Rene Dumont, seorang ahli mengenai Dunia Ketiga, setelah kunjungan pertamanya di tahun 1957 ke Republik Rakyat Tiongkok. “Pengendalian dan konservasi air, yang di mana pun merupakan suatu landasan pokok bagi intensifikasi agrikultur, di Tiongkok lebih dari di mana pun juga, merupakan suatu kebutuhan yang diharuskan bagi suatu program agrikultur” (Rene Dumont, *Revolution dans les campagnes chinoises* [Dumont 1957: 26] terj. W.W.).

Di salah sebuah koperasi yang kami kunjungi di propinsi Guangdong selatan, kami banyak belajar mengenai cara pembentukan koperasi-koperasi di tahun-tahun sebelumnya, dan cara mereka menyumbang pada suatu peningkatan penting dalam produksi. Pada tahun 1935, setelah Guomintang juga dikalahkan di bagian Selatan Tiongkok, tidak kurang dari 65 buah tim saling bantu telah terbentuk. Ini telah menyumbang pada suatu peningkatan dalam produksi agrikultur: kekuatan kerja telah bekerja lebih efisien, dan tugas-tugas terbagi secara lebih baik, baik dalam pemindahan bibit dan di dalam panen. Karena itu, pada bulan Mei 1954, telah bertumbuh kesadaran bahwa koperasi, di bawah pemilikan pemerintah, akan menciptakan keuntungan-keuntungan. Sementara orang hendak membentuk sebuah koperasi tingkat lebih rendah, di mana para pemilik tanah akan mempertahankan tanah mereka, dan sebagian atas landasan itu akan berbagi dalam keseluruhan panennya. Dua tim saling bantu, ditambah tujuh keluarga lainnya, mendirikan sebuah koperasi kecil terbatas seperti itu – suatu bentuk bergandengan tangan yang hingga saat itu belum banyak diperoleh pengalaman. Kelompok itu memulai dengan membuka tanah baru, delapan *mou* daripadanya dikhususkan untuk pembudidayaan teratai – suatu prakarsa yang baru benar bagi para petani sederhana itu. Hasilnya ialah

keuntungan sebesar 600 *yuan*.

Selama masa reform tanah, pada awal tahun-tahun 1950-an, para petani telah mengambil alih pohon-pohon buah yang dulunya milik tuan-tuan tanah besar; itu terbukti merupakan suatu sumber pendapatan yang penting. Para petani dengan mengangkut air-air pikulan untuk mengairi pohon-pohon itu, menyelamatkan pohon-pohon itu dari kekeringan awal tahun 1955, dan sebagai akibatnya panen buah-buahan yang dapat dipasarkan mencapai jumlah hingga 40 ton. Menyadari bahwa melalui usaha bersama kaum petani, termasuk para wanita, akibat-akibat kekeringan yang berkepanjangan dapat diatasi, yang lain-lainnya menjadi sadar pula akan keuntungan-keuntungan koperasi dan mereka bergabung dalam koperasi itu. Dengan cara serupa, di tahun 1955 juga, panen padi telah diselamatkan dari kekeringan. Pada awal tahun 1956 kaum pedesaan yang berpartisipasi memutuskan untuk memadukan ke 13 koperasi yang ada menjadi satu koperasi, di mana pemilikan atas tanah, ternak dan alat-alat kerja tidak menjadi suatu faktor penentu lagi dalam memperhitungkan bagian setiap pekerja individual dalam hasil panen seluruhnya, sehingga hanya performa kerja individual yang masuk dalam hitungan. Koperasi-koperasi tingkat lebih tinggi yang lebih besar juga merencanakan pembangunan bendungan-bendungan, dan sebuah tanki air yang melebihi dua hektar, yang, dengan mencega banjir-banjir akan memungkinkan koperasi itu panen dua kali dalam setahun, di atas tanah yang tadinya hanya mungkin satu kali panen dalam setahun. Pada tahun kita berkunjung itu, tahun 1957, masih terjadi suatu bencana banjir, di mana 30% dari tanaman padi dan banyak ikan di sawah-sawah, telah hilang.

Koperasi yang baru aku gambarkan ini jelas sebuah kolektif teladan yang khusus dipilih untuk diperlihatkan pada tamu-tamu asing.² Sebuah koperasi lain yang diperkenalkan untuk kami kunjungi, tidak jauh dari Guangzhou (Canton), jauh kurang mengesankan, dan di sana aku bahkan beralasan untuk meragukan ketepatan angka-angka tanaman yang diberikan kepada kami. Seminggu yang diberikan kepada kami untuk mempelajari pedesaan Tiongkok jelas terlalu singkat untuk sesuatu yang lebih ketimbang suatu kesan yang dangkal.

Keberhasilan yang paling mengesankan di propinsi Guangdong ialah sebuah kampanye besar untuk menanam pohon-pohon di atas tanah berbukit, yang diselang-seling dengan kuburan-kuburan, namun untuk selanjutnya ditinggalkan telanjang oleh para tuan tanah sebelumnya. Pada tahun 1948 ahli geografi Perancis yang terkenal, Pierre Gourou sudah menerbitkan sebuah tulisan dalam *Pacific Affairs* tentang 'Tanah-tanah tinggi Tiongkok yang tidak dikerjakan' dan potensial pentingnya bagi perkembangan masa depan (Gourou 1948). Pemerintahan Mao, tanpa mengetahui sedikitpun akan rekomendasi-rekomendasi Gourou, memberikan perhatian besar sekali pada penghutanan kembali daerah-daerah perbukitan, yang di abad-abad sebelumnya dilebati hutan-hutan. Para tuan-tanah besar, sebagai pemilik daerah-daerah perbukitan ini, selama bertahun-tahun telah menelantarkan tanah seperti itu, hanya memakainya sebagai tempat merumput bagi ternak mereka.

Eksplorasi 'tanah-tanah tinggi yang tidak dikerjakan' ini mengungkapkan bagaimana strategi pembangunan Tiongkok dalam batas-batas tertentu telah jauh mendahului usaha-usaha serupa di Indonesia. Penghutanan kembali memberikan salah-satu contoh yang paling mencolok. Apabila Indonesia telah melestarikan –di masa lalu– suatu bagian penting kekayaan hutan alamnya, maka di Tiongkok penggundulan hutan secara besar-besaran telah hanya menyisakan sekitar 5% dari seluruh wilayah luas yang masih dilebati pohon-pohon. Di lain pihak, di Tiongkok sesudah revolusi sosialis (yang secara mendasar berbeda dari revolusi yang terutama bersifat nasionalis yang telah membawakan kemerdekaan politik bagi Indonesia), usaha-usaha keras telah dilakukan di bidang penghutanan kembali; anak-anak desa, misalnya, masing-masing mesti menanam dan memelihara sedikitnya enam batang pohon. Di Indonesia, sebaliknya, penggundulan hutan masih berlangsung dengan suatu laju yang mengkhawatirkan, teristimewa di bagian-bagian Sumatera-Barat dan di Kalimantan (Borneo). Uang-uang sogokan yang dibayarkan kepada dan diterima oleh para pejabat merupakan salah satu sebab bagi eksploitasi yang membabi buta terhadap hutan-hutan Indonesia.

Di Jawa para petani umumnya memandang para pengusaha-pengusaha kehutanan sebagai musuh mereka, karena mereka berusaha menghalangi

para pekerja tidak-bertanah menduduki tanah-hutan perbukitan itu untuk maksud-maksud penggarapan. Di Tiongkok, sebaliknya, banyak dari hutan-hutan yang diambil-alih dari para tuan-tanah besar dibagikan pada koperasi-koperasi yang anggotanya kemudian dapat menikmati prospek mengeksploitasi pohon-pohon yang ditanam dan dibudidayakan itu. Karenanya, menurut kesimpulan ku pada waktu itu ialah bahwa sekalipun Indonesia mungkin saja berada setingkat dengan Tiongkok di sektor-sektor lain, namun di dalam kebijakan-kebijakan pembangunan kehutanan Indonesia tertinggal jauh di belakang.

lompatan Jauh Ke Depan

Tidak lama setelah kunjungan pertama itu, kami dikagetkan oleh laporan-laporan mengenai perubahan-perubahan dramatik di Tiongkok. Kami mendengar tentang 'Lompatan Jauh Ke Depan' tahun 1958 itu, dan tentang penciptaan Komune-komune Rakyat. Inovasi yang tersebut terakhir itu tidak terdengar sepenuhnya tidak-masuk-akal oleh ku, karena di tahun 1957, ketika mengunjungi koperasi-koperasi agrikultural, aku tersentak oleh sifat-rangkap dari administrasi pedesaan. Pertanyaan-pertanyaan sehubungan dengan produksi pertanian, seperti mengenai ukuran dan urutan tanaman, hortikultura, peternakan atau pertambakan ikan, diurus oleh pengelola (manajemen) koperasi. Tetapi pertanyaan-pertanyaan ku mengenai industri lokal, atau angka-angka kependudukan, seperti laju kelahiran dan angka-angka kematian, diurus oleh para pejabat *xiang* (sub-distrik) ke dalam mana koperasi itu termasuk, yang juga hadir dalam diskusi-diskusi kami.

Dipadukannya kedua unit terpisah itu menjadi satu sistem administratif terpadu tampak bagi ku suatu hasil logis dari proses pembentukan kolektif-kolektif pedesaan. Namun, gagasan-gagasan ekonomis di balik 'Lompatan Jauh Ke Depan' menimbulkan masalah-masalah baru yang penting. Di satu pihak, peningkatan-peningkatan drastik dalam laju pembangunan ekonomi, baik dalam agrikultur dan di dalam industri, tampak seperti suatu pelepasan diri secara radikal dari model pembangunan Sovyet, yang pada tahun-tahun awal 1950-an, sebagai satu-satunya model yang tersedia untuk menciptakan sebuah 'masyarakat sosialis,' agaknya kurang-lebih telah diikuti. Sebagaimana sudah kita

lihat, proses penyimpangan dari model Sovyet, yang tercermin dalam pembangunan pekerjaan-pekerjaan konservasi air, mendapatkan kekuatan baru selama ‘Lompatan Jauh Ke Depan’ itu. Sasaran utamanya ialah pengerjaan sepanjang tahun dari seluruh angkatan kerja yang tersedia –laki dan perempuan– untuk pembangunan bangunan-bangunan irigasi dan bendungan-bendungan bahkan di musim dingin. Karenanya, tampak masuk-akal sekali, untuk meninggalkan model pembangunan Sovyet. Ini mungkin pula berkaitan, hingga suatu batas tertentu, dengan memburuknya hubungan antara Partai Komunis Tiongkok dan para pemimpin Sovyet, karena Krushchev telah menolak untuk berbagi rahasia bom atom dengan Mao sewaktu kunjungannya ke Uni Sovyet. Lompatan Jauh Ke Depan dimaksud untuk membuktikan bahwa laju pembangunan Sovyet adalah terlalu lambat, dan bahwa dengan mengerahkan seluruh tenaga kerja manusia yang tersedia, Tiongkok dapat secara sangat berarti meningkatkan laju pertumbuhan itu. Menyusul keberhasilan-keberhasilan tahun-tahun sebelumnya, kepemimpinan Tiongkok agaknya terobsesi oleh suatu suasana euforia.

Di pihak lain, cara industri pedesaan kini dikembangkan, dengan lebih memberi penekanan pada ‘industri berat’ ketimbang pada produksi barang-barang konsumsi, yang tercermin dalam pembangunan di seluruh pelosok daerah pedesaan, berupa tungku-tungku tinggi untuk produksi baja, masih tampak bersandar pada konsepsi-konsepsi dasar yang diambil dari model Sovyet. Tidak saja kualitas baja yang diproduksi itu tetap jauh di bawah semua standar yang berlaku, melainkan tempat-tempat pengecoran itu sedemikian padat-kerja sehingga pada waktu panen acapkali tiada cukup tangan yang bebas untuk melakukan panen hasil bumi.

Pada tahun 1959 telah menjadi jelas bahwa cara perjalanan ‘Lompatan Jauh Ke Depan’ telah terjerumus dalam kesulitan-kesulitan gawat. Klaim resmi semula bahwa bahwa total panen gandum tahun 1958 adalah duakali lipat tahun 1957 jelas menunjukkan bahwa aparat statistik pemerintah Tiongkok telah kacau-balau. Ketika Perdana-Menteri Zhou Enlai untuk pertama kalinya mengakui, di pertengahan tahun 1959, bahwa angka yang benar adalah dua-per-tiga dari angka yang semula diumumkan, seluruh kekacau-balauan yang diakibatkan oleh ‘Lompatan

Jauh Ke Depan' itu menjadi gamblang bagi semua orang. Dan dalam sebuah percakapan dengan sejumlah ahli, termasuk di antaranya ialah Rene Dumont dan Charles Bettelheim, kami sampai pada kesimpulan bahwa angka yang sebenarnya bahkan adalah jauh lebih rendah daripada 250 juta ton yang dinyatakan oleh Zhou Enlai itu.

Pada tahun-tahun 1960-61 terjadilah kekurangan bahan pangan yang gawat, sebagai akibat tidak hanya karena bencana-bencana alam – kekeringan dan banjir– melainkan juga karena ketidak-seimbangan yang disebabkan oleh kebijakan-kebijakan pemerintah yang salah selama dua tahun sebelumnya. Dalam kekacauan yang menyusul setelah itu, euforia 'Lompatan Jauh Ke Depan' secara pasti telah menjadi sesuatu dari masa lalu. Terdapat kelaparan di bagian-bagian negeri, suatu jumlah yang tidak jelas tapi pasti mengerikan, yang mungkin mencapai angka jutaan orang telah mati karena kelaparan.

Walaupun begitu, angka-angka yang mencapai puluhan juta (korban kelaparan, i.i.) yang kini disiarkan oleh rejim Tiongkok sekarang maupun media Barat, dan diterima oleh sarjana-sarjana serius seperti Brugger dan Reglar, dan oleh Friedman dan mitra-pengarang-pengarangnya, tidak mempunyai sedikitpun dasar historis.³ Perhitungan-perhitungan yang didasarkan atas perbandingan angka-angka sensus resmi dari tahun-tahun 1950-an dan dari tahun-tahun 1960-an, dan yang menyatakan bahwa 'antara 17 hingga 29 juta orang Tionghoa tampaknya telah hilang,' tidak dapat diandalkan kebenarannya.

Ketika merencanakan kunjungan ku yang pertama ke Tiongkok, pada bulan Agustus 1957, aku telah menanyakan apakah aku dapat bertemu dengan dua sarjana sosial Tiongkok yang terkemuka, Fei Xiao-tung, ahli sosiologi, dan Chen Ta, ahli demografi. Aku tidak dapat bertemu dengan kedua-duanya, karena pada waktu itu mereka sedang dikritik secara serius sebagai kaum kanan; namun aku ditemui Pang Ze-nian, seorang filsuf Marxis yang mengetahui tentang problem-problem kedua sarjana tersebut di muka. Chen Ta dikritik karena telah mempertanyakan angka-angka apa yang disebut sensus tahun 1953. Sebagai seorang pengorganisasi sensus-sensus, ia tidak dapat menerima klaim resmi para pembesar Tiongkok bahwa, dalam jangka waktu yang luar-biasa

singkatnya, seluruh penduduk Tiongkok telah naik dari 450 juta menjadi 600 juta (bahkan apabila termasuk di situ 17 juta penduduk Taiwan). Chen Ta ingin menyelenggarakan suatu sensus yang taat-ilmiah, gantinya suatu sensus yang berdasarkan percontohan-acak di tingkat regional, sebagaimana yang dilakukan di tahun 1953, yang menurut pandangannya, menggunakan metode-metode yang tidak-ilmiah.

Seorang ahli Tiongkok yang diakui dalam bidang demografi Tiongkok, Dr. Ping-ti Ho, Profesor Sejarah di Universitas Chicago, juga mencatat, dalam sebuah buku berjudul *Studies on the Population of China, 1368-1953* (Ho, 1967), banyak ‘cacat’ dalam sensus 1953 itu, dan menyimpulkan bahwa “Secara keseluruhan, oleh karenanya, penghitungan penduduk seluruh negeri pada tahun 1953 bukan sebuah sensus menurut kaidah teknis istilah itu.” Angka-angka bagi masing-masing propinsi memang menunjukkan suatu peningkatan jumlah penduduk sebesar kurang lebih 30% dalam periode 1947-1953, suatu masa terjadinya pergolakan sipil yang tiada henti-hentinya (Ho 1967: 93/94)! John S. Akird, seorang ahli terkenal lainnya di bidang ini, dalam sebuah tulisan yang diumumkan pada tahun 1983, menyatakan bahwa baik sensus 1953 maupun 1964 sangatlah tidak bisa diandalkan, berbeda sekali dengan sensus tahun 1982.⁴ Mao sendiri mengemukakan sebuah penjelasan yang menarik sekali untuk ini: di masa lalu, kaum tani tidak mendaftarkan putra-putra mereka yang sudah dewasa kepada sensus-sensus itu, karena khawatir anak-anak lelaki mereka akan dikenakan dinas militer; sesudah Revolusi, rakyat cenderung mendaftarkan lebih banyak anak ketimbang yang sebenarnya mereka punyai, karena ini mungkin meningkatkan bagian yang akan diterima keluarga dari kolektif!

Kesimpulan saya: tak ada gunanya berbantah bahwa pada tahun-tahun 1960-an telah ‘lenyap’ 17 juta hingga 29 juta orang, karena tidak pernah ada kepastian mengenai angka 600 juta orang Tionghoa itu. Tidak mustahil sekali ‘orang-orang yang hilang’ itu tidak mati kelaparan dalam tahun-tahun bencana 1960-61 itu, sederhananya karena mereka itu memang tidak pernah ada.

Lagi pula, apabila bencana kelaparan tahun-tahun awal 1960-an itu benar

sehebat yang dikatakan dewasa ini, penduduk pedesaan yang tertinggal (yang masih bertahan hidup) pastilah akan sedemikian lemahnya hingga suatu pemulihan cepat dari produksi agrikultural pada tingkat-tingkat kenormalan tidak mungkin terlaksanakan. Demikianlah berulang-kali kejadiannya dengan kelaparan-kelaparan di masa sebelum perang.

Kunjungan Kedua: 1964

Pada tahun 1964 aku dapat berkunjung lagi ke Tiongkok – kali ini dengan sebuah program yang akan memungkinkan aku berkunjung, dalam jangka waktu satu bulan, sebanyak mungkin komune rakyat. Pada bulan Agustus 1964, karenanya, aku mengunjungi sepuluh komune rakyat dan dua pertanian negara. Dua komune pertgama yang aku kunjungi adalah di ddekat Beijing. Karena kedua-duanya mengkhususkan diri dalam hortikultura, dan peternakan dan perunggasan, mereka telah mencapai kemakmuran yang bagus sekali hanya dengan memasok penduduk kota dengan sayur-sayuran, buah-buahan, daging, hasil-hasil susu dan telur. Karenanya, aku mendesak agar dapat mengunjungi sejumlah komune rakyat yang berlokasi jauh dari sesuatu perkotaan, di mana aku dapat secara lebih dekat memantau keadaan-keadaan rata-rata daerah pedesaan Tiongkok. Keinginan ku jelas diperhatikan, namun aku masih mendapat kesan bahwa komune-komune yang aku kunjungi itu umumnya agak lebih baik dari pada rata-rata keadaannya. Pada kunjungan-kunjungan saya di hari kemudian ke Tiongkok, pada musim dingin 1970/71 dan musim gugur 1979, aku mengatur kunjungan pada banyak dari komune-komune yang sama yang telah ku kunjungi di tahun 1964, agar dapat mengukur keadaan-keadaan sesungguhnya dalam perspektif sejarahnya.

Kesan umum ku pada tahun 1964 ialah bahwa situasi pangan secara menyeluruh, sesudah tahun-tahun bencana 1960-61, telah dipulihkan, secara substansial, pada tingkat sebelum 'Lompatan Jauh Ke Depan,' sebagaimana yang dapat kami pantau pada tahun 1957. Di dunia Barat, dan bahkan di Moskow (di mana, sebentar sebelum kunjungan ku ke Tiongkok aku menghadiri sebuah konferensi internasional yang besar mengenai antropologi), pada umumnya dianggap bahwa rakyat Tiongkok masih menderita kekurangan-kekurangan pangan secara gawat. Selama kunjungan aku mendapatkan bahwa kota-kota masih

memberlakukan suatu sistem distribusi dengan kartu-kartu jatah, untuk sereal, gula, produk-produk yang mengandung minyak dan katun. Tetapi jatah-jatah sereal cukup masuk akal – kira-kira 15 kg. Per bulan untuk setiap orang dewasa. Aku juga tidak melihat, di daerah pedesaan, tanda-tanda adanya kekurangan pangan.

Rene Dumont, dengan pengalaman serupa enam bulan sebelumnya, menerbitkan sebuah buku, *La Chine surpeuple – Thiers Monde affame* (Tiongkok yang berkepadatan Penduduk – Dunia Ketiga yang Kelaparan) (Dumont 1965) – sebuah judul yang jelas mengungkapkan pandangannya mengenai perbedaan mendasar antara problem-problem Tiongkok dan problem-problem Asia Selatan (yang dikenalnya dengan sangat).

Pemerintah Tiongkok kini telah mengembangkan suatu strategi ekonomi baru, jauh lebih berhati-hati ketimbang yang dicoba selama Lompatan Jauh Ke Depan. Strategi baru ini, sebagaimana yang dikembangkan pada awal tahun-tahun 1960-an, yang bertujuan menyelesaikan problem-problem pedesaan, ialah yang aku namakan model-Mao sejati. Perumusan resminya telah menjadi: “Agrikultur sebagai landasan, dan industri sebagai faktor memimpin.”

Kini secara tegas telah ditinggalkan model Sovyet, dengan tekanan yang kuat pada industri perkotaan yang menyerap kelebihan penduduk pedesaan yang telah timbul sebagai hasil mekanisasi agricultural – suatu strategi yang di Uni Sovyet terbukti efektif. Di Tiongkok, di pihak lain, penambahan penduduk di daerah pedesaan akan, untuk sementara waktu, jauh melebihi permintaan akan tenaga manusia oleh suatu industri yang bertumbuh. Kepadatan penduduk yang luar-biasa tingginya di daerah-daerah persawaan padi yang beririgasi telah menjadikan model Sovyet sangat tidak cocok bagi bagian-bagian Tiongkok Tengah dan Selatan ini. Karenanya, di Tiongkok dari tahun 1950 dan seterusnya, banyak tekanan diletakkan pada investasi *dalam kerja* untuk pembangunan dam-dam dan saluran-saluran yang dimaksudkan untuk irigasi atau untuk pencegahan banjir dan pengeringan (pembuangan). Penekanan pada investasi dalam kerja untuk skema-skema hidrolis ini ialah, seperti sudah kita catat, bersifat mendasar bagi ‘Lompatan Jauh Ke Depan.’

Problem utama, keharusan memberi makan pada suatu jumlah mulut yang terus bertambah, adalah yang mendominasi strategi pedesaan Tiongkok.

Tahun-tahun awal 1960-an menyaksikan perkembangan suatu strategi yang tekanan utamanya diletakkan pada pengerjaan penuh, dalam pengertian penggunaan sepenuhnya dari tenaga kerja manusia yang tersedia. Dalam konteks ini kita mesti terutama berpikir tentang kerja fisik, dalam bentuknya yang paling primitif, dengan sendiri meliputi tenaga kerja wanita. Penggunaan tenaga kerja secara sepenuhnya ini merupakan salah-satu sasaran utama dari komune-komune rakyat. Ketika aku mengunjungi Tionghoa di tahun 1964, sub-pembagian komune-komune rakyat ke dalam brigade-brigade (dengan jumlah ratusan orang) dan tim-tim produksi (dengan sejumlah banyak keluarga) telah memperoleh bentuknya yang pasti. Unit-unit terkecil, tim-tim produksi, yang kebanyakan berpusat dalam satu daerah pemukiman di mana orang-orangnya saling mengenal satu sama lain cukup baik, bertanggung jawab atas pekerjaan pertanian tertentu.

Pada periode pasca-Mao sekarang, acapkali dinyatakan bahwa, pada masa komune-komune rakyat, perekonomian Tiongkok menderitakan egalitarianisme paksaan – semua orang dapat ‘makan dari mangkuk yang sama,’ tanpa menghiraukan bagiannya dalam pekerjaan yang mesti dilakukan. Ini suatu salah-penyajian yang besar mengenai sistem pengupahan dalam periode menyusul kolektivisasi pedesaan itu. Kaum komunis Tiongkok tidak pernah menjadi yang disebut ‘Pemerata-pemerata.’ Sistem pengupahan selalu tetap sosialis dalam pengertian Marxis: “Dari setiap orang menurut kemampuannya, kepada setiap orang menurut kebutuhannya.” Namun begitu, pada tahun 1958, penciptaan komune-komune rakyat memang mengesankan suatu langkah baru yang jauh ke arah egalitarianisme. Pada waktu itu, komune-komune rakyat merupakan unit-unit besar, kurang-lebih sama dan sebangun dari unit administratif sebelumnya yang paling rendah, yaitu *xiang* (sub-distrik). Semula komune-komune rakyat ini dipandang sebagai fokus-fokus kehidupan sosial dan ekonomi masa mendatang. Kepemilikan tanah telah dialihkan dari koperasi sosialis pada komune rakyat. Di banyak komune sistem pengupahan telah berubah dari sistem yang berdasarkan

perhitungan poin-poin kerja menjadi upah-upah tetap. Lebih radikal lagi ialah diberlakukannya, di banyak komune, suatu sistem distribusi makanan bebas dengan pelayanan kantin-kantin.

David dan Isabel Crook, dalam *The First Years of Yangyi Commune* (1966), melukiskan bagaimana, khususnya sistem perhitungan upah menurut kategori pekerjaan yang dilakukan tanpa perbedaan-perbedaan di antara brigade-brigade, telah melahirkan kontradiksi-kontradiksi antara brigade-brigade yang *lebih miskin* dan yang *lebih berada* – yaitu, antara brigade-brigade yang menempati tanah dengan tingkat-tingkat kesuburan yang berbeda-beda. Pada dasarnya, sistem itu memang menyangkut suatu *perataan* tingkat-tingkat upah, karena ia “berarti menaikkan upah secara otomatis di brigade-brigade miskin dan menurunkan upah itu di brigade-brigade yang lebih baik keadaannya.”⁵

Akibatnya, bagi kedua tipe brigade itu, ialah suatu rangsangan (insentif) yang lemah untuk bekerja keras, yang membawa pada pelambanan dalam produksi. Para anggota dari brigade-brigade yang lebih berada itu menyayangkan penurunan ke tingkat brigade-brigade yang lebih miskin, sedangkan para anggota yang tersebut belakangan cenderung untuk bergantung, secara serba-benalu, pada usaha-usaha yang tersebut duluan.

Segera disadari bahwa terjunan ke dalam sebuah sistem pangan bebas, dengan konotasinya mengenai suatu peralihan ke arah sistem ‘komunis *ke pada setiap orang menurut kebutuhannya*,’ adalah sesuatu yang terlalu awal (*premature*). *Perataan* upah-upah dan *pengalihan kepemilikan pada komune* juga dikritik: “Angin komunisme telah bertiup terlalu kencang” dan mesti diredakan.

Dalam waktu tidak terlalu lama komune-komune rakyat itu mendapatkan bentuk finalnya. Ukurannya dikurangi, dan kepemilikan dalam kebanyakan kasus diletakkan pada brigade, yang menjadi *unit penanggung-jawab* utama, ukurannya sangat bertepatan dengan sebuah desa dan sekitarnya. Pemberian pangan cuma-cuma dan pelayanan-pelayanan lainnya sangat dikurangi dan tekanan kembali diberikan pada azas *sosialis*: “ke pada setiap orang menurut pekerjaannya.”

Tetapi modifikasi yang paling penting ialah diberlakukannya kembali

poin-poin kerja sebagai kaidah utama untuk menetapkan upah harian seorang anggota komune. Ternyata terdapat banyak variasi dalam nilai suatu hari-kerja (sepuluh poin-kerja). Di bawah rejim baru hal ini mesti ditentukan, terutama, oleh nilai moneter produksi total sebuah brigade, suatu persentase dari padanya ditandai/ditetapkan untuk distribusi di antara para anggota, menurut jumlah poin-poin kerja yang menjadi pendapatan masing-masing anggota itu. Azas yang paling menentukan ialah brigade-brigade kaya dan miskin mesti didorong agar sepenuhnya mengeksploitasi sumber-sumber daya-alam dan daya-manusianya.

Sistem perhitungan ini, yang sudah dapat menghasilkan berbagai standar kehidupan di dalam sebuah komune saja, menjadi faktor utama yang menentukan berbagai tingkat pendapatan di pedesaan Tiongkok, yang menjadi tampak sekali jika diingat keaneka-ragaman yang luar biasa dari kondisi-kondisi klimatik dan alam geografik dalam sebuah negeri besar seperti Tiongkok. Sistem pengupahan kerja agrikultur ini mengharuskan penerimaan, untuk suatu masa yang panjang, berbagai keragaman yang mencolok dalam standar-standar kehidupan.

Ketika aku mengunjungi Tiongkok di tahun 1964, untuk kedua kalinya, sistem seperti yang dilukiskan di atas telah kokoh dan mantap. Suatu perubahan yang penting ialah bahwa tidak lagi brigade, tetapi tim produksi yang kecil, yang berfungsi sebagai unit-dasar untuk memperhitungkan bagian pendapatan setiap individu. Perbedaan-perbedaan pendapatan, yang sehubungan dengan kondisi-kondisi eksternal –seperti kualitas tanah– dengan demikian bahkan dapat timbul di dalam sebuah brigade. Brigade melakukan pengawasan atas pekerjaan tim-tim produksi, sedangkan komune rakyat tetap merupakan otoritas lokal tertinggi, dengan kekuasaan mendistribusikan pelaksanaan pekerjaan di antara berbagai anak-bagian anak-bagian.

Di daerah-daerah sawah-basah sasaran utamanya ialah penggunaan tenaga kerja agrikultur secara seintensif mungkin. Sesungguhnya, inilah yang justru merupakan metode yang sama yang di masa lalu, dipraktekkan, di Tiongkok maupun di Jawa: berpanen tiga kali yang dulunya hanya dua kali, dan dua tanaman yang dulunya hanya satu tanaman. Bagaimanapun, pengorganisasian dalam dua unit kolektif

sangat meningkatkan kinerja karena metode-metode kultivasi secara lebih ilmiah.

Suatu batas tertentu mekanisasi terbukti berguna dalam keadaan-keadaan Tiongkok, sekalipun tidak dalam skala yang begitu besar hingga menimbulkan problem-problem pengangguran yang serius. Di lain pihak, mekanisasi sebagian dapat, dalam kondisi-kondisi yang tepat, menciptakan suatu permintaan tambahan akan tenaga manusia, dan bukannya menguranginya. Jika, misalnya saja, pemanenan dapat dipercepat dengan menggunakan sebuah kombine, dan sebuah traktor dipakai untuk menyiapkan tanah bagi tanaman padi kedua, maka peningkatan dalam jumlah tanaman yang dipanen dalam setahun dapatlah sangat meningkatkan permintaan total akan tenaga kerja fisik agrikultur. Penggunaan tutup-tutup plastik untuk benih-benih padi dapat melayani tujuan serupa. Dalam hal ini, kenyataan bahwa benih-benih tumbuh lebih dini di waktu musim semi memungkinkan pemindahannya ke ladang-ladang (sawah) jauh lebih dini ketimbang yang dilakukan di masa lalu, dan memungkinkan pula tanaman dipanen pada waktunya untuk memungkinkan daur kultivasi kedua di kemudian hari tahun yang sama itu. Pada tahun 1957 isteri ku dan aku, di stasiun Shenzen, sesaat sebelum menyeberangi perbatasan untuk kembali ke Hongkong dengan menumpang kereta api, bertanya pada penerjemah kami yang seorang wanita itu, bagaimana caranya kita untuk membedakan para penumpang dari Hongkong dari mereka yang meninggalkan Tiongkok untuk mengunjungi keluarga-keluarga mereka di Hongkong. 'Ya,' jawab penerjemah itu, 'itu mudah sekali: mereka yang datang dari Hongkong membawa tas-tas plastik!' Tetapi menjelang tahun 1964, Tiongkok telah membangun sebuah industri plastik!

Sebuah inovasi penting lainnya ialah diperkenalkannya pompa-pompa listrik irigasi dalam berbagai ukuran – lagi-lagi suatu jenis mekanisasi sebagian yang memungkinkan kolektif-kolektif pedesaan meningkatkan/mempercepat kegiatan-kegiatan tertentu, dan dengan demikian memberikan waktu bagi suatu panen tambahan dalam setahun. Pada tahun 1957 telah kami lihat, di propinsi Guangdong, kaum wanita maupun pria bekerja dengan jantera-jantera injak (norias) untuk pengirigasian ladang-ladang. Di tahun 1964 saya menjelajahi berbagai

bagian propinsi itu, namun nyaris tidak melihat sebuah jantera-injak. Suatu prasyarat bagi jenis mekanisasi sebagian ini ialah dibangunnya sebuah jaringan listrik raksasa di dataran-dataran Tiongkok-Tengah dan -Selatan. Keberhasilan penting ini sudah dimulai pada waktu 'Lompatan Jauh Ke Depan,' yang oleh karenanya tampak tidak begitu negatif sebagaimana yang umumnya dianggap di Barat. Mekanisasi parsial memerlukan segala jenis pabrik industri baru – tidak dalam bentuk tungku-tungku tinggi untuk peleburan besi, tetapi untuk merancang perkakas-perkakas untuk tujuan-tujuan agrikultur. Inilah yang dimaksudkan oleh slogan Mao: "Agrikultur sebagai basis ekonomi, dan industri sebagai suatu faktor memimpin!"

Di Liangjiafan, sebuah komune di distrik Macheng propinsi Hubei, aku menyaksikan suatu tanaman kedua menguning pada akhir Agustus, kira-kira 150 kilometer di sebelah utara sungai Yangtse. Ketua komune itu, pada masa sebelum revolusi, seorang pekerja tak-bertanah; pada akhir tahun-tahun 1950-an ia mengalami perlawanan kuat sekali dari pihak para petani tua ketika ia memulai eksperimen-eksperimen ilmiahnya. Ketika aku kembali ke Moskow, para ahli Tiongkok yang aku jumpai tidak dapat membayangkan bahwa aku benar-benar telah menyaksikan suatu panen padi kedua di wilayah jauh di utara sungai Yangtse!

Dalam perjalanan ke Liangjiafan aku mengunjungi komune Liuji, di distrik Xinshou, yang berspesialisasi dalam penanaman kapas. Di seluruh komune itu tiada laki-laki dan perempuan muda yang di rumah. Semua orang sibuk mengambil dan memompa air, karena selama dua bulan tidak turun hujan. Dalam perjalanan dari kota Wuhan menuju distrik Xinzhou kendaraan sering harus berhenti untuk memasang papan-papan di atas galian-galian yang baru saja dibuat untuk penyaluran air guna mengatasi/meringankan kekeringan yang luar biasa yang menimpa seluruh distrik itu. Jelas sekali bahwa irigasi jauh lebih penting ketimbang transportasi motor! Para anggota komune Liuji juga menggunakan sebuah traktor yang membantu pemompaan air dari sebuah galian. Lagi pula, mereka mengharapkan suatu panen kapas yang berhasil, sekalipun kekeringan itu berlangsung hingga sebulan lagi.

Model ekonomi baru yang dikembangkan oleh orang Tionghoa guna

mengatasi penyakit kelebihan penduduk dapat dipandang, secara agak paradoksal, sebagai suatu bentuk pengobatan homeopatik, karena ia membuat, sesungguhnya, daerah-daerah yang sudah berpenduduk padat dan sudah menjalankan kultivasi intensif, yang dipilih bagi agrikultur yang lebih intensif berdasarkan mekanisasi sebagian dan inovasi-inovasi teknologis lainnya. Tenaga kerja manusia tambahan yang diperlukan bagi peningkatan dari tahun ke tahun dalam jumlah tanaman yang dipanen akan memungkinkan daerah-daerah seperti itu menyerap lebih banyak rakyat lagi, baik itu melalui peningkatan alamiah ataupun penataan kembali.

Pada awal tahun-tahun 60-an, model baru itu dikembangkan berdasarkan akumulasi inovasi-inovasi teknis secara kecil-kecilan, yang diuji pada tingkat lokal. Model itu juga menuntut kerja keras dan kesederhanaan sebagai suatu gaya hidup. Investasi untuk bagian besar diserahkan pada inisiatif lokal, pada tingkat komune-komune rakyat atau unit-unit peringkat lebih rendah, yang dibiarkan bebas memilih dalam menentukan cara mereka menginvestasikan simpanan-simpanan kolektif masing-masing, agar dimungkinkan proyek-proyek penting dilaksanakan sesuai kondisi-kondisi setempat. Strategi ekonomi Tiongkok masih dipimpin oleh azas Mao: "Berjalan di atas dua kaki."

Pengendalian kelahiran juga mulai mendapatkan dukungan resmi. Namun motivasi yang mendorong kebijakan ini bukanlah 'surplus kependudukan', yang masih dianggap suatu gagasan neo-Malthusian yang berlawanan dengan pikiran Marxis. Profesor Ma Yin-chu kehilangan pekerjaannya sebagai Rektor Universitas Beijing, dan dikirim ke pedesaan 'untuk belajar dari kaum tani!' Alasan bagi perencanaan keluarga ialah bahwa itu akan mendorong keluarga-keluarga sehat di mana kaum perempuan akan dapat bekerja bagi kebaikan kolektif tanpa diganggu oleh terlalu banyak anak yang masih kecil-kecil. Untuk tujuan itulah penangguhan-penangguhan perkawinan dan penjarakkan antara kelahiran-kelahiran di anjurkan.

Model pembangunan Tiongkok seperti yang dilukiskan di atas, dapat dipandang sebagai suatu manfaat sementara, yang dirancang untuk menyelamatkan produksi bahan makanan. Bersamaan dengan itu ia dapat

menciptakan suatu landasan bagi pembangunan industrialisasi lebih lanjut—yaitu, dengan industri sebagai *faktor memimpin*. Inovasi-inovasi yang dijalankan memungkinkan penganeka-ragaman lebih lanjut perekonomian pedesaan: pengembangan industri-industri setempat, termasuk bengkel-bengkel; segala macam pohon ditanam dan dipelihara. Sistem sekolahan diperbaiki dan diperluas, dan pusat-pusat kesehatan pedesaan diciptakan. Sebagai hasilnya, perpindahan kaum tani yang telah jatuh miskin ke kota-kota, yang merupakan bencana bagi nyaris semua negeri Dunia Ketiga, telah dihambat.

Selama seluruh periode di mana model pembangunan Tiongkok itu diterapkan, *garis massa* Mao dipertahankan/dipatuhi. Pada dasarnya ini adalah disyaratkannya persetujuan rakyat bagi diberlakukannya semua tindakan-tindakan baru, atau dengan kata-kata lain, suatu kebijakan yang menjauhi pemaksaan. Sekali di dalam prakteknya prinsip ini acapkali tidak dihiraukan, namun garis massa senantiasa ditentukan sebagai salah-satu kaidah, yang menentukan bahwa langgam-kerja seorang kader atau seorang dari pimpinan sebuah unit kolektif haruslah selalu dinilai.

Hasil kunjungan ku ke sepuluh komune rakyat telah aku kumpulkan angka-angka di atas (Tabel 1).

Tabel 1 - Peningkatan produksi agrikultur sejak 1957

No.	Wilayah Komune	Tanaman Utama	Hasil: Kg/Ha		
			1957	1963	1964
1	Beijing	Gandum	1.900	-	2.000
		Jagung	-	3.000	-
		Beras	-	4.500	-
2	Beijing	Sayuran segar	60.000	80.000	-
3	Shanghai	Sayuran segar	45.000	76.000	-
4	Shanghai	Gandum	1.200	-	2.700
		Beras	4.000	6.000	-

		Kapas (murni)	310	660	-
		Kolza	750	-	1.575
5	Hangzhou	Beras	4.500	6.800	-
6	Guangzhou	Beras	4.700	8.600	-
7	Guangdong Utara	Beras	3.400	7.300	-
		Kacang	720	1.500	2.000
8	Guangdong Selatan	Beras	-	7.200	-
9	Hubei-Utara	Beras	3.900	7.650	-
10	Hubei-Utara	Beras	-	7.500	-
		Kapas (murni)	-	750	-

(Beras selalu dihitung sebagai padi, kurang lebih 2/3 dari beratnya ialah yang untuk konsumsi sebagai beras lepas-kulit.)

Sekembali ku di Beijing pada akhir kunjungan ke daerah pedesaan Republik Rakyat Tiongkok itu, saya dapat menjumpai Tn. Tan Zhenlin, pemimpin politik yang bertanggung jawab atas urusan-urusan agrikultur. Kepadanya aku ajukan pertanyaan berikut, yang masih menghantui ku walaupun kesan-kesan yang umumnya positif yang aku dapatkan dari kunjungan ke komune-komune rakyat di seluruh Tiongkok:

Selama kunjungan aku ke negeri anda, kepada ku selalu ditekankan, bahwa komune-komune rakyat yang telah aku kunjungi itu kurang-lebih mewakili keadaan umumnya; anda juga menerangkan pada ku bahwa angka-angka hasil dan produksi yang aku terima di komune-komune itu dapat dipercaya.

Namun, terdapat suatu pernyataan yang sulit disesuaikan dengan data ini. Pada awal tahun ini, wartawan Amerika, Edgar Snow mengumumkan sebuah wawancara, yang dilangsungkannya dengan Tn. Zhou Enlai pada kesempatan sebuah kunjungan ke Conakry (Guinee). "Perdana Menteri Anda ketika itu mengatakan bahwa produksi total padi-padian untuk tahun 1963 berjumlah sekitar 190 juta ton. Bagaimana dapat aku cocokkan angka ini dengan angka-angka resmi bagi produksi padi-padian di tahun 1957, yang dicatat mencapai jumlah 185 juta ton? Komune-komune yang baru

aku kunjung secara teratur mencatat peningkatan-peningkatan berarti pada tahun-tahun sejak 1957. Kedua angka yang baru aku sebutkan itu menyiratkan suatu peningkatan total yang sangat kecil dalam produksi sejak tahun 1957, sedangkan dalam enam tahun yang telah berlalu sejak itu (beberapa di antaranya dicatat sebagai tahun-tahun 'bencana'), jumlah penduduk telah naik dengan sangat berarti. Tidakkah mesti aku simpulkan bahwa angka-total resmi untuk tahun 1957 itu adalah terlalu tinggi sekali, atau bahwa angka yang disebut oleh Tuan Zhou Enlai untuk tahun 1963 itu adalah terlalu rendah sekali?"

Jawaban Tan Shenlin adalah sebagai berikut: "Saya tidak berwenang memberikan kepada anda angka-angka yang belum diumumkan. Angka tahun 1957 adalah realistik, tetapi angka-angka yang diumumkan untuk tahun-tahun berikutnya terlalu dilebih-lebihkan. Namun, kami telah membetulkan itu.

Pengumuman yang terlalu-dini telah membuat kami lebih berhati-hati dalam pengumuman-pengumuman resmi kami. Kami kini berkecenderungan untuk lebih menghitung angka-angka panen di bawah yang sebenarnya daripada melebih-lebihkannya. Kami lebih suka mengumumkan angka-angka yang terlalu rendah, lima atau sepuluh persen di bawah produksi sesungguhnya. Salah satu alasan untuk berbuat begitu ialah bahwa ketika rakyat memperoleh kesan segala sesuatunya berjalan baik, mereka cenderung melonggarkan daya upaya mereka. Inilah yang kami alami di tahun 1958, dan kami bermaksud mencegah hal itu di masa depan". Tan Zhenlin juga dengan tegas menyangkal bahwa panen padi-padian pernah jatuh kembali ke 160 juta ton, sebagaimana umumnya diperkirakan oleh para 'pengamat-Tiongkok' di Barat.⁶

Dari Tan Zhenlin aku mendapat kesan bahwa ia ingin menyiratkan bahwa panen sesungguhnya di tahun 1963 jelas lebih tinggi daripada angka yang disebutkan Zhou Enlai, yang, ketika berbicara dengan Edgar Snow pada bulan Januari tahun 1964, tidak mungkin mengetahui angka-angka finalnya, yang hanya akan tersedia pada akhir tahun itu.

Dengan menerima pernyataan Zhou Enlai yang dibuat pada wawancara itu, bahwa sejak tahun bencana 1961 peningkatan tahunan dalam produksi padi-padian adalah lebih dari 10 juta ton, aku sampai – sebagai suatu perkiraan untuk tahun 1964– pada angka di atas 200 juta ton, barangkali dengan lebih dari 10 persen. Ini akan lebih daripada cukup untuk mengimbangi peningkatan wajar jumlah penduduk sejak tahun 1957 dan seterusnya. Menyusul publikasi di tahun 1965 (dalam berkala *Population* khusus ilmiah dalam bahasa Perancis) sebuah laporan

mengenai yang aku alami selama kunjungan ke Tiongkok di tahun 1964 itu, termasuk percakapan ku dengan Tan Zhenlin, sejumlah ahli ekonomi, yang mendasarkan diri pada para ‘pengamat Tiongkok’ di Amerika Serikat atau Hongkong, menyebut perkiraan ku untuk tahun 1964 itu –mengenai hasil total yang di atas 200 juta ton– suatu spekulasi ‘*karangan di awan-awang*’, tanpa menyadari bahwa angka-angka mereka mereka sendiri tidak lebih daripada ‘spekulasi-spekulasi yang direka-reka dari awang-awang’!⁷

Pada tahun-tahun berikutnya, perkiraan saya sangat diperkuat oleh angka-angka yang diumumkan selama tahun-tahun 1960-an dan awal tahun-tahun 1970-an. Para ‘pengamat Tiongkok’ berkukuh bahwa, sebagai akibat Revolusi Kebudayaan tahun 1966 dan tahun-tahun berikutnya, pertanian Tiongkok kembali menghadapi kesulitan-kesulitan luar-biasa. Mereka sama sekali mengabaikan sebuah pernyataan yang dibuat di tahun 1967 oleh wartawan Amerika Anna Louise Strong (yang sudah tinggal lama sekali di Tiongkok), bahwa, menurut para pejabat Tiongkok yang diajaknya berbicara, produksi padi-padian pada tahun itu telah mencapai 230 juta ton. Pada bulan April 1971, ketika Perdana Menteri Zhou Enlai dalam sebuah wawancara dengan Edgar Snow menyatakan, bahwa produksi padi-padian dalam tahun 1970 telah melebihi 240 juta ton, dan sebagai tambahan ada 40 juta ton disimpan dalam gudang-gudang negara, barulah pendapat umum di Barat menjadi yakin akan keadaan sesungguhnya mengenai agrikultur Tiongkok.

Sebagai akibatnya, pemerintah Amerika memutuskan untuk memandang serius Republik Rakyat Tiongkok dan menyelenggarakan hubungan-hubungan diplomatik yang wajar dengan pemerintahan Mao, bahkan dengan bea melepaskan kerajaan-bayangan Taiwan Chiang Kaishek.

Kunjungan Ketiga: 1970/71

Pada musim dingin tahun 1970-71, ketika aku untuk ketiga kalinya berkunjung ke Tiongkok (kali ini, kembali bersama isteri ku, Hetty), aku sampai pada kesimpulan bahwa pemimpin Tiongkok telah belajar dari Lompatan Jauh Ke Depan bahwa di bidang agrikultur inovasi-inovasi radikal sebaiknya dihindari. Aku mendapatkan bahwa, secara

keseluruhan, model-Mao yang aku lihat di tahun 19645 pada dasarnya masih berlaku. Namun, strategi pedesaan Tiongkok mempunyai satu kekurangan serius, yang ku perhatikan selama kunjungan ketiga ini. Tiada perencanaan untuk hari depan, dalam pengertian bahwa tidak seorangpun di waktu ini tampak peduli mengenai yang harus dilakukan sesegera mekanisasi pedesaan telah mencapai suatu taraf tertentu. Tiada seorangpun menyadari bahwa jika ini terjadi maka kelebihan tenaga (kerja) manusia di pedesaan akan menjadi suatu masalah serius. Pengeksploitasian secara lebih intensif atas tanah yang tersedia, yang di dalam tulisan ku dalam *Population* di tahun 1956 saya sebutkan sebagai *obat homeopatik*, ketika itu memang diperlukan untuk menjamin agar rakyat tidak akan kelaparan, dan untuk meletakkan suatu landasan bagi perkembangan ekonomi lebih lanjut. Namun ternyata tidak disadari bahwa tidak dapatlah secara terus-menerus ditingkatkan jumlah pekerja per *mou*, dan bahwa kita harus siap membuat suatu peralihan pada suatu tahap pembangunan kedua.

Setiap kali ku ungkap keprihatinanku, reaksinya biasanya ialah “Kebijakan akan datang bersama waktu.”

Seakan-akan para pemimpin beranggapan bahwa akan mungkin melanjutkan secara tiada terbatas intensifikasi agrikultur itu. Prakarsa-prakarsa untuk perubahan dalam strategi pedesaan, menurut sejumlah orang asing yang bermukim di sana, yang sudah hidup lama sekali di Tiongkok dan mempunyai hubungan baik sekali dengan para pemimpin—di antaranya Dr. Ma Hai-teh (George Hatem) yang termashur—haruslah datang dari massa pedesaan sesuai ‘garis massa’ Mao dan jangan dipaksakan dari atas! *Membuat Rencana untuk tahun 2000* memang bagus bagi orang Barat, yang tidak dapat memahami bagaimana sesungguhnya pembangunan di Tiongkok itu dilaksanakan, atas dasar prakarsa-prakarsa lokal yang diambil di waktu kebutuhan mendesak akan perubahan dirasakan pada tingkat ini.

Untuk selebihnya, kunjungan ketiga ini meyakinkan ku bahwa, sejauh yang mengenai strategi pedesaan, orang-orang Tiongkok masih menempuh suatu jalan yang rasional. Berbeda dengan negeri-negeri Asia lainnya seperti India, Pakistan dan Bangladesh, mereka tidak

mempertaruhkan segala-galanya pada satu inovasi agrikultur utama. Para politisi yang memimpin di negeri-negeri lain ini mengharapkan bahwa yang dinamakan *Revolusi Hijau*, yang didasarkan pada diperkenalkannya varitas-varitas beras atau tanaman padi-padian lainnya yang tinggi-hasilnya, akan menyelesaikan permasalahan pangan. Pemecahan ini di Barat dipandang sebagai suatu masalah yang semurni teknologis, tanpa pertimbangan apapun diberikan pada iklim sosial dan ekonomi umumnya atau pada hubungan-hubungan kekuasaan di mana varitas-varitas baru ini semestinya memainkan suatu peranan menentukan. Pada dasarnya, maksud sebenarnya di balik *Revolusi Hijau* (yang pada pokoknya didasarkan pada karya ilmiah Norman Borlaug dan para mitranya) ialah menjadikan *Revolusi Merah* tidak diperlukan lagi. Tujuan terselubung ini terbongkar ketika kepada Borland dianuhgrahkan Hadiah Nobel, bukan untuk bidang kimia atau ilmu alam lainnya, melainkan untuk pekerjaannya demi perdamaian!

Tiongkok tidak mengabaikan diperkenalkannya varitas-varitas baru yang berhasil-tinggi, tetapi pemecahan-pemecahan teknis tidak dicari dalam satu inovasi utama saja, melainkan dengan memperkenalkan ratusan perbaikan-perbaikan kecil. Ini dimulai pertama-tama di tingkat lokal, dan kemudian, tatkala hasil-hasil suatu eksperimen terbukti menjanjikan, sistem komunikasi yang bagus sekali di antara komune-komune rakyat atau distrik-distrik administratif menjamin bahwa perbaikan-perbaikan itu diterima pula oleh unit-unit kolektif lainnya – berbeda sekali dengan situasi pra-revolusioner, ketika para petani kaya sering cenderung merahasiakan inovasi-inovasi mereka yang berhasil. Revolusi sosialis telah memungkinkan suatu strategi yang didasarkan pada kerja-sama, gantinya kompetisi dan eksploitasi.

Baik Norman Borlaug dan A. Boerma yang pada waktu itu menjadi Direktur FAO, setelah mengunjungi Tiongkok pada awal tahun-tahun 1970-an, yakin bahwa negeri itu telah berhasil memecahkan masalah-masalah yang masih dengan sangat susah-payah digulati oleh negeri-negeri Dunia Ketiga lainnya. Seperti dikatakan Borlaug: “India jelas paling maju dalam penelitian agrikultur, tetapi Tiongkok bermil-mil di depan India di dalam penerapan pengetahuan yang diperoleh.”

Kunjungan ku ke Tiongkok di tahun 1970-71 memungkinkan aku memantau bukan saja kemajuan di bidang pertanian tradisional, melainkan juga, di sejumlah komune rakyat, kemajuan-kemajuan dalam pembangunan industri pedesaan, mekanisasi pertanian dan pemakaian pupuk-pupuk kimiawi. Justru kemajuan-kemajuan dalam penggunaan perlengkapan mekanis itu yang berulang-kali mendorong ku mempertanyakan masalah ancaman kelebihan-penduduk pedesaan, karena pertumbuhan industri masih kurang mencukupi untuk menyerap jumlah peningkatan pendudukan tahunan. Lagi pula, aku juga berpendapat bahwa prioritas yang diberikan –sejak Revolusi Kebudayaan– pada pertumbuhan produksi padi-padian secara kuantitatif, adalah agak dilebih-lebihkan. Alasan yang umumnya dikemukakan ialah kebutuhan akan keswa-sembadaan regional dalam hal padi-padian, khususnya dalam hubungan dengan ancaman meluasnya perang di Vietnam ke Tiongkok. Aku –khususnya– menyesalkan merosotnya perhatian resmi dalam hal penghutanan-kembali sebagai suatu aspek pengabaian tertentu terhadap daerah-daerah perbukitan yang kurang padat penduduknya –‘dataran-dataran tinggi yang tidak dimanfaatkan’ menurut Pierre Gourou– jika dibandingkan dengan perhatian yang diberikan pada daerah-daerah dataran-rendah yang sudah berpenduduk padat.

Terdapat lain-lain pengalaman selama kunjungan itu yang mencemaskan Hetty dan aku. Sikap kami bercadang terhadap meningkatnya pengaruh kaum militer di Tiongkok, teristimewa yang berkenaan dengan kedudukan terkemuka seseorang tipe Lin Biao yang tampak sekali kasar dan tidak-canggih, yang berulang-kali kami dengar dan saksikan di layar TV. Pada waktu itu kami tidak mengetahui bahwa kedudukan kekuasaannya sudah lewat puncaknya dan bahwa ia tak lama kemudian akan jatuh dari kekuasaan itu. Kami juga merasakan suasana kuat dari intoleransi, yang secara khusus dirasakan oleh Hetty, yang masih teringat sekali akan suasana kultural yang lebih bebas tahun 1957, yaitu tahun “100 bungah mekar bersama dan 100 aliran pikiran berlomba bersama.”

Pada dasarnya aku banyak memahami anti-elitisme Mao, yang merupakan batu-siku ‘Revolusi Besar Kebudayaan Proletar.’ Pada tahun 1964 aku sudah merasakan adanya suatu kecenderungan di antara sementara kader pada sikap-sikap yang dapat disebut tipikal *bourgeois*. Di

Uni Sovyet para *Nomenklatura*, kasta para pembesar tinggi partai dan pejabat pemerintah yang berhak-istimewa, telah berkembang cepat sekali sejak akhir Perang Dunia Kedua. Dalam buku mereka *Chinese Village, Socialist State*, Friedman dan mitra-penulisnya (Friedman 1991: 246ff.)

Berkali-kali menelanjangi favoritisme yang, –sudah di tahun-tahun 1950-an– mencirikan *Establismen (establishment)* Komunis; Aku percaya bahwa Mao mempunyai lebih daripada cukup alasan untuk memerangi kecenderungan-kecenderungan ini.

Pada tahun 1970-71 mustahil mendapatkan informasi sepenuhnya mengenai luasnya pengejaran dan kekerasan yang menyertai tahun-tahun awal Revolusi Kebudayaan. Tetapi ditempuhnya cara-cara nekad untuk mencapai pembongkaran selengkapnyanya terhadap sistem pendidikan memberikan alasan cukup bagi kecemasan luar-biasa. Caranya ratusan ribu pemuda perkotaan agar melupakan atau mengabaikan prospek apapun yang mungkin mereka miliki akan suatu karier intelektual, dan pasrah dibuang untuk jangka-jangka waktu tidak menentu ke daerah pedesaan, jauh dari keluarga mereka, pasti akan menimbulkan perlawanan kuat dari pihak-pihak yang di tahun-tahun sebelumnya telah mencapai suatu kedudukan sebagai suatu *elite* perkotaan.

Lompatan Jauh Ke Depan telah mengajarkan pada para pemimpin Tiongkok bahwa langkah gegabah apapun di bidang pertanian dapat mendatangkan bencana. Jelas mereka tidak menyadari bahwa perubahan-perubahan secara ngawur di bidang pendidikan dapat menjadi bencana serupa. Pada tahun 1976, setelah wafatnya Mao, kontra-revolusi suatu burjuasi-semu kota menjadi suatu kenyataan.

Suatu diskusi yang luas mengenai Revolusi Kebudayaan dapat dijumpai dalam Bab. VI buku ini, di mana aku mendiskusikan “Eksperimen anti-elitis Tiongkok dan Kegagalannya.”

Kunjungan Keempat: 1979

Pada tahun 1979 aku sekali lagi dapat mengunjungi Tiongkok, kali ini disponsori oleh UNRISD (UN Research Institute for Social Development) di Jenewa. Proyek itu dilaksanakan sebagai bagian sebuah pro-

gram UNRISD untuk mempelajari peranan keikutsertaan rakyat yang dilaksanakan dalam sejumlah proyek pembangunan masyarakat, baik yang bersifat pemerintah atau non-pemerintah. Kunjungan ku didasarkan pada sebuah usulan yang aku buat pada akhir tahun 1970-an sebagai seorang konsultan UNRISD, bertindak bersama dengan direktur Program Partisipasi-nya, yaitu ahli sosiologi Swiss, Matthias Stiefel.

Bagi ku secara pribadi, kunjungan yang dilakukan pada bulan September dan Oktober, 1979, sungguh tepat-waktu. Aku ingin sekali mempelajari perkembangan sesungguhnya di bidang pertanian, dan mengenai kebijakan-kebijakan kependudukan selama tahun-tahun 1970-an. Aku menyadari bahwa kematian Mao telah disusul berbagai pergantian-pergantian kebijakan. Namun begitu aku mengharapkan, bahwa aku masih dapat memperoleh informasi yang dapat diandalkan dengan mengunjungi kembali komune-komune rakyat yang ku ketahui dari kunjungan-kunjungan sebelumnya. Beberapa tahun kemudian, setelah slogan-slogan baru menyusup ke dalam masyarakat pedesaan Tiongkok secara sangat mendalam, penelitian-penelitian seperti itu ke masa lalu yang baru lewat akan menjadi jauh lebih sulit.

Dalam pengajuan permintaan ku untuk proyek penelitian UNRISD itu, aku mengungkapkan keinginan ku untuk disertai oleh Matthias Stiefel.

Bagi ku secara pribadi, kunjungan yang berlangsung dalam bulan September dan Oktober 1979 sungguh tepat-waktu. Aku sangat berkeinginan mengetahui perkembangan-perkembangan sesungguhnya selama tahun-tahun 1970-an. Aku menyadari bahwa kematian Mao telah disusul berbagai perubahan kebijakan. Namun begitu, aku berharap, bahwa aku masih dapat memperoleh bahan-bahan yang dapat diandalkan dengan mengunjungi kembali komune-komune rakyat yang aku ketahui dari kunjungan-kunjungan sebelumnya. Beberapa tahun kemudian, setelah slogan-slogan baru menyusup ke dalam masyarakat pedesaan Tiongkok secara lebih mendalam, penelitian ke dalam masa lalu yang baru berlalu seperti itu pasti akan jauh lebih sulit.

Dalam pengajuan permintaan ijin bagi proyek penelitian UNRISD itu, telah ku kemukakan keinginan ku agar dapat ditemani oleh Matthias

Stiefel. Namun, selama bagian pertama kunjungan ku di Tiongkok aku masih menghadapi kesulitan besar dalam meyakinkan para pembesar Tiongkok bahwa kehadiran Stiefel selama suatu jangka waktu hampir sebulan, yang akan dikhususkan untuk suatu penelitian yang mendalam mengenai bagian-bagian yang luas dari pedesaan Tiongkok, akan merupakan suatu sumbangan penting bagi penelitian ku.

Bagian pertama kunjungan ku itu, yang terdiri atas tiga minggu di bulan September, ketika aku ditemani isteri ku dan puteri tertua kami, dapat digunakan tidak hanya bagi suatu orientasi umum, tetapi juga untuk mengunjungi sejumlah komune rakyat yang lebih berdekatan dengan kota-kota, yang sudah ku kenal dari kunjungan-kunjungan ku sebelumnya. Kemudian aku dapat, bersama Stiefel, mengabdikan bulan Oktober untuk mengunjungi, setiap kalinya untuk jangka waktu seminggu, komune-komune rakyat yang jauh dari pusat-pusat perkotaan, yang di antaranya hanya dua buah yang sudah ku kenal (sebagai hasil kunjungan saya di tahun 1946). Sebuah laporan yang panjang-lebar mengenai misi kami di Tiongkok, yang ditulis oleh Stiefel dan aku sendiri, telah diumumkan di awal tahun-tahun 1980-an dengan judul *Production, Equality and Participation in Rural China* (Stiefel 1983).

Wawancara-wawancara dengan kader-kader lokal maupun kaum tani biasa, memberikan data penting dan bahan statistik yang menyangkut tahun-tahun yang baru lalu. Stiefel bahkan diperkenankan memfoto dokumen-dokumen resmi setempat; seluruh suasana itu jelas-jelas lebih terbuka daripada selama kunjungan-kunjungan ku sebelumnya. Terdapat perbedaan mencolok dalam cara para pejabat yang menyertai kami dari Beijing atau kader-kader propinsi mengemukakan perkembangan-perkembangan pedesaan, dan jawaban-jawaban yang kami peroleh dari kepemimpinan lokal unit-unit kolektif, yang beberapa di antaranya sudah aku kenal pada waktu kunjungan-kunjungan ku sebelumnya.

Di Beijing, Revolusi Kebudayaan, yang segi-segi terburuknya dijulukkan pada *Kelompok Empat*, yang dipimpin isteri Mao, Jiang Qing, dilukiskan secara sangat suram sekali. Secara resmi, pada ewaktu kunjungan kami itu, pengaruh-pengaruh Revolusi Kebudayaan masih dipelajari. Hasil penelitian-penelitian itu, namun, sudah teramat jelas sekali: 'sepuluh

tahun yang hilang,' 1967-1976, akan dinilai dalam istilah-istilah yang sepenuhnya negatif. Deng Xiaoping, yang berangsur-angsur naik ke suatu kedudukan berkuasa, bahkan lebih tegas lagi: ia berbicara tentang 'duapuluh tahun yang hilang,' dengan jelas-jelas bermaksud menunjukkan bahwa sejak 'Lompatan Jauh ke Depan' tahun 1958 dan pembentukan komune-komune *rakyat* hingga wafatnya Mao di tahun 1967, tiada sesuatupun yang positif yang telah dicapai.

Dalam sebuah percakapan dengan Tan Zhenlin (yang setelah dikritik keras sekali di akhir tahun-tahun 1960-an telah direhabilitasi di tahun-tahun 1970-an, dan kembali menduduki suatu jabatan bertanggung-jawab), kami kembali mendiskusikan perkembangan-perkembangan ekonomis di sektor agraria. Ia berbicara tentang 'stagnasi' ekonomi total selama Revolusi Kebudayaan. Ia terpaksa mengakui bahwa peningkatan dalam produksi pertanian selama tahun-tahun itu secara rata-rata mencapai sekurang-kurangnya 3,4% per tahun! Dalam pandangannya, angka ini mesti bisa jauh lebih tinggi, tetapi aku berusaha menjelaskan bahwa dibandingkan dengan negeri-negeri Dunia Ketiga lainnya, itu adalah suatu hasil yang luar biasa dan bukan sesuatu untuk membuat orang berkecil hati! Para ahli mengenai pertanian Dunia Ketiga sependapat dengan ku: Peter Nolan dan Gordon White menulis dalam sebuah "China Special" dari *Bulletin of Concerned Asian Scholars* (1981): "Hanya dengan mengimbangi suatu pertumbuhan kependudukan sebesar 2% atau lebih sudah merupakan hasil penting sekali di sektor pertanian negeri manapun" (Nolan 1981:2 ff.).

Patut sekali diperhatikan, bahwa komune-komune rakyat yang kami pelajari memberikan suatu gambaran yang jauh lebih seimbang ketimbang yang menjadi pegangan resmi di Beijing dan kota-kota besar lainnya. Di satu pihak kami diberitahu mengenai situasi anarkis di sejumlah masyarakat pedesaan, terutama di tahun-tahun 1968-69, ketika para pemimpin komune-komune rakyat atau unit-unit kolektif rendah dikritik atau bahkan dicopot dari jabatan mereka oleh kaum 'revolusioner' muda yang radikal, misalnya karena terlalu memikirkan angka-angka produksi dan tidak cukup memperhatikan politik. Kebanyakan dari kader-kader yang kehilangan jabatan mereka di kemudian hari didudukkan

kembali sebagai anggota-anggota 'Komite Revolusioner.' Di wilayah-wilayah tertentu, kemunduran-kemunduran sementara seperti itu juga terjadi sesudah tahun 1970. Kecenderungan pemerintah untuk mengurangi bantuan negara pada komune-komune rakyat, dengan demikian menyerahkan perkembangan pada prakarsa-prakarsa lokal demi untuk mendorong 'bersandar pada kekuatan-kekuatan sendiri' (mengikuti contoh komune Dazhai yang termashur di bagian Utara Tiongkok), juga mengakibat kasus-kasus kemunduran.

Namun secara keseluruhan, pembangunan pedesaan masih berjalan menurut model-Mao awal tahun-tahun 1960-an. Kami disentak oleh kenyataan bahwa ketika menanyakan dalam periode mana sebuah komune atau brigade telah melakukan suatu prakarsa penting, maka jawabannya berulang kali ialah bahwa itu dilakukan *di dalam* periode sepuluh tahun yang dikatakan telah hilang itu. Di berbagai tempat adalah justru pada tahun-tahun ketika *Kelompok Empat*, menurut para kader Beijing, berada di puncak kekuasaannya, telah dimulai pembangunan, atau setidaknya-tidaknya memperluas, saluran-saluran, dam-dam atau bangunan-bangunan konservasi air lainnya. Seperti itu pula dengan pembangunan (dengan bantuan luar negeri) pabrik-pabrik modern untuk produksi pupuk-pupuk kimiawi (urea). Demikian pula, prakarsa asli untuk membuka sebuah tambang batu-bara di pegunungan propinsi Sichuan, berasal dari tahun 1968/69 – dua tahun penuh anarki itu!

Mayoritas komune rakyat yang kami kunjungi di tahun 1979 itu memperlihatkan perkembangan yang bersinambungan, baik di bidang pertanian, dan dalam mekanisasi pertanian dan industri pedesaan. Kami menyaksikan bahwa kualitas pengelolaan lokal merupakan suatu faktor gawat. Kedua komune rakyat, Liangjiafan dan Liuji, yang di tahun 1964 telah ku kunjungi di propinsi Hubei (suatu wilayah di nmana kekurangan transportasi memustahilkan suatu kunjungan di musim dingin 1970-71) telah khususnya berhasil selama limabelas tahun ketidakhadiran ku. Di lain pihak, di Guangdong-Selatan, sebuah komune yang rada miskin ytang aku kunjungi di tahun 1964 masih juga terbelakang kdalam berbagai hal, mungkin sebagai akibat pengelolaan yang kurang efisien. Seorang anggota dari dewan distrik bahkan berusaha membujuk kami untuk tidak berkunjung ke komune itu, karena ada kemungkinan kami

mendapatkan kesan yang kurang menguntungkan mengenai seluruh distrik itu; namun aku berkeras untuk berkunjung, justru agar dapat membuat suatu perbandingan dengan pantauan-pantuan ku sebelumnya. Bahkan di komune yang kurang beruntung itu, Stiefel dan aku tidak dapat bersepakat dengan istilah ‘sepuluh tahun yang hilang’ itu. Misalnya, sementara sebuah dam yang telah kusaksikan di tahun 1964 telah runtuh pada tahun-tahun berikutnya, bangunan-bangunan konservasi air yang sama sekali baru telah dibangun di tahun-tahun 1970-an.

Yang paling menarik perhatian kami pada tahun 1979 ialah cara pendekatan masalah-masalah kependudukan. Sudah diketahui bahwa kepemimpinan baru Tiongkok memberi tekanan kuat pada perencanaan keluarga, yang dipandang sebagai suatu komponen mendasar dari *Empat Modernisasi* – pertanian, industri, pertahanan dan teknologi ilmiah. Di Shanghai aku mengetahui dari para ahli sebuah *Lembaga Riset Demografis* yang baru dibentuk, bahwa sanksi-sanksi ekonomi yang berat diberlakukan untuk menjamin dipatuhinya ketentuan ‘keluarga-keluarga dengan satu anak’ – ditinggalkannya secara radikal politik Mao yang lebih menggunakan propaganda dan pendidikan rakyat ketimbang pemaksaan dalam mencapai sasaran-sasaran pemerintah.

Pada tahun 1964 di setiap komune yang ku kunjungi aku bertanya tentang statistik-statistik kelahiran dan kematian. Statistik-statistik itu tidak tersedia, dan para pemimpin komune-komune tampak tidak terlalu berminat mengenai perkara-perkara itu. Aku menyaksikan –ini sebagai lelucon– bahwa nyata sekali mereka menghitung apa yang dapat mereka hitung, tanaman, babi, unggas – namun manusia tidak, dan ini sekalipun adanya pernyataan-pernyataan Ketua Mao “bahwa segala sesuatu bergantung pada rakyat!” Sejak kala itu setiap komune yang dikunjungi memberikan statistik-statistik kelahiran dan kematian. Jelas sekali bahwa pada pemimpin telah diberitahu di muka bahwa “tamu asing yang aneh itu akan menanyakan statistik-statistik vital, karenanya pastikan agar anda mempunyai statistik-statistik itu.” Tetapi statistik-statistik itu agaknya tidak diurus oleh komune-komune, tetapi oleh pejabat-pejabat distrik, dan di tahun 1964 statistik-statistik yang diberikan seringkali sangat tidak menentu – suatu keadaan wajar di sebuah negeri kurang berkembang.

Karenanya adalah agak mengherankan untuk mendapatkan, dalam sebuah tulisan yang tampaknya berwenang oleh Basil Ashton dan rekan-rekan pengarangnya mengenai *Kelaparan di Tiongkok, 1958-61*, yang diterbitkan di tahun 1984, statistik-statistik vital dari tahun 1953 dan seterusnya, dalam hitungan-hitungan desimal, seakan-akan Tiongkok ketika itu sebuah negeri dengan statistik-statistik vital yang terekam dengan cermat, dan bukannya sebuah negeri kurang berkembang yang, lagi pula, baru saja melalui sebuah revolusi penuh kekerasan!⁸ Para pengarang itu mestinya mengikuti nasehat ahli demografi termashur Perancis, Alfred Sauvy, bahwa demografi Dunia Ketiga bergantung pada bahan-bahan yang dapat dibandingkan dengan yang tersedia bagi seorang ahli palaeontologi, yang, dari tulang-tulang kaki sebelah dan beberapa gigi, mesti merekonstruksi binatang atau makhluk manusia yang menjadi pemilik benda-benda itu.

Namun begitu, di tahun 1979 semakin besar perhatian kami pada statistik-statistik vital. Di wilayah-wilayah yang kami kunjungi, aku kemudian mendapatkan kesan bahwa, selama tahun-tahun 1970-an, laju kelahiran di pedesaan telah sangat menurun, terutama sebagai hasil propaganda dan pendidikan rakyat yang terutama diberikan oleh ‘dokter-dokter wanita yang bertelanjang kaki’ – suatu inovasi yang diperkenalkan dalam alur Revolusi Kebudayaan. Kesan ini diperkuat oleh sebuah publikasi dalam *People’s Health Press*, yang sebuah versi Inggrisnya belakangan muncul dalam *Chinese Sociology and Anthropology*.⁹

Di lain pihak aku gembira bahwa Tiongkok kini menyadari betapa pentingnya masalah kependudukan itu. Tidak hanya kepemimpinan nasional yang meyakini arti-pentingnya itu sebagaimana dibuktikan dengan sepenuhnya direhabilitasinya Profesor Ma Yinchu, yang, pada usia 98 telah dipanggil kembali ke Beijing dan diangkat menjadi Rektor Kehormatan Universitas Beijing! Bahkan di komune-komune rakyat kepadatan penduduk pedesaan yang luar biasa, yang diungkapkan dalam jumlah-jumlah orang per *mou*, seringkali disebutkan dalam arti negatif: para pemimpin lokal kini tidak lagi mengeluh mengenai ‘kurangnya tenaga kerja’.

Di Liangjiafan yang telah menjadi sebuah *sub-komune* yang setengah-

merdeka dari Baiguo (sebelumnya sebuah sub-distrik), kami mendengar lebih banyak lagi tentang bagaimana kelebihan-penduduk mempengaruhi strategi ekonomi. Peng Sihang yang, sebagai ketua komune Liangjiapan, telah mengisahkan kembali, di tahun 1964, pengalaman-pengalamannya dengan dua panen-beras setahun (suatu inovasi yang kini menjadi baku di seluruh distrik Macheng), bercerita kepada kami mengenai perkembangan-perkembangan lokal yang belum lama berselang.

Pada sekitar tahun 1970 agaknya tidak mungkin lagi menemukan pekerjaan yang sesuai bagi seluruh tenaga kerja yang tersedia. Sepanjang tahun-tahun 1960-an prioritas lebih utama ialah meningkatkan produksi pertanian per unit lahan, daripada peningkatan produksi *per kapita*; untuk mencapai ini oleh karenanya, mekanisasi merupakan suatu prasyarat pokok. Pada tahun-tahun 1970-an mekanisasi telah maju sedemikian rupa sehingga, dengan memperhatikan kepadatan penduduk setempat yang tinggi (lebih dari satu orang per *mou*, yaitu, 15 orang per hektar), pertanian tidak dapat lagi menyediakan pekerjaan untuk semua orang. Sebagai akibatnya, selama tahun-tahun 1970-an itu, terdapat tahun-tahun ketika beberapa ratus anggota komune meninggalkan komune dan pergi ke kota-kota –kebanyakan memilih Wuhan, ibukota propinsi Hubei–dengan harapan mendapatkan pekerjaan, dan ini pada waktu migrasi dari pedesaan ke pusat-pusat kota hanya diperkenankan dengan izin penguasa, yang hanya diberikan apabila pekerjaan di kota sudah dijamin (adanya).

Kepemimpinan komune terpaksa menyimpulkan, selama tahun-tahun 1970-an, bahwa tidak mungkin lagi suatu ekonomi pedesaan yang khususnya didasarkan pada pertanian. Karenanya mereka beralih pada industri lokal dan kegiatan-kegiatan sampingan lainnya, dan mendapati bahwa dana-dana investasi yang diperlukan hanyalah dapat dihasilkan sedikit demi sedikit, yang sudah dihasilkan, dalam produksi pertanian. Mujurnya, surplus yang tercipta dengan menjual kepada negara pertambahan dalam produksi padi-padian –hasil panen dua tanaman-padi setahun– tersedia untuk memenuhi modal yang diperlukan bagi perkembangan industrial.

Kami juga melihat bagaimana, dalam beberapa tahun yang lalu, banyak di antara mereka yang selama tahun-tahun 1970 telah meninggalkan Liangjiafan, telah kembali untuk mendapatkan manfaat dari lowong pekerjaan industrial yang tersedia di sub-komune baru itu. Kami dapat menyaksikan bahwa perempuan-perempuan muda juga menjalankan mesin-mesin.

Di lain pihak tindakan-tindakan keras yang dipakai untuk menjamin keluarga-keluarga beranak satu mesti dipandang sebagai suatu reaksi-berlebihan yang berbahaya. Apabila di tahun 1971 saya diberitahu bahwa perencanaan untuk tahun 2000 ialah hobi anak yang sesuai bagi orang-orang Barat, maka para ahli demografi Tiongkok kini sibuk menghitung proyeksi-proyeksi yang jauh menjangkau ke abad 21 – nyatanya di bawah pengaruh rekan-rekan Amerika atau Barat lainnya. Di kalangan para pemimpin Tiongkok, perhitungan-perhitungan agaknya menimbulkan prognosis-prognosis mengerikan bagi negeri itu. Kami bertanya pada diri kami sendiri apakah tindakan-tindakan keras-ketat seperti itu, kecuali efektivitasnya yang tak dapat disangkal, memang benar-benar perlu. Selama tahun-tahun 1970-an laju kelahiran di Tiongkok sudah turun pada tingkat-tingkat yang cukup moderat, jika dibandingkan dengan negeri-negeri pertanian besar Dunia Ketiga lainnya. Keberhasilan-keberhasilan yang mencolok ini telah dicapai dengan bantuan metode-metode Maois dalam pendidikan dan himbauan. Mengapa tidak meneruskan cara yang sama yang penuh keberhati-hatian namun sangat efektif itu? Dalam sebuah ceramah di Beijing setelah perjalanan kami ke wilayah-wilayah pedesaan Tiongkok, aku memperingatkan bahwa kebijakan-kebijakan pengendalian kelahiran Indira Gandhi yang drastik ternyata tidak – menurut ahli demografi Amerika, Profesor Notestein, berhasil menurunkan laju kelahiran India, melainkan menurunkan (menjatuhkan) pemerintahan Indira Gandhi!

Hanya setelah sekembali kami di Eropa aku mendengar betapa banyak perlawanan dari pihak rakyat Tiongkok telah dihadapi oleh kebijakan satu-anak itu. Suatu konsekuensi yang paling mengerikan ialah merajalelanya infantisida perempuan (pembunuhan anak-perempuan), yang disebabkan oleh tradisi lebih dikehendaknya anak-anak lelaki.

Pada awal tahun-tahun 1980-an telah menjadi jelas sekali bagi saya, bahwa kebijakan umum yang dijalankan oleh Partai Komunis Tiongkok, sekalipun masih mempertahankan nama aslinya dan masih bermanis-manis bibir pada 'pikiran Mao Zedong,' telah sepenuhnya meninggalkan model pembangunan Mao itu. Pukulan terakhir dilancarkan dengan dibubarkannya komune-komune rakyat, dengan digantikannya 'garis massa' Mao dengan sanksi-sanksi hukum sebagai cara menjamin persesuaian dengan tujuan-tujuan yang dikejar oleh kepemimpinan baru Partai. Dalam bab 7 strategi baru ini akan diuraikan lebih lanjut.

Pernyataan Deng Xiaoping bahwa 'memperkaya diri' adalah suatu hal terpuji berarti, dalam praktek sesungguhnya, bahwa kapitalisme sedang diundang untuk masuk lewat pintu depan.

Suatu sifat mencolok dari gaya pemerintahan Tiongkok tidak berubah. 'Komandoisme' yang dikaitkan oleh kepemimpinan baru itu pada *Kelompok Empat*, adalah pembawaan dalam gaya yang dilaksanakan oleh kepemimpinan baru itu. William Hinton dalam bukunya yang penting, *The Great Reversal* (yang membicarakan perkembangan-perkembangan sejak tahun-tahun 1980-an, khususnya di bidang pertanian) menunjukkan betapa pembubaran komune-komune rakyat sebenarnya dilaksanakan dengan komando pemerintah (Hinton 1991: 49).

Dewasa ini dunia Barat menyaksikan suatu ekonomi yang membumbung tinggi di Tiongkok. Aku tetap yakin bahwa, sejauh pandangan ini dibenarkan, adalah hasil-hasil Tiongkok selama periode 30-tahun yang telah saya pelajari secara menyeluruh dan mendalam yang meletakkan landasan bagi kemakmuran sekarang di beberapa bagian negeri itu.

Namun begitu, aku sangat menyangsikan, apakah kebijakan-kebijakan pedesaan yang dijalankan sejak pembubaran pertanian kolektif akan sungguh-sungguh menghasilkan kemajuan bersinambungan. Dalam bukunya, Hinton menunjukkan bagaimana pembagian lahan-lahan tanah luas, yang terbentuk lewat kolektivisasi, menjadi bidang-bidang tanah individual yang luasnya bagaikan potongan-potongan spaghetti dan yang dikerjakan menurut suatu sistem *tanggungjawab-keluarga*,

merupakan suatu lawan-rangsangan yang kuat terhadap mekanisasi pertanian (Hinton 1991: 15-17). Lebih gawat lagi, dalam periode setelah pembubaran komune-komune itu, ialah pengabaian terhadap bangunan-bangunan konservansi air. Anjuran Deng Xiaoping ‘memperkaya diri-sendiri’ mungkin juga telah mengakibatkan penebangan hutan-hutan untuk membangun rumah-rumah kayu di pedesaan – dengan erosi tanah yang serius sebagai akibatnya. Banjir-banjir besar pada tahun-tahun akhir-akhir ini mungkin untuk sebagian adalah akibat dekollektivisasi itu.

Kecenderungan-kecenderungan Dewasa ini di Dunia Ketiga

Masalah inti dalam bab ini ialah, apakah strategi pedesaan Mao seperti yang dilukiskan di atas, masih mempunyai prospek-prospek untuk dijadikan model bagi negeri-negeri Dunia Ketiga lainnya.

Pertama-tama, keberhasilan-keberhasilan dan kegagalan-kegagalan Tiongkok mesti dinilai dalam terang kondisi-kondisi dan perkembangan-perkembangan di Dunia Ketiga, dan tidak dengan membandingkannya –dengan cara apapun– dengan segala yang dicapai oleh dunia Barat yang diindustrialisasi - suatu pokok yang ditekankan oleh Rene Dumont dalam bukunya *Chine: La revolution culturale* (Tiongkok, revolusi agrikultur), yang terbit di tahun 1976:

Terlalu banyak kritikus, sedikit atau banyak secara sadar, membuat perbandingan-perbandingan dengan situasi yang sudah terbiasa bagi mereka, yaitu, situasi di negeri-negeri maju. Adalah lebih baik memikirkan *cantah negatif* yang diberikan oleh Asia Selatan, dan lebih khususnya, oleh anak-benua India.

Bab yang memuat pernyataan ini berjudul: “Betapa indahna Tiongkok itu, apabila di lihat dari Bangladesh.” Dumont menuliskan kata-kata ini sekalipun kritiknya yang serius mengenai sejumlah gejala yang telah dilihatnya di Tiongkok pada masa Revolusi Kebudayaan.¹⁰

Sepuluh tahun kemudian situasi anak-benua India itu secara mendasar masih belum berubah sedikitpun. Jan Brenman, seorang ahli mengenai pembangunan pedesaan di India, menyajikan temuan-temuannya dalam bukunya *Of Peasants, Migrants and Paupers* (Breman 1985), yang

didasarkan atas riset ekstensif di India Barat, di mana produksi kapitalis telah mencapai kemajuan-kemajuan berarti. Sekali hal-hal ini telah menghasilkan suatu pertumbuhan penting dalam kesempatan-kesempatan kerja di wilayah itu, mereka telah menarik jumlah-jumlah besar kaum migran dari pedalaman puak-puak:

Orang-orang luar ini memonopoli sebagian besar lowongan-lowongan kerja baru yang lahir, dan lebih dari itu mengusir penduduk asli dari pekerjaan-pekerjaan yang selamanya dilakukan yang tersebut belakangan itu. Kesudahan dari proses rangkap berupa proletarianisasi dan pemiskinan ini belum juga tampak ujungnya.

Sebabnya pemilik-pemilik tanah luas lebih menyukai mengupah migran-migran baru ketimbang para anggota kasta-bawah yang tak-bertanah yang tinggal di situ ialah, bahwa kaum migran bersedia menerima bahkan upah yang lebih rendah. Breman mengakhiri bukunya dengan penilaian yang paling menyedihkan:

Demikian, apabila aku menyatakan bahwa minim sekali alasan untuk mengantisipasi masa depan yang dekat dengan optimisme, aku berbuat demikian dalam kesadaran bahwa, untuk seksi-seksi yang menjadi miskin di antara kaum yang tidak bertanah itu, situasinya nyaris tak dapat menjadi lebih buruk lagi daripada yang sudah ada (Breman 1985: 445 ff.).

Keadaan-keadaan sekarang dan harapan-harapan di masa depan itu Bangladesh, kalau mau dikatakan, adalah lebih buruk lagi. Kalau keadaan sekarang di India bagian Barat untuk sebagian adalah dikarenakan oleh perkembangan kapitalis, maka yang di Bangladesh hal itu terutama dikarenakan kemandegan di sektor agraria, yang menurut Willem van Schendel dan Aminul Haque (van Schendel 1984), yang, pada awal tahun-tahun 1980-an, nyaris tidak terkena perkembangan-perkembangan kapitalis:

Selama seluruh periode pasca-Pemisahan dinamika utama masyarakat pedesaan Bangladesh berkaitan pada mendalamnya kemiskinan massa daripada pada lahirnya hubungan-hubungan produksi kapitalis [...] Suatu rasio perorangan/tanah yang menjulang dalam artian ekstraksi surplus yang tinggi tanpa reinvestasi produktif telah memaksa suatu jumlah rumah-tangga pedesaan yang semakin membesar menambah pendapatan mereka dari tanah yang terus menyusut dengan cara-cara lain. Orientasi pasar dengan demikian menjadi suatu unsur dalam perjuangan untuk bertahan hidup: mengambil bentuk pencarian kerja-upahan agar dapat membeli bahan makanan pokok di pasar.

Oleh karenanya, dapatkah kita berbicara tentang proletarianisasi di pedesaan Bangladesh? Ini agaknya seakan-akan benar sejauh dimiskinkannya para pekerja pedesaan dan dijadikan sepenuhnya bergantung pada kerja-upahan untuk bertahan hidup. Namun benar juga bahwa di pedesaan Bangladesh masa-kini, klas proletar pedesaan ini bedrkembang lebih cepat daripada keseiringannya, yaitu kaum kapitalis pedesaan (Schendel 1984: 118/119)

Kita sekarang mesti kembali ke pertanyaan pokok kita: masih dapatkah model-Mao berfungsi sebagai sebuah contoh bagi gerakan-gerakan sosialis masa depan di negeri-negeri Dunia Ketiga? Setiap jawaban atas pertanyaan ini sudah tentu sangat bersifat spekulatif. Dengan kenyataan gagalnya kapitalisme dunia secara umum untuk memberikan pemecahan-pemecahan yang memuaskan atas masalah-masalah utama perekonomian Dunia Ketiga, terdapat alasan kuat untuk mencari pemecahan-pemecahan alternatif. Krisis dunia kapitalis dewasa ini dapat—di masa depan yang tidak terlalu jauh – memungkinkan pemecahan-pemecahan yang sama sekali tidak terpikirkan di bawah dominasi yang terus-menerus dari imperialisme Amerika.

Tidak diragukan lagi, sebuah model pembangunan yang tampak penuh kelayakan empatpuluh atau tigapuluh tahun yang lalu, mungkin tidak lagi menjadi sebuah usulan yang dapat dilaksanakan dalam keadaan dunia sekarang. Lagi pula, suatu strategi yang dapat berhasil bagi sebuah negeri raksasa seperti Tiongkok, yang kaya akan sumber-sumber daya manusia maupun material, mungkin tidaklah cocok bagi sebuah negeri yang lebih kecil, di mana revolusi sosialis, seperti yang diperlihatkan pengalaman-pengalaman dari Vietnam, Kuba dan Niaragua, sebagai suatu prasyarat bagi pembangunan ekonomi lebih lanjut, dapat secara gawat dihambat oleh kekuatan-kekuatan kapitalis asing.

Betapapun, salah sekali untuk secara membebek mengikuti model-Mao dari Tiongkok. Bagaimanapun, tahapan pertama, yang mensyaratkan bahwa semua usaha mesti dikonsentrasikan pada peningkatan produktivitas tanah yang sudah dikerjakan secara intensif, hanyalah suatu kemungkinan pemecahan bagi wilayah-wilayah yang secara geografis dapat dipersamakan dengan Tiongkok bagian Selatan, seperti Luzon (Filipina), Jawa (Indonesia), Delta Tonkin (Vietnam), dan bagian-bagian Bangladesh.

Namun begitu, masih terdapat pelajaran-pelajaran yang berharga untuk diambil dari model-Mao dari Tiongkok itu. Pertama, landasan utama setiap strategi yang akan diikuti mestilah sukarela dan dukungan mas-sif dari penduduk pedesaan. Ini berarti bahwa penempuhan strategi mesti menyusul suatu revolusi sosial yang berhasil, di mana kaum tani telah mengambil bagian aktif di dalamnya, atau sekurang-kurangnya didukung oleh suatu pemerintahan yang berakar kuat di tengah-tengah kaum tani nasional. Sebuah pelajaran lain dari sejarah perekonomian Tiongkok ialah, bahwa baik perkembangan agrikultur maupun industri mesti direncanakan dan dipimpin oleh suatu negara yang kuat, yang sepenuhnya berkemampuan menghadapi provokasi-provokasi atau serangan-serangan dari kekuatan-kekuatan asing. Bersamaan dengan itu, rejim itu jangan monolitik. Interaksi secara teratur antara para penguasa dan rakyat, dan kepekaan pada keinginan-keinginan dan keberatan-keberatan dari pihak rakyat, mesti menjadi pedoman dan sandaran rejim itu: ini hakekat garis massa Mao Zedong, yang harus diberi maka lebih dari sekedar pemanis-bibir (*lip service*). Dan yang paling penting di atas segala-galanya, setiap kepemimpinan mesti menjauhi keterikatan secara dogmatik pada teori-teori politik masa-lalu!

Catatan:

¹ Richard Cantillon, *Esai sur la nature du commerce en general*, teks asli dari tahun 1755, diterbitkan kembali dengan komentar, Paris, 1952, hal.xxxii.

² Lihat Dumont (1957), hal. 302-310.

³ Lihat Brugger dan Reglar (1994) hal. 35 dan Friedman (1991), hal. 244.

⁴ John S. Aird, "The Preliminary Results of China's `1982 Cencus," *China Quaterly*, no. 96, Desember 1983, hal. 613-640, khususnya hal. 635-639.

⁵ Crook (1966), hal.38 f., 42 ff., 280 ff.

⁶ Brugger dan Reglar, dalam buku mereka tahun 1994, hal. 35, menyebutnya bahkan lebih rendah, dan menurut pendapat saya angka-angka yang sangat meragukan, sekitar 140 juta ton!

⁷ Wim F. Wertheim, "La Chine est-elle sous-peuplee?" *Population*, Jilid 20 (1965), hal. 477-514. Dengan judul ini saya secara provokatif merujuk pada jawaban yang bersifat stereotip yang aku dapatkan dari para pemimpin lokal ketika aku menangkat isu kelebihan-penduduk, yaitu bahwa mereka masih mengalami

"kekurangan tenaga kerja!"

⁸ Basil Ashton, Kenneth Hill, Alan Piazza, Robin Zeitz, "Famine in China, 1958-61," *Population and Development Review*, Jilid 10, no. 4 (Desember 1984). Studi ini mengandung sejumlah wawasan mencerahkan mengenai perkembangan ekonomi Tiongkok selama dasawarsa-dasawarsa yang lalu. Tetapi kelemahannya yang mendasar ialah bahwa para penyusunnya mulai dengan menerima hasil *sensus* tahun 1953 sebagai kebenaran yang tidak dapat diganggu-gugat, gantinya mereka bertanya apakah kepemimpinan Tiongkok, dalam uforia tahun-tahun pertengahan 1950-an, mempunyai alasan kuat untuk melebih-lebihkan jumlah total penduduk Republik Rakyat Tiongkok, sebagai bukti akan kekuatan dan hasil-hasil pencapaiannya. Angka 600 juta (termasuk 17 juta dari Taiwan) telah disesuaikan untuk menimbulkan kesan pada dunia luar. Lagi pula, bagaimana orang dapat memperkirakan bahwa segera setelah kemenangan akhir terhadap Guomintang suatu sensus yang sesungguhnya meliputi seluruh Tiongkok dapat diselenggarakan? Bagi saya, di tahun 1957, keragu-raguan serius yang aku punyai atas kredibilitas angka itu merupakan salah-satu alasan mengenai aku ingin menemui Prof. Chen Ta. Di lain pihak, orang dapat mempertanyakan alasan-alasan para pembesar Tiongkok memberikan kepada dunia statistik-statistik vital itu di awal tahun-tahun 1980-an, dimulai dengan angka sensus resmi pada tahun 1953? Orang dapat membayangkan bahwa *mengungkap* angka-angka yang dapat dipakai untuk menyajikan 'Lompatan Maju Ke Depan' sebagai malapetaka yang jauh lebih besar daripada yang sesungguhnya terjadi, mungkin menyenangkan pihak-pihak di kalangan kepemimpinan Tiongkok yang di tahun 1979 telah berbicara mengenai 'duapuluh tahun yang hilang.'

⁹ Tulisan asli itu dimuat dalam *People's Health Press*, Beijing, Oktober 26, 1976; tulisan itu diumumkan dalam terjemahan bahasa Inggris dalam *Chinese Sociology and Anthropology*, Jilid 11, 1979, No. 3/4.

¹⁰ Rene Dumont, *Chine: La Revolution culturelle*, Paris, 1976, hal. 159 ff., dan khususnya hal. 169. Dalam bab berikutnya, Dumont mengkritik 'hak-hak istimewa' birokrasi, tetapi menambahkan: "sambil menunjuk pada semua ini, kita mesti menekankan bahwa kita berurusan di sini dengan salah-satu masyarakat paling egaliter di dunia, di mana, namun, masih berfukuh suatu mentalitas kasta yang ganjil, dengan prasangka-prasangka yang diwarisi dari sistem mandarin" (hal. 183). (Terjemahan ini dari saya, W.W.).

BAGIAN 3:
SYARAT-SYARAT POLITIK
BAGI SUATU TEROBOSAN

Bab IV, Negara Dan Dialektika Emansipasi

Introduksi

Pada akhir bab di muka saya menyatakan bahwa, di negeri-negeri Dunia Ketiga, baik pembangunan agrikultura maupun industrial mesti direncanakan dan dipimpin oleh suatu negara kuat. Dalam bab pertama saja juga menekankan ‘penggabungan positif antara intervensi negara dan percepatan pertumbuhan ekonomi.’

Namun, dewasa ini khalayak maupun kaum ahli acapkali condong memandang negara sebagai suatu faktor negatif, terutama dalam hubungan dengan perkembangan ekonomi. Ini mewakili suatu kecenderungan kearah neo-liberalisme yang tidak sangat berbeda dari suasana yang menguasai bagian terbesar abad ke XIX, ketika bebas berfungsinya kekuatan-kekuatan pasar diharap akan memajukan pembangunan ekonomi secara riil, dan peranan negara dipandang paling banter bersifat marjinal. Namun, pertanyaan yang harus diajukan adalah, apakah, dan jika memang begitu, dalam keadaan-keadaan historis apa, negara telah merupakan suatu faktor penting dalam memajukan perkembangan ekonomi –bahkan, dalam kasus-kasus tertentu– dalam persekutuan dengan kekuatan-kekuatan emansipatoris. Dalam hal pertanyaan ini, dengan ‘emansipasi’ saya maksudkan ‘setiap’ bentuk perjuangan kolektif di pihak kelompok-kelompok yang merasa diri mereka diperlakukan sebagai rendahan (*inferior*) atau bawahan (*sub-ordinate*), yang melawan terhadap hak-hak istimewa kelompok-kelompok yang berdominasi. Dalam pengertian ini, emansipasi meliputi suatu jajaran lengkap kelompok-kelompok sosial yang berjuang agar sekurang-kurangnya diakui sederajat dengan pihak-pihak yang sejauh ini menjalankan kekuasaan politis, ekonomis atau sosial terhadap mereka. Orang dapat menyebutkan emansipasi kaum buruh, kaum tani, rakyat-rakyat kulit berwarna, minoritas-minoritas rasial, etnik atau religius, kaum wanita, kaum muda dan banyak kategori lainnya.

Pada dasawarsa-dasawarsa sebelumnya, bukan ‘emansipasi,’ tetapi ‘modernisasi’ adalah istilah yang lebih disukai oleh kelompok-kelompok luas para ilmuwan politik dan ekonomi, yang berpegangan bahwa di

negeri-negeri yang masih 'terbelakang,' maka arah perubahan tidak bisa tidak mesti ke arah suatu tipe masyarakat Barat, dan bahwa perubahan seperti itu akan terjadi sebagai suatu proses berangsur-angsur. Buku saya, *Evolusi dan Revolusi* (Wertheim 1974: 28 ff., 78-84) menyatakan keberatan-keberatan saya terhadap konsep 'modernisasi' ini. Saya mencari suatu konsep alternatif mengenai evolusi manusia, sesuatu yang berakar dalam proses-proses yang dikarakterisasi oleh 'emansipasi,' dilihat sebagai suatu usaha kolektif dari pihak bagian-bagian luas penduduk. Keberatan utama saya terhadap konsep 'modernisasi' ialah bahwa itu secara terlalu menggampangkan berarti suatu proses satu-arah, diprakarsai dari atas oleh suatu kepemimpinan yang menimba kualifikasi-kualifikasinya dari penerimaannya akan konsep-konsep Barat dan teknik-teknik Barat. Setiap proses sosial adalah suatu interaksi dua-arah, sebagaimana telah jelas dari bukti sejarah yang terakumulasi abad-demi-abad. Tiada proses yang diprakarsai dari atas akan berakar tanpa keterlibatan nyata dari rakyat bersangkutan, yang untuk itu mesti 'dimobilisasi.' Di pihak lain, terdapat banyak sekali bukti-bukti proses-proses sejarah di mana prakarsa itu datang untuk sebagian besar dari bawah, sekalipun kepemimpinan, yang kebanyakan berbasis-kota, selalu diperlukan untuk menyalurkan prakarsa itu menjadi tindakan yang utuh. Dalam mendefinisikan proses-proses yang membentuk totalitas evolusi sosial, 'emansipasi' merupakan istilah yang lebih cocok daripada 'modernisasi.' Emansipasi –dalam artian pembebasan dari belenggu-belenggu alamiah maupun buatan-manusia– adalah sebuah proses yang tidak berkembang dalam suatu cara unilinear, yang tidak-ambigu. Ia lebih merupakan suatu proses dialektis, yang maju dalam gelombang-gelombang berututan. Hanya sebagai suatu proses dialektis, yang emansipatorik dalam skala menyeluruh-dunia dapatlah evolusi manusia difahami sebagai suatu konsep analitis yang berdaya.

Di masyarakat Romawi awal, emansipasi adalah pemberian kebebasan oleh seorang tuan pada seorang budak yang termasuk dalam *patrimonium* atau *mancipium*-nya, atau oleh seorang bapak *manumission* (berkuasa penuh atas milik-miliknya) kepada seorang anak lelaki yang telah mencapai usia dewasa. Dalam sejarah Amerika abad ke XIX, emansipasi masih dipakai dalam arti kebebasan yang 'dianugrahkan' kepada para budak melalui suatu tindak kebajikan dari pihak yang

berkuasa: inilah maknanya dalam Proklamasi Emansipasi Presiden Lincoln tahun 1863. Saya tidak menggunakan emansipasi dalam artian pemberian kemerdekaan pada seorang 'individual,' sebagai pengalihan padanya suatu status yang berbeda dari status yang dimiliki sebayasebayanya sebelum itu; saya juga tidak merujuk pada kebebasan yang dianugerahkan dari atas kepada suatu kelompok atau kategori, di mana tiada perjuangan untuk pengakuan haknya atas persamaan/keadilan. Sebagai suatu konsep sosiologis, dengan emansipasi saya merujuk pada buah keberhasilan suatu perjuangan kolektif di pihak suatu kelompok atau kategori yang tiada-berbekal hak apapun (*under-privileged*).

Menurut definisi ini, emansipasi adalah setiap bentuk perjuangan kolektif kelompok-kelompok yang merasa diri mereka diperlakukan sebagai golongan asor (*underdogs*). Namun, kita jangan membatasi konsep itu pada perjuangan-perjuangan kolektif skala besar, yang secara sadar dilakukan dan diorganisasi sebagai gerakan-gerakan pembebasan. Sebelum perjuangan pembebasan tampil ke permukaan, banyak jenis protes tersembunyi, yang juga termasuk dalam definisi emansipasi, dapat dikenali oleh seorang ahli sosiologi yang terlatih. Dalam *Evolusi dan Revolusi*, dan dalam berbagai publikasi lainnya, saya mendefinisikan bentuk-bentuk protes tersembunyi itu sebagai *kontrapunkt-kontrapunkt* (Wertheim 1974: 113 ff.)¹ James C. Scott lebih lanjut menguraikan awal-awal pertama protes-protes kolektif seperti itu dalam *Weapons of the Weak* (1985) dan dalam *Domination and the Arts of Resistance* (1990). Terdapat suatu kecenderungan untuk membatasi konsep mengenai emansipasi itu pada perjuangan yang dilakukan oleh suatu kelompok khusus.² Misalnya, kaum Marxis memandang 'emansipasi' dalam artian perjuangan kelas, sehingga revolusi-revolusi yang terjadi pada akhir abad ke XVIII dilihat sebagai perjuangan-perjuangan kelas antara suatu burjuasi yang sedang bangkit dan suatu aristokrasi yang berkuasa. Setelah burjuasi menjadi dominan, adalah kelas proletar yang dipandang memperjuangkan kemenangannya sendiri. Pembatasan konsep mengenai emansipasi pada perjuangan kelas, dengan kelas proletar sebagai kekuatan dinamis, adalah suatu penafsiran yang terlalu sempit mengenai emansipasi sebagai suatu gejala historis dan sosiologis.

Max Weber telah memperingatkan terhadap reifikasi lembaga-lembaga sosial, yang dalam pandangannya cuma sekedar *Kollektivgebilde* (We-

ber 1922: 444-446). Sebuah bank, sebuah sekolah, sebuah gereja atau sebuah negara tidak dapat dipandang sebagai realitas-realitas di dalam kehidupan sosial. Semua itu hanya mewakili suatu realitas sosial tertentu selama keberadaannya sendiri diakui oleh suatu kategori orang yang luas. Weber menganjurkan agar lembaga-lembaga sosial dibebaskan dari jenis 'sihir' ini (Marianne Weber 1926: 692); ia menyadari bahwa *Kollektivgebilde*, dengan ilusi ketiada-bisa-musnahkan mereka, dapat dengan gampang menghilang begitu saja apabila orang menarik dukungan mereka dari susunan kekuasaan yang berdominasi.³

Demikian pula, 'klas' jangan dipandang sebagai suatu realitas obyektif, dengan suatu keberadaannya sendiri yang bebas dari kesadaran orang yang terlibat. Hal ini secara khusus penad bagi konsep Marxis mengenai suatu 'klas-pada-dirinya-sendiri,' yang dianggap ada secara tidak bergantung pada sesuatupun pengakuan dan kesadaran dari pihak para anggotanya. Ini adalah sebuah fiksi –dalam terminologi Weber, suatu 'sihir'– yang sebenarnya tidak lebih daripada pernyataan suatu harapan bahwa di masa depan para anggota akan menjadi sadar akan kepentingan-kepentingan bersama mereka dan dengan demikian ditransformasi menjadi suatu 'klas-bagi-dirinya-sendiri.'

Namun begitu, konsep tersebut belakangan itu, dengan tekanannya pada suatu kesadaran klas yang dapat dibuktikan di kalangan anggotanya, dapat dipandang merujuk pada suatu realitas obyektif. Menerima hal ini tidak berarti bahwa interpretasi Marxis, yang menyatakan bahwa suatu klas proletar mesti dipandang sebagai pelaku (*agency*) bagi revolusi dan emansipasi, dapat dianggap sah dan memuaskan dalam keadaan dunia dewasa ini. Di kebanyakan negeri Dunia Ketiga, misalnya, suatu proletariat industrial hanya ada dalam keadaan janin (*embrionik*). Walaupun begitu, bahkan di Tiongkoknya Mao terdapat suatu harapan bahwa 'kaum buruh, tani dan prajurit' akan memimpin masyarakat menuju keadaan optimumnya. Sekalipun Revolusi Tiongkok 1945-1949 adalah terutama suatu revolusi agrarian, yang mencapai kota-kota besar hanya pada tahapan akhirnya, kaum Marxis dan bahkan para ahli teori Maois mengklaim bahwa klas buruh adalah pelopor sejati dari revolusi. Dalam kenyataannya bukan kaum buruh perkotaan yang memerintah negeri, tetapi Partai Komunis yang secara dominan dipimpin oleh kaum intelektual – tepat seperti di Uni Sovyet. Ini menjelaskan kejauhan

(keterasingan) yang pada akhirnya timbul antara negara dan rakyat. Interpretasi saya mengenai emansipasi tidak mensyaratkan suatu proletariat sebagai suatu pertanda akan nirwana. Emansipasi bukanlah sebuah ideologi, lebih dari itu: bukan suatu ideologi klas, melainkan suatu gejala historis dan sosiologis yang sangat penting, barangkali bahkan yang mendasar; ia adalah, pertama-tama, aksi berdasarkan dan senantiasa terjadi dalam artian-artian perjuangan. Emansipasi berawal dari yang rakyat sendiri hasratkan dan perjuangkan – apapun yang mereka pandang sebagai pembebasan. Kekuatan penggerak yang sesungguhnya terdapat secara sangat dominan di dalam pikiran-pikiran mereka yang terlibat, dan tidak mensyaratkan keberadaan suatu *cara produksi* material tertentu. Akar-akar utama emansipasi berada di alam/dunianya kaidah-kaidah dan nilai-nilai. Dalam sebuah studi sebelumnya (Wertheim 1983: 13 ff.) berdasarkan atas sejumlah gerakan-gerakan emansipasi bersejarah, saya membeda-bedakan berbagai tahapan, yang dapat dikarakterisasi sebagai berikut:

- (1) berjuang untuk persamaan;
- (2) berjuang untuk pernyataan-diri;
- (3) berjuang untuk suatu masyarakat baru yang berdasarkan solidaritas di antara berbagai kelompok golongan-golongan yang tadinya berkedudukan asor. Hanya pada tahapan ketiga ini ada masalah suatu perjuangan oleh suatu klas-bagi-diri-sendiri (tetapi tidak harus dengan suatu proletariat industrial sebagai pelopornya) Sekalipun emansipasi mesti dipandang sebagai suatu gejala fundamental dalam sejarah bangsa manusia, saya tidak berlagak bahwa ia mewakili suatu kecenderungan yang berkanjang dan tidak-bisa-berbalik di dalam sejarah manusia. Emansipasi tidak menghasratkan semacam titik-puncak (*apogee*) final, melainkan ia tetap terbuka untuk berubah. Ia selalu akan merupakan suatu proses dialektis, dengan pasang surutnya. Justru perjuangan untuk emansipasi itu, yang berulang-kali meletus, yang menimbulkan kekuatan-kekuatan perlawanan yang kuat yang mesti diakui sebagai gejala-gejala historikal yang penting. Jan Nederveen Pieterse, dalam studinya yang penting, *Empire and Emancipation* (Nederveen Pieterse 1989) dengan tepat menentang ‘kerajaan’ ke ‘emansipasi’ dan ‘kekuasaan’ ke ‘pembebasan.’ Hanya dengan mengembangkan suatu wawasan mengenai pengaruh-mempengaruhi dan

pergulatan timbal-balik antara dua kecenderungan, yang kedua-duanya difahami sebagai unsur-unsur kunci di dalam keseluruhan evolusi sosial, dapatlah kita sampai pada suatu pengertian mengenai dinamika evolusi sosial itu, baik pada jenjang mikro maupun jenjang makro.

'Kepadatan berjuta' dari Asia, Afrika, Amerika Selatan dan Tengah masih merupakan 'bagian terbesar dunia' yang sangat membutuhkan emansipasi. Interpretasi asli Marxis mengenai emansipasi terutama sekali mempersoalkan nasib suatu proletariat industrial yang menderita karena eksploitasi kapitalis. Dewasa ini, 'mereka yang tidak akan kehilangan apa-apa kecuali belunggu mereka' bukanlah para pekerja industrial Barat yang menikmati banyak sekali perlindungan sosial, melainkan adalah jumlah yang tidak terhitung besarnya kaum tak-berpunya di antara kaum tani dan sub-proletariat perkotaan dari Dunia Ketiga.

Bagian pertama bab ini menggambarkan peranan negara di dalam transformasi ekonomi sebagai suatu gejala historis. Hanya suatu analisis historis-sosiologis, yang dimulai dari konsep mengenai emansipasi sebagaimana yang diuraikan di atas, yang secara jelas dapat menerangkan proses-proses di masa lalu dan masa kini, termasuk di dalamnya perubahan-perubahan dramatis dalam peranan negara di bagian-bagian tertentu dunia selama sejumlah tahun yang lalu.

Bergantung pada konteks historisnya, 'negara' dapat tampil dalam banyak ragam bentuk. Negara nasional merupakan suatu gejala yang relatif lambat dalam sejarah dunia; sampai hari inipun terdapat banyak negara multinasional, baik di lingkungan maupun di luar lingkungan Eropa. Dalam tulisan ini, istilah 'negara' secara umum dipakai berlawanan dengan kekuatan-kekuatan pasar swasta, tanpa merujuk pada suatu cabang khusus dari struktur negara.⁴

Merkantilisme Dini

Kecenderungan sekarang untuk memandang perusahaan swasta sebagai faktor menentukan yang telah meluncurkan masyarakat-masyarakat Barat ke arah pertumbuhan ekonomi dan perkembangan industrial, sekaligus dengan mengesampingkan peranan negara sebagai sesuatu yang tidak-berarti, adalah suatu dampak penyakit dari abad ke XIX. Penjulukan pertumbuhan ekonomi secara berat-sebelah pada suatu burjuasi yang

merdeka tidak saja berdominasi di kalangan pembela-pembela kapitalisme periode itu, tetapi juga menentukan pemikiran Marx dan pengikut-pengikutnya. Nederveen Pieterse (1989, Bab X, 'Empire and Power') telah membuktikan bahwa melebih-lebihkan arti-penting peranan burjuasi telah juga mengakibatkan suatu konsepsi monokausal (bersebab-tunggal) mengenai kelahiran imperialisme di dunia Barat; suatu penilaian yang menyeluruh mengenai peranan negara di dalam perkembangan ekonomi Barat telah lama sekali diperlukan.

Sebagaimana telah ditunjukkan dalam bab pertama, kebijakan-kebijakan negara Inggris abad XVIII mencakup seperangkat praktek ekonomi, yang didukung oleh kekuatan kelautan Inggris, yang sejak itu telah diberi label 'merkantilisme.' Kebijakan-kebijakan ini terutama diarahkan terhadap India yang, pada abad XVII, masih mengungguli Inggris dalam manufaktur barang-barang tekstil. Sepanjang abad XVIII, industri tekstil Inggris yang baru bangkit, dengan dukungan kuat dari pemerintah (yang meliputi suatu larangan resmi terhadap pengimporan sutera buatan dan kaliko cetakan dan celupan dari India), membuat Inggris dapat bertahan terhadap persaingan dari India. Suatu unsur ganjil dalam kebijakan ini ialah, bahwa para pengusaha manufaktur Inggris mengklaim perlindungan terhadap warga-sebangsanya sendiri – yaitu para pedagang Inggris yang bekerja untuk Kompeni India Timur, (*VOC-East India Company*), yang telah menjadi pengeksport utama sutera-sutera dan kaliko-kaliko India ke Inggris.

Pada tahun 1776, karya Adam Smith *The Wealth of Nations* diterbitkan. Anjurannya akan perdagangan bebas agaknya merupakan sebuah tanda akan suatu kesadaran baru bahwa kepentingan-kepentingan ekonomi nasional Inggris tidak memerlukan perlindungan negara lagi—sekalipun telah kita saksikan betapa tarif-tarif protektif terhadap import tekstil-tekstil dari India bahkan dinaikkan pada tahun 1813! Betapapun, kutiban-kutiban dari Smith menggariskan keyakinan yang semakin meluas bahwa urusan-urusan ekonomi hgaruslah menjadi urusan khusus para pengusaha swasta—sebuah faktor penting dalam kemerosotan merkantilisme. Pandangan ini, yang oleh Jan Breman, ketika merujuk pada suasana kolonial, pernah secara kena sekali disebut 'mitos mengenai non-intervensi,' bahkan membuat Max Weber menganggap pertumbuhan industri adalah sepenuhnya karya para pengusaha kapitalis, yang dalam

industrialisasi sebuah masyarakat agraria yang besar dicapai berdasarkan suatu ekonomi kapitalis. Di sana juga, kewenangan Kaisar diberlakukan, mula-mula untuk membangun sebuah struktur negara yang berkuasa/kuat, demi untuk menghentikan masuknya secara massal produk-produk industrial murah dari Barat, dan kemudian untuk mendukung industri-industri nasional yang masih kecil lewat cara-cara lain. Sejak pergantian abad dan seterusnya tidak terdapat contoh-contoh lebih jauh mengenai negara-negara berukuran besar dan dengan suatu kependudukan pedesaan yang besar yang, dengan keberhasilan, mengikuti jalan kapitalis untuk lolos dari suatu kondisi umum keterbelakangan.

Negara sebagai sebuah Motor Emansipasi

Gerschenkron di dalam bukunya, *Economic Backwardness in Historical Perspective* (1962), menonjolkan gejala bahwa semakin terbelakang perekonomian sebuah negeri, semakin mungkin pula industrialisasi akan dimulai dengan suatu lompatan, suatu percepatan dadakan, dengan suatu tingkat pertumbuhan awal yang tinggi di dalam produksi industrial. Ia menyatakan bahwa dalam suatu kasus pertumbuhan cepat seperti itu, peranan negara meningkat dalam arti-pentingnya secara relatif dengan tingkat awal keterbelakangan. Ia tidak menyebutkan, namun, bahwa meningkatnya peranan negara dalam situasi ini tidak cuma suatu fungsi kondisi internal keterbelakangan; intervensi negara tidak bisa tanpanya karena faktor-faktor eksternal, seperti persaingan berat dari pihak perusahaan-perusahaan transnasional, yang, menurut kenyataannya, telah menghalangi pertumbuhan industrial baik di negeri-negeri kolonial maupun negeri-negeri semi-kolonial (seperti Tiongkok atau negara-negara Amerika Latin).

Justru 'keharusan ekonomis' untuk memberikan perlindungan pada industri-industri yang baru berkembang itulah yang membawa pada kian meningkatnya intervensi negara. Dengan kenyataan kian meningkatnya kekuasaan modal transnasional, tingkat bantuan negara bergantung pada kurun historikal di mana perkembangan industri domestik itu memulai awalnya.⁶ Pada sekitar pergantian abad telah dicapai suatu titik di mana sektor industrial, yang hanya mengandalkan dukungan domestik, menjadi tidak mampu berkembang secara mandiri.

Terpaan-terpaan keras mengharuskan bertambahnya kekuasaan, yang hanya dapat diberikan lewat kian besarnya perlindungan pemerintah. Kekuatan modal transnasional telah begitu merajalela sehingga, dengan tiadanya dukungan negara, bangkitnya bangsa-bangsa industri baru yang berdaya-saing nyaris merupakan kemustahilan. Ahli sejarah Polandia, Witold Kula telah membuktikan, dalam sebuah tulisan menarik yang diumumkan pada tahun 1960, betapa Polandia telah lebih dari satu kali berada diambang memasuki perkerabatan bangsa-bangsa industrial, namun setiap kali itu, usaha-usahanya telah menjadi mustahil, terutama disebabkan oleh persaingan yang mematikan dari bisnis raksasa Barat.⁷ Russia Tsar merupakan sebuah kasus menentukan. Pada tahun-tahun 1890-an terdapat politisi tertentu, Count Witte di antara mereka, yang mendukung perkembangan awal industri Russia. Tetapi kekaisaran Russia tetap sebuah masyarakat yang dominasinya agrarian, yang dua kali mesti mengalami kekalahan dan peperangan, dikalahkan Jepang pada tahun 1905 dan oleh Jerman dalam Perang Dunia Pertama. Menurut teori Walt Rostow mengenai proses pertumbuhan ekonomi melalui suatu periode 'lepas-landas' yang berjangka relatif singkat (dua atau tiga dasawarsa) Russia telah menyelesaikan 'tinggal-landas'-nya sebelum Revolusi. Amanatnya jelas: industri Russia betapapun akan sudah memasuki suatu tahap 'pertumbuhan yang berkesinambungan-sendiri,' dengan atau tanpa suatu revolusi komunis (Rostow 1960).

Dari empat nasion yang diharapkan Rostow akan 'menutup kesenjangan teknologis terhadap Barat' (Rostow 1959), hanya dua yang telah berhasil sampai suatu batas tertentu yang berarti, dan kedua raksasa ini, Russia dan Tiongkok, kedua-duanya memerlukan revolusi-revolusi radikal.⁸ Dua negeri lainnya, India dan Brazil, masih menderitakan keterbelakangan serius dan eksploitasi neo-kolonial. Dalam arti besarnya tugas yang mereka hadapi dalam keharusan akan industrialisasi, keempat 'negeri industri baru' (NIC) masa kini, yaitu di antaranya termasuk negara-negara kota Hongkong dan Singapura, betapapun tidak dapat diperbandingkan dengan negeri-negeri agraria yang besar yang dilihat oleh Rostow sebagai calon-calon pertumbuhan industrial secara dini (Nolan 1990).

Suatu lepas-landas tidaklah terjadi secara dengan sendirinya (otomatis). Seperti yang ditunjukkan oleh Gershenkron, negara mesti memainkan

suatu peranan yang kian meningkat dalam menggerakkan suatu masyarakat yang terutama agrarian sifatnya ke jalan yang menuju pada perkembangan industrial. Sebuah revolusi radikal diperlukan untuk menciptakan sebuah negara yang cukup kuat dalam melawan persaingan ekonomi asing, intervensi militer dan subversi, ketika membangun sebuah ekonomi nasional.

Kita sekarang tiba pada suatu masalah mendasar dalam perbincangan kita. Kedua revolusi besar abad ini –Revolusi Rusia tahun 1917 dan Revolusi Tiongkok 1945-49– dapat, saya yakin, dipandang sebagai gerakan-gerakan emansipatorik. Selama kemajuan-kemajuan tahun-tahun 1920-an, yang tidak bisa terbayangkan di bawah kekuasaan Tsaris, telah dicapai di berbagai sektor ekonomi Sovyet, seperti perkembangan industrial, elektrifikasi dan mekanisme agrikultural, belum lagi kita membicarakan tentang edukasi. Tetapi pencapaian-pencapaian yang diwakili kemajuan-kemajuan ini harus dilindungi oleh sebuah negara yang cukup kuat untuk menghadapi pengaruh-pengaruh asing dari dunia kapitalis.⁹ Adalah sebuah paradoks sejarah fondasi-fondasi bagi sebuah negara baru telah diletakkan oleh Lenin yang, dalam bukunya *State and Revolution*, yang ditulis pada tahun 1917, menegaskan pandangan Marxis bahwa sebuah revolusi sosialis akan berarti –dalam suatu jangka-waktu yang secara relatif singkat– melayu-hancurnya negara (Lenin 1932).

Selama zaman Mao Zedong sebagai pemimpin Partai Komunis, Republik Rakyat Tiongkok juga mengupayakan kemajuan ekonomi, dan kembali sebuah aparat pemerintah yang kuat diperlukan. Berbeda dengan Uni Sovyet, kepemimpinan Tiongkok yang kemenangannya –hingga suatu batas jauh– dikarenakan dukungan kaum, tani, menjalankan kebijakan-kebijakan yang diarahkan pada pemenuhan kebutuhan-kebutuhan rakyat pedesaan, yang merupakan 80% seluruh penduduk Tiongkok. Di samping meletakkan landasan bagi perkembangan industrial, kepemimpinan Tiongkok mempromosikan modernisasi peralatan-peralatan agrikultur tradisional, dengan kesadaran bahwa suatu mekanisasi agrikultur secara cepat akan mengakibatkan pengangguran serius. Namun begitu, Republik Rakyat Tiongkok tidak pernah mengenal sederajat pemusatan pemerintah yang dapat dibandingkan dengan yang ada di Uni Sovyet. Komune-komune rakyat menikmati suatu otonomi tertentu: garis massa

(dari massa kembali pada massa) berarti bahwa rakyat diberi suatu suara dalam urusan-urusan lokal.

Dalam dasawarsa pertama setelah kaum komunis berkuasa, Tiongkok telah mencapai keberhasilan-keberhasilan yang patut diperhatikan. Walaupun adanya suatu kemunduran serius pada tahun-tahun akhir 1950-an, yang terutama disebabkan oleh kegagalan Lompatan Jauh Ke Depan yang serampangan pada tahun 1958, kebijakan-kebijakan agrikultural yang berhasil telah sepenuhnya dipulihkan menjelang tahun 1965.¹⁰ Lewat irigasi yang ditingkatkan dan elektrifikasi, Tiongkok mencapai swa-sembada dalam produksi biji-bijian selama tahun-tahun 1960-an, dan itu dicapai bagi suatu kependudukan yang meningkat dengan sekitar 2 persen per tahun. Demikianlah, pada abad ke duapuluh, di sebuah negeri yang dihuni oleh seperlima dari seluruh penduduk dunia, suatu proses pertumbuhan ekonomi yang sesungguhnya, yang didukung oleh suatu komitmen yang kuat akan emansipasi, telah dimulai. Ini berlangsung secara bergandengan tangan dengan emansipasi di sejumlah bidang lain kecuali di bidang ekonomi, dan telah dilaksanakan tanpa bantuan asing. Sejauh adanya represi selama periode itu, ia tidak berlaku sekuat yang terjadi semasa berkuasanya Stalin di Uni Sovyet, dan lebih ditujukan terhadap kaum intelektual ketimbang terhadap kaum tani.

Untuk dapat menilai arti-penting hasil-hasil yang dicapai Tiongkok cukup dengan membandingkan tingkat perkembangan agrikultur dengan tingkat-tingkat yang dicapai oleh India, Bangladesh, Pakistan atau Indonesia—negeri-negeri yang perekonomian-perekonomiannya sebelum Perang Dunia Kedua adalah (seperti ditunjukkan bab-bab di muka) sebanding dengan perekonomian Tiongkok (Dumont 1965: 260 ff.) Sekalipun di negeri-negeri ini berulang kali ditindakan prakarsa-prakarsa penting untuk memajukan perkembangan ekonomi, ada satu unsur pokok yang mangkir: tidak dilakukan usaha-usaha sungguh-sungguh untuk memajukan emansipasi massa pedesaan. Di India dilakukan usaha-usaha serius selama tahun-tahun 1950-an untuk membina industrialisasi secara pesat, seperti Rencana Lima Tahun kedua di tahun 1956. Tetapi stratifikasi yang berlaku, dengan kandungan-kandungan hak-hak istimewa bagi klas-klas mempunyai dan kasta-kasta pemilik tanah, menghambat setiap jusaha ke arah emansipasi radikal bagi kaum tak-berpunya di pedesaan (Bremen 1985). Kebebasan politik,

dalam bentuk suatu sistem parlementer tidak mencapai sektor-sektor luas massa pedesaan dan perkotaan.

Di Indonesia selama tahun-tahun 1950-an, rezim populis Presiden Sukarno juga bergerak ke arah kebijakan-kebijakan yang bertujuan emansipasi penduduk pedesaan.¹¹ Tetapi setelah Jendral Suharto menjadi 'orang-kuat' Indonesia di tahun 1965-66, setiap peluang mobilisasi yang mungkin diperkenankan bagi massa pedesaan, dan untuk bebas berorganisasi, agar menjamin emansipasi kolektif dari kemiskinan telanjang, telah dengan efektif ditindas oleh rezim *Orde Baru*.

Demikian pula di Pakistan dan Bangladesh, di mana kekuasaan tertinggi selama suatu jangka waktu panjang berada di tangan diktatur-diktatur militer, Revolusi Hijau tahun-tahun 1970-an dilaksanakan dengan cara yang paling menguntungkan klas-klas pemilik-tanah. Karena tiada satupun dari negeri-negeri ini mampu menghadapi tekanan ekonomis dari negara-negara kapitalis, pemerintahan-pemerintahan mereka tidak mampu mencapai tingkat-tingkat pertumbuhan yang dipercepat dan yang berkesinambungan.

Negara sebagai suatu Rem terhadap Emansipasi

Kekuasaan negara yang kuat yang dibangun di Russia dan Tiongkok untuk melindungi reform-reform revolusioner terhadap musuh-musuh dari luar, juga mengandung potensial berkembang menjadi suatu kekuatan 'di dalam' nasion itu, yang mungkin menjadi suatu halangan serius bagi gerakan imansipasi yang telah menjadikan mungkinnya revolusi sosialis. Untuk mengamankan ketahanan-hidup mereka sendiri di Uni Sovyet, kaum Bolsyewik, menurut Immanuel Wallerstein, menegakkan seperangkat prioritas yang diberlakukan demi kepentingan mereka sendiri:

Prioritas nomor satu ialah mengamankan kekuasaan partai terhadap oposisi internal. Ini menyangkut penciptaan suatu negara satu-partai, pengokohan birokrasi negara pada umumnya dan aparat kepolisian khususnya, dan kontrol atas penyebaran informasi.

Prioritas nomor dua ialah mengamankan negara sendiri terhadap musuh-musuh asing. Ini mengharuskan pengokohan basis-basis militer dan ekonomi negara. Ini menyangkut industrialisasi secara pesat dan penyertaan historisnya: perampasan milik kaum tani. Ini juga menyangkut penciptaan suatu mesin militer yang –paling sedikitnya– mampu menetralisasi kekuatan-kekuatan

militer musuh. (Wallerstein 1984: 88).

Prioritas-prioritas ini bukanlah satu-satunya pilihan yang tersedia, namun mereka menentukan perkembangan lebih lanjut dari Revolusi Russia. Stalin telah menciptakan sebuah kerajaan yang memiliki watak-watak yang mengingatkan pada rezim lama zaman Tzar – tekanan pada sentralisasi dan pengaruh kuat polisi rahasia atas kehidupan warga-warga negara perorangan. Isolasi yang berkembang sebagai jawaban pada bahaya infiltrasi ekonomis, dan pembangunan suatu ekonomi berencana dan yang dipimpin dari pusat, menyumbang pada penempatan seluruh sistem sosial dan politik dalam perantaraan, mengakibatkan suatu kebekuan yang mencekik setiap kemungkinan akan suatu suasana kultural terbuka. Pada akhirnya, kekejuran ini mencapai proporsi-proporsi sedemikian rupa sehingga tiada tersisa ruang bagi kritik atas kebijakan-kebijakan pemerintah, atau bagi inisiatif-inisiatif dari bawah. Penerimaan *perestroika* (rekonstruksi) oleh masyarakat Sovyet yang tidak luwes ini sebagai sebuah program untuk perubahan dan *glasnost* (kebebasan berbicara) sebagai suatu cara untuk mencapai perubahan itu, sungguh suatu perkembangan yang mengejutkan. Ini sama sekali bukan suatu gerakan emansipasi dari bawah: adalah seorang pemimpin dari kekuasaan yang bercokol yang mengembangkan prakarsa-prakarsa baru ini. Dengan berbuat begitu Gorbachev pada awalnya berhasil mendapatkan dukungan massa, tetapi ketidakmampuannya untuk memecahkan masalah-masalah ekonomi Uni Sovyet yang mendasar, atau untuk menyelesaikan konflik-konflik etnik dan gerakan-gerakan pembebasan, mengakibatkan suatu situasi yang semakin amburadul dan, akhirnya, membawa pada pembubaran Uni Sovyet sebagai sebuah negara. Namun, sangatlah penting memperhatikan bahwa dalam sebuah masyarakat seperti masyarakat Uni Sovyet (yang selama kurun Brezhnev tampaknya terjebak dalam suatu keadaan kekejuran yang tanpa-harapan) dapat tumbuh suatu desakan radikal akan pembaruan, yang melibatkan banyak pembalikan nilai-nilai dan norma-norma. Ini dapat dipandang sebagai suatu bukti dari suatu vitalitas dan potensial bagi pembaruan di dalam suatu masyarakat yang aslinya dibubuhi tanda-tera sosialis. Pada umumnya, sebuah negara nasional dengan kekuasaan yang boleh dikata tidak terbatas mengandung resiko untuk pada akhirnya didominasi

oleh suatu aparat birokratik yang tidak praktis, teristimewa apabila ia dikuasai oleh sebuah partai politik tunggal yang tidak bisa diganggu-gugat, yang tidak menenggangi kritik dari bawah atau dari luar. Sekali perkembangan industrial telah mencapai suatu tingkat tertentu, sistem ekonomi nasional menjadi terlalu kompleks bagi manajemen yang dipusatkan. Adakah transformasi negara sosialis sebagai motor emansipasi revolusioner menjadi sebuah rem, merupakan suatu proses yang tidak dapat dielakkan? Ini akan mendukung tesis Crane Brinton bahwa setiap revolusi sosial mesti berakhir dengan sebuah *Thermidor*, suatu (langkah) balik pada 'kenormalan' yang disertai sejenis 'Restorasi' dari rezim pra-revolusioner (Brinton 1965: Bab. 8).

Tidak disangsikan lagi, kecenderungan-kecenderungan *thermidorian* dapat dilihat di mana-mana setelah suatu revolusi sosialis yang berhasil. Seperti yang pernah saya tulis:

Juga di Tiongkok, pada tahun-tahun setelah revolusi, bersamaan dengan perbaikan yang jelas dalam kesejahteraan material, terdapat kecenderungan-kecenderungan tertentu ke arah puas-diri, kekejuran birokratik, hilangnya keyakinan pada ideal-ideal revolusioner asali dan suatu kecondongan untuk berkompromi dengan realitas-realitas kehidupan dan dengan kelemahan-kelemahan sifat manusia (Wertheim 1974: 333).

Namun, di Tiongkok dominasi birokratik itu tidak pernah mencapai suatu tingkat yang sebanding dengan yang ada di Uni Sovyet selama kurun Brezhnev. Sejak awal sistem pemerintahan Tiongkok telah bercirikan suatu derajat partisipasi rakyat yang lebih tinggi di dalam pengambilan putusan daripada yang berlaku di zaman Stalin.¹² Sekalipun begitu, sudah pada pertengahan tahun-tahun 1960-an Mao mengakui bahwa baik aparat partai maupun birokrasi pemerintahan sangat beresiko untuk semakin kejur, dan ia melihat bahaya timbulnya suatu kelas baru yang berhak-istimewa, yang dapat disejajarkan dengan *Nomenklatura* yang telah memapankan diri di Uni Sovyet sebagai suatu elit sosial. Ini merupakan periode konflik-konflik ideologis dan politis antara Tiongkok dan Uni Sovyet. Dengan keras sekali Mao mengkritik kecenderungan di antara sejumlah rekannya di dalam kepemimpinan Partai, termasuk di situ Liu Shaoqi, Ketua (presiden) Republik Rakyat Tiongkok sejak 1958, dan Deng Xiaoping, Sekretaris Jendral Partai Komunis Tiongkok, untuk menindas massa rakyat (Gray 1990: 335/6).

Dalam pandangan Mao suatu ‘burjuasi’ baru sedang tumbuh di dalam Partai, dan pada tahun 1966-67 ia berusaha mengubah itu dari atas dengan bantuan pemuda Tiongkok yang telah mengorganisasi diri mereka sebagai Garda Merah. Dalam beberapa hal Revolusi Kebudayaan Mao dapat dibandingkan dengan *perestroika* Gorbachev. Strategi Mao juga meliputi sejenis *glasnost*, dalam bentuk diperkenankan dan dianjurkan surat-surat kabar dinding yang besar-besaran (*daze-bao*), yang mencatat keluhan-keluhan mengenai segala jenis pelanggaran. Perbedaan utama dengan Gorbachev sudah tentu ialah, bahwa apabila pada yang disebutkan belakangan ini beraspirasikan perkenan yang lebih luas bagi prakarsa-prakarsa perseorangan dalam urusan-urusan ekonomi, termasuk di situ agrikultur, maka Revolusi Kebudayaan bermaksud memperkuat unsur sosialis di dalam sistem ekonomi Tiongkok.

Revolusi Kebudayaan itu berakhir dalam anarki, dengan Mao tampaknya terlalu tua untuk mempertahankan kontrol perkembangan-perkembangan berikutnya.¹³ Setelah wafatnya Mao pada tahun 1976, Deng Xiaoping (yang selama Revolusi Kebudayaan diekspos sebagai seorang ‘penempuh jalan kapitalis’ dan dilucuti kekuasaannya) segera menjadi pemimpin yang dominan dari Republik Rakyat Tiongkok. Pada sekitar 1980 suatu reaksi yang benar-benar *thermidorian* telah menang; di bawah pengaruh Deng di tahun-tahun 1980-an, cengkeraman pemerintah atas ekonomi Tiongkok telah sangat berkurang dan langkah-langkah penting telah diambil ke arah suatu ekonomi yang lebih berorientasi-pasar (Hinton 1991).

Kecenderungan serupa tidak saja dianjurkan oleh Gorbachev dan pendukung-pendukungnya di Uni Soviet, melainkan sejak tahun 1989 dan seterusnya juga dijalankan oleh negeri-negeri Eropa Timur lainnya. Jelas sekali bahwa pada tahun-tahun akhir-akhir ini gerakan-gerakan emansipatorik tidak lagi ditujukan terhadap Mammon, melainkan lebih terhadap Leviathan – justru negara yang pada lahirnya kedua revolusi besar itu, telah mendukung gerakan-gerakan protes emansipatorik yang perkasa.

Dengan pengecualian Uni Soviet, dan mungkin juga Yugoslavia, kekuasaan komunis di Eropa Timur bukanlah hasil dari suatu revolusi rakyat, melainkan adalah kemenangan Angkatan Bersenjata Soviet pada akhir Perang Dunia Kedua. Pemerintahan-pemerintahan yang dibangun

dan berkuasakan oleh Uni Sovyet tidak didasarkan pada sepakat rakyat bangsa-bangsa yang bergabung dalam Pakta Warsawa. Bagi mereka, dominasi Sovyet adalah semacam pemerintahan asing yang pada dasarnya tidak berbeda dari pendudukan Jerman yang darinya mereka telah dibebaskan. Akibatnya, Leviathan menjadi Goliath, kekuatan yang harus diserang. Mereka tidak mempunyai pengalaman mengenai Goliath yang lain, yaitu Mammon; mereka telah diberitahu bahwa kapitalisme itu salah, bahwa rakyat menderita kemiskinan di bawah sistem itu, tetapi semua propaganda resmi telah kehilangan kredibilitasnya.

Kini mereka mungkin secara berangsur-angsur menyadari bahwa menyerah pada suatu ekonomi pasar, pada Mammon, melibatkan masalah-masalah seperti pengangguran massal, naiknya harga-harga dan dicabutnya subsidi-subsidi untuk barang-barang konsumsi pokok (di bawah tekanan IMF dan Bank Dunia), maupun penswastaan (privatisasi) perusahaan-perusahaan publik. Clairmonte dan Cavanach telah mendefinisikan gebugan penswastaan itu sebagai “tidak lebih daripada suatu kedok untuk menyambar sektor-sektor yang semakin luas dari pasar-pasar nasional dan global: sektor-sektor yang secara historikal dianggap tidak terpisahkan dari patrimoni nasional.”¹⁴ Bahkan Adam Smith meyakini bahwa jasa-jasa utilitas publik semestinya tetap di bawah pengurusan negara.

Negara dan Emansipasi di Dunia Ketiga

Sampai seberapa penadkah pembolakan kekuasaan negara, yang dianggap opresif dan tidak efisien, bagi rakyat negeri-negeri Dunia Ketiga? Pengalaman telah mengajarkan bahwa bagi negeri-negeri agrarian yang belum berkembang di Dunia Ketiga, hidup di bawah dampak kapitalisme asing umumnya berakibat sangat tidak menguntungkan. Tidak hanya massa pedesaan di wilayah-wilayah yang padat penduduknya di Asia Selatan dan Tenggara yang tidak berkemampuan untuk mencapai emansipasi kolektif secara aktif. Di negeri-negeri Afrika dan Amerika Selatan yang lebih jarang penduduknya, ketergantungan pada modal asing telah juga menciptakan suatu sistem sosial yang ditandai oleh ketimpangan-ketimpangan yang mencolok, dengan ruang yang sempit untuk mengemansipasikan kaum miskin pedesaan (Frank 1970). Dalam

beberapa dasawarsa yang lalu hanya dua negara Asia yang mencapai status Negeri Industri Baru (NIC): yaitu Taiwan dan Korea Selatan. Dua negara kota: Hongkong dan Singapura, dari sifatnya sendiri merupakan suatu kasus berbeda karena mereka tidak mempunyai wilayah-wilayah pedesaan yang luas, tetapi bahkan kedua Macan Kecil yang lain “bukanlah negeri-negeri besar dalam arti kependudukannya maupun dalam arti areal tanah” (Nolan 1990: 45). Terdapat dua faktor relevan lainnya di samping ukuran:

Lokasi dan politik juga menjadi teramat penting bagi ROK (Republik Korea) dan Taiwan, karena – demikian dinyatakan – pertumbuhan mereka sangat dirangsang oleh pasokan-pasokan modal asing sehubungan dengan posisi strategik mereka berhadap-hadapan (*vis-a-vis*) dengan Tiongkok dan Korea Utara (Nolan 1990: 47).

Sebaliknya, mengulurkan bantuan pada negeri-negeri agrarian seperti India atau Bangladesh pada tingkat yang sebanding dengan tingkat dalam hubungan dengan ‘Macan-macan Kecil’ itu, menjadi tidak mungkin bahkan bagi Amerika Serikat.

Berbeda dengan jumlah besar dukungan ekonomi yang diberikan pada Korea Selatan dan Taiwan, ‘bantuan’ yang diulurkan pada negeri-negeri Dunia Ketiga lainnya dengan persyaratan-persyaratan kapitalis telah memperoleh suatu dimensi baru sebagai akibat krisis hutang. Pada awal tahun-tahun 1970-an banyak pemerintahan Dunia Ketiga menerima pinjaman-pinjaman dalam jumlah-jumlah besar dengan suku bunga rendah. Ketika suku-suku bunga dunia melambung pada tahun-tahun akhir 1970-an, negeri-negeri Dunia Ketiga yang telah berutang secara besar-besaran tidak mampu lagi menunaikan pembayaran-pembayaran kembali tahunan mereka; beberapa negeri bahkan tidak dapat membayar bunga atas pinjaman-pinjaman itu. Menyusul kemudian suatu spiral tanpa akhir dari pinjaman-pinjaman baru, dengan syarat-syarat lebih berat, sampai bank-bank komersial itu menarik diri; pemerintah-pemerintah Dunia Ketiganya terpaksa meminta bantuan IMF dan Bank Dunia, menyerah-diri pada persyaratan-persyaratan berat, seperti penghapusan subsidi-subsidi untuk barang-barang konsumsi pokok, dan dengan begitu memustahilkan pertumbuhan ekonomi yang sehat.¹⁵

Ini dapat menjelaskan mengapa banyak rakyat di negeri-negeri Dunia Ketiga –khususnya yang berpemerintahan sosialis– dengan pengalaman-

pengalaman mereka akan ‘ekonomi-ekonomi pasar’ di masa lalu yang agak jauh, lebih enggan untuk menukarkan Leviathan dengan Mammon. Di Nikaragua, kaum Sandinista yang dalam pemilihan umum tahun 1984 memperoleh kemenangan mutlak (Vilas 1986), telah kalah dalam pemilihan umum nasional di tahun 1990, namun masih mendapatkan banyak dukungan dan simpati di kalangan rakyat biasa. Alasan utama bagi perpindahan kesetiaan politis itu ialah harapan bahwa ini mungkin dapat mengakhiri serangan-serangan militer dari kaum Kontra, dan ‘perang intensitas rendah’ yang dilancarkan –sejak awal tahun-tahun 1980-an– oleh Amerika Serikat. Mozambik dan Angola juga dipaksa untuk berdamai dengan kaum ‘Kontra’ mereka, yang didukung oleh Afrika Selatan ‘Putih,’ tetapi dalam kasus-kasus ini juga, menyerah-kalah itu sulit dijumlahkan pada ketidakpuasan massa terhadap sosialisme. Dan Vietnam yang menghadapi kerusakan luar-biasa akibat pemboman Amerika selama perang (1965-73) dan boikot yang dilancarkan oleh Amerika Serikat sesudah kekalahan-akhirnya di tahun 1975, tidak mempunyai pilihan lain kecuali menerima suatu ekonomi pasar yang diimlakkan oleh Amerika Serikat, IMF dan Bank Dunia, sehingga –akhirnya– negeri itu masih menderita kekalahan di dalam peperangan gemilang yang dimenangkannya di medan perang pada tahun-tahun 1970-an (Gabriel Kolko 1995, menulis tentang *Vietnam Since 1945: Winning a War and Losing the Peace*)!

Mungkin sekali nasion-nasion sosialis Dunia Ketiga yang lebih kecil ini telah menikmati suatu periode pemerintahan-sendiri yang terlalu singkat untuk memungkinkan suatu reaksi yang benar-benar *thermidorian* atau restoratif. Bagaimanapun, intervensi asing, baik itu lewat embargo-embargo (Kuba, Vietnam) atau lewat dukungan politikal dan finansial yang diberikan pada kekuatan-kekuatan kontra-revolusioner (Nikaragua, Angola, Mozambik), telah membikin sulit untuk mengukur sampai sejauh mana sebuah negara sosialis, ‘tanpa’ intervensi dari luar, dapat secara bersinambungan meneruskan proses emansipasi yang berjangka panjang. Semakin tiada berguna sebagai kasus-kasus ujian adalah nasion-nasion Asia seperti Korea Utara, Kampuchia dan Laos di mana, selama periode Perang Dingin, intervensi asing itu bersimerajalela.

Peristiwa-peristiwa baru-baru ini di Tiongkok juga agak mendua-arti.

Terdapat perbedaan-perbedaan yang mencolok antara perkembangan-perkembangan di Tiongkok dan bekas Uni Sovyet. Pertama-tama, Tiongkok tidak bubar berantakan sebagaimana yang terjadi dengan Uni Sovyet. Kemudian, Tiongkok tidak menuju pada suatu pembongkaran negara secara menyeluruh di dalam mengarahkan perekonomian mereka. William Hinton menulis tentang Pensiwaan Tiongkok (Hinton 1991) – namun begitu kelanjutan supremasi Partai Komunis telah memungkinkan para pemimpin Tiongkok untuk tetap mengendalikan pemerintahan secara kokoh di dalam tangan mereka sendiri, dan tidak – boleh dikata – menyerah mentah-mentah seperti yang dilakukan oleh Russia, pada kesewenangan dan kebijakan-kebijakan IMF dan bank-bank asing lainnya. Lagi pula, mungkin sebagai hasil pengalaman-pengalamannya dengan suatu ekonomi pasar di awal tahun-tahun 1980-an, pemerintah Tiongkok – pada suatu tahap lebih dini daripada Russia maupun Eropa Timur – telah mengambil sejumlah langkah penting yang menjauhi gerakan ke arah suatu ekonomi pasar – suatu perkembangan yang secara khusus patut dicatat setelah menghilangnya Deng Xiaoping dari barisan-depan kebijakan-kebijakan Tiongkok. Misalnya, setelah memberikan hak-hak istimewa pada daerah-daerah pesisir dengan mengorbankan wilayah-wilayah pedalaman selama tahun-tahun 1980-an, Tiongkok kini memberikan perhatian lebih besar pada yang disebut belakangan itu. Bahkan tampak ada suatu kecenderungan untuk kembali pada agrikultur kooperatif. Dihidupkannya kembali penghormatan tertentu pada Mao Zedong mungkin juga menandakan suatu kecenderungan perubahan, yang masih nyaris tidak jelas, di kebanyakan negeri Eropa Timur.¹⁶

Namun, glasnost sulit disebut sebuah karakteristik dari rezim pasca-1980 di Tiongkok. Garis politik baru yang dijalankan di Tiongkok sejak wafatnya Mao tidak dapat dikarakterisasikan sebagai suatu peningkatan keterbukaan untuk keuntungan massa rakyat. Yang mendapatkan suatu kebebasan intelektual tertentu adalah khususnya elit-elit perkotaan, termasuk di situ mahasiswa universitas, penulis dan seniman. Walaupun apa yang dinamakan Dinding Demokrasi di Beijing, yang populer di kalangan wartawan asing di akhir tahun-tahun 1970-an, segera ditutup, namun terdapat suatu keterbukaan yang lebih luas bagi pengaruh kultural dan ekonomi dari Hongkong dan dunia Barat. Namun begitu, sejak

bentrok-bentrok kekerasan bulan Juni 1989, bahkan sekedar *glasnost* yang dinikmati kaum intelektual dan mahasiswa telah kian berkurang. Pembongkaran/pembubaran agrikultur kolektif dan penghapusan komune-komune rakyat merupakan ancaman dilemparkannya kembali kaum tani ke 'karung kentang' Marx, sebagai pemilik-pemilik tanah kerdil dengan kecenderungan-kecenderungan individualistik, yang hanya peduli dengan kepentingan-kepentingan material keluarga kecil mereka sendiri. Investasi dalam irigasi dan pemeliharaan jangka-panjang infrastruktur secara serius juga makin tidak dihiraukan.¹⁷

Ringkasnya, di bagian-bagian lain dunia, gerakan untuk menolak sosialisme sama sekali tidak dapat dibandingkan dengan suasana yang berlaku di Eropa Timur. Berkenaan dengan Asia, kita mesti mengingat pernyataan Maurice Zinkin bahwa "perlawanan mental terhadap intervensi negara lebih kecil di Asia daripada yang terdapat di Barat, karena Asia mempunyai suatu sejarah panjang mengenai aksi negara yang efektif dan membantu" (Zinkin 1953: 214). Bukti mengenai hal ini, di dalam catatan sejarah, meliputi karya-karya raksasa kanalisasi dan irigasi yang dibangun di kekaisaran Tiongkok lebih empatpuluh abad yang lalu, selama pemerintahan Kaisar Yao, dan yang sangat diperluas di bawah dinasti-dinasti yang menggantikannya.

Yang telah didiskreditkan dalam dasawarsa-dasawarsa baru-baru ini bukanlah sosialisme sebagai suatu ideologi atau suatu sistem untuk menyeimbangkan kepentingan-kepentingan individual dengan kepentingan-kepentingan masyarakat, tetapi lebih ditujukan pada pemerintahan-pemerintahan 'diktatorial' dan 'tidak-toleran' yang berpretensi menentukan kearifan tertinggi dalam urusan-urusan ideologi. Namun ini tidaklah mendiskreditkan sosialisme sebagai suatu ideologi emansipatorik. Kita mesti 'memikirkan kembali sosialisme,' sebagai suatu aspek fundamental dari 'Pemikiran Kembali Emansipasi,' yaitu istilah yang telah dipilih sebagai tema pokok dari Bengkel Kerja yang diselenggarakan di Institute of Social Studies di Den Haag pada bulan Januari 1991, yang telah menghasilkan jilid karya berjudul *Emancipation, Modern and Postmodern* (disunting oleh Nederveen Pieterse 1992, baca khususnya hal.5 ff.).

Peter Nolan benar sekali ketika menyatakan: "tiada sesuatu yang secara intrinsik *sosialis* mengenai negara itu." Marx dan para pengikutnya salah

ketika menyatakan bahwa negara di bawah kapitalisme cuma sebuah alat di tangan suatu burjuasi yang berkuasa (dominan). Emansipasi sebagai suatu gejala sosial pada dasarnya adalah suatu usaha kolektif yang bertujuan akan kontrol menyeluruh dari bawah terhadap negara maupun pasar, yang itu sendiri adalah “wahana-wahana yang cacad untuk mencapai tujuan-tujuan sosial” (Nolan 1990: 60).

Dialektika emansipasi menunjukkan bahwa dalam keadaan-keadaan tertentu suatu negara kuat diperlukan untuk menangkal kekuatan-kekuatan pasar yang menghalangi emansipasi, atau untuk melindungi massa rakyat dari perkembangan-perkembangan yang mencelakakan. Di antara keadaan-keadaan itu yang pertama-tama kita mesti perhitungkan adalah keadaan-keadaan seperti peperangan dan bencana-bencana alam, di mana negara nasional mesti mengoper tanggung-jawab untuk mengambil keputusan-keputusan darurat. Bagian-bagian besar Dunia Ketiga senantiasa berada dalam suatu keadaan serupa menghadapi bencana-bencana alam, erosi bumi, kelaparan, penyakit dan pengangguran massa perkotaan, belum lagi kekuatan-kekuatan neo-kolonial yang mendominasi perekonomian. Menghadapi konfrontasi-konfrontasi ini menuntut suatu pengambilan keputusan yang segera dan efisien dan dengan demikian merupakan faktor mendasar dalam menentukan pilihan jenis pemerintahan yang paling sepadan.

Kediktatoran militer tidak membantu rakyat mencari suatu pemecahan bagi masalah-masalah mendesak mereka. Sifat otoritarian rezim-rezim militer merupakan kelemahan mereka yang mendasar. Kebanyakan ‘orang-kuat’ militer menjalankan suatu garis keras terhadap mayoritas pedesaan dan semi-perkotaan, tetapi cenderung lembek terhadap unsur-unsur berpengaruh di dalam negeri mereka sendiri dan terhadap kekuatan-kekuatan luar yang menjadi gantungan mereka. Penelitian Gunnar Myrdal (1970) ke dalam ‘negara lunak’ membuktikan itu terbuka bagi eksploitasi oleh siapa saja yang memegang kekuasaan, dengan merajalelanya korupsi sebagai suatu akibat.¹⁸

Joel Migdal, dengan memakai contoh-contoh sejumlah negeri Dunia Ketiga, menunjukkan betapa petani kaya dan berpenghasilan-sedang memainkan suatu peranan menentukan sebagai ‘orang-orang kuat,’ setiap kali penguasa-penguasa militer mencoba membangun sebuah ‘negara kuat’ (Migdal 1988).

Baik Myrdal maupun Migdal agaknya mengabaikan faktor paling menentukan yang bertanggungjawab bagi selalu lemahnya kebanyakan negara Dunia Ketiga: ketergantungan mereka yang terus-menerus pada kekuatan-kekuatan kapitalis asing. Dari beberapa negara yang dipandang Migdal sebagai negara-negara yang secara relatif kuat ada *empat*: Kuba, Tiongkok, Vietnam dan Korea Utara, yang disebabkan oleh suatu revolusi sosialis (Migdal 1988: 269). Migdal menjustifikasi bangkitnya sebuah 'negara kuat' pada 'dislokasi' yang mendahuluinya dan bukannya menyadari bahwa asal-usulnya-(genesis)nya ialah dikarenakan sebuah revolusi yang didukung oleh gabungan kekuatan-kekuatan emansipatorik dari bawah. Gambaran Myrdal dan Migdal mengenai masyarakat-masyarakat dan negara-negara Dunia Ketiga mungkin saja bagian besarnya tepat, tetapi tanpa memperhitungkan pentingnya tekanan-tekanan emansipatorik dari massa pedesaan Dunia Ketiga, maka titik penentunya menjadi hilang.

Ada masalah-masalah lebih jauh bagi 'negara nasional' di negeri-negeri Dunia Ketiga yang akan dibicarakan secara luas dalam Bab 7: satu, ialah implementasi langkah-langkah legislatif dalam sebuah masyarakat yang terutama bersifat agrarian dengan suatu kependudukan yang jauh dari otoritas sentral. Kaum tani umumnya hanya bersentuhan dengan pembesar-pembesar lokal atau regional (Benda-Beckmann 1989), yang penafsirannya mengenai undang-undang atau peraturan-peraturan yang dikeluarkan dari pusat mungkin sekali tidak mengungkapkan isi/maksud sebenarnya. Kaum politisi di pusat mungkin mengeluarkan undang-undang yang berfokus pada emansipasi, yang oleh para pembesar di tingkat lokal, dengan ikatan-ikatannya dengan elit pedesaan, akan ditafsirkan secara menguntungkan bagi yang tersebut belakangan itu. Usaha-usaha melaksanakan undang-undang reform-tanah secara radikal justru yang paling mungkin gagal dengan cara ini, sebagaimana dibuktikan di berbagai bagian India selama tahun-tahun 1950-an, dengan gagalnya perundang-undangan yang menguntungkan kaum penyewa tanah (Baks 1985); dan sabotase diam-diam oleh unsur-unsur birokrasi regional dan lokal atas undang-undang reform tanah yang diprakarsai Presiden Sukarno di Indonesia pada awal tahun-tahun 1960-an.¹⁹ Sedikit sekali negara yang hingga kini telah mampu memberi jawaban sepadan pada tantangan-tantangan yang dihadapi Dunia Ketiga. Hanya sebuah

sistem pemerintahan yang bersambut pada kebutuhan-kebutuhan pokok penduduk yang dapat berhasil dalam memecahkan masalah-masalah mendesak yang merundung nasion-nasion miskin. Kemampuan untuk mengambil keputusan-keputusan efektif mesti dipadukan dengan suatu pemahaman yang mendalam mengenai gerakan-gerakan kemerdekaan emansipatorik, yang secara aslinya mungkin telah memberikan kekuatan penggerak bagi suatu revolusi sosialis. Manakala suatu negara lahir dari sebuah revolusi seperti itu tumbuh menjadi suatu kekuatan yang berdiri sendiri, yang terbuka bagi kemandegan total atau penindasan dan penghisapan ekstrem, maka ia sneidri dapat menjadi sasaran gerakan-gerakan emansipatoris.

Kesimpulan

Berhubung dengan perkembangan-perkembangan terakhir, khususnya di Eropa, mungkin ada diragukan apakah 'negara-negara' benar-benar lembaga-lembaga yang cocok yang dapat diharapkan memberi penggenapan bagi peranan-peranannya yang sulit. Sepanjang perjalanan sejarah, negara telah mengambil berbagai bentuk, tergantung pada sejauh mana mayoritas rakyat bersedia mengakui suatu lembaga politik mengklaim otoritas wilayah pemerintahan. Di sejumlah negeri Eropa Timur, negara-negara multi-nasional sedang berdisintegrasi di bawah dampak kekuatan-kekuatan emansipatorik yang berwarnakan partikularistik, etnik atau religius.

Di Dunia Ketiga, tampak paling besar kecenderungannya bahwa kebanyakan rakyat akan terus menghasratkan emansipasi dengan jalan suatu pengambil-alihan secara menyeluruh atau sebagian dari negara-negara 'lemah' yang ada sekarang. Suatu aksi terpadu, sejenis 'Koalisi Pelangi,' mungkin di masa dekatg tertentu akan menghasilkan suatu jenis gerakan emansipasi yang lain, yang mengatasi perbatasan-perbatasan nasional yang ada sekarang.²⁰ Demikian pula, negara-negara Dunia Ketiga mungkin bergabung kekuatan untuk memajukan tujuan bersama mereka: sebuah saran yang diajukan Fidel Castro ialah membentuk koalisi-koalisi untuk menolak beban-beban yang dipaksakan oleh krisis hutang. Mengutip Clairmonte dan Cavanagh: "Penghapusan hutang menonjol sebagai satu-satu penyelesaian yang masuk akal dan

rasional bagi Dunia Ketiga” (Clairmonte 1986).

Dalam situasi dunia sekarang, negeri-negeri berkembang tidak mempunyai pilihan lain kecuali mengambil bentuk negara-negara nasional atau multi-nasional: ini esensial, walaupun hanya untuk mengontrol kekuatan-kekuatan pasar yang mendorong masyarakat menuju bencana lingkungan lewat polusi, yang terus-menerus mempromosikan perdagangan persenjataan, atau yang menjerumuskan berjuta-juta rakyat di negeri-negeri Dunia Ketiga ke dalam kemiskinan dan perbudakan yang tiada akhirnya. Dunia masa kini masih memerlukan perlindungan negara dan kegiatan negara, tetapi itu mestilah sebuah negara yang pada gilirannya dikontrol oleh kekuatan-kekuatan emansipatorik dan kerakyatan yang kuat dan gerakan-gerakan dari bawah. Demokrasi parlementer, di mana mematuhi peraturan-peraturan permainan parlementer lebih dipentingkan daripada memecahkan masalah-masalah mendesak, hanyalah satu di antara pilihan-pilihan yang terbuka/tersedia bagi kekuatan-kekuatan emansipatorik ini.

Catatan:

¹ Lihat juga esai saya terdahulu *Asociety as a Composite of Conflicting Value systems* (1964), dicetak ulang dalam Wertheim 1993.

² Sebagai contoh, di negeri Belanda adalah sudah biasa menggunakan istilah emansipasi khususnya bagi pembebasan kaum perempuan. Di negeri Belanda abad ke XIX, emansipasi masih dipakai untuk isu-isu seperti pemajuan kaum buruh, orang-orang Katolik Roma dan orang-orang yahudi.

³ Dalam *Evolusi dan Revolusi* (1974) saya juga mengkritik *reifikasi* konsep-konsep seperti itu: Reifikasi gejala-gejala sosial dapat melayani kepentingan-kepentingan mereka yang berkuasa; ia menambahkan suatu kualitas ketahanan pada distribusi kedudukan dan peranan sekarang (hal.89-94).

⁴ Dalam bab ini saya telah mengikuti Nederveen Pieterse dalam pemakaian istilah *Leviathan*, yang diterakan oleh Hobber bagi negara, dan istilah *Mamman* bagi modal, yang mewakili kekuatan-kekuatan pasar.

⁵ Sudah pada tahun 1909 Weber dikritik oleh sejarawan Felix Rachfahl karena pembahasannya yang tidak tuntas mengenai kasus Belanda. Namun, bagi Weber kritik ini tidak menjadi alasan untuk mempertimbangkan kembali tesisnya; yang jelas ia agaknya terusik oleh yang dirasakannya sebagai suatu serangan terhadap otoritasnya dalam masalah-masalah keserjanaan. Pandangan Rachfahl adalah sesuai dengan sebuah studi oleh sejarawan Belanda, Elias, 1903.

⁶ S.N. Eisenstadt, dalam *Modernization*, 1966, menjelaskan lebih jauh teori Gershenkron; saya telah merumuskan keberatan-keberatan saya dalam Wertheim, 1974, hal. 79 ff.

⁷ Witold Kula, "Les debuts du capitalisme en Pologne dans la perspective de l'histoire comparee," teks sebuah ceramah yang dibacakan pada Akademi Polandia di Roma, 1960.

⁸ W.W. Rostow, "Rostow on Growth," *The Economist*, 15 dan 22 Augustus 1959, hal. 413.

⁹ Lihat Emmanuel Wallerstein, 1984, dalam paragraf "Socialist States: Mercantilist Strategies and Revolutionary Objectives." Dalam *The Capitalist World Economy* (Wallerstein 1979), pengarang itu menyatakan bahwa "manajer-manajer negara" Rusia "menggunakan teknik klasik setengah-pengunduran diri merkantilis dari perekonomian dunia" (hal.31). Di hal.29 ia menulis: "Merkantilisme ini menjadi alat utama dari negeri-negeri semiperiferal untuk menjadi negeri-negeri inti yang masih menjalankan suatu fungsi yang analog dengan dorongan-dorongan merkantilis akhir abad XVII dan XVIII di Inggris dan Perancis."

¹⁰ Lihat Bab III; juga Rene Dumont, 1965, hal. 216/7.

¹¹ Mengenai konsep populisme, dan dimasukkannya Sukarno ke antara pemimpin-pemimpin populis, lihat Worsley 1967, hal. 128-130; lihat juga Wertheim 1974, hal. 245-254.

¹² Lihat F. Schurmann 1971, mengutip "Peraturan-peraturan Partai" dari Kongres Kedelapan Partai tahun 1956, hal.118 ff.; lihat juga Theda Skocpol, *States and Social Revolutions*, 1979, hal. 286/7.

¹³ Sebuah uraian yang bagus sekali mengenai periode itu dapat dijumpai dalam William Hinton, *Sherfan*, 1983.

¹⁴ F. Clairmonte dan J.Cavanagh, "Global Economic Debacle and Corporate Power," *Economic and Political Weekly*, jilid 22, 1987, hal. 559; lihat juga Clairmont (1996), *Introduction*.

¹⁵ F. Clairmonte dan J. Cavanagh, "Third World Debt: The approaching Holocaust," *Economic and Political Weekly*, Jilid 21 (1986), hal. 1361-64; Susan Geore, "Third World Debt: The moral and Physical Equivalent," dalam *Who Owes Whom?* (Musim semi 1988), hal. 3-10.

¹⁶ Menurut *China Youth Daily* tgl. 8 April 1995, 100.000 orang yang diwawancarai diminta memberikan pendapat mereka mengenai orang Tionghoa modern yang paling dikagumi. Hasil survei mengungkapkan bahwa Mao Zedong berada di puncak daftar itu dengan 94.2% suara, menurut Reuter. Sun Yat-sen nomor dua, dengan 83.8%; Deng Xiaoping nomor tiga dengan 48.7%. Menurut laporan itu, 60% dari orang yang disurvei dilahirkan sesudah tahun 1970.

¹⁷ Hinton (1991); J. Petras, "Contradictions of Market Socialism in China," Bag.I, *Journal of Contemporary Asia*, Jilid 18 (1988), hal. 3-23.

¹⁸ Gunnar Myrdal dalam *The Challenge of World Poverty*, 1970. Sebuah contoh tipikal adalah rezim *Orde Baru* Suharto di Indonesia; lihat Robison, 1986.

¹⁹ Lihat Utrecht (1969), hal. 71 ff.

²⁰ Istilah *Rainbow Coalition* telah dipakai di Amerika Serikat untuk sebuah gerakan yang dilahirkan oleh Jesse Jackson, sebagai "suatu perjuangan bersama semua kekuatan progresif, yang meliputi kulit putih maupun kulit hitam, pria ataupun wanita, hijau maupun merah."

Bab V, Kegagalan-Kegagalan Demokrasi Yang Dipaksakan

Urgensi Dunia Ketiga

Winston Churchill katanya pernah bilang: “Demokrasi adalah sebuah sistem pemerintahan yang buruk, tetapi semua sistem lainnya adalah lebih buruk.” Tidak diragukan lagi, Churchill merujuk pada demokrasi-demokrasi yang telah menjadi dikenalnya di Kerajaan Inggris dan di tempat-tempat lain di dunia Barat.

Sejak runtuhnya Tembok Berlin telah banyak sekali laporan surat-kabar yang menyatakan, bahwa di suatu atau lain negeri, entah itu Slovakia, Polandia, Zambia, Ghana, Haiti atau Brazil, sistem parlemen tidak berfungsi sebagaimana mestinya – bahkan tanpa perbandingan apapun dengan alternatif-alternatifnya. Di berbagai negara ‘baru’ pasca-kolonial yang memulai, segera setelah merdeka, dengan sesuatu jenis demokrasi parlementer, kegagalan sistem itu untuk berfungsi sebagaimana mestinya, telah membawa pada suatu peralihan pada sesuatu jenis rezim yang lebih otoriter. Sebuah contoh tipikal diberikan oleh Indonesia sesudah-perang, di mana Presiden Sukarno, pada akhir tahun-tahun 1950-an, memperkenalkan suatu sistem ‘Demokrasi Terpimpin.’¹

Namun begitu, Utara, yang lebih sering diwakili oleh Bank Dunia dan IMF, secara berkanjang mensyaratkan setiap negara yang meminta bantuan finansial, agar dilakukan langkah-langkah untuk menjalankan demokrasi parlementer, dan inilah yang membawa kita pada pertanyaan yang diajukan dalam bagian berikutnya.

Demokrasi-demokrasi yang Berdaya-hasil

Mengapakah bentuk-bentuk pemerintahan demokratik, yang di sepanjang abad-abad lalu bersifat fundamental bagi perkembangan ekonomi dan kemajuan sosial di Barat, gagal membuahkan hasil-hasil serupa di bagian terbesar negeri-negeri Asia?

Kebanyakan negeri-negeri ini, yang pada umumnya masih tergolong

dalam yang disebut 'Dunia Ketiga,' adalah sangat 'kurang berkembang' jika dibandingkan dengan negeri-negeri dunia Barat, di mana proses 'modernisasi' telah dimulai jauh lebih dini. Kemudian, mengapakah bentuk-bentuk politik yang, selama suatu jangka waktu yang lama, sepadan bagi modernisasi di dunia Barat, kurang cocok bagi negara-negara yang merupakan pendatang-pendatang baru dalam pacuan modernisasi itu?

Pertama-tama mesti disadari bahwa demokrasi parlementer sering sekali, juga di masyarakat-masyarakat Barat, berada di bawah tekanan-berat. Perbincangan-perbincangan yang berkepanjangan di parlemen-parlemen dan senat-senat seringkali menjadi sasaran kritik, baik dari orang-orang biasa, di jalanan, di kedai-kedai dan klub-klub, dan dari media. Banyak yang lebih memilih mereka 'yang tidak bicara tetapi bertindak.' Di negeri-negeri Barat para pembesar berulang-kali berusaha memastikan suatu wilayah yang luas di mana mereka dapat melangsungkan kegiatan-kegiatan dan rencana-rencana mereka, tanpa terlalu banyak direpotkan oleh kontrol parlementer dan veto-veto yang merintang. Khususnya di bidang internasional kontrol parlementer itu selalu lemah. Pengalihan sebagian kekuasaan pengambilan-keputusan kepada badan-badan supra-nasional seringkali merupakan suatu cara yang memudahkan untuk menghindari kontrol parlementer. Dalam Masyarakat Eropa, misalnya parlemen-parlemen nasional tidak pernah secara efektif mengontrol pekerjaan berbagai komitennya, juga – sebagaimana sudah dapat diramalkan – pemilihan suatu 'Parlemen Eropa' yang representatif tidak secara berarti memperluas jangkauan kontrol rakyat.

Serangan-serangan langsung terhadap sistem demokrasi parlementer tetap merupakan ancaman potensial bahkan di dunia Barat. Fasisme, dalam bentuknya yang paling ekstrem, telah berkembang di Italia dan Jerman, yaitu negeri-negeri yang termasuk dalam dunia Barat, yang sedikit atau banyak sudah mengenal bentuk-bentuk dan azas-azas demokrasi Barat selama tahun-tahun 1920-an dan 1930-an ketika gerakan-gerakan fasis itu bangkit.

Alasan utama terhadap bentuk-bentuk dan prosedur-prosedur

demokratik ditujukan pada kekurangannya akan efisiensi dan keteguhan keputusannya, khususnya dalam keadaan-keadaan kritis. Jalan yang panjang dan berliku-liku dalam mencapai sesuatu keputusan, disuaratkannya dukungan mayoritas, dari berbagai segi, pada setiap urutan tahap, dikecam sebagai suatu beban yang tidak perlu dan mahal atas sistem pemerintahan – suatu gangguan yang dengan mudah dapat disingkirkan.

Namun, sekalipun semua kritik hampa dan usang terhadap prosedur-prosedur dan lembaga-lembaga demokratis itu, masih tidak dapat diingkari bahwa, di dunia Barat, kemajuan terbesar, baik dalam perkembangan teknologis dan ekonomis, telah dicapai di bawah sistem-sistem demokratis. Tiada di manapun demokrasi itu pernah berfungsi dalam suatu bentuk yang lengkap atau sempurna. Namun begitu, dengan segala kekurangan-kekurangannya, sistem-sistem ini telah –betapapun– tidak menghambat kemajuan yang dicapai; bahkan boleh dikatakan bahwa adalah demokrasi itu yang dalam jangka panjangnya yang memungkinkan kemajuan itu.

Sebuah contoh yang paling mengagumkan telah diberikan oleh Republik Tujuh Provinsi Belanda yang, pada abad ke XVII (tatkala lembaga-lembaga demokratis tidak meluaskan jangkauannya di luar lingkaran warga-warga kota yang berhak-suara), memadukan suatu keterkaitan ekstrim pada bentuk-bentuk dan prosedur-prosedur demokratis dengan suatu tingkat kemajuan teknologis dan ekonomis yang mengagumkan. ‘Revolusi industrial’ di Inggris terjadi di bawah suatu sistem demokrasi parlementer. Jelas, azas-azas demokratis memiliki suatu pembawaan daya-tahan yang tidak dapat diremehkan ataupun diabaikan. Karenanya tidak terdapat alasan yang jelas mengapa mereka mesti tidak cocok bagi bagian dunia yang, dalam abad ke XX, masih dalam keadaan terbelakang.

Latar-belakang Sistem-sistem Parlementer

Apakah gagasan dasar di balik sistem ‘limapuluh persen tambah satu suara,’ sebagaimana ia, kadang-kadang, secara olok-olok dirumuskan?

Pertama-tama, bentuk-bentuk pemerintahan demokratis bersangkutan dengan lebih daripada sekedar keputusan-keputusan mayoritas yang

diambil oleh parlemen-parlemen atau lembaga-lembaga perwakilan lokal dan regional. Demokrasi barat, misalnya, secara tidak terpisahkan terikat pada kebebasan mengumpulkan informasi dan pembentukan dan pernyataan pendapat-pendapat, bersamaan dengan jaminan-jaminan bagi hak kebebasan berkumpul.

Walaupun begitu, keputusan-keputusan yang diambil dengan suara mayoritas para wakil pilihan rakyat mjasih merupakan bagian pokok dari sistem demokrasi Barat. Agaknya menjadi penting untuk meneliti lebih dalam ke dalam sifat sesungguhnya dari azas demokratik itu. Menurut pendapat saya, landasan ideologisnya ialah keyakinan bahwa sebenarnya tidak terlalu menjadi soal mengenai keputusan-keputusan yang diambil itu, asal saja suatu mayoritas rakyat setuju dan siap untuk mendukungnya. Karenanya, sistem mesti memperhitungkan segala kemungkinan bahwa keputusan-keputusan aktual itu, sekalipun diputuskan sebagai hasil suara mayoritas, bisa saja salah atau bahkan berbahaya, jika diniulai menurut kaidah-kaidah yang berdasarkan efisiensi atau keahlian; keputusan-keputusan itu mungkin berdasarkan informasi palsu atau suatu kesalahan dalam penilaian. Para pegawai pemerintah, baik di tingkat pusat atau lokal, mungkin saja terhambat dalam penunaian tugas-tugas mereka secara berdaya-hasil oleh segala macam rintangan yang dipasang oleh lembaga-lembaga perwakilan.

Namun sistem itu memiliki suatu segi positif, yang juga tidak dapat diremehkan: selalu terdapat kesempatan bagi perbaikan. Bersamaan dengan itu, sistem itu dapat menahan timbulnya ketegangan serius karena para pemberi suara minoritas tidak perlu merasa pihak mereka terlampau disudutkan. Kesempatan-kesempatan baru akan timbul untuk membuat pandangan-pandangan mereka tetap unggul. Minoritas itu dapat meneruskan perjuangan mereka hingga tidak di mana ia tidak lagi dikalahkan (suaranya), tetapi sendiri menjadi mayoritas.

Kesabaran adalah harga yang harus dibayar. Secara relatif diredakannya minoritas yang kalah itu, dan suatu pengurangan ketidakpuasan mereka, dicapai dengan mempertimbangkan faktor waktu sebagai hal yang memiliki arti-penting sekunder. Sistem demokratik berangkat dari anggapan bahwa faktor waktu tidaklah menentukan. Titik berangkatnya

ideologikalnya yang sesungguhnya adalah bahwa 'dalam jangka panjang' adalah akal sehat yang lebih unggul. Suatu sistem demokratik yang memperkenankan pembentukan pendapat-pendapat secara bebas mengandung jaminan-jaminan secukupnya untuk memastikan bahwa, dalam jangka panjangnya, alasan-alasan yang masuk akal yang lebih unggul, lewat persuasi/himbauan penuh kesabaran. Menurut garis pikiran rasional yang menjadi sumber inspirasi sistem parlementer demokratik Barat, 'akal sehat' mesti, akhirnya, menang. Lambat atau cepat, kesalahan-kesalahan akan dikoreksi, sedangkan ketegangan-ketegangan serius dapat dikendalikan dengan memperkenankan minoritas-minoritas secara terbuka menyatakan ketidak-puasan mereka dan menekankan alasan-alasan mereka demi suatu tempuhan aksi yang lain.

Sebagai ringkasan, menurut konsep Barat mengenai demokrasi, peraturan-peraturan permainan dipatuhi. Minoritas yang dikalahkan itu membentuk suatu oposisi 'loyal' dan menunggu kesempatan berikutnya, di dalam kerangka kerja diskusi parlementer yang berlangsung dengan dipadukan dengan pemilihan-pemilihan umum secara periodik. Dengan sistem ini tidaklah sangat penting mengenai apa yang terjadi, asal saja itu terjadi menurut peraturan-peraturan permainan itu. Dalam keselarasan dengan konsep Inggris mengenai sportivitas dalam olahraga, permainan parlementer bukanlah suatu masalah fulus, tetapi adalah soal prinsip.

Demokrasi-demokrasi Dalam Krisis

Apakah yang membuat mungkinnya masyarakat-masyarakat Barat untuk tidak hanya berfungsi dengan cara jajak-jajak yang tampak seperti acakan itu untuk bahkan mencapai pertumbuhan ekonomi yang mengesankan? Bagaimana dapat kita jelaskan kemajuan yang pesat, dan perkembangan yang dinamis, di begitu banyak bidang, seperti yang dicapai di dunia Barat, khususnya dari tahun 1800 ke sini, jika kita menerima/menyatakan bahwa cuma 'fulus dan fulus' pada umumnya lebih dipentingkan daripada azas-azas? Bagaimanakah para negarawan dunia Barat mampu memerintah nasion-nasion sekalipun dengan suatu permainan parlementer yang amat rumit yang menuntut kesabaran maksimum?

Untuk memulai dari awalnya, di abad ke XIX tugas pemerintah dipandang sebagai suatu tugas yang sangat terbatas. Suatu pemerintahan tidak dimestikan bertindak sebagai kekuatan pendorong bagi pertumbuhan ekonomis dan teknologis. Selama sesuatu pemerintahan, lewat cara-cara perundang-undangan, yang dibekali keputusan-keputusan pengadilan, menciptakan kondisi-kondisi legal yang dituntut oleh para pengusaha 'swasta' (*private entrepreneurs*) atas prakarsa-prakarsa dan kegiatan-kegiatan ekonomi mereka, maka adalah yang tersebut belakangan itu yang dapat mengurus fulus dan fulus itu! Dalam negara 'liberal-demokratik' itu, yang hanya mesti berfungsi menurut ideal Jeffersonian mengenai 'pemerintahan yang sederhana,' atau sebagai 'negara penjaga-malam,' maka suatu aparatus pemerintahan yang efisien tidaklah terlalu penting. Yang terpenting ialah bahwa pemerintah mematuhi aturan-aturan permainan dan sejauh-jauh mungkin menahan diri untuk tidak mencampuri proses ekonomis. Lagi pula, sepanjang abad ke XIX, para pemilih (para orang yang berhak-memilih) Barat umumnya dibatasi pada pemilik-pemilik kekayaan – yang berarti bahwa para anggota parlemen untuk bagian terbesar, memeluk pandangan-pandangan dan kepentingan-kepentingan usaha-usaha swasta burjuis.

Namun begitu, dalam abad ke XX, dengan meningkatnya campur-tangan pemerintah dalam kehidupan ekonomi, kontrol parlementer acapkali dialami sebagai berlawanan dengan pemerintahan yang efisien. Tidak saja rezim-rezim fasis dan anti-demokratik secara terbuka berkuasa di Itali, Jerman dan Spanyol; sistem politik berada di bawah tekanan gawat bahkan di negeri-negeri dengan tradisi-tradisi demokratik sejak dulu. Khususnya selama krisis ekonomi tahun-tahun 1930-an, seruan akan seorang kuat seringkali terdengar, dan di berbagai lingkaran terdapat suatu simpati tertentu bagi ide-ide korporatis yang diambil dari model-model Italia atau Portugis, di mana tiada disembunyi-semunyikan komponen-komponen diktatorialnya.

Tetapi Perang Dunia Kedua dengan pengalaman-pengalaman pahit mengenai rezim-rezim diktatorial, baik itu sebagai lawan dalam peperangan maupun sebagai pasukan-pasukan pendudukan, memberikan suatu nafas-kehidupan baru pada ideal-ideal demokratik: Angkatan-angkatan Perang Sekutu yang jaya telah 'berperang untuk

menjadikan dunia ini aman bagi demokrasi.' Demokrasi-demokrasi Barat bahkan telah membuktikan keunggulan militer mereka atas kediktatoran-kediktatoran Jerman, Italia dan Jepang (walaupun akan sulit sekali, di masa Stalin, melihat bagian Sovyet dalam kemenangan itu sebagai kemenangan bagi demokrasi!).

Namun, telah menjadi semakin jelas, di masa pasca-perang, bahwa sistem parlementer, yang didasarkan pada penyelenggaraan pemilihan-pemilihan umum secara berkala, tidak lagi memberikan peluang secukupnya bagi seorang pemilih, dengan hak pilih umum, untuk secara benar-benar mewujudkan pengaruh rakyat. Kian meningkatnya kekuasaan kepentingan-kepentingan bisnis multinasional menyatakan wujudnya dalam gejala-gejala seperti 'lobby,' 'kelompok-kelompok penekan,' dan keputusan-keputusan parlement yang direkayasa lewat konsultasi-konsultasi antara pemerintah dan partai-partai dalam parlemen. Menjadi mudah dimengerti kecenderungan, di antara berbagai kelompok marginal, untuk beralih pada cara-cara ekstra-parlementer dalam melaksanakan aspirasi-aspirasi demokratik mereka. Ini menjelaskan bahwa semua pemogokan-umum, demonstrasi massa, mogok-duduk atau pemboikotan, kesemuanya untuk mengerahkan tekanan pada pemerintahan-pemerintahan atau partai-partai politik. Walaupun adanya pernyataan-pernyataan di lingkungan-lingkungan penguasa (kemapanan) bahwa kampanye-kampanye seperti itu adalah ilegal dan bahwa protes terhadap kebijakan-kebijakan dan tindakan-tindakan pemerintah mesti disalurkan melalui talang-talang parlementer, frekuensi aksi-aksi ekstra-parlementer seperti itu di dunia Barat zaman sekarang menyiratkan bahwa demokrasi, yang diungkapkan dalam bentuk pendelegasian pada lembaga-lembaga perwakilan, berulang-kali gagal mencapai tujuannya, yaitu dalam menyediakan suatu katub pengaman bagi perasaan-perasaan ketidak-puasan kolektif. Aksi ekstra-parlementer merupakan kemungkinan satu-satunya yang tersisa bagi yang tidak berdaya mengerahkan kekuatan, setiap kali mereka merasa bahwa mereka tidak diwakili secara secukupnya oleh para wakil terpilih di parlemen.

Demokrasi parlementer menjadi sangat tertekan pada masa bahaya besar, yang terjadi akibat suatu peperangan atau ancaman peperangan, tetapi

bahkan dalam keadaan seperti itu ide demokratik dapat menunjukkan daya-tahannya. Harold Laski telah melukiskan reaksi-reaksi rakyat Inggris terhadap kekalahan Perancis di tahun 1940:

Kekalahan Perancis mengungkapkan bahwa kaum Fasis penakluk itu tidak hanya menawarkan perbudakan nasional bagi korban-korban mereka, tetapi juga kehancuran perekonomian mereka (...) Kenistaan yang sudah terbayang di muka bagi Inggris Raya menyingkirkan keragu-raguan dan kesangsian-kesangsian kurun Baldwin-Chamberlain. Telah menjadi jelas bagi para orang yang paling buta-pun bahwa keberadaan Inggris sendiri sebagai suatu nasion bebas yang dipertaruhkan. Kesadaran itu membuat keharusan persatuan nasional semakin lebih jelas lagi ketimbang pada kurun manapun dalam sejarah Inggris. Ia lebih menentukan ketimbang satu dasawarsa perdebatan, bahkan lebih dari itu, lebih daripada kisah-kisah mengenaskan dari seratus ribu kaum pengungsian, untuk membikin bahkan orang Inggris yang paling Konservatif memahami bahwa tiada harga yang terlalu besar bagi kejayaan/kemenangan Inggris. Pada musim panas dan musim gugur 1940 terdapat sesuatu yang sulit untuk tidak disebutkan sebagai suatu regenerasi demokrasi Inggris. Sifatnya perjuangan dirumuskan dalam pengertian-pengertian yang menjadikan identitas-identitas (kesamaan-kesamaan) di antara warga menjadi seratus kali lebih vital daripada perbedaan-perbedaan yang telah memisah-misahkan mereka (Laski 1946: 143).

Otokrasi-otokrasi dalam Krisis

Sebaliknya, otokrasi-otokrasi jauh daripada menjadi model-model kestabilan politik. Dalam situasi-situasi kritikal, otokrasi-otokrasi sering sekali mencari dukungan dengan menciptakan sebuah lembaga perwakilan, sekalipun mereka lebih suka itu mempunyai tidak lebih daripada suatu kapasitas sebagai pemberi nasehat. Di Eropa zaman pertengahan, seorang Pangeran (penguasa) yang hendak melancarkan suatu peperangan, mesti meminta pinjaman-pinjaman pada dewan-dewan kota yang merdeka. Seperti itu pula, pada akhir tahun-tahun 1780-an, semakin mendekatnya kebangkrutan memaksa raja Perancis Louis XVI memanggil bersidang Dewan Negara (Estate-General/Staten General) – yang terakhir kali bersidang pada tahun 1614!² Parlemen, yang mewakili Golongan Ketiga, telah berhasil mendapatkan begitu banyak kekuasaan, sehingga rezim kerajaan itu akhirnya ditumbangkan. Parlemen telah terlambat pemanggilannya (untuk bersidang).

Russia Tsaris tidak mengenal tradisi demokratik di luar/kecuali zemstvo-zemsto regional; di bawah Tsar Alexander II (1855-81) yang relatif lebih liberal telah memperoleh pengaruh tertentu, tetapi yang tidak bertahan lebih lama dari masa pemerintahan Tsar Alexander II. Krisis yang melahirkan lembaga perwakilan pertama di tingkat nasional adalah hasil kekalahan perang terhadap Jepang (1904-1905). Walaupun Revolusi Russia peretama, tahun 1905) yang menyusul kemudian, ditindas habis oleh Tsar Nicholas II, di tahun 1906 ia telah terpaksa melahirkan Duma pertama, tetapi hanya sebagai sebuah badan penasihat. Sebuah kekalahan perang, kali ini terhadap Jerman, yang mengakibatkan krisis yang menentukan bagi kekuasaan imperial di tahun 1917. Tetapi tiadanya suatu tradisi demokratik sejati, dipadukan dengan tiada hadirnya suatu Golongan Ketiga Russia yang berarti sebagai suatu sumber dukungan burjuis bagi Duma, telah memungkinkan sekelompok kaum buruh industrial dan prajurit yang terorganisasi untuk mengikuti suatu jalan yang lebih radikal dan mengusahakan suatu penggulingan kekuasaan secara revolusioner. Rezim yang kurang-lebih demokratik dan dipimpin oleh Duma, yang telah lahir sesudah Revolusi Februari tahun 1917 (dan dengan turun-takhtanya Tsar), hanya berlangsung delapan bulan; pada bulan Oktober ia dikalahkan oleh revolusi anti-burjuis yang dipimpin oleh Lenin.

Begitu berkuasa, kaum Bolsyewik (Partai Komunis Russia), mencoba suatu tipe demokrasi alternatif. Sementara ideologi Marxis menekankan pada peranan aktif massa-massa proletarian dan emansipasi mereka sebagai suatu tujuan revolusi, azas-azas partai, khususnya menurut interpretasi Leninis, menekankan sifatnya sebagai barisan pelopor kelas proletar. Ini di dalam praktek aktual dipandang mengharuskan kepemimpinan negara dan masyarakat oleh sebuah partai yang terorganisasi secara ketat.

Istilah-istilah yang dipakai oleh pemerintahan-pemerintahan komunis di Eropa Timur sejak akhir Perang Dunia Kedua, seperti sentralisme demokratik, atau Demokrasi Rakyat, dimaksudkan untuk mengaksentuasi sifat-sifat demokratik yang diklaim bagi sistem-sistem kenegaraan yang baru diciptakan/dibentuk. Dalam praktek sesungguhnya telah menjadi jelas bahwa sistem-sistem seperti itu, dengan struktur

negara maupun peranan dominan dan struktur hierarkis dari partai-partai komunis nasional, merupakan suatu bahaya serius bagi ide demokratik.

Erosi Demokrasi secara langsung

Sentralisme demokratik seringkali bekerja sedemikian rupa sehingga, sementara di dalam partai, mungkin saja ada ruang bagi diskusi demokratik, sekali sebuah keputusan telah diambil oleh organ partai bersangkutan di tingkat sentral, maka setiap anggota partai tidak saja mesti berpedoman padanya, melainkan juga mesti mendukungnya di dalam hubungan-hubungan dirinya dengan pihak-pihak luar. Ketika seorang teman baik saya, seorang anggota partai komunis Belanda yang setia, berkukuh membela suatu posisi yang diambil oleh partainya, isteri saya dan saya sendiri selalu mengetahui apakah teman itu di dalam hatinya memang setuju dengan yang dibelanya itu: setiap kali ia tidak setuju, wajahnya mesti menjadi merah-padam. Demikianlah demokrasi itu, menurut penafsiran Leninis tentang 'demokrasi partai,' diberi suatu kedudukan sekunder, sedangkan 'sentralisme' yang berperan secara pokok.³

Begitu kaum revolusioner itu berkuasa, maka penegakkan suatu 'diktatur proletariat' membawa pada erosi lebih lanjut dari demokrasi. Apakah tahapan ini diterakan untuk menggambarkan suatu tindakan sementara, pada hari-hari awal suatu negara baru, hingga kini masih belum dikalahkan secara tuntas (dan bahkan mungkin menjauhkan sekutu-sekutu kuat dari luar darinya), 'kediktatoran' itu mudah sekali memperoleh/mengambil ciri-ciri permanent – sebagaimana contoh Sovyet telah membuktikannya. Dalam hal seperti itu, suasana politis tidak lagi ditentukan oleh kontrol rakyat dan partisipasi massa, tetapi oleh pemeliharaan dan legitimasi klaimnya untuk mewakili massa proletariat, semakin berprilaku dengan cara otoriter manakala menghadapi tidak saja musuh-musuhnya, tetapi juga massa itu sendiri.

Pada tahun-tahun awal negara Sovyet, yaitu segera mengikuti asal-usulnya dalam Revolusi Russia, ia memang berusaha untuk tidak saja memerintah negeri itu atas nama rakyat, tetapi juga secara aktif melibatkan mereka (rakyat, pen.) di dalam urusan-urusan politik. Selama

tahun-tahun pertama sesudah *Revolusi Oktober*, 'sovyet-sovyet' (dewan-dewan) kaum buruh, kaum tani dan prajurit, yang dibangun di setiap bagian negeri itu, mempunyai suatu pengaruh yang besar atas pemerintahan di berbagai tingkat. Eksperimen dengan demokrasi langsung di tingkat lokal ini dimaksudkan untuk memantapkan partisipasi aktif dan kontrol atas pemerintahan oleh massa luas dalam suatu cara yang lebih radikal daripada yang pernah dicapai oleh demokrasi-demokrasi Barat. Dalam waktu beberapa tahun saja pengaruh berbagai dewan itu mulai merosot. Perang dalam negeri yang berkelanjutan, berpadu dengan 'Perang-Perang Intervensi' yang dilancarkan kekuasaan-kekuasaan asing, menyebabkan diperkuatkannya unsur otoritarian di dalam yang masih disebut 'kediktatoran proletariat' itu.

Selama tahun-tahun 1920-an, walaupun kesulitan-kesulitan luar-biasa yang dihadapi negara yang baru didirikan itu, para pemimpinnya masih menjadikan emansipasi massa rakyat yang luas sebagai suatu tujuan utama. Landasan luas bagi pendidikan umum, yang dibangun pada tahun-tahun awal ini (berbeda total dengan zaman-zaman Tsar, ketika sekolahan-sekolahan yang terbuka bagi golongan-golongan anak-anak yang sangat terbatas), membuktikan bagaimana sebuah negara yang berasal-usul dalam suatu revolusi sosial tidak dapat dibandingkan dengan kediktatoran-kediktatoran yang berasal-usul dari kontra-revolusi kontra-revolusi atau kudeta-kudeta.

Bertunginya Pemerintahan Sovyet

Mengenai tipe pemerintahan yang lahir setelah Revolusi Oktober, efisiensi nyaris tidak merupakan suatu karakteristik dari rezim baru Sovyet selama dasawarsa-dasawarsa pertama dari keberadaannya. Namun, harus kita akui, bahwa perkembangan ekonomi, khususnya di bidang industri berat, telah diberikan prioritas tertinggi oleh Rencana-rencana Lima Tahun yang dijalankan berturut-turut itu. Perkembangan ekonomi ini, yang hanya dapat dilaksanakannya berkat disingkirkannya kekuasaan para investor asing, mempunyai arti-penting luar-biasa menentukan bagi perkembangan dan makna ketidak-ketergantungan ekonomi Sovyet.

Namun begitu, di dalam rezim pembangunan ekonomi, sebagaimana itu ditegakkan oleh Stalin selama tahun-tahun 1930-an, kenekadan merajalela dengan mengorbankan demokrasi. Kediktatoran partai telah memperoleh suatu sifat permanen dan kritik dari bawah menjadi tidak-mungkin, atau menjadi terlalu membahayakan. 'Kediktatoran proletariat,' jika asal-mulanya diciptakan untuk memimpin perjuangan terhadap unsur-unsur kontra-revolusioner dari burjuasi dan aristokrasi, telah merosot menjadi suatu kediktatoran partai atas semua uyang menentang garis resmi dalam bentuk apapun.

Proses kemerosotan dari sebuah negara yang lahir dari suatu revolusi dapat dilihat dalam kaitannya dengan suatu kesalahan konsepsi teori yang disebabkan oleh suatu penafsiran dogmatik atas teori Marxis mengenai basis dan bangunan atas. Stalin dan rekan-rekannya meyakini bahwa basis ekonomi sepenuhnya menentukan bangunan-atas ideologis, sehingga menjadilah terlalu gampang untuk menganggap bahwa, dikarenakan alat-alat produksi telah diambil alih oleh suatu 'negara sosialis' atau 'korporasi-korporasi kolektif' (*kolkhoz-kolkhoz*), maka pemerintahan-sendiri oleh rakyat akan secara otomatis menyusul. Lewat fiksi ini maka dominasi oleh partai dapat dipertahankan terhadap setiap kritik mengenai caranya beroperasi di dalam praktek.

Secara sangat di luar segala dugaan, Uni Sovyet yang diserang di musim panas tahun 1941 oleh kekuatan-kekuatan militer Hitler yang luar-biasa kuatnya dan menderita serentetan kekalahan-kakalahan gawat pada bulan-bulan berikutnya, dalam jangka panjangnya tidak saja berhasil menghadapi serangan-serangan membabi-butu pihak Jerman terhadap Moskow, Leningrad dan Stalingrad, tetapi juga berhasil mengusir Jerman mundur dan balik hingga sejauh kota Berlin. Hingga invasi Normandi di musim panas 1944, Uni Sovyet harus perang di benua Eropa, tanpa sedikitpun dukungan militer secara langsung dari angkatan perang Sekutu kecuali pembekalan-pembekalan di bawah *Lend-Lease Act* (Perjanjian Sewa-pinjam). Negara Sovyet tidak saja berhasil mencapai suatu tingkat efisiensi teknis dan organisasi yang tinggi, tetapi juga berhasil, walaupun watak kediktatorannya yang kejam, dalam mendapatkan dukungan di kalangan lapisan-lapisan luas penduduk, terutama melalui himbauannya pada sentimen-sentimen patriotik.

Tetapi, memenangkan suatu peperangan adalah berbeda sekali dengan memenangkan perdamaian. Kemenangan tidak saja memajukan / meningkatkan prestise internasional Uni Svoyet, melainkan telah memungkinkannya untuk memaksakan banyak dari sistem politis dan ekonomisnya sendiri pada negeri-negeri yang di tahun 1956 akan bergabung ke dalam Pakta Warsawa. Namun, di negeri-negeri Eropa-Timur ini, sistem itu tidak dipandang oleh penduduk umumnya sebagai sesuatu yang dipilih oleh mereka sendiri, melainkan lebih banyak telah dipaksakan oleh suatu kekuasaan asing. Demikian inilah juga halnya dengan negara-negara Baltik, yang, dalam kurun zaman di antara dua peperangan dunia, telah merupakan republik-republik mereka.

Bahkan di Uni Sovyet, yang, setelah berakhirnya perang dunia kedua, telah mencapai status/kedudukan sebagai adidaya kedua di dunia, ketergantungan total kehidupan ekonomi pada negara dan Partai Komunis telah menjadikan tidak mungkin bagi negeri itu untuk bersaing secara berdaya-hasil dengan dunia Barat. Di sini, keterbelakangan semulka dari Rusia pada waktu Revolusi, juga merupakan suatu faktor penting.

Kelemahan-kelemahan Uni Sovyet, baik di dalam negeri itu dan di lingkungan pengaruh di Eropa Tiomur, menjadi jelas pada semua orang di tahun 1980, dalam suatu presis yang mencapai kesudahan-akhirnya dengan runtuhnya Tembok Berlin di tahun 1989.

Demokrasi yang Dipaksakan di Eropa Timur

Walaupun adanya keberhasilan mencolok dari kapitalisme, negeri-negeri Barat masih membuat dua kesalahan menentukan.

Yang pertama, yang sudah dikemukakan dalam Bab I, 'Amerika Nomer Satu,' adalah usaha untuk memaksakan suatu 'ekonomi pasar bebas' di seluruh dunia, sekalipun 'Utara' sendiri tidak pernah menjalankan suatu sistem seperti itu dalam mengejar kepentingan-kepentingan ekonominya sendiri. Akibat-akibat dadakan pemberlakuan secara paksa suatu perekonomian pasar pada nasion-nasion dengan perekonomian yang sebelumnya dikontrol sepenuhnya oleh negara, untuk sementara waktu telah menghasilkan akibat-akibat malapetaka, walaupun hanya karena dampak negatifnya atas kekuasaan-kekuasaan negara dalam hal

pengaturan dan moderasi.

Hasil-hasil malapetaka seperti itu telah menyusul pemberlakuan secara paksa sistem-sistem pemerintahan parlementer di negeri-negeri Eropa-Timur. Kenyataan bahwa sistem-sistem seperti itu telah lama beroperasi dengan berhasil di dunia Barat memberikan suatu kesan –setidak-tidaknya– akan ketulusan, karena usaha-usaha telah dilakukan untuk berbagi kebajikan demokrasi parlementer dengan dunia di luar belahan Barat. Namun, di negeri-negeri tanpa suatu tradisi parlementer apapun, pemberlakuan secara tiba-tiba dari suatu sistem pemerintahan yang asing, membawa serta resiko-resiko jenis lain yang luar-biasa tingginya.

Di Eropa Barat, Amerika Serikat dan negeri-negeri seperti Kanada, Australia dan Selandia Baru, sistem parlementer berkembang sebagai bagian dari suatu tradisi historis yang ber-evolusi secara terus-menerus. Sistem itu berarti lebih dari sekedar penghitungan suara, melainkan mensyaratkan juga hak untuk berkumpul secara bebas dan akses bebas pada informasi.

Yang lebih penting lagi ialah kebutuhan bagi minoritas-minoritas politis untuk mempunyai kepercayaan secukupnya mengenai kejujuran operasi sistem itu, sehingga mereka dapat menerima kekalahan di kotak-kotak suara, dan menantikan giliran mereka. Tetapi kepercayaan seperti itu bukanlah sesuatu yang dapat dipaksakan pada sesuatu kelompok di dalam suatu nasion. Tanpa adanya sekadar toleransi politis yang sudah ada sebelumnya, maka sistem itu tak akan dapat berjalan. Di Eropa Barat, Irlandia Utara telah membuktikan, selama berabad-abad, akibat-akibat malapetaka karena ketiadaan toleransi kelompok itu.

Di Eropa Timur, secara tiba-tiba memberlakukan ‘demokrasi parlementer’ bahkan dapat lebih bermalapetaka lagi ketimbang secara mendadak diberlakukannya suatu ‘perekonomian pasar bebas.’ Namun kedua-duanya itu dipersyaratkan oleh Bank Dunia dan IMF, sebagai prasyarat-prasyarat bagi bantuan keuangan.

Barangkali, secara lebih daripada suatu negeri lain, Yugoslavia telah membuktikan akibat-akibat dari tiba-tiba menghilangnya suatu pemerintahan yang kuat mempersatukan, Ketika ini terjadi pada awal

tahun-tahun 1990-an, tiga kelompok etnik, masing-masing dengan agamanya sendiri, berusaha mendirikan negara mereka masing-masing, yang di masing-masingnya ada suatu mayoritas parlementer di tangan kelompok etnik yang dominan, akan memungkinkannya mendominasi wilayah yang seluas-luas mungkin. Dalam skenario ini, arti-penting ekonomikal dan strategis sesuatu wilayah yang diperebutkan –seperti misalnya, akses ke Lautan Adriatik– juga merupakan suatu faktor menentukan.

Makedonia, Slovakia, Hungaria dan Rumania, belum lagi disebutkan di sini banyak negara-negara yang telah muncul di bekas Uni Sovyet, memberikan contoh-contoh lebih lanjut mengenai disintegrasi politis ini, yang berpadu dengan nafsu-nafsu etnik dan religius, jika tidak pada tahap mala-petaka yang sama.

Di Yugoslavia, pengakuan internasional atas negara-negara federal sebagai negara-negara nasional telah mengubah suatu perang-saudara menjadi suatu peperangan antara bangsa-bangsa. Di banyak bagian dunia dewasa ini perang-perang-saudara sedang berlangsung. Sejak runtuhnya Tembok Berlin kita telah tahu bahwa pemberlakuan ‘secara paksa’ atau ‘didesakkannya’ suatu sistem parlementer, sebagai suatu prasyarat bagi bantuan ekonomi, sebaliknya ketimbang menahan segala jenis konflik, justru menimbulkan perang-saudara, atau konflik-konflik yang tidak terpecahkan di dalam suatu nasion bentukan baru.⁵

Pemberlakuan sistem-sistem parlementer bagi nasion-nasion Dunia Ketiga, setelah mereka itu berhasil dan mencapai kemerdekaan dari bekas kekuasaan-kekuasaan kolonial, memberikan bukti berlimpah mengenai keguguran-keguguran seperti itu. Ketiada-hadiran suatu tradisi demokratik pada tingkat negara menjelaskan ketidakmampuan banyak dari negara-negara baru di Afrika untuk menghindari perang-saudara. Namun, terdapat suatu faktor lain yang perlu diperhitungkan.

Demokrasi Parlementer di Dunia Ketiga

Pertanyaannya ialah: apakah suatu sistem pemerintahan yang didasarkan pada demokrasi parlementer Barat mempunyai sesuatu peluang akan keberhasilan dalam suatu masyarakat yang termasuk pada Dunia Ketiga

yang secara ekonomi belum berkembang – yang hingga sekarang meliputi sebagian besar Asia. Beralasan sekali untuk memandang sebagai suatu masalah pokok apakah tingkat pendidikan dan mentalitas rakyat membuatnya dapat memuaskan salah-satu kondisi dasar bagi suatu demokrasi parlementer, yaitu suatu pendapat umum yang berpengetahuan luas. Masalah ini jelas penting sekali, tetapi bagaimana kalau kita mengajukan pertanyaan yang sama, dengan penekanan yang sama pula, mengenai sejumlah masyarakat Barat? Menurut pandangan saya, terdapat suatu masalah yang lebih mendasar.

Cara demokrasi parlementer berfungsi di dunia Barat mendukung pandangan bahwa sistem itu bergantung pada azas dasarnya bahwa tidak terlalu soal mengenai ‘apa’ yang terjadi, selama segala sesuatu berlangsung dalam persesuaian dengan aturan-aturan permainan parlementer. Demokrasi parlementer itu sedikit atau banyak berfungsi di dunia Barat karena basis material masyarakatnya secara relatif stabil. Menunda tindakan-tindakan tertentu, yang sendirinya dihasratkan, untuk suatu jangka waktu empat atau delapan tahun, tidak mesti merupakan suatu malapetaka. Hanya dalam kasus-kasus malapetaka alam, atau peperangan atau ancaman perang, dapatlah kebutuhan akan aksi yang mendesak bertubrukan dengan demokrasi, tetapi bahkan ini tidak harus begitu, sebagaimana dibuktikan di Inggris selama Perang Dunia Kedua (Laski 1946: 145 ff., 154 ff.). Orang dapat membayangkan situasi-situasi masa depan di mana tindakan-tindakan untuk melindungi lingkungan alam akan menjadi begitu mendesak sehingga tidak mungkin lagi untuk menunda aksi sampai dicapai suatu mayoritas parlementer, yang akan bersedia melanggar kiprah bebas kekuatan-kekuatan ekonomi hingga batas yang diperlukan.⁶

Karenanya negeri-negeri Dunia Ketiga, apabila mempertimbangkan strategi-strategi jangka-panjang, mesti memutuskan apakah mereka benar-benar dapat menunggu hingga aksi yang diperlukan itu dapat ditindakan bersesuaian dengan aturan-aturan permainan parlementer. Tidak mungkinkah bahwa suatu lakon yang dimainkan antara pemerintah dan partai-partai oposisi, dengan segala manuver-manuver politik yang berkaitan, perdagangan sapinya, dan aspek-aspek menjijikkan lainnya, merupakan suatu rintangan yang tidak dapat ditanggulangi bagi suatu

kebijaksanaan jangka panjang?

Ciri-ciri Khas Ekonomi Dunia Ketiga

Meneruskan perbandingan dengan Barat segera membawa diri kita pada pertanyaan berikutnya: mengapa Dunia Ketiga masa kini begitu sulit memadukan perkembangan ekonomi dengan sistem-sistem pemerintahan yang demokratis, manakala Barat lama berselang telah berhasil mencapai sasaran yang sama itu? Di negeri Belanda, misalnya, suatu bentuk demokrasi ekstrim telah berfungsi selama abad ke XVII, pada suatu masa ketika negeri itu, menurut kaidah kita 'zaman sekarang,' jelas-jelas masih terbelakang. Yang sama berlaku juga bagi Inggris pada awal 'revolusi industrial,' seperti juga halnya dengan Amerika Serikat ketika mulai menempuh jalan modernisasi sebagai 'Nasion Baru Pertama' (Lipset 1963). Dalam semua kasus di atas sistem demokratis berulang-kali berada di bawah tekanan – namun ia tetap bekerja tanpa begitu banyak menghalangi perkembangan ekonomi. Lalu apakah yang menjadi perbedaan besar dengan Dunia Ketiga masa kini?

Sederhana sekali, dalam banyak aspek pokoknya, dunia sedang berkembang dewasa ini tidak dapat dibanding-bandingkan dengan dunia sedang berkembang abad-abad lalu. Terdapat faktor-faktor tertentu yang menjadikannya tidak dapat diterima, terutama sekali bagi rakyat masyarakat-masyarakat itu sendiri, untuk tanpa batas waktu tetap pada tingkatan mereka yang sekarang.

Salah-satu dari faktor-faktor esensial ini ialah kependudukan. Untuk menyebut beberapa angka: dari awal kurun Kristiani hingga kita-kira 1650, seluruh penduduk dunia telah berlipat-ganda kurang dari dua kali, yang berarti suatu pertambahan rata-rata secara alamiah sebesar kurang lebih satu per seribu dalam setahunnya. Tiga bersaudara: kelaparan, epidemik dan peperangan – nyaris mengontra-aksi laju kelahiran yang tinggi, yang mestinya berada pada suatu tingkat kurang-lebih 40 per seribu setiap tahunnya. Antara 1650 dan 1850, pertambahan penduduk per tahunnya agak meningkat, khususnya di Eropa Barat, di mana teknologi agrikultural maupun transportasi darat dan lewat air telah sangat ditingkatkan. Bencana-bencana alam dan kelaparan, sebagai

sebab-sebab kematian secara besar-besaran (skala massal), telah menurun hingga batas tertentu selama abad-abad itu. Tetapi bahkan dalam hubungannya dengan total kependudukan dunia, peningkatan alamiah rata-rata setahunnya selama abad-abad itu tidak melebihi 3 hingga 5 per seribunya.⁷

Berbeda dengan abad-abad yang lalu, tingkat pertambahan penduduk dunia per tahunnya sekarang kurang-lebih 20 per seribu – yang berarti suatu perlipat-gandaan penduduk setiap 40 tahun! Di bagian-bagian luas dunia yang ‘kurang berkembang/terbelakang’ peningkatan tahunan bahkan mencapai 25 hingga 30 per seribu, yang berarti perlipat-gandaan dalam 25 tahun. Suatu laju pertumbuhan seperti itu, yang, menurut Robert Malthus pada awal abad ke XIX sama sekali tidak terbayangkan dalam keadaan-keadaan keterbatasan persediaan tanah garapan, kini telah menjadi suatu kenyataan – dan suatu kenyataan yang sangat menindas.

Perbedaanbnya sepenuhnya adalah hasil perubahan-perubahan dalam angka kematian. Di negeri-negeri terbelakang dewasa ini, penurunan dalam tingkat kematian mendahului perubahan-perubahan struktural yang mendasar di dalam sistem perekonomian dan teknologi pertanian tradisional. Penurunan itu hasil dari diperkenalkannya –dari luar–inovasi-inovasi di bidang kesehatan dan pengobatan, seperti anti-biotika, insektisida dan inokulasi pencegahan terhadap infeksi-infeksi. Inovasi-inovasi ini mengurangi dampak epidemi-epidemi (salah satu dari ‘tiga bersaudara’), namun tanpa menghilangkan sebab-sebab kelaparan dan peperangan. Berkanjangnya perekonomian kemiskinan dan struktur-struktur sosial tradisional telah memelihara tingkat kelahiran untuk bertahan pada tingkat sebelumnya.

Ini telah menghasilkan kesimpulan bahwa diperkenalkannya kesehatan modern di negeri-negeri Dunia Ketiga telah menjadikannya jauh lebih sulit untuk memperkenalkan lembaga-lembaga demokratik. Lebih daripada itu, pertambahan penduduk yang cepat telah mengakibatkan perubahan-perubahan penting yang menyeluruh yang mempengaruhi jangkauan pelaksanaan strategi-strategi ekonomi tertentu.

Perluasan kapitalisme telah menarik wilayah-wilayah yang sangat luas

dari Dunia Ketiga ke dalam orbit perdagangan dunia. Sebagai akibatnya, kehidupan rakyat-rakyat petani telah menjadi semakin rentan bagi fluktuasi-fluktuasi pasar. Penduduk pedesaan yang bertumbuh dengan cepat sekali telah menjadi bergantung pada cepatnya perluasan perluasan pekerjaan-pekerjaan umum, khususnya irigasi; dalam banyak hal penduduk juga harus bergantung pada impor padi-padian.

Selanjutnya, dengan memberlakukan monokultura atau mengganggu reservoir-reservoir hutan, sistem-sistem ekonomi kolonial, semi-kolonial atau neo-kolonial seringkali menyebabkan erosi tanah secara besar-besaran. Sebagai akibatnya, keseimbangan biologis menjadi lebih tidak stabil dari yang dapat ditimbulkan oleh pertumbuhan penduduk yang cepat. Dengan mengeksploitasi kekayaan-kekayaan bumi maupun bagian-bagian penting dari persediaan tenaga manusia, perusahaan kapitalis telah membuat penduduk-penduduk lokal semakin tergantung pada campur-tangan asing. Pada kekacauan dan kesengsaraan pedesaan yang ditimbulkan oleh faktor-faktor ini, kita mesti juga memperhitungkan masalah kelaparan dan pengangguran massal yang ada di kota-kota besar Dunia Ketiga yang secara industrial belum berkembang, seperti Kalkuta, Bombay atau Rio de Janeiro. Kesengsaraan yang terdapat di sana adalah dalam skala yang tidak dikenal di Barat pada waktu lahirnya industri perkotaan.

Suatu perbedaan penting lainnya ialah, bahwa produksi dan distribusi di negeri-negeri Dunia Ketiga pada waktu ini hingga hingga jauh sekali didominasi oleh perusahaan agrobisnis asing. Dalam agrikultura, sebagian besar kekuasaan ekonomi kini berada dalam tangan korporasi-korporasi agrobisnis asing. Kepentingan-kepentingan 'multinasional-multinasional' ini pada umumnya didukung oleh kekuatan-kekuatan politik, baik yang internal ataupun yang asing, yang tiada ada sedikitpun kecondongan untuk memperkenankan berkuasanya partai politik yang menganut suatu pendekatan radikal pada masalah-masalah fundamental, apabila ini akan membahayakan kedudukan kekuasaan '*mereka*' atau sumber-sumber laba '*mereka*.' Sejarah rezim Allende di Chili dengan teramat jelasnya menggambarkan nasib sebuah rezim parlementer dalam hal seperti itu.

Meningkatnya inkorporasi perekonomian-perekonomian agrarian negeri-negeri Dunia Ketiga, dalam bentuk ketergantungan-ketergantungan neo-kolonial, ke dalam suatu perekonomian dunia yang ‘diglobalisasi’ dan didominasi oleh Mammon, tidak memungkinkan dipersamakannya situasi dan potensial untuk pertumbuhan mereka sekarang dengan kondisi-kondisi di negeri-negeri Eropa Bnarat pada waktu ‘tinggal-landas’ mereka. Ini menjadikan tugas yang dihadapi pemerintahan-pemerintahan Dunia Ketiga semakin lebih berat ketimbang yang dihadapi dunia Barat pada awal proses modernisasinya.

Faktor Urgensi

Demokrasi berkembang di Barat sebagai jawaban pada tuntutan rakyat untuk bersuara dalam masalah-masalah politik. Melalui diberlakukannya hak-suara (*franchise*), mula-mula atas dasar suatu basis terbatas, dan kemudian berangsur-angsur semakin luas, sejumlah orang yang semakin banyak jumlahnya, menjadi mampu untuk ikut-serta di dalam proses pengambilan keputusan.

Di Dunia Ketiga, dan khususnya di negeri-negeri Asia Bermusim Hujan (*Monsoon Asia*) yang berpenduduk padat, keperluan untuk memuaskan hasrat-hasrat dan tuntutan-tuntutan rakyat yang paling dasar membuat tidak mungkin penundaan yang berjangka waktu panjang. Ketidakpuasan massal dan pergolakan sosial di antara penduduk-penduduk perkotaan maupun pedesaan Dunia Ketiga merupakan suatu tantangan yang jauh lebih besar ketimbang apapun yang dihadapi pemerintahan di Eropa abad ke XVIII. Hingga batas yang tidak dikenal pada waktu revolusi industrial, kaum tani telah menjadi suatu kekuatan revolusioner yang potensial di banyak negeri. Ini untuk sebagian adalah hasil diperkenalkannya suatu derajat pendidikan rakyat oleh pemerintah-pemerintah gaya Barat selama periode kolonial atau semi-kolonial.

Masalah demokrasi yang mendasar di Duni Ketiga dewasa ini ialah, bahwa rakyat tidak dapat menunggu – demikian pula pemerintah-pemerintah. Namun, urgensi tidak dapat didamaikan dengan suatu tipe demokrasi di mana aturan-aturan mainnya lebih penting daripada hasil-hasil yang dicapai. Massa tidak dapat menunggu sampai sistem parlemen

itu, secara kebetulan, menghasilkan (mengangkat) sebuah partai politik atau sebuah koalisi yang memiliki keberanian, tenaga dan penilaian yang tepat untuk menjalankan kebijaksanaan konstruktif jangka-panjang yang diperlukan untuk memecahkan masalah-masalah pokok yang benar-benar dihadapi.

Selanjutnya, negeri-negeri Dunia Ketiga tidak mempunyai tradisi apapun yang dapat membuat suatu minoritas parlementer menerima, dengan sabar, kekalahan sementara, dan menunggu kesempatannya sendiri untuk berkuasa pada pemilihan umum berikutnya – setelah empat atau delapan tahun! Setiap penundaan tindakan-tindakan mendesak, dari pihak pemerintah, seperti pembangunan atau perbaikan irigasi, bendungan dan tangki-tangki air, penghutanan kembali, penyiapan ladang-ladang, lebih memungkinkan ledakan penduduk akan menghapus hingga nihil (tak-berarti) segala perbaikan yang sudah dicapai di bawah pemerintahan sebelumnya.

Setiap kebijaksanaan pembangunan jangka-panjang mungkin sekali memerlukan campur-tangan drastik dengan jaringan-jaring yang ada berdasarkan hubungan-hubungan politis dan sosial. Perencanaan yang baik tidaklah cukup, kecuali rencana-rencana itu dikordinasikan dan dilaksanakan oleh pemerintah, tanpa memandang kemungkinan semua itu disimpangkan atau didistorsi sebagai akibat pemilihan-umum berikutnya.

Negeri-negeri Dunia Ketiga secara terus-menerus dalam peperangan, tidak hanya terhadap alam, tetapi juga terhadap kekuatan-kekuatan neokolonial yang mendominasi perekonomian. Keadaan berperang ini mengharuskan suatu gaya pengambilan keputusan yang cepat dan efisien. Tantangan yang dihadapkan oleh ledakan kependudukan maupun dominasi kapitalis yang makin menyeluruh pada dasarnya bersifat dinamis. Tidak seperti Eropa yang terbelakang dua atau tiga abad yang lalu, rakyat-rakyat Dunia Ketiga ini tidak berjuang melawan kesulitan-kesulitan situasi yang stasioner (diam, tidak bergerak), melainkan terhadap suatu proses kemunduran progresif. Karenanya, jawabannya paling sedikit mestilah sedinamis tantangannya.

Kediktatoran-kediktatoran Militer

Lembaga-lembaga demokratik Barat nyaris tidak sepadan sebagai jawaban dinamis yang diperlukan oleh keadaan-keadaan dewasa ini di Dunia Ketiga. Partai-partai politik bukanlah dokter-dokter yang paling mungkin memberikan pengobatan-pengobatan darurat yang diperlukan oleh kasus-kasus gawat. Ini menerangkan seruan yang sering terdengar akan suatu pemerintahan 'kuat' atau bahkan suatu kediktatoran. Banyak negeri Dunia Ketiga, yang telah dibebaskan dari kekuasaan kolonial, menikmati –untuk suatu masa singkat– suatu sistem parlementer berdasarkan suatu model Barat, hanya untuk menyaksikan kaum militer merebut kekuasaan dan memaksakan *atau* suatu rezim yang terang-terangan diktatorial *atau* suatu rezim diktatorial yang bersumbunyi di balik suatu tampang demokratik. Perebutan kekuasaan itu umumnya dibenarkan oleh argumen bahwa suatu pemerintahan yang efisien tidaklah mungkin di bawah suatu sistem parlementer, yang sekaligus mendorong korupsi (Scott 1971: 10).

Kediktatoran militer, sekali berkuasa, beroperasi dengan slogan bahwa 'orde baru' itu akan membereskan secara drastik semua masalah pembangunan ekonomi. Korupsi, yang merajalela di zamannya partai-partai berlomba-lomba kekuasaan, akan dengan tegas dan keras diakhiri.

Adakah kediktatoran-kediktatoran militer benar-benar mampu untuk menyelesaikan masalah-masalah mendesak dari rakyat-rakyat yang ditundukkan pada mereka itu? Benarkah bahwa mereka itu tidak 'dihalangi' oleh kontrol parlementer yang merepotkan itu? Mereka mampu mengambil keputusan-keputusan dengan cepat dan radikal yang, menurut pandangan mereka, bersifat mendesak. Tetapi, apakah ini berarti bahwa suatu gaya yang pada dasarnya otoritarian itu sungguh-sungguh memungkinkan pemecahan atas masalah-masalah paling mendesak dari suatu masyarakat Dunia Ketiga?

Sejarah menyiratkan bahwa yang sebaliknya yang benar. Hampir semua negeri Amerika Selatan dan Tengah dirundung kemiskinan dan eksploitasi ekonomi. Selama abad ke XIX dampak kepentingan-kepentingan bisnis Amerika Utara telah meningkat hingga suatu tahap

sedemikian rupa hingga membenarkan argumen bahwa bekas koloni-koloni Spanyol dan Portugal itu telah diubah menjadi semi-koloni semi-koloni imperialisme Amerika. Dengan berlakunya kekuasaan luar-biasa (*exorbitant*) United Fruit Company tidaklah mengherankan bahwa berbagai 'negara baru' Amerika Tengah telah disebut dengan nama 'republik-republik banana.'

Jeremy Bentham telah menyusun konstitusi-konstitusi berdasarkan azas-azas demokratik bagi banyak negara baru di Amerika Selatan, namun sejumlah besar negeri-negeri ini telah, sepanjang abad ke XX, diperintah oleh junta-junta militer, seringkali untuk jangka-jangka waktu panjang sekali.

Junta-junta ini terbukti sama sekali tidak mampu meletakkan dasar-dasar bagi kesejahteraan umum rakyat, sekalipun di sejumlah negeri terdapat suatu prakarsa pada pembangunan industri. Masalah-masalah kemiskinan pedesaan tetap tak-terpecahkan, dan ketidak-merataan distribusi kepemilikan atas tanah, yang diwarisi dari kekuasaan kolonial Spanyol dan Portugal, masih berkanjang, sekalipun adanya reform-reform tanah di atas kertas, yang jarang sekali dilaksanakan secara penuh. Junta-junta itu jarang sekali menyerang landlordisme (tuan-tanah-isme) Seperti ditunjukkan oleh Rene Dumont, negeri-negeri ini bahkan belum memperkenalkan reform-reform yang dianjurkan oleh Jefferson sedini tahun 1785 (Dumont 1961: 83/84).

Di negeri-negeri Asia yang besar itu, di mana kaum militer merebut kekuasaan (Indonesia, Pakistan, Bangla Desh), setelah suatu jangka-waktu singkat yang menampakkan seakan-akan adanya keberdaya-hasilan tertentu di bidang ekonomi, ternyata keburukan-keburukan keterbelakangan bahkan menjadi semakin gamblang. 'Kekerasan' para diktator militer itu, dan pembantu-pembantu mereka, dengan mudah merosot menjadi pengejaran hasil-hasil cepat secara nekad. 'Pengobatan-pengobatan darurat' tidak mesti yang tepat bagi penyakit-penyakit gawat yang menimpa rakyat miskin di negeri-negeri miskin.

'Urgensi' mungkin sekali tidak bisa dipertemukan dengan demokrasi, namun kecepatan sama sekali tidak menjamin efisiensi. Dalam

prakteknya, kebanyakan diktator militer lebih tidak tertarik pada kesejahteraan massa rakyat daripada pada suatu bagian dalam operasi-operasi yang menguntungkan, kebanyakan dilakukan dalam usaha-usaha bersama dengan perusahaan-perusahaan asing. Massa rakyat dapat berpartisipasi sebagai tenaga kerja murah, tanpa diperkenankan mengorganisasi diri mereka dalam serikat-serikat buruh bebas; juga hak-hak kaum tani tidak dihormati manakala agri-bisnis agri-bisnis atau multinasional-multinasional lainnya mengklaim tanah untuk perusahaan-perusahaan mereka. Kenekadan dengan sangat mudahnya bisa berarti kekejaman.

Kelemahan dasar rezim-rezim militer adalah watak otoritariannya. Kaum militer terbiasa untuk memerintah tanpa ucap-balik. Sekali kontrol parlementer dihapuskan atau dibuat tidak berdaya sama sekali, maka tiadalah sama sekali kontrol dari bawah. Sesudah berkuasa satu atau dua dasawarsa, suatu rezim militer berangsur-angsur mengambil pila biasa dari eksploitasi neo-kolonial tanpa menghiraukan kekuatan-kekuatan yang pada awalnya mengangkatnya ke kekuasaan. Kebijakan-kebijakannya tidak lagi memajukan kepentingan-kepentingan massa luas rakyat; kaitan-kaitannya dengan bisnis internasional telah mengkorupnya. Korupsi, yang kaum militer telah bersumpah akan dilawannya, kembali menjadi bagian tatanan kehidupan, bekerja sebagai seekor raksasa berkepala-ganda yang mendominasi seluruh aparatur negara. Seluruh puncak militer terlibat dalam korupsi dan mendapatkan keuntungan darinya. Kita diingatkan pada pepatah lama: kekuasaan itu mengkorup, dan kekuasaan mutlak mengkorup secara mutlak.

Sebagai kesimpulan, walaupun adanya kegagalan, di Dunia Ketiga, bagi demokrasi parlementer untuk berfungsi sesuai model Barat itu, tetap esensial bagi pemerintahan untuk tunduk pada unsur kontrol rakyat dari bawah jika kita menghendaki demokrasi secara tuntas menghadapi masalah-masalah fundamental. Tanpa adanya kontra-imbangan demokratik terhadap kekuasaan eksekutif, sistem itu tidak akan berjalan. Pemecahan jelas tidak dapat ditemukan dalam suatu sistem otoritarian yang melecehkan massa, dan bersamaan dengan itu takut pada massa, sebagaimana tampak dari penindasan semua kritik dan suatu suasana represi secara umum.

Komunisme sebagai suatu Alternatif?

Kini kita dapat memahami mengapa berbagai negeri Dunia Ketiga, khususnya di Asia Tenggara dan Asia Timur, telah menemukan dalam suatu revolusi sosial, –yang memuncak dalam suatu rezim yang sungguh-sungguh didominasi oleh sebuah partai komunis–, suatu pemecahan alternatif bagi masalah-masalah utama mereka. Hal ini benar, dalam beragam keadaan, mengenai Tiongkok, Vietnam, Laos, Kampuchia, Korea Utara dan juga Kuba. Rezim-rezim seperti itu mempunyai sifat-sifat diktatorial, tetapi ideologi Marxis maupun gaya yang dengannya revolusi sosial itu dijalankan telah memberikan kesempatan-kesempatan pada massa luas, kesempatan-kesempatan yang lebih baik daripada yang ditawarkan oleh suatu kediktatoran militer, yaitu mempunyai suara dalam urusan-urusan politik. Sekalipun begitu, masih tidak terdapat kepastian dan tiada jaminan bahwa partisipasi aktif di pihak massa, sesuai dengan ideologinya, akan benar-benar dilaksanakan dan, dalam jangka panjangnya, dipertahankan.

Prelude (pendahuluan) revolusioner pada dasarnya berbeda dari cara rezim-rezim militer pada umumnya mencapai kekuasaan. Di dalam suatu perjuangan revolusioner, sesuai definisinya, massa rakyat yang luas telah secara aktif berpartisipasi, dan dalam keberlangsungan perjuangan itu mereka sudah memperoleh derajat tertentu pendidikan politik. Khususnya dalam kasus revolusi sosial yang terutama dilancarkan dari basis-basis gerilja di daerah-daerah pedesaan –seperti yang terjadi, misalnya, di Tiongkok dan Vietnam– penduduk tani pada tahap itu berpartisipasi secara sangat aktif di dalam perjuangan revolusioner. Ini acapkali awal dari suatu proses emansipasi yang luas, dilaksanakan, misalnya, dengan mendirikan sekolah-sekolah di daerah-daerah yang diduduki oleh para pejuang gerilya. Karenanya, partisipasi rakyat secara aktif, bukan saja bagian yang tidak terpisahkan dari ideologi revolusioner yang berlaku sebagai suatu petunjuk bagi proses pengambilan keputusan, tetapi ia juga telah disenyawakan, hingga batas tertentu, ke dalam praktek revolusioner.

Berbagai revolusi telah membuktikan bagaimana, bahkan dalam situasi konflik bersenjata, penerapan azas-azas demokratik dapat memajukan,

lebih daripada menghalangi, keteguhan dan daya-keberhasilan di dalam perjuangan. Hal ini tidak mengherankan jika kita menyadari hingga seberapa jauh gerakan-gerakan revolusioner bergantung pada dukungan massa secara aktif di dalam perjuangan yang dilakukan terhadap suatu kekuasaan yang terutama bersandar pada senjata dan taktik-taktik konvensional. Juga di sini, keperluan akan keputusan-keputusan yang cepat memainkan suatu peranan penting, seperti halnya dalam peperangan melawan suatu musuh asing; contoh-contoh seperti revolusi sosial Tiongkok dan perjuangan pembebasan Vietnam telah mengajarkan pada kita arti-penting yang luar-biasa dari gaya pengambilan-keputusan yang tidak-otoritarian, khususnya dalam kasus-kasus yang melibatkan tentera-tentera kaum tani. Dalam kasus-kasus ini para pejuang gerilya dapat secara aktif berpartisipasi dalam penyusunan maupun dalam pelaksanaan strategi pertempuran.

Kediktatoran-kediktatoran militer, sebaliknya, pada umumnya tidak lahir dari gerakan-gerakan massa rakyat, melainkan sebagai hasil sebuah kudeta atau sebuah kontra-revolusi yang dilakukan oleh angkatan bersenjata reguler. Tujuan suatu kontra-revolusi bukanlah, seperti dalam halnya dengan revolusi-revolusi, untuk mengemansipasikan massa, tetapi, sebaliknya, untuk menindasnya atau –setidak-tidaknya– untuk menahan suatu gerakan emansipasi yang sudah dimulai (Wertheim 1974: 127 ff.).

Kasus Tiongkok

Pada tahun 1949, setelah revolusi sosial di Tiongkok berhasil dengan kemenangan bagi Partai Komunis, pemerintahan baru dihadapkan pada kebutuhan akan pembangunan suatu masyarakat sosialis di sebuah nasion 'Dunia Ketiga.'

Pola pemerintahan pasca-revolusioner Tiongkok, secara jelas membedakan dirinya dari model Russia. Para pemimpin Tiongkok, terutama sekali Mao Zedong, senantiasa mengakui bahwa emansipasi massa dan partisipasi rakyat yang sesungguhnya di dalam pengambilan keputusan bukanlah suatu masalah perubahan kelembagaan, dan bahwa penguasaan alat-alat produksi oleh negara tidaklah cukup. Mentalitas

rakyat, yang menjadi bagian dari bangunan-atas, tidak secara dengan sendirinya (otomatis) diubah melalui perubahan-perubahan kelembagaan; itu juga mensyaratkan suatu program pendidikan yang intensif. Penafsiran Mao mengenai Marxisme-Leninisme lebih menekankan pada unsur-unsur demokratik di dalam struktur partai ketimbang yang terjadi di Uni Sovyet. Istilah ‘sentralisme demokratik’ dipakai dalam kedua kasus itu, tetapi Tiongkok kurang meletakkan tekanannya pada sentralisme dan lebih banyak pada demokrasi (Schurmann 1971: 126).

Unsur demokratik itu, lagi pula, dinyatakan secara ringkas dan tegas dengan ‘garis massa’ yang selalu dipropagandakan oleh Mao: semua ide harus berasal dari massa, dan setelah mereka diangkat dan dirumuskan oleh para pemimpin pada tingkat lokal atau pusat, mereka harus kembali pada massa, yang berarti bahwa mereka harus dijelaskan kepada mereka dan dianut oleh mereka. Kemudian, ketika ide-ide itu diterjemahkan menjadi aksi, massa harus kembali menguji ketepatan ide-ide ini di dalam aksi itu (Blecher 1979: 107).

Mao dan kawan-kawannya tidak begitu mempercayai reform-reform yang diberlakukan dari atas tanpa dukungan aktif dari rakyat – yang hanya dapat dipastikan lewat suatu proses pendidikan secara intensif. Misalnya, reform-reform tanah Tiongkok tidak diberlakukan melalui dekrit, melainkan di setiap desa sendiri-sendiri melalui suatu perjuangan yang dilakukan oleh kaum tani, setelah suatu kampanye pendidikan yang bersinambungan menanggulangi ketakutan mereka yang mendasar terhadap kekuasaan kaum tuan tanah.⁸

Bagaimana dapat kita rumuskan hubungan antara ‘*urgensi dan demokrasi*’ dalam model Tiongkok itu? Pembangunan suatu masyarakat sosial atas suatu basis agrikultural yang kuat dan dengan pengembangan suatu sektor industrial yang kuat, juga menjadi prioritas tinggi di Tiongkok. Keyakinan bahwa revolusi harus merupakan suatu proses yang berkesinambungan bahkan lebih kuat pada partai Tiongkok ketimbang pada partai Sovyet. Tetapi unsur-unsur urgensi dan efisiensi jelas-jelas kurang ditekankan dalam model Tiongkok ketimbang dalam model Sovyet. Ini terutama disebabkan oleh fakta bahwa pembangunan ekonomi

tidak dipandang sebagai suatu proses yang secara khususnya mesti dipaksakan dari atas, dan bersamaan dengan itu sebagai suatu partisipasi aktif oleh massa luas memainkan suatu bagian penting dalam eksperimen Tiongkok.

Memang beberapa kampanye reform di Tiongkok dicirikan oleh kesemberonoan dan bahkan ketergesa-gesaan yang sangat. Ini, misalnya, kenyataan dengan Lompatan Jauh Ke Depan di tahun 1958, dan pembentukan dini komune-komune rakyat sebagai unit-unit basis dari kepemilikan dan perhitungan di tahun yang sama. Tetapi, setelah para pemimpin menyadari, sebagai akibat bencana-bencana panen tahun 1960/61, bahwa mereka telah bergerak terlampau cepat, dan bahwa reform-reform itu tidak pas benar dengan yang dapat diterima dan ditanggung oleh massa, maka laju itu dikurangi dan berbagai langkah mundur dilakukan di atas jalan yang mulanya ditempuh itu.

Sikap umum para pemimpin Tiongkok terhadap soal urgensi bersama-sama dianut oleh Mao Zedong dan Zhou Enlai pada suatu tahap awal dari Republik Rakyat yang baru lahir itu. Mao menyadari sejak awal bahwa demokrasi langsung dan kebutuhan untuk selalu berkonsultasi dengan rakyat dapat menghambat laju pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Tetapi dalam pandangannya hilangnya waktu itu sama sekali tidaklah bersifat malapetaka, asalkan masa penundaan itu dimanfaatkan untuk meningkatkan kesadaran massa lewat pendidikan, yang memungkinkan mereka untuk berpikir mandiri dan kritis dan dengan demikian menangkap ide-ide yang tepat. Sebuah laporan tahun 1949 oleh Zhou Enlai melukiskan gaya Mao secara positif dengan kata-kata berikut:

Apakah yang harus dilakukan apabila ide-ide tepat dari kepemimpinan tidak diterima oleh rakyat?
Jawabannya ialah bahwa kita mesti menunggu dan melakukan kerja payakinan.

Tetapi, bila mayoritas besar tidak setuju, kita mesti mengikuti mayoritas itu secara organisasi (...). Ini berarti bahwa sering sekali pandangan kepemimpinan akan menang dan menjadi diterima setelah banyak usaha dan usaha dan suatu masa menunggu.

Ide-ide yang tepat dapat diubah menjadi kekuatan rakyat, tetapi “ini tidak dapat dicapai dengan ketergesaan, tetapi memerlukan keuletan

dan kesabaran yang sangat sehingga mendorong maju revolusi dengan keteguhan dan mencapai kemenangan akhir.”⁹

Jelas, dalam kontradiksi antara urgensi dan demokrasi, Mao memilih demokrasi – walaupun menafsirkan konsep ini dalam pengertian yang berbeda dengan Barat. Hal ini, setidaknya-tidaknya, benar dalam teori. Di dalam praktek, Mao kadang-kadang juga mendesak keputusan-keputusan, misalnya dalam kasus Lompatan Jauh Ke Depan. Namun, pada umumnya para pemimpin Tiongkok telah memahami bahwa menjalankan suatu gaya pemerintahan yang kuat dan efisien dapat membuahkan hasil-hasil yang tahan lama hanya apabila itu dipadukan dengan partisipasi luas oleh massa rakyat.

Berarti bahwa unsur-unsur demokrasi langsung, yang sudah dikandung sejak awal di dalam sistem politik Tiongkok di bawah kepemimpinan Mao, menjadi sebab suatu gambaran yang secara menyeluruh jauh berbeda dari gaya pemerintahan diktatur-diktatur militer Dunia Ketiga, yang memperoleh kekuasaan dengan dukungan asing. Melalui unsur-unsur demokratik ini, kepemimpinan Tiongkok dapat menjaga hubungannya, di dalam kebijakan-kebijakannya, dengan massa luas dan dengan kebutuhan-kebutuhan pokok mereka. Di pihak lain, rezim Tiongkok juga membedakan diri secara mendasar dari sebuah negeri seperti India, di mana suatu eksperimen sedang dijalankan dengan demokrasi parlementer menurut pola Barat. Tidak diragukan lagi yang mana dari kedua negeri itu yang paling berhasil dalam mengatasi masalah-masalah yang khas Dunia Ketiga, dalam bentuk suatu perjuanganterhadap kelaparan dan kemiskinan yang sangat. Sekalipun adalah tahun-tahun yang sangat sulit selama tiga dasawarsa antara pendirian Republik Rakyat di tahun 1949 dan awal tahun-tahun 1980-an, keadaan kesejahteraan umum di Tiongkok telah menjadi jauh lebih baik daripada yang di India.¹⁰

Namun, juga tidak disangsikan lagi, praktek pasca-revolusioner Tiongkok mengungkapkan ciri-ciri diktatorial. Ini menjadi gawat selama Revolusi Kebudayaan, yang akan dibicarakan secara lebih terperinci dalam bab berikutnya, “Elit-elit versus Massa - Eksperimen Anti-Elitis Tiongkok dan Kegagalannya.”

Hak-hak Azasi Manusia

Suatu masalah umum yang sering diangkat dengan pengajuan klaim-klaim bagi demokrasi, teristimewa di bidang perdagangan internasional dan bantuan luar-negeri, adalah yang mengenai hak-hak azasi manusia. Bagi seorang makhluk manusia hak paling penting ialah hak untuk hidup. Hak hidup ini dapat diperluas hingga keluarga yang paling dekat atau pada suatu kelompok yang lebih luas yang menjadi tanggung-jawab seseorang itu. Pada tahun 1944 ketika Perang Dunia Kedua mendekati akhirnya, Presiden Rossevelt menyatakan dalam Piagam Hak-hak Ekonomi:

....Suatu esensi yang sama mendasarnya bagi perdamaian adalah suatu derajat hidup individual yang pantas bagi semua pria dan wanita dan anak-anak semua bangsa. Kebebasan dari rasa takut senantiasa berkaitan dengan kebebasan dari kekurangan [.....] Orang dalam kekurangan bukanlah orang yang bebas.

Di dunia Barat hak ini tampak dipandang begitu jelas sehingga nyaris tidak perlu disebut-sebut lagi. Orang-orang Barat, dalam keadaan-keadaan normal, hidup dalam masyarakat-masyarakat di mana kehidupan bagi mayoritas terbanyak penduduk terjamin. Dalam ungkapan sehari-hari kelaparan merupakan sebuah istilah yang dipakai dalam arti bahwa seseorang sedang berselera.

Hanya dalam kasus-kasus peperangan, perang saudara atau bencana alam, masalah kelaparan menjadi suatu soal hidup atau mati. Belum lama berselang, di kota-kota Bosnia seperti Sarajevo atau Gradze, kelaparan dalam skala massal telah menjadi suatu kenyataan yang amat mengerikan. Lazimnya, di negeri-negeri Barat kelaparan sungguh-sungguh juga terdapat, tetapi masih terbatas pada kelompok-kelompok sosial yang hidup 'di dasar masyarakat paling bawah,' terutama di kota-kota besar.

Di banyak bagian Dunia Ketiga situasinya berbeda sekali. Di sana kelompok-kelompok besar di dalam masyarakat, baik pedesaan maupun perkotaan, lazimnya mengalami kelaparan sungguh-sungguh, sehingga banyak kaum tani miskin atau para pekerja yang tak-bertanah, maupun banyak rakyat yang hidup di daerah-daerah perkotaan yang kumuh, tiada pernah mempunyai kepastian apakah esok hari mereka dan keluarga

mereka akan mempunyai sesuatu untuk dimakan.

Bagi negeri-negeri seperti itu, klaim bahwa hak azasi manusia untuk bertahan hidup sesungguhnya adalah benar-benar suatu keharusan utama, dan bukan sekedar omong kosong.

Bagi masalah hak-hak azasi manusia hal ini merupakan suatu faktor yang amat penting. Tentu, hak untuk bertahan hidup, dan bahkan pada suatu tingkat kehidupan yang menjamin kesehatan dan kesejahteraan, disebut di antara Hak-hak Azasi Manusia di dalam Deklarasi Umum Perserikatan Bangsa-bangsa, yang dengan suara bulat diterima di tahun 1948. Tetapi hak-hak azasi manusia yang dikedepankan sendiri di lingkungan politik internasional tampak pada umumnya didasarkan pada peranggapan bahwa esensi-esensi kehidupan terjamin, sehingga yang lebih penting untuk diperhatikan pemerintahan-pemerintahan, dan yang mesti dijaminakan bagi warga mereka, adalah hak-hak azasi lainnya, seperti kebebasan individual untuk berbicara, kebebasan untuk berkumpul dan semua kebebasan lainnya yang dicantumkan dalam berbagai konstitusi nasional maupun di dalam Deklarasi Umum Perserikatan Bangsa-bangsa. Arti-penting luar-biasa hak-hak azasi manusia ini di bidang politik tidak boleh diingkari – tetapi dalam hubungan dengan hak-hak vital untuk hidup, yang tersebut di muka ini harus menduduki tempat kedua.

Ini berarti bahwa berkukuh, atas dasar kesahihan universal mereka, pada hak-hak politik seperti itu, misalnya sebagai suatu prasyarat bagi bantuan keuangan, tidak dapat dibenarkan jika mengenai suatu masyarakat Dunia Ketiga, di mana pemerintahnya menghadapi masalah bahan makanan yang gawat bagi seluruh penduduknya. Sikap berkeras seperti itu menjadi sangat menyangsikan apabila ia disertai tuntutan, misalnya oleh IMF, agar suatu pemerintahan seperti itu harus mengurangi, atau bahkan menghapus, subsidi-subsidi yang diperuntukkan menurunkan harga-harga bahan makanan. Berkeras pada pelaksanaan hak-hak azasi manusia bahkan menjadi lebih sinis lagi jika itu datang dari sebuah pemerintahan atau lembaga keuangan yang kebijakan-kebijakannya sendiri terhadap 'Selatan' dapat dianggap bertanggung-jawab atas kelaparan yang merajalela di sesuatu negeri Dunia Ketiga tertentu.

Berkeras pada penghormatan hak-hak azasi manusia jelas dibenarkan bila itu dituntut dari kediktatoran-kediktatoran militer yang bersikap tak-acuh terhadap kesengsaraan yang merajalela di kalangan sektor-sektor luas penduduk yang ditundukkan pada kekuasaan mereka. Rezim Suharto di Indonesia, dengan klaimnya bahwa hak-hak azas manusia yang dituntut pelaksanaannya itu, adalah khas Barat dan dengan begitu tidak memperhitungkan ‘nilai-nilai budaya’ yang berbeda dari dunia non-Barat, merupakan kasus tipikal di mana keberatan-keberatan seperti itu dapat dengan mudah disingkirkan.

Di pihak lain, sebuah pemerintahan yang telah melakukan usaha bersungguh-sungguh untuk meringankan kemiskinan janganlah diganggu dengan sanksi-sanksi eksternal atau hukuman-hukuman lainnya, yang dipaksakan atau diancamkan karena suatu pengabaian tertentu dalam melaksanakan hak-hak politik.

Sebagai kesimpulan: sebuah negeri Dunia Ketiga semestinya hanya tunduk pada persyaratan-persyarat yang dinyatakan dalam batasan-batasan demokrasi dan hak-hak azasi manusia, setelah sebuah penbelitian mengenai karakteristik-karakteristik khususnya telah membuktikan kebenaran mereka.

Ingin saya akhiri bab ini dengan sebuah kutipan dari *International Encyclopedia of Social Sciences*, 1968:

Demokrasi, seperti dikatakan Woodrow Wilson, adalah bentuk pemerintahan yang paling sulit. Kita oleh karenanya tidak dapat berharap untuk mengekspor tipe Barat yang ‘lengkap’. Sebaliknya adalah sama jelasnya bahwa negara-negara baru dan nasion-nasion yang sedang berkembang tidak dapat berpretensi memulai dari tingkat keberhasilan yang sudah dicapai oleh demokrasi-demokrasi Barat. Sesungguhnya, tiada demokrasi akan pernah berwujud jika menetapkan baginya sendiri tujuan-tujuan kemajuan yang menjadi klaim sejumlah negara yang kini sedang melakukan modernisasi. Dalam suatu perspektif yang menyeluruh-dunia, masalahnya ialah meminimalkan kekuasaan sewenang-wenang dan tirani dan memaksimalkan suatu pola civilitas yang berakar pada penghormatan dan keadilan bagi setiap orang – singkatnya, untuk mencapai suatu kebijaksanaan manusiawi. Ketergesa-gesaan yang tidak-layak dan sasaran-sasaran yang terlampau ambisius sangat mungkin akan membawa pada hasil-hasil sebaliknya.¹¹

catatan:

¹ Sebuah analisis menarik mengenai peralihan ini diberikan oleh Adnan Buyung Nasution, *The Aspiration for Constitutional Government in Indonesia: A Socio-legal Study of the Indonesian Konstituante 1956-1959*, doct.diss. Utrecht University, 1992.

² Lihat, misalnya, Crane Brinton, *The Anatomy of Revolution*, rev.ed. New York 1965, hal. 73.

³ Lihat, misalnya, Stuart R. Schram dalam sebuah buku yang disunting olehnya sendiri, *Authority, Participation and Cultural Change in China*, Cambridge, 1973, hal. 28 ff.

⁵ Disayangkan sekali bahwa Hans Magnus Enzensberger, dalam buku kecilnya *Aussichten auf den Bürgerkrieg*, Frankfurt, 1993, tidak memberi perhatian pada sebab-sebab khusus perang-perang saudara yang beasal sebab pada partikularisme kelompok etnik atau agama.

⁶ Masalahnya telah dengan jelas diterangkan di tahun 1950 oleh William K. Kapp, *The Social Costs of Private Enterprise*, New York, 1971 (1950); lihat juga dari pengarang yang sama: *Environmental Policies and Development Planning in Contemporary China and Other Essays*, The Hague/Paris, 1974.

⁷ Untuk semua perhitungan ini lihat misalnya Alfred Sauvy, *De Malthus a Mao Tse-toung*, Paris, 1958.

⁸ Lihat sebuah direktif yang dikeluarkan pada 1 Oktober, 1943, oleh Mao, yang dikutip dalam Charles Bettelheim, *Revolution culturelle et organisation industrielle en Chine*, Paris, 1973, hal. 81, nt.5. Cara reform-reform tanah dilaksanakan telah dilukiskan secara hidup oleh William Hinton, *Fanshen: A Documentary of Revolution in a Chinese Village*, New York/London, 1966.

⁹ *Peking Review*, 27 Oktober, 1978 (No. 43).

¹⁰ Saya merujuk pada Rene Dumont, *Chine: La revolution culturelle*, Paris, 1976, hal. 167 ff.: "Terlampau banyak pengkritik tentang Tiongkok adalah, kurang-lebih secara sadar, membuat perbandingan-perbandingan dengan kondisi-kondisi yang mereka kenal, yaitu yang di negeri-negeri maju; orang semestinya memperhatikan contoh negatif, yang diberikan oleh Asia Selatan dan, apa boleh buat, khususnya oleh anak-benua India" (Terjemahan saya, WW).

¹¹ Giovanni Sartori, sub "Demokrasi," dalam: *International Encyclopedia of the Social Sciences*, Jilid IV, New York, 1968, hal. 120.

BAGIAN 4:
STRATEGI-STRATEGI NEGARA
EMANSIPATORIK

Bab VI, Bertaruh Pada Elit atau Bertaruh Pada Massa

Elit dan Massa: Observasi-observasi teoritis

Persepsi kita mengenai masa depan sangat bergantung pada citra kita mengenai sifat bangsa manusia, dan, khusus-nya, apakah itu bersifat aristokratik atau bersifat demokratik.

Pemakaian istilah ‘elit’ sebenarnya mengandaikan suatu pandangan dunia aristokratik. Secara harfiah ia berarti ‘bungahnya masyarakat,’ suatu ‘pilihan dari material manusia yang tersedia.’ Sekalipun mungkin benar bahwa sejumlah penulis memakai istilah ini tanpa suatu konotasi positif seperti itu, pada umumnya pemakaian istilah itu secara implisit menyatakan bahwa termasuk pada suatu ‘elit’ adalah berkat kualitas-kualitas khusus tertentu yang membedakan para anggotanya dari massa umumnya.

Pandangan aristokratik dapat mengambil berbagai bentuk. Versi paling kasar ialah peranggapan bahwa tatanan sosial yang ada, dengan ketimpangan-ketimpangan dan struk-tur hierarkikalnya, akan berlangsung sepanjang waktu. Alasan yang mendasarinya ialah bahwa struktur itu mencerminkan kapasitas-kapasitas pembawaan –yaitu, bahwa kaum yang berhak-istimewa (*privileged*) menjalankan kekuasaan mereka dan memiliki status mereka yang tinggi itu semata-mata karena mereka adalah yang terbaik– kaum *aristoi*. Namun, bahkan dalam kasus-kasus di mana klaim-klaim mereka untuk diterima sebagai suatu elit telah diuji dengan cara yang kurang-lebih objektif (seperti misalnya di Tiongkok Kuno, di mana penerimaan pada status mandarin, menyangkut masuknya dalam dinas sivil, bergantung pada keberhasilan dalam ujian-ujian tertulis), pandangan aristokratik itu tetap berlaku. Walaupun dalam kasus-kasus seperti itu hierarki sosial yang dihasilkan mungkin menunjukkan ciri-ciri tertentu dari suatu meritokrasi, ini sama sekali tidak menge-cualikan suatu pandangan yang pada dasarnya aristokratik

mengenai masyarakat manusia.

Pandangan aristokratik seseorang tampak tidak saja dalam penilaiannya mengenai sesuatu masyarakat tertentu, khususnya masyarakatnya sendiri, tetapi lebih-lebih lagi dalam sikapnya terhadap kemungkinan perkembangan masa-depan ke arah suatu masyarakat yang lebih egalitarian. Pandangan tipikal aristokratik menjadi jelas ketika reaksi pada penyebutan sesuatu kemungkinan seperti itu adalah suatu angkatan-bahu yang dibarengi kata-kata seperti: "Dalam setiap masyarakat selalu akan ada suatu elit yang dominan." Sebaliknya, suatu pandangan demokratik diciri-khas-kan oleh kepercayaan bahwa –pada azasnya– terdapat kemungkinan untuk maju ke arah suatu situasi di mana, tidak saja secara teoretikal tetapi dalam praktek praktis, partisipasi seluruh penduduk dalam keputusan-keputusan yang mesti diambil dalam urusan-urusan yang menyangkut diri mereka. Pandangan demokratik pada dasarnya adalah suatu pandangan optimistik, mengandung kepercayaan pada massa. Sebaliknya, pandangan aristokratik pada dasarnya suatu pandangan pesimistik: ia menyingkirkan setiap kepercayaan pada massa sebagai utopian; mereka bahkan mungkin takut pada massa itu. Dalam jangka-waktu antara dua perang dunia ketakutan ini menemukan ungkapannya yang paling jelas dalam karya Jose Ortega Gasset: *The Revolt of the Masses* (Ortega 1961).

Masih ada suatu perbedaan lagi antara kedua pandangan itu: pandangan aristokratik bergayut pada status quo, karena baginya tiada tempat untuk perubahan fundamental: ia pada dasarnya bersifat statik. Pandangan demokratik, sebaliknya, menaruh kepercayaan pada perubahan sosial yang mendasar: ia pada hakekatnya bersifat dinamis.

Pada dasawarsa-dasawarsa awal abad ke XIX suatu suasana yang umumnya optimistik berlaku di lingkaran-lingkaran Eropa-Barat tertentu yang sudah dicerahkan. Marx dan Engels memadukan suatu pandangan optimistik mengenai potensial massa dengan suatu pendekatan ilmiah. Dalam pemikiran Marxis tidak ada tempat bagi kaum 'elit.' Mereka yang menjalankan kekuasaan politis bukanlah terutama individual-individual yang dipilih berdasarkan kualitas-kualitas mereka yang menonjol, melainkan adalah wakil-wakil dari suatu klas dominan

yang mengabdikan/melayani kepentingan-kepentingan tuan-tuan mereka. Teristimewa klaim Marxis bahwa revolusi sosial tidak terelakkan dan akan menghabiskan suatu tipe masyarakat yang lain, dipandang sebagai suatu ancaman serius bagi tatanan yang bercokol. Klaim ini dihadapi dengan sebuah teori politik yang menyatakan bahwa pada dasarnya revolusi itu tidak berguna: revolusi akan berarti penumbangan mereka yang berkuasa tanpa melahirkan perubahan fundamental apapun pada struktur masyarakat.

Ilmuwan politik yang, pada akhir abad ke XIX, memberikan perumusan paling jelas mengenai pandangan ini adalah Vilfredo Pareto, dengan konsepnya mengenai suatu 'sirkulasi kaum elit' (Pareto 1968). Dalam penilaiannya, perubahan revolusioner secara fundamental tidak akan mengubah tatanan hierarkis masyarakat. Satu-satunya perubahan yang akan terjadi ialah bahwa suatu elit baru akan menggantikan yang lama. Anggapan bahwa revolusi itu akan menguntungkan rakyat tidak lebih ketimbang sebuah slogan belaka, sebuah alat untuk mendapatkan dukungan di antara massa luas. Orang jangan mendengarkan kata-kata 'kontra-elit,' yaitu para pemimpin revolusioner yang mengangap diri sendiri, tetapi agar mengawasi aksi-aksi mereka, yang akan menunjukkan bahwa massa, di bawah elit baru itu, akan sama tidak-berdayanya seperti di bawah elit lama.

Kaum Elit di Dunia Ketiga

Di dunia Barat pemakaian istilah 'elit' pada umumnya menimbulkan suatu perasaan canggung yang tidak menyenangkan. Suatu penafsiran mengenai masa-lalu dan masa-kini kita sendiri, yang memahami politik sebagai suatu medan di mana kaum elit bersaing, membuat kita menyadari kemunafikan yang dikandung slogan-slogan dan citra-citra demokratik kita. Kekuasaan teror Nazi telah membuat diri kita khususnya peka terhadap dianutnya secara terang-terangan gagasan-gagasan elitis, sekalipun ini jauh daripada suatu konsep *Herrenvolk*.

Kita dapat menerima suatu masyarakat asing sebagai sebuah masyarakat yang sesungguhnya didominasi oleh sebuah elit – tetapi bagaimana dengan masyarakat kita sendiri? Bagi banyak orang Amerika,

pengungkapan oleh Wright Mills bahwa masyarakat mereka didominasi oleh suatu 'Elit Kekuasaan' telah dialami sebagai suatu kejutan dahsyat. Citra itu tidak cocok dengan Impian Amerika mengenai persamaan dan kebebasan. Pengungkapan yang dilakukan sekitar tahun 1930, bahwa Amerika Serikat adalah sebuah masyarakat kelas, telah mengejutkan orang-orang Amerika yang membayangkan bahwa para Pilgrim di atas kapal Mayflower telah meninggalkan masyarakat kelas Eropa di belakang mereka, untuk melaksanakan Impian Amerika mengenai kesempatan yang sama bagi setiap putera dan puteri Amerika.¹ Analisis kritis Wright Mills (Mills 1956) muncul tidak lama setelah Carl Friedrich (1950) menolak kemungkinan keberlakuan interpretasi Pareto bagi Amerika Serikat. Sikap Friedrich ialah sikap mayoritas orang Amerika: kelas-kelas berkuasa mungkin ada di Eropa,, atau di Asia – “tetapi itu tidak bisa terjadi di sini!” (Meisel 1962: 360). Namun begitu, sudah sedini akhir tahun-tahun 1930-an, Ferdinand Lundberg telah berusaha membuktikan bahwa Amerika Serikat didominasi oleh 'Enampuluh Keluarga Amerika' (1937).

Namun, begitu negeri-negeri Dunia Ketiga menampilkan diri, citra umum itu langsung berubah. Tiba-tiba saja keberadaan 'kaum elit' itu tidak saja diterima sebagai dengan sendirinya – ia bahkan dipandang sebagai suatu gejala 'positif.' Khususnya pada kaum elit inilah dipusatkan harapan-harapan bagi prakarsa pembangunan ekonomi dan politik yang diperlukan secara mendesak sekali.

Di koloni-koloni Barat, seperti India atau Indonesia, yang paling pertama diuntungkan oleh pendidikan Barat adalah dari kelompok-kelompok elit tradisional. Perbedaan pokok di kebanyakan kerajaan Asia pra-kolonial, antara bangsawan dan kaum tani, bahkan tetap mempunyai suatu dampak kuat setelah diperkenalkannya tipe Barat. Di India adalah terutama para putera Brahmin, di Indonesia, para putera priayi – birokrasi aristokratik di Jawa– yang dengan kemujuran pendidikan Barat, memperoleh suatu kedudukan istimewa di dalam proses modernisasi.² Namun, hingga akhir kekuasaan kolonial, pendidikan yang diberikan oleh kekuasaan-kekuasaan kolonial menegaskan bahwa wakil-wakil Kulit Putih mereka di koloni itu akan tetap suatu kasta-atas, dengan hak-hak istimewa mereka sendiri, enggan menyerahkan predomasinya

dalam urusan-urusan ilmu pengetahuan dan ekonomi. Hal ini teramat jelas sekali dari jenis pendidikan yang diberikan di berbagai koloni: 'elit' lokal mesti puas dengan pendidikan dalam hukum dan ketrampilan, dengan penambahan berangsur-angsur dalam kedokteran. Pendidikan tinggi dalam fisika, kimia dan bentuk-bentuk teknologi modern lainnya –yang sama pentingnya bagi modernisasi– bagaimanapun ditanggihkan.

Walaupun begitu, suatu 'inteligensia' lokal berangsur-angsur lahir, tetapi di lingkungan itu, yang termasuk kaum 'elit' tradisional untuk sebagian besarnya mempertahankan kedudukan 'elit' mereka. Ketika, seusai Perang Dunia Kedua, kebanyakan dari negeri-negeri kolonial mendapatkan kemerdekaan politik formal, 'elit baru' ini bagi kebanyakan negeri jelas menjadi kelompok sosial yang memberikan kepemimpinan di dalam proses 'modernisasi': kelompok yang sama itu telah memainkan suatu peranan terkemuka di dalam gerakan nasionalis sebelum-perang dan di dalam perjuangan politik dan kadang-kadang juga dalam perjuangan bersenjata untuk kemerdekaan.

Nyaris tidak realistik untuk mengharapkan 'kaum elit baru' ini memainkan suatu peranan memimpin di dalam pem-bangunan suatu masyarakat yang terutama bersifat pedesaan. Ideologi yang terkandung dalam pendekatan mereka pada proses modernisasi berhubungan dengan suatu pandangan dunia di mana Barat menjadi pusatnya alam-jagat. Menurut ahli sosiologi Amerika, Edward Shils, yang telah memandang pada modernisasi dari suatu perspektif pusat-periferi, suatu 'modernitas' dengan asal-usul asing mesti diperkenalkan dari pusat-pusat kebudayaan Barat ke dalam periferi Dunia Ketiga.³ Dalam proses ini 'kaum elit baru' yang hidup di pusat-pusat perkotaan negara-negara merdeka yang baru terbentuk, menjadikah pengantara-pengantara yang sewajarnya. Namun, tradisi menghamba pada kekuasaan-kekuasaan asing umumnya menghalangi kaum elit baru ini dalam memprakarsai jenis perubahan emansipatorik yang diperlukan bagi pembangunan masyarakat-masyarakat pedesaan di mana hidup mayoritas terbesar rakyat.

Jenis pendidikan Barat mereka, yang secara gawat didistorsi oleh yang dengan tepat sekali disebut Ronald Dore 'Penyakit Diploma' (1976),

telah begitu menjauhkan diri mereka dari kaum tani dan kepentingan-kepentingan dan kebutuhan-kebutuhan kaum tani itu –bahkan apabila mereka sendiri berasal dari kaum tani– sehingga mereka selalu gagal menjembatani kesenjangan antara diri mereka sendiri dan mereka yang semestinya mereka pimpin menuju ‘modernitas.’

Anti-Elitisme di Tiongkoknya Mao

Sebuah contoh dari suatu strategi negara emansipatorik yang luar-biasa menarik telah diberikan oleh Republik Rakyat Tiongkok yang, dari 1950 hingga wafatnya Mao Zedong di tahun 1976, menjalan suatu kebijakan ‘memasang taruhan pada massa.’ Kontradiksi-kontradiksi elit lawan massa mempunyai akar-akar kuat dalam tradisi Tiongkok. Di dalam penelitian-penelitian mengenai Tiongkok pra-revolusioner, dikotomi bangsawan-kaum tani dipandang sebagai dasar suatu pemahaman mengenai masyarakat Tiongkok. Kaum bangsawan ialah mereka yang oleh kepemilikannya atas tanah dibebaskan dari kerja badan. Status sosial mereka yang tinggi, ditentukan oleh jumlah pelayan dan penyewa tanah mereka, memungkinkan bagi mereka suatu gaya hidup keisengan sesuai dengan tradisi-tradisi budaya kelas mereka. Terdapat berbagai lambang luar dari status tinggi itu, seperti kuku-kuku panjang untuk para pria, atau kaki-terikat bagi para wanita, yang kesemuanya itu melambangkan kebebasan dari kerja badan.

Anggota dinas *civil* Tiongkok terutama direkrut dari kaum bangsawan. Sekalipun orang-seorang dari keturunan petani atau tukang mempunyai kesempatan untuk menyusup ke dalam kebangsawanan lewat hasil-hasil kebudayaan, hal ini umumnya terjadi sebagai hasil para anggota klan mereka sendiri, yang sudah termasuk pada kaum bangsawan, yang memberikan kepada mereka pendidikan yang disyaratkan untuk lulus ujian-ujian negara. Dalam kasus-kasus yang secara relatif langka itu, calon yang berhasil selalu dituntut menjalankan gaya hidup yang sesuai dengan sepenuh-penuh mungkin.

Dengan latar-belakang sejarah ini, perjuangan kepemimpinan komunis Tiongkok terhadap elitisme adalah, tak-mengherankan, luar-biasa kerasnya. Revolusi yang pada tahun 1949 membawa pada pendirian

Republik Rakyat Tiongkok didasarkan pada akar persamaan fundamental dari seluruh warganya. Semua hak-istimewa tradisional harus dihapus. Namun, kita masih berkepentingan menemukan sejauh mana kebijakan ini berhasil, sejauh-jauh sifat masalah-masalah yang dihadapi dalam perjalanan itu.

Pada tahun-tahun sesudah 1949, usaha-usaha untuk menanggulangi kontradiksi antara kerja badan dan kerja intelektual ternyata menjadi salah-satu aspek paling asali dan mencekam dari Revolusi Tiongkok. Dalam sebuah karangan baru-baru ini, *Elite Perceptions and the Masses* (Wertheim 1993: 57 ff.), saya mencoba menunjukkan sejauh mana 'kaum elit' tetap tidak-tahu mengenai dunia di mana 'massa' itu hidup; saya menamakan penelitian mengenai kecenderungan di antara kaum elit untuk mengabaikan realitas sosial ini 'sosiologi ketidak-tahuan,' berlawanan dengan 'sosiologi pengetahuan' – sebuah disiplin akademik yang sudah diakui. Mao telah, mengungkapkan pendapatnya mengenai gejala ini dalam rumusan-rumusan yang lebih tajam lagi: "Yang paling rendah adalah yang paling inteligen, kaum elit adalah yang paling tidak-tahu."

Sepanjang tahun-tahun 1950-an sudah menjadi jelas bahwa para pemimpin komunis Tiongkok lebih menyadari bahaya suatu kemunduran ke pada sikap-sikap elitis dan suatu gaya kerja elitis daripada kepemimpinan Sovyet, khususnya dalam periode sesudah wafatnya Lenin. Kaum Sovyet cenderung menyandarkan diri pada tesis Marxis bahwa basis material masyarakat, yaitu cara-produksi yang dominan, menentukan bangunan-atas, termasuk pandangan filosofis dan sikap-sikap mental rakyat. Karena alat-alat produksi telah dinyatakan menjadi milik negara atau telah diubah menjadi milik kolektif, maka secara terlampau gampang dianggap bahwa disposisi mental rakyat akan, dengan berlalunya waktu, menjadi sosialis.

Pada awal tahun-tahun 1920-an, sebuah novel Rusia dengan judul, *A Millionaire in Sovyet Russia* mengisahkan pengalaman-pengalaman seorang penjahat yang telah menjadi kaya dengan melakukan setiap jenis pemalsuan, tetapi kemudian cuma mendapatkan bahwa dirinya tidak berkesempatan untuk memperoleh hak-istimewa apapun atau dapat

menyogok siapapun, hanya dikarenakan sistem kepemilikan negara tidak memungkinkan penyalah-gunaan kekayaan.⁴ Moral kisah itu ialah, bahwa kekayaan perseorangan telah menjadi tidak berguna sama sekali.

Orang-orang Tiongkok memahami bahwa soal-soalnya tidak sesederhana itu. Di samping sosialisasi alat-alat produksi, suatu perubahan hati yang total juga diperlukan untuk membuat suatu sistem sosialis bekerja. Sejak awal, orang-orang Tiongkok telah mengaitkan arti-penting yang sungguh-sungguh pada pendidikan seluruh rakyat, untuk menggenangi mereka dengan cita-cita kolektif dan membuat mereka meninggalkan kecenderungan-kecenderungan egoistik mereka.

Jelas, tingginya nilai yang dijunjukkan pada pendidikan moral dan ideologis mempunyai akar-akar dalam pada tradisi Tiongkok, khususnya dalam Konfusianisme. Lagi pula, tradisi tua Tiongkok memandang manusia sebagai bisa dididik. Selama tahun-tahun 1950-an, pendidikan bagi seluruh rakyat diberi prioritas tertinggi. Hal ini kusadari ketika isteri saya dan saya sendiri, di tahun 1957, mengunjungi sebuah sekolah di Canton (Guangzhou) untuk anak-anak para penghuni ‘sampan’ di Sungai Mutiara. Mereka adalah kaum *Tangka*, sekelompok yang sebelum Revolusi diperlakukan kurang-lebih sebagai pariah, sebagai sampah masyarakat. Sekolah itu sendiri berkedudukan di atas sebuah sampan besar dan anak-anak itu memberikan kesan yang ramai dan hidup sekali, sekalipun tidak sangat rapih. Melihat huruf-huruf sulit di atas papan-hitam itu saya tidak bisa tidak bertanya apakah anak-anak itu mengalami kesulitan-kesulitan menguasainya. Sang guru menjawab dengan senyum di bibir: “Kami, di Tiongkok sini, tidak percaya akan adanya anak-anak yang dungu. Kami hanya percaya akan adanya guru-guru yang bodoh.” Itu sudah cukup untuk membuat diri saya berpikir – dan saya tak pernah berhenti merenung-renungkan pelajaran bermakna dalam itu hingga hari ini.

Bagaimanapun, sudah jelas bahwa dalam tekanannya pada faktor-faktor mental dan spiritual, Marxisme dalam versi Maois itu membedakan diri dari interpretasi-interpretasi materialisme Marxis lainnya. Ungkapan Mao: “Spirit sedang diubah menjadi materi” adalah, pada waktu Revolusi Kebudayaan, seringkali dikutip di Tiongkok. Setepatnya

yang dikatakan Mao adalah, bahwa materi dapat diubah menjadi kesadaran manusia, tetapi bahwa yang sebaliknya adalah sama benarnya.⁵ Sekali massa itu menguasai gagasan-gagasan benar yang berasal dari realitas sosial, maka gagasan-gagasan itu sendiri dapat menjadi suatu kekuatan dahsyat, suatu kekuatan material yang mampu mengubah masyarakat.

Satu pokok lain lagi dimana versi Maois berbeda secara tajam dari model Sovyet ialah penekanannya pada arti-penting terus-menerus dari kontradiksi-kontradiksi klas dan perjuangan klas, bahkan sesudah suatu revolusi sosial yang berhasil.

Pada dasarnya, menurut versi Sovyet mengenai Marxisme, kenyataan bahwa alat-alat produksi telah menjadi milik umum menutup kemungkinan hubungan-hubungan klas secara antagonistik, basis material bagi kontradiksi klas telah dihapuskan. Pandangan ini diperkuat/ditegaskan di dalam Konstitusi Sovyet tahun 1936: menurut interpretasi resmi Sovyet, Konstitusi itu menandai akhir dari periode kediktatoran proletariat, membuka jalan lebar-lebar bagi pembangunan sosialisme secara tidak terbatas. 'Klas-klas' masih ada, dengan kaum tani merupakan suatu 'klas' tersendiri yang dapat dibedakan dari kaum buruh industrial, tetapi mereka itu tidak antagonistik lagi sifatnya.

Menurut interpretasi Maois, konflik-konflik klas tidak hanya bergantung pada basis material masyarakat dan cara produksi yang dominan, tetapi pada mentalitas rakyat yang bersangkutan, suatu mentalitas yang sering berakar dalam sikap-sikap dan konsep-konsep yang diturunkan/diwariskan dari hubungan-hubungan pra-revolusioner.

Sikap-sikap kapitalis, misalnya, tidak mesti lenyap dengan penghapusan suatu ekonomi yang sungguh-sungguh kapitalis. Selama awal tahun-tahun 1960-an, ketika timbul diskusi teoritis antara Partai-partai Komunis Tiongkok dan Sovyet, para ahli teori Partai Tiongkok sepenuhnya menyadari bahaya bahwa suatu klas burjuis baru dapat timbul dalam suatu situasi di mana kapitalisme swasta kelihatannya dalam keadaan kemerosotan total. Mereka tidak yakin bahwa dalam suatu ekonomi sosialis, birokrasi akan –seperti dengan sendirinya–

mengembangkan suatu mentalitas sosialis. Karenanya, perjuangan terhadap kapitalisme mesti diteruskan setelah revolusi yang berhasil, untuk menghindari suatu kemunduran dan akhirnya, suatu restorasi suatu masyarakat kapitalis.

Para pemimpin Sovyet, terutama setelah Konstitusi 1936 diberlakukan, dengan kukuh menyangkal bahwa sebab-sebab 'internal' yang dikandung dalam masyarakat Sovyet dapat menimbulkan antagonisme klas. Ini mungkin dengan baik menjelaskan mengapa, teristimewa selama akhir tahun-tahun 1930-an, begitu banyak warga Sovyet dikejar-kejar sebagai agen-agen asing, mata-mata dan penyabot: sederhana sekali, kontradiksi-kontradiksi pokok 'di dalam' masyarakat Sovyet dipastikan tidak ada. Pihak Tiongkok beranggapan lebih mudah untuk mengakui bahwa masyarakat mereka masih jauh daripada kesempurnaan sosialis. Lagi pula, mereka jauh lebih condong ketimbang tetangga mereka di sebelah utara, untuk membolehkan kebijakan-kebijakan mereka dsikritik dari bawah. Dengan kampanye-kampanye ideologi secara besar-besaran para pemimpin Tiongkok telah memberlakukan garis massa: semua prakarsa harus lahir dari massa, dan setelah perumusannya oleh Partai, kebijakan-kebijakan itu harus kembali diserahkan pada kritik dari massa. Justru dan khususnya 'garis massa' itu mengekspresikan hasrat para pemimpin Partai Tiongkok untuk tidak memaksakan diri mereka sebagai suatu 'elit' baru, tetapi untuk melaksanakan peranan mereka sebagai 'pelopor massa.'

Namun, melakukan penilaian atas aspek-aspek anti-elitis strategi umum Tiongkok telah menjadi sangat dipersulit oleh kenyataan bahwa selama tahun-tahun awal Revolusi Kebudayaan (1966-1969), perjuangan terhadap elitisme telah dilakukan hingga tingkat-tingkat yang tiada bandingan di masa lalu. Sementara unsur-unsur dari garis anti-elitis ekstrim ini, misalnya di bidang pendidikan, masih tetap dominan bahkan serlama awal tahun-tahun 1970-an, ketika berbagai eksekusi dari tahun-tahun awal (Revolusi Kebudayaan, pen.) mulai dikoreksi. Karena, lebih baik membedakan kebijakan-kebijakan yang ditempuh dalam periode sebelum Revolusi Kebudayaan (1949-1966) dari pengalaman-pengalaman anti-elitis ekstrem yang dilakukan dari tahun 1966 dan

seterusnya.

Selama periode tersebut duluan peranan Partai sebagai pelopor massa diaksentuasi, tetapi garis-garis yang lebih radikal ditahan oleh berlangsungnya 'perjuangan antara dua garis': garis pragmatik, diwakili oleh Liu Shaoqi dan Deng Xiaoping, melawan garis revolusioner sebagaimana yang dianut oleh Mao sendiri. Dalam Revolusi Kebudayaan, di pihak lain, garis umum Maois dijalankan hingga keekstriman-keekstriman sedemikian rupa hingga iua melampaui titik yang tidak bisa dibalikkan pada situasi stabilitas relatif pra-1966.

Dalam mendiskusikan perkembangan perjuangan anti-elitis di Tiongkok, perbedaan antara kedua episode itu harus selalu diingat dan diperhatikan. Terdapat dua aspek pada kontroversi elit lawan massa itu: di bidang kekuasaan politik dan struktur klas. Walaupun adanya usaha-usaha keras untuk mencega perkembangan seperti itu, dalam perjalanan tahun-tahun 1950-an, berbagai unsur elit telah bangkit di dalam masyarakat Tiongkok sesudah tugas-tugas pertama pembangunan sosialis nampak telah terlaksana. Dampak kuat dari model Sovyet, terutama selama awal tahun-tahun 1950-an, dan penghormatan tinggi yang diberikan pada Uni Sovyet sebagai negeri-persaudaraan sosialis, mempunyai sejumlah implikasi berbahaya, yang membawa resiko penjiplakan sejumlah dari aspek-aspek ideologis yang kurang menarik yang dominan di negeri Sovyet itu. Ini menuntut suatu peninjauan kembali mengenai kebijakan-kebijakan yang diberlakukan oleh pihak Tiongkok untuk mengkontra-aksi kecenderungan-kecenderungan ini.

Kekuasaan Politik di Tiongkok Mao

Sekitar tahun 1956 bahaya akan suatu deformasi revolusi dengan jelas disadari, khususnya oleh Mao. Gaya kerja Partai yang dilengkapi dengan kekuasaan politik, sedang menjadi otoritarian seperti yang terjadi di Sovyet, dan komunikasi turun dari atas ke tingkat-tingkat Partai yang lebih rendah dan seterusnya ke pada massa, dan bukannya secara sebaliknya. Demikian pula, birokrasi negara yang baru tercipta sedang memperoleh berbagai macam hak-istimewa. Perbedaan-perbedaan upah dan pangkat di dalam Tentara diaksentuasikan, dan manajemen

perusahaan-perusahaan industrial negara menjadi semakin otoritarian.

Pengawasan atas otoritas merupakan suatu persoalan yang sangat problematik di dalam tipe pemerintahan apapun. Dalam *Reflections on the Causes of Human Misery*, Barrington Moore mengabdikan banyak halaman pada persoalan ini, yang dikemukakannya dalam kata-kata Latin terkenal, *quis custodiet ipsos custodes?* (siapa yang akan mengawasi para pengawas?) - dalam pandangannya “yang paling keras-kepala dalam teori politik maupun praktek politik.”⁶ Sang pengarang mendiskusikan berbagai metode yang telah dicoba atau dianjurkan ‘untuk mengontrol otoritas’ tetapi sampai pada suatu kesimpulan negatif yang suram: suatu peninjauan mengenai pengaturan-pengaturan “bahwa pengalaman Barat menyajikan sebagai kemungkinan jawaban-jawaban atas persoalan *quis custodiet* membuktikan bahwa tiada satupun yang berjalan dengan baik sekali” (Moore 1972: 69). ‘Demokrasi langsung’ bukan obat mujarab: “Demokrasi langsung menimbulkan teror revolusioner, nemesisnya sendiri” (Moore 1972: 66).

Barrington Moore tetap sangat skeptikal mengenai ditemukannya suatu pemecahan dalam suatu sistem sosialis:

Sosialisme Marxian atau yang berpusat tidak mempunyai jawaban atas pertanyaan *quis custodiet* (...) Kegagalan untuk menjawab pertanyaan *quis custodiet*, kupikir, merupakan kekurangan fatal pada hakekat seluruh pengobatan sosialis bagi penyakit-penyakit manusia (Moore 1972: 71).

Argumen Moore, sekalipun sangat penad bagi permasalahan kita, tidak sepenuhnya meyakinkan, karena ia tidak memberikan cukup perhatian pada kemungkinan pengontrolan otoritas dari bawah. Dalam mendiskusikan ‘demokrasi langsung’ sebagai suatu kesempatan “bagi korban tatanan-tatanan sosial agar suara mereka didengar” (Moore 1972: 65), dan merujuk pada *Fanshen* Hinton (1966), Moore dengan singkat menyebutkan praktek-praktek yang, selama tahun-tahun revolusioner, dapat diamati di desa-desa Tiongkok, tetapi ia menghubungkan itu semua pada periode-periode singkat ketika ‘eksperimen-eksperimen dalam kontrol rakyat seperti itu’ dijalankan selama revolusi-revolusi Perancis dan Russia.

Yang baru dalam kasus Tiongkok adalah, bahwa paktek-praktek seperti

itu tidak terbatas pada 'periode-periode singkat' pergolakan revolusioner, tetapi sesudah kemenangan-akhir Partai Komunis di tahun 1949 telah disenyawakan secara permanen ke dalam kebijakan Tiongkok. Kepemimpinan Tiongkok sangat memahami bahwa 'demokrasi langsung' tidak dapat diberlakukan secara tiba-tiba, tanpa sesuatu persiapan. Kalau ini yang terjadi, maka kemungkinan-kemungkinannya sangat besar bahwa 'demokrasi langsung' akan berakhir dalam anarki belaka, dengan faksi-faksi yang berselisih beralih pada yang disebutkan Barrington Moore 'teror revolusioner.' Sebagaimana yang dibikin jelas oleh kisah Hinton *Fanshen*, diperkenalkannya praktek-praktek dasar demokrastik mesti didukung oleh pendidikan rakyat secara luas, dengan berangsur-angsur mengajarkan ke pada Rakyat bagaimana cara mengontrol otoritas. Adalah justru tipe alternatif pemecahan ini pada jalan-buntu *quis custodiet* yang agaknya sepenuhnya diabaikan oleh Barrington Moore dalam makalah mengenai ilmu pengetahuan politik –yang sebenarnya piawai sekali itu– sebagai sesuatu yang sama sekali tiada berpeharapan.

Salah seorang dari siswa Barrington Moore, Theda Skocpol, sesudah meneliti kasus Tiongkok dalam sebuah studi historis dengan membandingkan hasil revolusi sosial di Tiongkok dengan yang ada di Perancis dan Russia, sampai pada suatu kesimpulan yang lebih canggih ketimbang gurunya yang sangat dihormati itu, yaitu mengenai potensialitas-potensialitas kontrol rakyat di dalam sosialisme:

... tidak seperti pembalikan sama-sekali di Uni Sovyet dalam hal kontrol atas para pekerja produksi oleh para ahli profesional dan para manajer otoritarian yang menggunakan sangksi-sanksi yang dibeda-bedakan secara individual, di Tiongkok terdapatlah usaha-usaha yang selalu terjadi secara berulang untuk menggunakan gaya-gaya mobilisasi politik kolektif 'garis massa' di pedesaan-pedesaan dan lembaga-lembaga urban (...) Idenya adalah, bahwa pola-pola kontrol atas kaum pekerja yang otoritarian dan sangat berstratifikasi dapat mengasingkan (menjauhkan) kaum pekerja dari menyumbangkan keahlian-keahlian dan daya-daya upaya mereka, sehingga apabila rintangan-rintangan ini dapat disingkirkan oleh gaya kepemimpinan yang 'bergaris-massa,' maka perkembangan ekonomi dan sosial yang lebih pesat akan dihasilkannya (Skocpol 1979: 272).

Skocpol sampai pada suatu penilaian yang umumnya positif mengenai

tingkat keikutsertaan yang diwujudkan dalam eksperimen Tiongkok:

Sebagai hasil langsung pencapaian-pencapaian sosio-ekonomik dan politikal Revolusi Tiongkok, kaum tani Tiongkok sebagai suatu keseluruhan tidak hanya menikmati kondisi-kondisi material yang nyata-nyata lebih baik ketimbang sebelum tahun 1949. Mereka juga memiliki kontrol lebih langsung atas dan keikutsertaan dalam keputusan-keputusan mengenai urusan-urusan kehidupan mereka yang terfokus secara lokal daripada yang ada pada kaum tani Rusia sesudah tahun 1929 maupun kaum tani Perancis sesudah 1789-93. Lagi pula, betapapun terpusat dan birokratiknya negara-Partai Komunis Tiongkok jika dibandingkan dengan rezim-rezim Tiongkok pra-revolusioner, ia memungkinkan jangkauan yang jauh bagi perencanaan dan inisiatif provinsial dan lokal (...) Sudah tentu hasil Revolusi Tiongkok tidak harus diromantisasi. Cita-cita terbaik demokrasi sosialis masih jauh daripada dilaksanakan dalam suatu konteks di mana kehidupan politik ditandai oleh manipulasi kelompok dan oleh intoleransi terhadap banyak jenis pembangkangan. Namun akan bodoh sekali membiarkan kategori-kategori politik yang kita miliki membutakan diri kita terhadap kualitas-kualitas partisipatori dari kebijakan Komunis Tiongkok secara menyeluruh atau terhadap hasil-hasil murni dalam pengambilan keputusan komunitas lokal yang telah dicapai oleh dan bagi mayoritas petani Tiongkok sebagai hasil revolusi. Negara Tiongkok telah diperkuat dan, serempak dengan itu, demikian pula demokrasi kolektif di tingkat lokal (Skocpol 1979: 286/7).

Kampanye-kampanye massal telah memainkan suatu peranan sangat penting dalam melawan garis-garis elitis dan dalam memperkenalkan yang orang Tiongkok namakan 'suatu langgam kerja yang tepat' di kalangan kader-kader Partai. Beberapa dari kampanye massal yang paling terkenal ditujukan pada suatu pengurangan kekuasaan arbitrer adalah Gerakan-gerakan 'Tiga Anti' tahun 1951, yang ditujukan terhadap korupsi, pemborosan dan suatu pandangan birokratik pada dinas pemerintahan. Gerakan massa ini melibatkan tekanan atas setiap warga, dari yang tertinggi hingga yang paling bawah, menolak setiap perbuatan korupsi atau pelanggaran serupa yang telah sampai pada pengetahuan orang – kritik dan oto-kritik dalam istilah-istilah resmi, memata-matai dan pembersihan-otak dalam mata Barat. Kampanye-kampanye itu segera terfokus pada segala macam penyalah-gunaan kekuasaan ekonomik di pihak individu-individu perseorangan yang condong menyimpangkan penjabat-penjabat pemerintah dari penunaian teratur tugas-tugas mereka. Yang disebutkan Gerakan 'Lima Anti' tahun 1952 ini ditujukan terhadap penjogokan, penghindaran pajak, pemalsuan, pencurian kekayaan-

kekayaan negara, dan pembocoran rahasia-rahasia ekonomi negara. Kampanye-kampanye ini dilakukan dalam suatu suasana di mana kesederhanaan Spartan, kehematan dan disiplin dalam kehidupan perseorangan ditekankan.

Suatu kampanye lain, yang dimaksudkan untuk memerangi korupsi dan mismanajemen di lingkungan pedesaan melalui kritik dari bawah adalah *Gerakan Pendidikan Sosialis* yang digerakkan oleh Mao pada awal tahun-tahun 1960-an. Gerakan ini ditujukan terhadap empat kekotoran dalam administrasi pedesaan (kurangnya disiplin politikal, penyimpangan-penyimpangan ideologikal, penyimpangan-penyimpangan organisasi, dan mismanajemen urusan-urusan ekonomi), dan menjadi terkenal dengan Gerakan *Su Qing* (Empat Pembersihan)⁷ Kampanye ini terutama disebabkan oleh melonggarnya norma-norma sebagai akibat bencana kelaparan serius tahun 1960/61.

Terdapat perselisihan di kalangan para pemimpin Tiongkok mengenai sifat pembersihan-pembersihan ini, dengan Mao dan para pengikutnya menganjurkan suatu gerakan massa yang konkret di mana organisasi-organisasi ‘bekas kaum tani miskin dan menengah-bawah’ akan memainkan peranan dominan, sedangkan kelompok di sekeliling Liu Shaoqi dan isterinya hendak mempertahankan arah gerakan pembersihan itu di tangan kepemimpinan Partai.⁸ Pada kejadiannya, ‘tim-tim Kerja’ yang diutus oleh organ-organ Partai lebih tinggi untuk melak-sanakan ‘empat pembersihan’ seringkali mencampuri urusan-urusan pedesaan secara sewenang-wenang, memecat kader-kader tanpa penyelidikan selayaknya atau konsultasi dengan massa. Bukan ini yang dimaksudkan oleh Mao ketika memulai gerakan itu. Pada awal tahun 1965, posisi Mao dengan jelas dinyatakan dalam sebuah dokumen baru, ‘ke 23 pasal,’ yang sekali lagi menyeruhkan pada massa kaum tani agar menggunakan kritik dalam mengawasi kader-kader Partai.

Perjuangan untuk melaksanakan Gerakan Pendidikan Sosiaklis ini dapat dipandang sebagai suatu pendahuluan dari kampanye massa yang secara resmi dikenal sebagai *Revolusi Besar Kebudayaan Proletar*. Gerakan ini, dengan –sebagai sarasannya– setiap jenis pengaturan dan prilakui elit, atau setiap penyalah-gunaan posisi kekuasaan para kader Pemerintah

dan {Partai, segera berkembang menjadi suatu perjuangan habis-habisan terhadap elitisme di mana pun itu dijumpai.

Revolusi Kebudayaan itu, dalam berbagai hal, merupakan suatu revolusi sejati, di mana banyak individual, terutama para kader di tingkat puncak, menjadi korban pengejaran hebat, kadang-kadang bahkan sampai pada tindakan kekerasan fisik. Sebaliknya, mereka yang berkuasa, baik itu kader sipil ataupun komandan militer yang menerima ide-ide radikal yang baru, juga menggunakan kekerasan dalam menghadapi para pemberontak, yang kebanyakan adalah 'Garda Merah' yang menantang otoritas mereka.⁹

Mao Zedong jelas tidak menyetujui penggunaan kekerasan oleh para Garda Merah itu. Pada 10 Agustus 1966, "dengan mengabaikan prosedur-prosedur keamanan, Mao turun ke tengah massa untuk berbicara pada para pelajar" (Gray 1990: 345). Pada 11 Agustus suatu 'petunjuk 16 Pasal' telah dikeluarkan oleh pleno ke XI mengenai penyelenggaraan Revolusi Kebudayaan. Salah-satu dari ketentuan-ketentuan yang paling penting adalah sebagai berikut:

Metode yang mesti digunakan di dalam diskusi-diskusi ialah: laporkan fakta, dengan sabar bertukar argumen dan yakinkan lewat pertukaran argumen. Setiap metode pemaksaan ketundukan suatu minoritas, yang menganut suatu pendapat berbeda, tidak diperkenankan. Minoritas harus dilindungi, karena kebenaran kadang-kala berada pada minoritas. Bahkan apabila minoritas itu salah, ia senantiasa mesti diperkenankan membela pendiriannya dengan argumen-argumen dan diperkenankan pula untuk mengubah pendiriannya. Jika terjadi perdebatan, maka itu mesti dilakukan melalui argumentasi, tidak melalui pemaksaan atau kekerasan.

Jack Gray menulis:

Nada Enam-belas Pasal itu moderat. Dalam hal ini ia sangat berbeda dengan sikap yang dipertahankan Lin Biao (Menteri Pertahanan). Beberapa hari setelah pengumuman petunjuk Enam-belas Pasal itu, dalam suatu pidato di sebuah rapat umum pertama Garda Merah, Lin Biao mengatakan: "Kita mesti melancarkan gempuran-gempuran keras pada ideologi burjuis, adat-adat lama dan kekuatan-kekuatan kebiasaan-kebiasaan lama. Kita mesti secara tuntas menumbangkan, menghancurkan dan mendiskreditkan klaim-revisiis kontra-revolusioner, kaum kanan burjuis dan pembesar-pembesar burjuis reaksioner." Adalah Lin Biao yang merumuskan tugas Garda Merah itu adalah "penghancuran empat hal tua," dan dengan begitu membenarkan -atau setidaknya-tidaknya

menganjurkan-ekses-ekses yang dilakukan oleh sementara kelompok Garda Merah ... (Gray 1990: 346)

Di dalam bukunya, *Rebellions and Revolutions*, Gray menunjukkan bagaimana peranan Lin Biao dalam Revolusi Kebudayaan itu tetap kabur hingga kini, dan bagaimana Mao kadang-kala dicemaskan oleh cara Lin dikaitkan dengan ide-ide dan kegiatan-kegiatan ekstremis, sekalipun dukungan Lin untuk sementara waktu tetap esensial bagi rencana-rencananya.

Yang menjadi ‘tujuan segera’ Mao,

adalah memungkinkan suatu perdebatan di mana Partai akan dikenakan pada kritik rakyat, yaitu kritik non-Partai. Melalui perdebatan ini ia berharap mengubah suasana pendapat, agar kebijakan-kebijakannya yang non-birokratik, non-elitis kembali didengar. (...) Tema Mao yang paling kokoh adalah tuntutan akan kebebasan kritisisme bagi kaum muda (Gray 1990: 340/1).

Gerakan itu dimulai dengan pemberontakan pelajar, khususnya ditujukan terhadap cara-cara pengelolaan dan pengajaran universitas yang kejur dan birokratik. Sistem pengajaran dan ujian yang berlaku, yang diterima pada taraf pertama dari Barat, dan diperkuat setelah 1949 oleh pengaruh-pengaruh Sovyet, secara menentukan bersifat menguntungkan para pelajar yang berasal dari bangsawan atau berasal-usul burjuis. Dalam hal ini Revolusi Kebudayaan Tiongkok menyerupai gerakan-gerakan pelajar lainnya di pertengahan tahun-tahun 1960-an di negeri-negeri seperti Perancis dan Negeri Belanda, tetapi dengan perbedaan penting bahwa pemberontakan pelajar Tiongkok menerima dukung kuat dari suatu faksi penting di dalam kepemimpinan Partai dan Militer, termasuk Mao sendiri. Namun, dukungan ini tidak melepaskan gerakan itu dari watak revolusionernya. Sebaliknya, himbuan Mao agar para pemuda ‘membombardir markas-markas besar’ mengubah gerakan pelajar itu menjadi suatu pemberontakan umum, dibarengi suatu kampanye kritik yang diungkapkan lewat demonstrasi-demonstrasi dan *dazebao-dazebao* (poster-poster dinding) yang ditujukan terhadap Partai dalam kenyataan komposisi dan struktur kekuasaannya. Himbuan untuk memberontak terhadap kemapanan itu, yang dating –nyatanya– dari dalam kemapanan itu sendiri, secara kejadian historis tiada duanya.

Dalam perkembangan selanjutnya, Revolusi Kebudayaan itu menjadi suatu gerakan massa sejati, yang melibatkan lapisan-lapisan luas rakyat Tiongkok, dan ditujukan terhadap berbagai aliran/kecenderungan elitis di dalam masyarakat Tiongkok sebagaimana yang telah berkembang sejak revolusi pada akhir tahun-tahun 1940-an. Revolusi Kebudayaan itu membawakan perubahan-perubahan penting di bidang politik. Di semua tingkat birokrasi negara maupun di sektor kolektif, sistem manajemen secara menyeluruh dirombak. 'Komite-komite manajemen' atau manajer-manajer industri, yang bagian terbesar diangkat oleh tingkat-tingkat administratif yang lebih tinggi di bawah pengawasan Partai yang ketat (Stavis 12977: 107), mesti menyerahkan kekuasaan mereka pada Komite-komite revolusioner yang diorganisasi menurut azas tiga-dalam-satu. Komite-komite seperti itu terdiri atas wakil-wakil para kader sebelumnya, kaum pekerja biasa dan Tentera (atau, lebih sering ialah milisia di daerah-daerah pedesaan). Belakangan para ahli mengambil alih dari militer di dalam struktur tiga-dalam-satu di perusahaan-perusahaan industri. Ini dimaksudkan untuk meningkatkan pengaruh kaum pekerja pedesaan maupun perkotaan di dalam manajemen, dan untuk meletakkan dasar suatu cara yang lebih demokratik dalam mengangkat kader-kader pengelola.

Karena markas-markas besar Partai menjadi sasaran utama pemberontakan itu, maka posisi dominan kader-kader Partai menjadi sasaran serangan bertubi-tubi. Kenyataan bahwa para kader harus mempertanggung-jawabkan semua kegiatan mereka, dengan setiap orang berhak mengkritik mereka, telah, pada tahun-tahun awal Revolusi Kebudayaan itu, sangat luar-biasa pengaruhnya atas suasana di negeri itu, sekalipun dalam banyak kasus kritik itu meluncur terlalu jauh dan belakangan mesti dikurangi kekerasannya.

Pada tahap kemudian Revolusi Kebudayaan itu, serangan-serangan yang ngawur terhadap para kader dihentikan/dilarang karena telah menjadi ultra-kiri (kekiri-kirian). Sebagaimana Mao mendesak sejak awal, hanya suatu minoritas kecil para kader yang mesti disingkirkan, dengan selebihnya di reedukasi (dididik kembali) dan ditaruh di bawah kontrol lebih ketat dari bawah. Partai telah, dari 1970 dan seterusnya, dibangun kembali. Lin Biao ternyata telah menentang kebangkitan kembali Partai,

mungkin dikarenakan ia berharap bahwa Tentera, yaitu basis dukungan dirinya, yang akan menggantikan tempat Partai. Tetapi, pandangan yang paling kuat dari tahun 1970 dan seterusnya ialah, bahwa massa mesti tetap di bawah bimbingan Partai, telah ditegakkan kembali sebagai pelopor ideologis. Komite-komite Partai juga didudukkan kembali pada semasa tingkat dan mereka juga, dibentuk menurut azas-tiga-dalam-satu, namun menurut usia, dengan ketiga kategori itu terdiri atas anggota-anggota Partai yang lebih tua, anggota-anggota setengah-baya, dan pekerja Partai angkatan muda.

Sekalipun semua inovasi seperti itu diperkenalkan dengan tujuan meningkatkan pengawasan rakyat atas aparat pemerintahan dan Partai, hasil sesungguhnya teramat sering justru yang sebaliknya: suatu peningkatan dalam tipe pengambilan keputusan yang sewenang-wenang dan otoritarian. Selama kunjungan saya di Tiongkok pada tahun 1979, telah saya dengan cukup banyak kasus mengenai kembalinya pada suatu tipe manajemen yang birokratik, dan sering tidak-efisien, bahkan kadang-kadang yang korup. Pada tahun-tahun 1974-76, beberapa daerah bahkan menyaksikan suatu kecenderungan hiper-radikal yang menganggap produksi yang 'efisien bagi suatu garis yang salah' sebagai sesuatu yang mesti ditentang (Ruge 1978: 356). Tidak semua tuduhan dan pengakuan yang direkam selama pengadilan 'Kelompok Empat' mesti diterima sebagaimana yang ditampilkan, dan demikian pula mengenai dakwaan-dakwaan yang dilontarkan terhadap kelompok militer dan politik berkedudukan tinggi yang berasosiasi dengan Lin Biao dalam yang pada dasarnya merupakan suatu 'proses politis.' Sekalipun begitu, dalam jangka panjangnya, Revolusi Kebudayaan itu, sebagai suatu usaha untuk memperkuat pengawasan rakyat terhadap para pemegang kekuasaan, akhirnya gagal mencapai tujuan-tujuannya. Pada akhirnya, setelah wafatnya Mao pada tahun 1976, para kader yang direhabilitasi dan didudukkan kembali memperoleh kembali kekuasaan dan otoritas mereka, sehingga merupakan contoh dari aforisme Perancis *rien apris et rien oublie* (Tidak belajar apa-apa dan tidak melupakan apa-apa, merujuk pada mentalitas kaum aristokrat *Ancien Regime* yang kembali ke Perancis sesudah restorasi monarki di tahun 1814).

Kegagalan akhir Revolusi Kebudayaan itu mempunyai sejumlah sebab.

Selama tahun-tahun awal adalah anarki yang berlaku. Pergulatan-pergulatan sengit di antara berbagai faksi tumbuh di berbagai tempat, dalam beberapa kejadian di dalam gerakan radikal, dalam kejadian-kejadian lainnya di luarnya, dengan salah satu dari faksi-faksi itu menggunakan slogan-slogan revolusioner baru yang sebenarnya untuk mendukung kader-kader partai dan unsur-unsur lainnya terhadap siapa Revolusi Kebudayaan itu ditujukan ('melambai-lambaikan Bendera Merah untuk melawan Bendera Merah')¹⁰ Kelompok yang terbukti menang di dalam pergulaan seperti itu berhasil memaksakan kemauannya dengan cara yang sedikitnya sama otoritariannya seperti yang sedianya terutama menjadi sasaran Revolusi Kebudayaan itu.¹¹ Poster-poster dinding dan rapat-rapat massa, yang dimaksud sebagai alat kontrol rakyat atas yang berada dalam kekuasaan bisa menjadi berdaya-hasil melalui penyelenggaraan 'perdebatan-perdebatan besar,' juga dengan gampang dapat digunakan sebagai alat memanipulasi massa, sedemikian rupa sehingga menjamin bahwa pandangan-pandangan mereka bersesuaian dengan pandangan-pandangan para pemimpin baru.¹²

Pada pertengahan tahun-tahun 1970-an penindasan secara terang-terangan (yang sedang berkurang pada awal tahun-tahun 1970-an setelah serangan-serangan bertubi-tubi terhadap kader-kader Partai selama tahap permulaan Revolusi Kebudayaan telah dikutuk sebagai ultra-kiri) kembali merajalela. Yang bertanggung-jawab atas gelombang baru penindasan ini ialah para pemegang-kekuasaan baru di berbagai tingkat. Yang dinamakan 'Kaum Radikal Shanghai' di kalangan kepemimpinan Partai (Ruge 1978: 324 ff., 355-357), khususnya bertindak terhadap yang dipandang sebagai pendukung Deng Xiaoping – yang dapat menjelaskan mengapa begitu banyak orang Tiongkok, terutama yang di kota-kota, merasa sangat lega, pada bulan Oktober 1976, dengan 'jatuhnya Kelompok Empat.'

Penindasan (represi) terhadap lawan-lawan politik secara nyata telah meningkat selama Revolusi Kebudayaan itu karena kontradiksi-kontradiksi yang terdapat di dalam puncak Partai tidak lagi dipandang sebagai 'kontradiksi-kontradiksi di kalangan rakyat' yang tidak antagonistik, melainkan dipandang sebagai 'kontradiksi-kontradiksi

antara musuh dan kita sendiri' yang antagonistik. Ini memungkinkan banyak dari pemimpin puncak yang telah diserang selama Revolusi Kebudayaan sebagai 'kaum kontra-revolusioner' atau sebagai agen-agen negeri-negeri asing.¹³ Unsur baru dalam perjuangan intra-Partai ini merupakan hasil kesengajaan dalam merumuskannya sebagai yang didasarkan atas kontradiksi-kontradiksi kelas, dengan Liu Shaoqi dan Deng Xiaopin yang diserang sebagai 'penempuh-penempuh jalan kapitalis' yang telah menyusup ke dalam Partai.

Penafsiran perjuangan dalam batasan-batasan kontradiksi-kontradiksi kelas memberikan suatu makna khusus pada hukuman-hukuman yang diumumkan selama Revolusi Kebudayaan. Oleh karenanya ketika, setelah wafatnya Mao, kaum Radikal Shanghai itu sendiri, pada giliran mereka, diperlakukan sebagai kaum kontra-revolusioner dan sebagai musuh-musuh rakyat, jelaslah bahwa mereka yang telah menebar angin kini menuai badai-taufan.

Kegagalan eksperimen anti-elitis, yang dimulai di tahun 1966 sebagai suatu usaha radikal untuk mengontrol kekuasaan politik, pada penglihatan pertama memberikan sebuah contoh untuk membenarkan sebuah prediksi yang dibuat oleh Barrington Moore, bahwa, setelah menumbuhkan anarki, "demokrasi langsung melahirkan teror revolusioner, yaitu nemesisnya sendiri" (Moore 1972: 66). Namun ini mengemukakan persoalannya secara terlalu sederhana. Praktek-praktek yang berakar dalam azas-azas demokrasi dasar telah dijalankan di Tiongkok selama kurang-lebih limabelas tahun sebelum pengaturan-pengaturan yang lebih ekstrem diberlakukan di tahun 1966 dan tahun-tahun berikutnya. Pelajaran yang harus ditarik dari Revolusi Kebudayaan ialah, bahwa bentuk-bentuk baru kontrol rakyat tidak dapat bekerja sebagaimana mestinya tanpa pendidikan politik yang menyeluruh. Nyatanya, unsur kesabaran dan pendidikan intensif dalam azas-azas demokrasi dasar telah sangat diabaikan dalam penumbangan struktur otoritas yang berlaku itu secara tiba-tiba.

Ini, agaknya, telah menjadi pandangan Mao ketika ia, beberapa tahun kemudian, mengatakan: "Kita mesti memperluas front pendidikan kita dan mengurangi front serangan kita," dan "Jika tidak dididik, kaum kiri

akan menjadi kaum ultra-kiri” (Milton 1976: 291/2). Ia jelas-jelas menentang ciri-ciri penindasan (supresi) tahun-tahun awal Revolusi Kebudayaan. Mungkin sekali, ketiadaan pendidikan secara sabar dalam persiapan suatu guncangan dalam dimensi-dimensi Revolusi Kebudayaan itulah yang menjadi sebab utama mengapa eksperimen radikal itu berakibatkan pergesekan internal, faksi-faksi yang saling berperang, dan perlawanan kuat di kalangan seksi-seksi luas rakyat. Dapat juga diargumentasikan bahwa apabila metode-metode pendidikan gagal memperoleh penerimaan di kalangan rakyat biasa, maka para pemegang-kekuasaan yang lama dan yang baru secara kuat dimotivasikan untuk lari pada kekerasan dan represi.

Stratifikasi Sosial di Tiongkoknya Mao

Anti-elitisme tidak hanya mempunyai suatu aspek politis, tetapi juga aspek sosiologis. Para pemimpin Tiongkok, dengan strategi mereka ‘bertaruh pada massa,’ tidak pernah ‘penyamarata-penyamarata’ radikal. Seperti kaum Sovyet, mereka memberlakukan sistem pengupahan ‘sosialis’: “kepada masing-masing orang menurut kerjanya.” Sistem ini tetap berlaku, tetapi dengan salaris-salaris puncak agak diturunkan dan disamaratakan bahkan sebelum Revolusi Kebudayaan. Jelas terdapat beberapa perbedaan mendasar antara sistem pengupahan (remunerasi) ini dengan yang diberlakukan di Uni Sovyet.

Menurut Theda Skocpol, yang menulis tentang perbedaan-perbedaan ini, dan secara lebih umum, mengenai pola-pola stratifikasi di Tiongkok pasca-revolusioner,

... pola-pola stratifikasi yang telah lahir di Tiongkok sejak tahun-tahun 50-an patut diperbincangkan. Tidak hanya dibandingkan dengan Russia Stalinis, tetapi juga dengan negeri-negeri kapitalis industrial dan dengan negeri-negeri berkembang lainnya, Tiongkok Komunis secara relatif adalah egalitarian. Usaha-usaha terpadu telah dilakukan untuk menstabilkan atau mengurangi-ketimpangan-ketimpangan dalam pendapatan dan status di antara lapisan-lapisan pegawai, di antara pekerja-pekerja kota dan pedesaan, dan di antara para pemimpin dan yang dipimpin. Statistik-statistik pendapatan mengisahkan sebagian keadaan (...) Tiongkok – dengan suatu rentang hingga 10 banding 1 (atau jika diperhatikan kasus-kasus yang sangat ekstrim, hingga sebesar 20 banding 1) – tampak jauh lebih egalitarian ketimbang Rusia di tahun 1034, di mana rentang itu (yang dapat

dibandingkan pada angka 10 banding 1 bagi Tiongkok) adalah 29 banding 1, dan juga jauh lebih egalitarian ketimbang India (30 banding 1) atau Amerika Serikat (hingga 50 banding 1) (Skocpol 1979:273),

Demikian itulah mengenai diferensial-diferensial upah di kalangan pekerja di perusahaan-perusahaan negara. Di daerah pedesaan sumber utama bagi ketidak-adilan ekonomi dapat dijumpai di bidang agrikultura kolektif. Sejak tahun-tahun 1950-an agrikultura Tiongkok telah dikolektifkan, kecuali lahan-lahan kecil perseorangan yang terutama dipakai untuk beri-pakan ternak atau tanam sayur-sayuran (namun masih terhitung bagian besar sekali dari pendapatan perorangan kaum tani). Seperti sudah disebutkan di bab.3, di setiap unit kolektif pengupahan tergantung –pada dasarnya– pada kuantitas dan kualitas kerja yang dilakukan, yang diperhitungkan menurut jumlah poin-poin kerja yang diperoleh per hari. Jelas standard hidup sebuah keluarga tidak hanya bergantung pada kekuatan fisik dan kualifikasi-kualifikasi teknikal, tetapi juga pada jumlah pekerja *full-time* atau *part-time* yang termasuk di dalamnya. Sistem ini menunjukkan bahwa ‘di dalam’ setiap unit kolektif basis suatu stratifikasi sosial tertentu –atau lebih tepatnya diferensiasi ekonomi– berlaku, ditentukan menurut diferensial-diferensial dalam upah atau jumlah poin-poin kerja yang diperoleh. Selama tahun-tahun 1950-an dan awal tahun-tahun 1960-an, berbagai ikhtiar telah dilakukan untuk mengatasi, atau paling tidak mengurangi, keempat kontradiksi pokok yang didapati di Tiongkok pra-revolusi: antara kaum buruh industri dan kaum tani, antara kota dan desa, antara pria dan wanita, dan antara pekerja intelektual dan kaum buruh. Yang terakhir ini mempunyai arti-penting utama bagi masalah ‘elit’ sebagai komponen dalam stratifikasi sosial.

Sudah seawal akhir tahun-tahun 1950-an telah dilakukan sejumlah usaha untuk mengkontra-aksi sifat elitis sistem pendidikan yang dipinjam dari Barat dan berkelanjutan di bawah pengaruh Sovyet:

Telah ada gerakan-gerakan (...) untuk melibatkan sekolah-sekolah dalam kerja produktif sebagai lembaga-lembaga separoh-kerja, separuh-belajar, dan mengubah kaidah-kaidah untuk masuk ke lembaga-lembaga pendidikan lebih tinggi, sebagian untuk memberi lebih banyak bobot pada kualitas-kualitas selain sekedar keberhasilan akademik, sebagian lagi untuk meningkatkan proporsi anak-

anak kaum buruh dan petani di antara para siswa. Namun, pada tahun-tahun setelah kegagalan Lompatan Jauh, kecenderungan-kecenderungan ini telah dibalikkan. Pada awal tahun-tahun 1960-an, sesungguhnya, terjadi suatu gerakan untuk mendirikan rumah-rumah kaca khusus: *sekolah-sekolah paksaan-pagoda-pagoda pusaka kecil*- di setiap distrik untuk mempercepat kemajuan akademik anak-anak terpandai (Dore 1976: 168/9).

Pada periode sama awal tahun-tahun 1960-an sekolah-sekolah separuh-kerja/separuh-studi ditransformasi menjadi tingkat-tingkat sekolah klas dua bagi siswa-siswa yang 'tidak' diterima di sekolah-sekolah lanjutan umum atau lembaga-lembaga akademik. Ini suatu periode di mana dipancarkan persyaratan seseorang mesti 'merah dan sekaligus ahli' sebelum memenuhi syarat untuk diseleksi bagi segala macam fungsi. Namun Revolusi Kebudayaan akan menjadi suatu perjuangan habis-habisan terhadap segala jenis ciri elitis dalam dunia pendidikan, dan terhadap privilese-privilese yang dinikmati 'para ahli.'

Pertama-tama sekali, semua sistem seleksi bagi bentuk-bentuk pendidikan lebih tinggi secara menyeluruh direvisi. Setelah diluluskan dari sekolah-sekolah lanjutan atas, para siswa diharuskan melakukan kerja praktek untuk dua atau tiga tahun, di sebuah pabrik, sebuah komune rakyat, atau di dalam ketentaraan. Atas dasar performan, yang diukur dalam hubungannya dengan sikap-sikap politik dan ideologik umum, kaidah-kaidah bagi seleksi untuk pendidikan lebih tinggi ditentukan oleh lingkungan baru ini. Ujian-ujian masuk, sebagai sebuah alat penyeleksian, dihapuskan.

Di setiap jenis sekolahan, substansi pendidikan yang diberikan secara menyeluruh direvisi. Lebih banyak tekanan diberikan pada kerja praktek; setiap ekolah berusaha mengintegrasikan kerja fisik dengan kerja mental, dengan kerja eksperimental disyaratkan selalu sebagai suatu unsur mendasar. Salah satu perubahan yang paling penting ialah, bahwa para siswa harus menerima gagasan bahwa mereka tidaklah belajar untuk suatu karir, melainkan untuk dapat melaksanakan pekerjaan secara lebih baik dalam pengabdian pada masyarakat. Sumpah yang diucapkan secara kolektif oleh sekelompok mahasiswa terdaftar pada dua universitas Beijing di tahun 1970, setelah suatu perjalanan jauh selama empat hari yang simbolik dari Tianjin, mencerminkan tatanan baru itu:

Kami, mahasiswa, kaum buruh, kaum tani dan prajurit, tidak mengaitkan arti-penting khusus pada kartu-nama 'insinyur' (...) Kami tidak akan pernah membiarkan diri kami dikorupsi, baik itu oleh kepentingan-diri sendiri atau oleh suatu hasrat untuk memperoleh kemashuran pribadi. Keputusan telah kami ambil: sekalipun kita menduduki suatu pos baru, kesadaran revolusioner kami tetap seperti sediakala. Sekalipun lingkungan kami berbeda, posisi kami sebagai kaum buruh yang lahir dari rakyat tetap tidak akan berubah. Terpanggil untuk menunaikan tugas baru, kami akan terus melakukan perjuangan kami dengan cara yang sama ...¹⁴

Prospek bahwa setelah lulus seorang mahasiswa tidak akan mempunyai perspektif karir, ataupun pilihan apapun mengenai pekerjaan di masa datang, mungkin saja telah mengakibatkan ketegangan-ketegangan psikologik yang sedemikian hebatnya sehingga menjadi salah satu soal yang paling sulit dan kritis dalam perjuangan Tiongkok terhadap elitisme.

Pada dasarnya setiap siswa individual dikirim ke sebuah universitas oleh suatu unit kerja yang memerlukan jenis keahlian tertentu, sekalipun keinginan-keinginan atau pilihan-pilihan siswa itu sejauh-jauh mungkin masuk ke dalam pertimbangan. Mahasiswa itu tetap diharapkan kembali ke unit yang sama setelah mendapatkan kualifikasi-kualifikasi yang ditetapkan pada awal priode studi itu. Misalnya, seorang siswa yang – setelah lulus dari sekolah menengah, telah bekerja untuk dua atau tiga tahun dalam departemen kebersihan sebagai seorang pengumpul sampah (di malam hari), diharapkan kembali ke departemen itu setelah mereka menyelesaikan studinya di sebuah universitas atau sekolah politeknik. Fokus studi spesialisasi mereka dengan begitu adalah pada aspek-aspek teknikal atau medikal dari kerja saniter.¹⁵

Pengintegrasian kerja intelektual dengan kerja manual juga mengambil bentuk-bentuk lain, agar memberikan pada mereka yang cuma menikmati sedikit pendidikan, kesempatan untuk mengembangkan kemampuan-kemampuan mereka. Kaum tani biasa dapat memperoleh bentuk-bentuk pelatihan tertentu, bisalnya sebagai 'dokter-dokter bertelanjang kaki,' dalam kapasitas itu mereka melaksanakan tugas-tugas medis dan paramedis sebagai tambahan pada kerja normal mereka sebagai petani. Kaum pekerja industrial belajar ketrampilan-ketrampilan khusus di sekolah-sekolah pabrik. Di kantor-kantor dan perusahaan-

perusahaan industrial jumlah kader, yaitu orang yang melakukan kerja otak dan administrasi, sangat dikurangi selama Revolusi Kebudayaan, dengan begitu melawan kecenderungan *hukum Parkinson* (yang menggambarkan pertumbuhan sifat personel administratif dari hampir semua perusahaan abad ke-XX, termasuk di pemerintahan). Pekerja-pekerja biasa semakin banyak berpartisipasi dalam melaksanakan tugas-tugas kejurutulan dan manajerial. Para kader itu, sebaliknya, diharuskan secara intensif terlibat dalam kerja manual, tidak hanya untuk membiasakan diri mereka dengan situasi dan masalah-masalah khusus para pekerja manual, melainkan juga untuk memaksa mereka meninggalkan sikap-sikap 'keintelektualan' mereka. Pesannya sederhana saja: 'hentikan kemandirian.'

Kecenderungan umumnya ialah untuk lebih melebarkan kapasitas-kapasitas orang banyak ketimbang pelestarian spesialisasi beberapa orang yang diistimewakan. Idealnya orang Tiongkok adalah mengembangkan rakyat yang menyeluruh kepandaiannya. Mengutip David Crook:

Tidak setiap orang Taching dewasa ini seorang pekerja-administratur-ilmuwan-seniman. Tetapi demikian itulah segala sesuatu sedang mengarah: pada suatu perkembangan orang (rakyat) yang menyeluruh kepandaiannya, menutup kesenjangan kerja mental dan kerja manual. Ini, dengan menutup kesenjangan antara kota dan desa dan antara buruh dan petani, akan melengkapi penjemabatan yang dimaksudkan Marx dan Engels sebagai tujuan-tujuan komunisme.¹⁶

Bagaimana tentang penjemabatan yang keempat, menutup kesenjangan antara pria dan wanita, yang merupakan karakteristik Tiongkok pra-revolusi?

Bahkan pada tahun-tahun 1950-an emansipasi kaum wanita telah maju dengan pesatnya. Di tahun 1957, pada kunjungan kami pada Federasi Wanita di Beijing, kami diberitahu bahwa kaum wanita sudah menjalankan fungsi-fungsi manajerial yang penting di pedesaan. Di kebanyakan koperasi yang kami kunjungi, atau ketuanya atau wakil-ketuanya adalah seorang wanita. Kalaupun secara azasi, hak mendapatkan upah yang sama bagi pekerjaan yang sama itu diakui, di dalam prakteknya, pekerjaan yang khusus (bersifat) bagi wanita (seperti

memungut kapas) masih dinilai lebih rendah dalam mengkomputasi poin-poin kerja. Namun di ladang-ladang kami berulang-kali menyaksikan wanita-wanita muda menjalankan traktor-traktor. Selama kunjungan saya yang kedua ke Tiongkok, di tahun 1964, kembali saya mengunjungi Federasi Wanita, di mana, kecuali mendiskusikan hal keluarga berencana, saya juga bertanya tentang pekerjaan kaum wanita di daerah-daerah pedesaan. Menurut keterangan yang diberikan pada saya, di antara 80 dan 90% dari mereka yang mampu bekerja terlibat dalam kerja agrikultural. Rata-rata mereka bekerja lebih dari 100 hari dalam setahun, tetapi ada pula yang bekerja lebih dari 200 hari. Ini berbeda sekali dari masa lalu, ketika praktek pengikatan kaki menjadi kerja agrikultural suatu kemustahilan bagi banyak wanita. Di provinsi Guangong, di Tiongkok tenggara, di mana praktek (pengikatan kaki) itu tidak dikenal, kaum wanita selalu memainkan peranan penting dalam kerja agrikultural. Seperti yang dikatakan ketua yang wanita itu: “kaum pria di sana cuma bermalas-malasan!” Dalam kunjungan-kunjungan saya ke komune-komune rakyat saya juga memperhatikan bahwa banyak gadis belajar di sekolah-sekolah menengah.

Persamaan jenis kelamin juga bersifat sentral bagi Revolusi Kebudayaan, teristimewa pada awal tahun 1970-an.

Seorang ahli-Tiongkok terkenal bangsa Perancis, Michelle Loi, telah menulis sebuah artikel penting mengenai posisi wanita Tiongkok.¹⁷

Selama kunjungannya ke Tiongkok di bulan Oktober 1974 ia sangat terkesan oleh luas dan dalamnya dampak kampanye *Pi Lin pi Kong* (kritiklah Lin Bio dan Konghucu), yang di antara sarasannya meliputi pencapaian persamaan ‘aktual’ (dan tidak hanya teoretis) antara pria dan wanita. Pira, misalnya, diharuskan memungut kapas untuk satu hari, demi mengajarkan pada mereka bahwa pekerjaan ini adalah setidak-tidaknya sama berat dan melelahkan seperti pekerjaan yang untuknya mereka diberikan 10 poin kerja, danbukannya 7, yaitu pengupahan maksimum untuk kaum wanita. Persamaan di antara jenis-jenis kelamin juga dicerminkan dalam persentase mahasiswi di universitas-universitas.

Sekaligus pengarang itu juga sudah menyadari akan adanya suatu garis-kontra yang kuat, tidak hanya di antara kaum pria; terdapat cadangan-cadangan terhadap garis-garis radikal di dalam gerakan itu, bahkan di kalangan pemimpin dan kader Federasi Wanita. Di lain pihak, di antara sayap feminis yang lebih radikal, isteri Mao, Jiang Qing, memainkan peranan yang sangat aktif, sesuai dengan pandangan Mao sendiri tentang perempuan yang ‘memikul setengahnya langit.’

Sekolah-sekolah Kader 7 Mei adalah di antara lembaga-lembaga penting yang memerangi mentalitas elit di kalangan kader, dengan sasaran pentransformasian mereka menjadi pelopor-pelopor sejati dari massa rakyat. Dalam proses pendidikan ini, para kader disyaratkan belajar dan kaum tani miskin dan tengah-bawah (yaitu, dari kaum tani yang sebelum revolusi tergolong pada keluarga-keluarga seperti itu). Masalahnya ialah bahwa Sekolah-sekolah Kader 7 Mei ini lazimnya berada dalam wilayah-wilayah terkucil di mana para ‘siswa’ tidak banyak berkesempatan untuk membaur dengan rakyat biasa; buruh, petani dan prajurit pilihan datang ke sana sebagai guru, tetapi selebihnya kader menjalani kehidupan sederhana mereka di antara rekan-rekan mereka sendiri.¹⁸ Maksud Mao menciptakan Sekolah-sekolah 7 Mei ini ialah untuk menyediakan kader-kader yang telah mengalami serangan-serangan dahsyat dari bawahan-bawahan dengan kesempatan untuk pulih dalam suatu lingkungan di mana mereka dapat memperoleh re-edukasi yang diperlukan sebelum mereka kembali ke pos-pos mereka sebelumnya. Sudah dengan sendirinya ada sejumlah intelektual memandang ‘pengasingan’ ke suatu sekolah seperti itu sebagai suatu bentuk hukuman, tetapi saya telah bertemu dengan kader-kader yang kembali itu nyatanya merasa senang sekali telah mendapatkan pengalaman seperti itu.

Pelajaran-pelajaran yang diberikan oleh kaum buruh, petani dan prajurit telah menjadi suatu bagian normal dari kehidupan di semua jenis sekolahan, termasuk universitas-universitas. Sekalipun pelajaran-pelajaran seperti itu dapat berkenaan dengan aspek-aspek teknis pekerjaan penceramahannya sendiri, pelajaran-pelajaran itu untuk sebagian besar diabdikan pada pendidikan ideologis dan politis. Dalam manajemen universitas-universitas, para anggota klas pekerja dan Tentera juga memainkan peranan penting – dapat dibandingkan dengan

yang dimainkan dalam universitas-universitas burjuis kita sendiri oleh para anggota dewan-dewan wali, yang bekerja sebagai wakil-wakil pemerintah atau bisnis besar.

Arti-penting yang diletakkan oleh Tiongkok, teristimewa pada waktu Revolusi Kebudayaan, pada perjuangan melawan elitisme dalam aspek-aspek sosialnya, mestinya sekarang cukup jelas. Ronald Dore, dalam kritiknya yang tajam mengenai 'Penyakit Diploma' yang diindap dunia Barat, dan yang kini merupakan malapetaka pendidikan di kebanyakan negeri Dunia Ketiga, menungkapkan penghargaan yang sangat tinggi pada azas-azas yang mendasari reform-reform pendidikan dari Revolusi Kebudayaan Tiongkok. Sekali sama sekali tidak buta atas kelemahan-kelemahan dan bahaya-bahaya yang mengintainya, Dore masih mengharapkan bahwa perubahan-perubahan mendasar akan bersifat permanen. Nampaknya bagi Dore:

Tidak seperti reform-reform yang sifatnya lebih percobaan di periode 1958-9, sistem pendidikan selama revolusi kebudayaan telah berubah sedekian rupa hingga menjadikannya tetap seperti itu. Kesahihannya, keadilan sosial pola baru itu tampak diterima secara luas sekali. Mungkin saja ada ongkos-ongkos efisiensi – seperti jelas diyakini oleh mereka 'yang menempuh jalan kapitalis' di awal tahun-tahun 1960-an dan yang membongkar reform-reform 1959-9, dengan berargumentasi bahwa itu perlu untuk memobilisasi bakat-bakat intelektual terbaik dari nasion ini (sekalipun itu datangnya dari keluarga-keluarga burjuis) agar memaksimalkan keahlian 'merah dan ahlinya' sector elit modern. Hampir pasti itu akan – di lain pihak – memperoleh keuntungan-keuntungan efisiensi dalam peningkatan sumbangan sekolah itu untuk, dan meningkatkan peluang-peluang pertumbuhan ekonomi dalam agrikultur tradisional dan sektor industri berbasis agrikultur ukuran kecil yang bertumbuh di dalam struktur komune pedesaan. Reform-reform pendidikan itu adalah bagian dari maupun suatu pencerminan strategi Tiongkok untuk bergerak maju dengan 'berjalan di atas kedua kaki.' Keberhasilan atau kegagalan mereka akan diukur oleh berhasil atau gagalnya strategi itu sebagai suatu keseluruhan (Dore 1976: 175/6).

Pembalikan Besar

Sekalipun begitu, ternyata inovasi-inovasi dalam sistem pendidikan, yang diperkenalkan dalam alur Revolusi Kebudayaan, telah menimbulkan banyak sekali perlawanan di Tiongkok. Pertama-tama, adalah kritik

bahwa taraf pendidikan telah secara serius terkena akibatnya, dan oleh karenanya pertumbuhan ekonomi telah terhambat. Memang, selama kunjungan kami yang ketiga ke Tiongkok (1970-71), kami dicengangkan oleh rendahnya tingkat pendidikan para siswa tahun pertama yang diterima sebuah universitas yang kami kunjungi setelah universitas itu ditutup selama beberapa tahun. Ini adalah hasil sistem seleksi yang diterapkan dalam penerimaan siswa di universitas itu. Setelah wafatnya Mao banyak inovasi telah dibatalkan. Ujian-ujian masuk kembali diberlakukan. Perjuangan untuk persamaan sepenuhnya di antara jenis-jenis kelamin, yang dijalankan dalam alur kampanye *Pi Lin pi Kong*, telah banyak dikurangi, dan Federasi Wanita telah kembali pada posisi-posisi moderatnya.

Menurut analisis Michelle Loi, kampanye besar yang dilakukan terhadap Jiang Qing sampai batas jauh sekali adalah suatu reaksi terhadap catatan feminisnya yang kuat. Ini barangkali dapat menjelaskan mengapa, gantinya diserang atas dasar-dasar politis, Jiang Qing digambarkan sebagai seorang kriminal, sebagai sejenis tukang sihir (Loi 1979).

Sebuah simptom yang sangat mencemaskan menegenai merosotnya penghormatan pada ajaran-ajaran Mao –sekalipun terus diberikan *lip-service* pada *Pikiran Mao*– adalah perselisihan mengenai perbedaan-perbedaan antara pria dan wanita. Sudah pada bulan September 1981, Suzanne Pepper, setelah suatu studi mengenai perkembangan dalam pendidikan tinggi, menulis:

‘Sebuah universitas penting melaporkan bahwa proporsi kaum wanita di antara klas-klas pertama telah merosot dari lebih dari 60% di tahun 1976 menjadi 28% di tahun 1979’.

Lebih buruk lagi adalah alasan yang diberikan oleh para pengajar ini

Menjelaskan bahwa para gadis tidak berprestasi sebaik para pemuda di dalam ujian-ujian masuk sekolah-sekolah menengah atas. Dan sebabnya kemerosotan tiba ini, demikian seorang guru menjelaskan, adalah bahwa otak ‘gadis-gadis’ berhenti berkembang lebih dini.

Seorang pengajar lain mengatakan “otak wanita rata-rata 200 kubik sentimeter lebih kecil daripada dari otak pria.” Penjelasan ini bukannya dikemukakan oleh seseorang misoginis sendirian, melainkan oleh

sejumlah guru dan pengelola –laki maupun perempuan– di Tiongkok utara, selatan dan tengah, termasuk mereka dari salah-sebuah universitas utama bagi pendidikan guru di Tiongkok. Dan Suzanne Pepper mengakhiri dengan berkata: ‘Slogan Mao bahwa “Wanita itu menopang separoh jagat raya” telah jelas-jelas keluar dari peredaran’ (Pepper 1981).

Bahkan lebih absurd lagi, dan sekaligus simptomatik dari suatu obskurantisme yang dihidupkan kembali, adalah sebuah tulisan yang diterbitkan sekitar 1 Agustus 1982, karang Jie Gang (sebuah nama samaran?), dalam *Chinese Worker’s Journal*, yang mengemukakan superioritas bawaan kaum pria sebagai penjelasan bagi pilihan tradisional orang Tiongkok akan anak laki-laki! Karangan itu bagaikan sebuah pembelaan bagi dihidupkannya kembali praktek pembunuhan anak-anak perempuan. Untungnya, karangan itu ketika diserang secara habis-habisan dalam surat-surat kabar lain – dan tidak hanya oleh kaum wanita. Tetapi selama tahun-tahun 1980-an praktek pembunuhan anak-anak perempuan betapapun telah dihidupkan kembali, sebagai hasil kampanye satu-anak (saja). Kita memang mesti menunggu apakah kritik sengit terhadap praktek ini dan mengenai latar-belakang ideologinya, dalam konferensi besar di Beijing di bulan September 1995, akan mempunyai pengaruh.

Kita mesti memeriksa lebih jauh mengapa politik anti-elitis telah gagal berakar di kalangan massa rakyat Tiongkok. Kunjungan studi saya yang keempat di tahun 1979, mengajarkan bahwa kecuali keberatan-keberatan terhadap reform-reform pendidikan radikal, terdapat juga sebab-sebab penting lainnya bagi keluhan-keluhan mengenai cara inovasi-inovasi itu telah dilaksanakan. Sebagai sebuah contoh, kampanye pengiriman lulusan-lulusan muda dari sekolah-sekolah menengah di kota ‘turun ke desa-desa dan naik ke gunung-gunung’ ternyata tidak selalu dilakukan atas dasar kesukarelaan (Bernstein 1977; Milton 1976: 263, 342). Banyak anak muda memandang diperpanjangnya tinggal mereka di pedesaan sebagai suatu masa pembuangan, dan cara mereka diintegrasikan ke dalam masyarakat pedesaan dalam banyak kasus jelas jauh daripada memuaskan, karena jika tidak demikian, beribu-ribu dari mereka itu tentunya tidak akan kembali ke kota-kota tempat tinggal mereka

sesegera kemungkinan ini menjadi terbuka bagi mereka di tahun 1979. Lebih-lebih lagi, ada keluhan-keluhan bahwa terdapat pintu-pintu belakang yang terbuka untuk meloloskan diri dari sistem itu bagi lulusan-lulusan sekolah menengah yang menikmati perlindungan personal dari kader-kader tinggi (Milton 1976: 374). Dikirim ke pedesaan seringkali berarti perpisahan dari keluarga atau mitra untuk jangka waktu lama, tanpa diperkenankan untuk berkumpul-kumpul. Kita semua mengetahui betapa ideologi dan praktek aktual dapat terpisah jauh satu dari yang lainnya.

Pengharusan aktual inovasi-inovasi dari atas, tanpa persiapan, konsultasi dan pendidikan massa secara secukupnya, tidak sangsi lagi mengakibatkan perlawanan serius dan suatu kesadaran pemaksaan. Himbauan pada pemuda kota, untuk melepaskan semua prospek akan karier masa depan sebagai seorang intelektual atau ahli setelah meninggalkan sekolah menengah dan untuk –sebagai gantinya– menerima pengabdian pada negeri di suatu wilayah Tiongkok yang jauh sebagai perspektif sesungguhnya untuk kehidupan masa depan, adalah sebuah pesan yang kebanyakan orang muda sulit menerimanya tanpa persiapan ideologis dan pendidikan massal secara tuntas. Tak sangsi lagi sejumlah besar pria dan wanita muda pada dorongan hati semula telah memutuskan untuk mengabdikan kehidupan masa depan mereka demi melayani rakyat dan menerima tugas apapun yang mesti ditunaikan. Sekali lagi, pemberlakuan secara awut-awutan langkah-langkah inovatorik yang sebenarnya bisa dibenarkan itu dapatlah menjelaskan mengapa pada akhirnya semua itu gagal juga.

Sungguh mengherankan bahwa apabila strategi Tiongkok sebagai-mana yang diterapkan pada hak milik perseroangan adalah berhati-hati dan berangsur-angsur, dengan para pembisnis –misalnya– diperkenankan bertahun-tahun lamanya menikmati suatu persentasi dari laba-laba yang diperoleh dari perusahaan-perusahaan mereka yang telah diambil alih oleh negara, para pemimpin Tiongkok di tahun 1966 dan tahun-tahun berikutnya, ternyata tidak menyadari bahwa peniadaan hak untuk membangun suatu karier adalah –setidak-tidaknya– dalam dampaknya atas harapan-harapan orang-orang muda, sama drastiknya seperti penghapusan pemilikan material bagi orang dewasa.

Transformasi pikiran manusia bukannya suatu kemustahilan – tetapi itu memakan waktu, dan memerlukan banyak kesabaran.

Lagi pula, tidak dapat disangkal bahwa bahkan selama Revolusi Kebudayaan itu, ciri-ciri elitis tertentu masih dipertahankan dalam kehidupan Tiongkok, terutama sebagai sisa-sisa dari gaya kalangan berada di Tiongkok pra-revolusioner. Para orang asing seringkali dapat menyaksikan suatu tatanan hierarki yang ketat yang tidak sesuai dengan gaya egalitarian yang dipropagandakan secara resmi. Misalnya, bila ada tamu-tamu asing hanyalah yang berpangkat tertinggi di antara tuan rumah Tiongkok yang diperkenankan menyatakan pendapatnya. Para dewa dari tatanan lebih rendah diatur untuk berfungsi hanya sebagai penerjemah.

Ini cuma suatu pencerminan minor dari suatu sifat yang lebih umum dari masyarakat Tiongkok yang masih bertahan bahkan selama perjuangan habis-habisan terhadap elitisme. Rene Dumont, dalam sebuah buku yang muncul di tahun 1976, menyebutkan berbagai jenis ciri *mandarin* yang masih saja tampak, maupun sejumlah banyak privilese kecil atau bahkan yang substansial yang dicadangkan untuk tokoh-tokoh berpangkat. Namun begitu, Dumont mengakui,

Bahwa di sini kita berurusan dengan salah-satu masyarakat paling egalitarian di dunia, di mana masih bertahan suatu semangat kasta yang ganjil dan prasangka-prasangka yang diwarisi dari gaya mandarin - (terjemahan saya, W.W.)

Penilaian Kembali Revolusi Kebudayaan

Lalu, apakah watak sesungguhnya dari Revolusi Kebudayaan (1966-76) itu?

Jelaslah bukan suatu percobaan oleh Mao, yang bertindak atas dorongan nafsu akan kekuasaan semata-mata, untuk merebut kembali kepemimpinan politik yang nyaris terlepas dari tangannya. Strategi Mao mempunyai motif-motif ideologis tertentu.

Ia menghendaki –dengan biaya apapun– memerangi kecenderungan di antara kader-kader partai dan birokrasi pemerintahan yang mengarah

menjadi 'burjuis,' mengikuti contoh *Nomenklatura*, yaitu kaum elit berhak istimewa di Uni Sovyet. Karena alasan inilah, 'Revolusi Kebudayaan' terutama diarahkan terhadap kelompok-kelompok berhak istimewa di dalam hierarki partai perkotaan. Bagi kelompok-kelompok ini Revolusi Kebudayaan, dengan segala aspek ketidak-adilan yang menjadi bawaannya, pelebih-lebihan dan ciri-ciri anarki yang mendorong suatu suasana kekerasan, menjadilah sebuah ujian teramat berat. Begitu Revolusi Kebudayaan itu berakhir, dengan wafatnya Mao dalam bulan September 1976, menyusul suatu pembalikan total dalam orientasi politik Partai Komunis.

Walau semua itu, jumlah korban-korban mati dari Revolusi Kebudayaan, betapapun mengerikan dan tidak dapat dimaafkan, teristimewa dimasa damai, mungkin sekali jauh di bawah yang kini disajikan dalam banyak penerbitan.

Dalam tahun 1980-81, 'Kelompok Empat,' termasuk janda Mao, Jiang Qing, dihadapkan di depan pengadilan di Beijing. Dokumen resmi mengenai pengadilan ini, *A Great Trial in Chinese History* (Beijing 1981) yang memuat sebuah kata pengantar oleh ahli sosiologi termashur Fei Xiao-tung (yang adalah salah-seorang dari para hakimnya), mengutip dakwaan Jaksa Istimewa untuk angka-angka berikut ini, sekitar 730.000 telah didakwa palsu dan dihukum, dan mengakibatkan kematian, baik itu lewat perlakuan-buruk atau karena bunuh-diri dari kurang-lebih 35.000 di antara mereka.²⁰ Mengingat kenyataan bahwa jaksa-jaksa penuntut umum mempunyai segudang alasan untuk mengemukakan kejahatan-kejahatan Gang Empat itu seburuk-buruk mungkin, menjadi suatu kesimpulan yang adil bahwa jumlah sebenarnya dari korban-korban fatal Revolusi Kebudayaan itu, yang mungkin saja jauh lebih tinggi daripada angka yang disebut dalam pengadilan itu, masih jauh di bawah puluhan juta korban yang lazim dituduhkan di dunia Barat.

Satu alasan untuk menerima suatu jumlah korban yang jauh lebih kecil dimungkinkan oleh kenyataan bahwa penduduk pedesaan kurang terkena Revolusi Kebudayaan itu daripada klas-klas perkotaan, di mana, misalnya, Jung Chiang, pengarang *Wild Swans* (Angsa-angsa Liar), tumbuh menjadi dewasa. Di daerah-daerah pedesaan pemberontakan-

pemberontakan lokal, sering disertai anarki, memang terjadi selama Revolusi Kebudayaan. Pada waktu kunjungan saya yang ke empat ke Tiongkok di tahun 1979, ditemani seorang ahli sosiologi dari UNRISD (Jenewa), Matthias Stiefel, sejumlah petani menceritakan pada kami mengenai gangguan-gangguan seperti itu di bagian negeri mereka sendiri (Stiefel 1983). Tetapi kasus-kasus di mana pengejaran berakibat pembunuhan atau bunuh-diri jelas-jelas jauh lebih sedikit ketimbang yang terjadi di kota-kota, dan itu pada ketika mayoritas terbesar penduduk masih tinggal di pedesaan.

Bahkan seandainya usaha-usaha Mao untuk mencapai perubahan sosial dan politik secara cepat dengan mempromosikan Revolusi Kebudayaan, setelah memperhitungkan perkembangan-perkembangan di tahun 1980-an dan awal 1990-an, dapat dikatakan suatu kegagalan, perspektif jangka panjangnya tetap menjadi penting. Mao sepenuhnya sadar bahwa bukan satu, melainkan sejumlah revolusi-revolusi kebudayaan yang diperlukan dalam perjalanan waktu. Mungkin sekali sasaran utamanya, ketika memprakarsai gejolak mencekam berupa Revolusi Kebudayaan pada akhir masa hidupnya, adalah untuk mengingatkan kaum muda, secara tuntas meyakinkan, mengenai azas-azas mendasar dari Revolusi Tiongkok. Dengan berbuat demikian, ia mungkin berharap mempersiapkan massa agar memperjuangkan kebebasan-kebebasan mereka dan bagi suatu masyarakat yang lebih baik, jika bentuk-bentuk otoritarian dan birokratik baru lagi-lagi dipaksakan di masa mendatang. Dinilai dari perkembangan-perkembangan berikutnya Mao tidak berhasil merealisasikan sasaran ini. Angkatan muda Tiongkok dewasa ini telah dicuci-otakl sedemikian rupa, sehingga, apapun penghormatan mereka pada tokoh Mao, mereka tampaknya tidak terlalu berminat pada hakiki sebenarnya dari 'Pikiran Ketua Mao,' yang masih diberi *lip-service* resmi.

Sangatlah jelas bahwa perjuangan terhadap elitisme adalah dan tetap merupakan suatu perjuangan yang sangat berat. Orang Tiongkok sendiri menyebutkannya suatu perjalanan jauh yang 10.000 li (mil Tiongkok), suatu perjalanan jauh yang sampai sejauh ini baru mereka ayunkan langkah pertamanya.

Contoh Tiongkok ini memberikan beberapa pelajaran umum. Selama tiga dasawarsa massa rakyat telah berjhuangan untuk emansipasi di sebuah negeri yang memberi tempat-huni bagi hampir seperempat penduduk dunia. Tetapi pelajaran dari periode setelah wafatnya Mao adalah, bahwa perjuangan terhadap elitisme, dengan segala gejolak naik dan turunnya, akan selalu merupakan perjuangan yang berat sekali. Sementara orang, tak sangsi lagi, yang memahami masyarakat manusia sebagai suatu kandang ayam akan mengklaim – setelah menyaksikan peristiwa-peristiwa di Tiongkok sejak pertengahan tahun-tahun 1970-an, bahwa dalam jangka panjangnya perjuangan untuk suatu masyarakat yang benar-benar demokratik pasti akan karam di atas batu-batu karang sifat manusia.

Saya sendiri tidak dapat menerima pandangan pesimistik seperti itu. Di bagian-bagian lain dunia, di Afrika atau Amerika Tengah, perjuangan rakyat untuk partisipasi lebih besar di dalam proses pengambilan keputusan berlangsung terus dengan intensitas yang terus tumbuh. Membelenggu massa rakyat secara permanen tampak sebagai suatu kemustahilan: massa rakyat terus bergerak maju.

Dalam keadaan duniua sekarang, dengan mengutip Rene Dumont, bangsa manusia mungkin saja menghadapi pilihan antara utopia dan kemusnahan (Dumont 1973).

catatan:

¹ Lihat Rob.S.Lynd dan Helen M. Lynd, *Middletown*, 1929; pengarang yang sama, *Middletown in Transition*, 1937. Watak kelas masyarakat kota Amerika telah menjadi alat analitikal utama dalam W. Lloyd Warner dan Paul S. Lunt, *The Social Life of a Modern Community*, Jilid I dari *Yankee City Series*, 1941.

² Sebuah pembahasan historis yang bagus sekali, cf. Heather Sutherland, *The Making of a Bureaucratic Elite*, 1979.

³ Lihat, misalnya, Edward Shils, "On the Comparative Study of the New States," dalam: Clifford Geertz (ed.), *Old Societies and New States*, 1963, hal. 21.

⁴ Ilya Ilf dan Evgeny Petrov, *A Millionaire in Soviet Russia*, dengan kata-pengantar dari A. Lunarcharsky (diterbitkan dalam terjemahan bhs. Belanda, 1922).

⁵ Lihat Mao Zedong, *Where do correct ideas come from?*, 1963.

⁶ Barrington Moore, Jr., *Reflections on the Causes of Human Misery*, 1972, khususnya hal. 60 ff.

⁷ Lihat R. Baum dan F. Teiwes, *Ssu-Ch'ing: The Socialist Education Movement of 1962-1966*, 1968; David Milton dan Nancy Dall Milton, *The Wind Will not Subside*, 1967, hal. 71 ff. Lihat juga Barbara P. Hazard, *Peasant Organization and Peasant Individualism*, 1981.

⁸ 'Sepuluh Point Pertama' dari Mei 1963 mencerminkan pandangan-pandangan Mao, sedangkan 'Sepuluh Point Kemudian' dari bulan September dapat dijumpai pada gagasan-gagasan Liu Shaoqi.

⁹ Lihat misalnya, Ezra Vogel (ed.) *The Cultural Revolution in the Provinces*, 1971.

¹⁰ Lihat mengenai pergumulan faksional di antara mahasiswa Beijing, William Hinton, *Hundred Day War*, 1972; Milton, 1976, hal. 295 ff.

¹¹ Kritik-kritik Mao atas eksese-eksese ini, yang berlawanan dengan '16 Poin' bulan Agustus 1966/7, lihat Milton, 1976, hal. 326/7.

¹² Tentang pengakuan-pengakuan yang dipaksakan di rapat-rapat massa, lihat Milton, 1976, hal. 326/7.

¹³ Lihat misalnya, pidato Kang Sheng, dikutip dalam Milton, 1976, hal. 314/5.

¹⁴ I. Vandermeersch, "La reforme des universites en Chine," *La Nouvelle Chine*, Nr.1 (1971), hal. 30. Frase mengenai kartu yang datang berkunjung merujuk pada sebuah istilah, yang dianggap pernah dipakai oleh Liu Shaoqi.

¹⁵ Kasus seperti itu telah dibahas dalam sebuah studi oleh L./ Ch. Schenk-Sandbergen, berjudul *Vuil Werk Schone toekomst?* Sebuah studi yang membahas kehidupan para tukang sapu dan pembersih di India maupun di Tiongkok, diterbitkan dalam bahasa Belanda dengan ringkasan dalam bahasa Inggris, 1975.

¹⁶ David Crook, "The Quantity of Oil and the Quality of Life," *Eastern Horizon*, Jilid 14, No. 6 (1975) hal. 7 ff. *Ta-ching* (ejaan baru: Daqing) adalah sebuah pusat industrial yang dibangun atas dasar sumur-sumur minyak yang kaya di bagian Timur-laut Tiongkok, yang berfungsi sebagai sebuah model bagi pembangunan industrial, sama seperti yang fungsi yang dipenuhi oleh *Dazhai* yang waktu itu diperankan sebagai model bagi pembangunan agrikultur.

¹⁷ Michelle Loi, "Les femmes chinoises et la Quatrieme corde," *Questions feministes*, Nr. 6 (Sept. 1979), hal. 35 ff., lihat juga Michelle Loi, *L'intelligence du pouvoir - Un monde nouveau: La Chine*, 1973, bab. 5: *La Moitie du ciel*.

¹⁸ Lihat pemaparan bagus sekali oleh K.S. Karol, *La deuxieme revolution chinoise*, 1973, hal. 376 ff.

²⁰ *A Great Trial in Chinese History*, dengan kata-pengantar oleh Fei Hsiao Tung (Fei Xiaotong) yang menjadi salah-seorang dari tigapuluh satu hakim, 1981.

Bab VII, Legislasi Versus Edukasi di Dunia Ketiga

Efek-efek Sosial dari Hukum

Penelitian akhir-akhir ini dalam sosiologi hukum membuktikan bahwa legislasi pemerintahan mempunyai ‘efek-efek’ sosial tertentu. Efek-efek ini, namun, bukanlah (sebagaimana secara dianggap secara salah oleh para ahli hukum dan ahli sosiologi) pembawaan dalam penerapan peraturan-peraturan perundang-undangan, yaitu, dalam kandungan normatif legislasi. John Griffith, profesor sosiologi hukum pada Universitas Groningen, mempermasalahkan apa yang disebut pendekatan ‘instrumentalis’ yang disukai oleh para ahli hukum. Ia menulis:

Suatu peraturan undang-undang dipandang sebagai sebuah perintah, yang dipakai oleh pembuat undang-undang dan yang ditujukan pada para individual, yang dipandang –sebagai konsekuensi perintah itu– mesti menyesuaikan prikelakuannya secara serasi dengan undang-undang itu. Efektivitas suatu peraturan undang-undang –yang menurut pandangan ini menandakan arti-penting sosialnya– dianggap sebagai ditentukan hingga batas mana prikelakuan yang menjadi sasaran itu berada dalam kesesuaian dengan norma yang ditentukan itu (Griffith 1990; terjemahan-terjemahan dari karangan Griffith adalah dari saya. W.W.).

Gantinya berangkat dari suatu ‘penerapan undang-undang’ secara otomatis dan kepatuhan padanya, Griffith, sebagai seorang ahli sosiologi hukum, menyelidiki ‘efek-efek sosial’ legislasi itu, tanpa mempedulikan sifat mereka. Konsepsinya mengenai efek-efek legislasi itu pada dasarnya adalah sama seperti konsepsi saya, yang telah saya nyatakan dalam berbagai publikasi. Yang pertama dari publikasi-publikasi itu muncul pada tahun-tahun 1930-an, pada waktu penelitian sosiologis yang sesungguhnya di bidang ini belum dimulai.¹

Bagaimana Griffith melukiskan pandangannya mengenai ‘efek sosial legislasi’ itu? Masalah pokoknya adalah sebagai berikut: ‘perbedaan apakah dihasilkan oleh sesuatu undang-undang tertentu dalam pergaulan sosial?’ Bukannya: adakah undang-undang itu menggerakkan masyarakat ke arah yang dimaksudkan?, melainkan: apakah tepatnya yang terjadi di

dalam masyarakat ketika sebuah undang-undang itu diberlakukan? Griffith melanjutkan:

Tempat apakah yang diambil oleh sebuah undang-undang di antara segala jenis faktor yang sudah berada yang mempunyai suatu dampak tertentu atas kegiatan manusia? Hal pertama yang kita temukan apabila kita balikkan masalah ini dengan cara ini ialah, bahwa kegiatan manusia tidak terjadi dalam suatu 'vakum tidak berbentuk' sosial, melainkan dalam suatu lingkungan sosial tertentu, dengan norma-norma dan struktur-strukturnya sendiri, yang secara berbeda-beda dapat menimbulkan suatu dampak menentukan atas arti-penting sosial suatu undang-undang.

Di sini Griffith merujuk pada sumbangsih 'bidang-bidang sosial semi-otomatik' (*semi-automatic social fields* – SASF) yang terdapat dalam setiap masyarakat manusia pada cara sebuah undang-undang sesungguhnya berfungsi. Unit-unit sosial ini, yang sudah eksis, memiliki suatu 'potensi pengarah' mereka sendiri. Sebuah gereja, sebuah organisasi profesional dengan kaidah-kaidahnya sendiri, sebuah komunitas agraria, kesemuanya adalah contoh-contoh kemungkinan. Griffith berhutang konsep ini pada Sally Falk Moore, yang menulis bahwa SASF itu “tidak hanya, sebagai suatu sumber regulasi alternatif, bertanggung jawab atas inefektivitas legislasi,” tetapi mungkin juga, sekalipun secara tidak langsung, bersifat menentukan “bagi cara peraturan-peraturan legal yang memancar dari negara itu akan dipatuhi atau tidak dipatuhi” (Falk Moore 1973).

Di antara efek-efek sosial legislasi itu, penerapan sesungguhnya dari kaidah-kaidah itu, apakah melalui pengadilan-pengadilan ataupun lembaga-lembaga pemerintahan lainnya, hanya memenuhi suatu peranan sekunder. Yang jauh lebih penting adalah dampaknya atas prikelakuan para warganegara, tidak begitu penting dalam pengertian sesuatu pelanggaran aktual atau situasi konflik lainnya, tetapi lebih sebagai suatu motivasi psikologis untuk menghindari situasi seperti itu.

Jelas sekali, efek psikologis seperti itu mensyaratkan suatu kesadaran tertentu, bagaimanapun diperolehnya, mengenai kandungan dan tujuan legislasi bersangkutan.

Sebelum Perang Dunia Kedua mudah sekali diterima bahwa azas “Setiap warganegara dianggap mengenal undang-undang” tidak lebih ketimbang

sebuah fiksi dalam hubungannya dengan rakyat yang tidak pernah menikmati pendidikan hukum secara khusus. Menurut azas ini seseorang yang berada di bawah hukum tidak dapat menyatakan ketidaktahuan akan undang-undang untuk membenarkan atau memaafkan kelakuannya. Sekalipun saya beranggapan, pada umumnya, bahwa tidak banyak perubahan yang terjadi dalam situasi dasar di negeri-negeri Eropa-barat, mungkin sekali telah ada suatu peningkatan gradual pada tingkat keakraban dengan hukum, atau—sekurang-kurangnya—dalam kesempatan yang terbuka bagi para warganegara untuk memperoleh pengetahuan hukum, tanpa rintangan-rintangan yang tak-tertanggulangi. Di sini SASF-SASF, seperti serikat-serikat buruh, lembaga-lembaga bagi konseling sosial atau organisasi-organisasi konsumen, apa lagi organisasi-organisasi 'alternatif' bagi bantuan hukum, kesemuanya telah memainkan suatu peranan. Tambah lagi, media modern, termasuk di dalamnya televisi, telah membantu menyebarkan pengetahuan hukum di antara rakyat biasa.

Bagaimanapun, menurut literatur akhir-akhir ini, legislasi mempunyai dampak tertentu, sekalipun ia gagal untuk menjadi sepenuhnya efektif pada tingkat yang dimaksudkan oleh pihak-pihak yang memberlakukannya. Seorang legislator (pembuat undang-undang) karenanya tidak dapat beranggapan bahwa undang-undang yang dibantunya pengesahannya mesti akan memotivasi perorangan-perorangan mengubah prikelakuan mereka sesuai dengan konstruksi hukumnya. Faktor-faktor lain, di samping mentalitas pihak-pihak yang menjadi sasaran perundang-undangan, menentukan efek sosial akhirnya. Keadaan-keadaan khusus, seperti bencana-bencana alam, peperangan atau revolusi, dapat sangat mempengaruhi efek itu, lazimnya dalam arti negatif. Dalam pada itu efek sosial masih sangat bergantung pada mentalitas pihak-pihak, seperti para pejabat atau para hakim, yang diberi kepercayaan dengan pelaksanaan legislasi itu

Kekuatan-kekuatan motivasi dalam sistem-sistem kaidah-kaidah ekstra-legal lainnya, seperti dari agama, moralitas atau susila, juga sangat penting, dan perlu diperhatikan bahwa itu semua sama-sama cenderung untuk memperkuat kaidah-kaidah hukum secara ketat ataupun justru merintanginya.

Dapatkan Masyarakat Manusia Diolah?

Untuk beberapa waktu lamanya telah berlangsung diskusi teoritis, khususnya di kalangan politisi, mengenai apakah masyarakat dapat 'diolah.' Di waktu lalu, teristimewa kaum sosialis yakin benar mengenai kemungkinan untuk dalam jangka panjang sengaja merencanakan pengarahannya pada kesejahteraan yang meningkat, dibarengi pendistribusian kesejahteraan itu secara lebih adil. Kepercayaan akan yang dapat ditawarkan oleh masa-depan ini tidak terbatas pada para pemimpin 'negara-negara sosialis,' di mana tatanan kekuasaan lama telah ditumbangkan. Para politisi sosial-demokrat di negeri-negeri Barat dengan perekonomian yang jelas-jelas bercirikan kapitalis, juga yakin bahwa perencanaan pemerintah di bawah kepemimpinan mereka akan secara berangsur membuka jalan ke arah keadilan sosial yang lebih luas.

Kepercayaan akan perencanaan ini telah terguncang oleh perkembangan akhir-akhir ini di Eropa Timur, di mana perekonomian yang dikontrol oleh negara telah gagal total, sedangkan, bersamaan dengan itu, baik pemerintah maupun birokrasi partai gagal gagal menawarkan kesempatan pada rakyat untuk melampiaskan kebutuhan-kebutuhan dan gagasan-gagasan, apalagi merealisasikannya.

Sebagai reaksi maka unsur-unsur sosialistik di negeri-negeri Barat telah didorong ke dalam posisi defensif dalam suatu situasi di mana kelompok-kelompok sosial dan partai-partai politik yang menentang mereka bersasaran menggerogoti pengaruh negara atas kehidupan ekonomi. Ini dicerminkan dalam kampanye untuk 'menswastakan' (privatisasi) perusahaan-perusahaan seperti utilitis di sektor publik. Kasus yang paling ekstrim adalah kasus pemerintahan Margaret Thatcher di kerajaan Inggris, namun di negeri-negeri Eropa Barat lainnya juga terdapat kecenderungan-kecenderungan kuat ke arah itu – untuk tidak berbicara mengenai kecenderungan sekarang di kalangan kaum Republik di Amerika Serikat, di bawah lecutan Newt Gingrich!

Literatur sosiologis akhir-akhir ini juga bermuatan reaksi-reaksi terhadap kepercayaan dini pada kemaha-kuasaan negara. Di satu pihak para ahli sosiologi, umumnya, tidak lagi menerima pandangan-

pandangan strukturalis dan fungsionalis mengenai masyarakat, yang setelah Perang Dunia ke II telah mendapatkan begitu banyak pengikut, teristimewa di Amerika Serikat. Pada dewasa ini lebih banyak perhatian diberikan pada perubahan-perubahan yang terus-menerus dialami kelembagaan-kelembagaan sosial. Pandangan statik mengenai masyarakat, sebagaimana yang berdominasi di tahun-tahun 1950-an, telah digusur oleh pandangan yang lebih dinamis, yang memperhitungkan arus perubahan-perubahan sosial mendasar yang tiada terinterupsi.

Norbert Elias mengemukakan bahwa perubahan sosial terutama terjadi tanpa campur-tangan secara sadar oleh suatu pemerintahan atau oleh kelompok-kelompok sosial. Ia berpendapat bahwa penekanan mesti diletakkan pada 'figurasi-figurasi' sosial yang umumnya berkembang tanpa memperhitungkan intervensi-intervensi pemerintah secara terencana.²

Pandangan baru ini dapat dianggap sebagai penguraian lebih lanjut dari gagasan-gagasan yang bisa dijumpai dalam 'Aliran Historis' von Savigny (Savigny 1840), yang tesis dasarnya adalah 'ketidak-berdayaan' para legislator: sebuah masyarakat yang berkembang bebas dari peraturan-peraturan yang dipaksakan dari atas. Ini berkaitan dengan konsepsi tipikal abad ke XIX mengenai negara, yang menyatakan bahwa perilaku pemerinah mesti dibatasi dalam sasaran-sasarannya, dengan menghindari semua usaha pengarahan perkembangan sosial. Begitu merkantilisme ditinggalkan sebagai suatu kebijakan ekonomi yang dominan, maka intervensi pemerintah untuk mempengaruhi kehidupan ekonomi, tidak lagi merupakan suatu strategi yang dapat diterima.

Menjelang akhir abad ke XIX, berbagai negeri Eropa Barat, termasuk negeri Belanda, menyaksikan suatu pembalikan kecenderungan ini. Bangkitnya suatu gerakan serikat buruh yang kuat, berpadu dengan pertumbuhan ideologi-ideologi sosialis, membawa pada tindakan-tindakan legislatif yang dimaksud untuk melindungi klas pekerja yang bangkit terhadap ganasnya eksploitasi oleh pengusaha-pengusaha perseorangan. Tidak saja terbukti mungkin, tetapi juga diperlukan untuk menggunakan legislasi guna memajukan daya tawar-menawar klas pekerja, lebih-lebih karena ada politisi yang mulai menyadari bahwa

legislasi yang ada yang melindungi hak-hak pemilikan, dapat ditafsirkan sedemikian rupa sehingga memungkinkan pemerintah mengontrol perkembangan-perkembangan ekonomi. Di negeri Belanda, seorang politikus liberal yang berpengaruh, Sam van Houen, sudah pada sedini tahun-tahun 1880-an menulis:

Aku hanya ingin mengungkapkan kenyataan sederhana bahwa juga sekarang para ahli hukum mengerahkan suatu dampak kuat, bahkan menentukan, atas distribusi kekayaan. Apabila ia menyadari kenyataan ini, legislator itu tidak dapat lebih lama berpura-pura, dengan menatakan klas-klas dalam masyarakat yang telah menjadi miskin: "Aku tidak bertanggung-jawab atas keadaan kalian; situasi itu adalah suatu konsekuensi hukum-hukum sosial yang alamiah, yang terhadapnya juga para legislator itu tak-berdaya." (Houten 1883; terjemahan saya. WW).

Atas prakarsanya di tahun 1874 sebuah undang-undang terhadap kerja-anak-anak telah diperkenalkan.

Pandangan-pandangan Elias mengenai perundang-undangan dan penciptaan hukum umum untuk sebagian mengandung kebenaran. Perencanaan dan legislasi pemerintahan seringkali mempunyai konsekuensi-konsekuensi yang tidak diniatkan; ini kadangkala justru berlawanan dengan sasaran-sasaran asli para pembuat undang-undang itu. Perundang-undangan yang dimaksudkan untuk melindungi penyewa atau sub-penyewa sebuah rumah atau apartemen memberikan sebuah contoh. Para penerima fasilitas dapat saja benar-benar dirugikan kepentingannya: para pemilik dapat saja tidak lagi menyewakan rumah atau apartemen itu, mereka lebih suka memegang kekuasaan untuk secara bebas melepas/menjual miliknya itu.

Sebuah undang-undang yang dimaksud untuk meningkatkan jaminan kerja jangka panjang tidak saja mendorong pengusaha-pengusaha swasta, tetapi bahkan departemen-departemen pemerintah untuk mempekerjakan personil sementara di luar lingkup ketentuan itu. Sebuah contoh lain perundangan-undangan yang dalam jangka panjangnya mengancam akan menghasilkan efek yang adalah kebalikan dari yang diniatkan, berkaitan dengan dorongan pada kemajuan teknologis. Seperti sudah saya tulis, tidak lama sesudah berakhirnya Perang Dunia ke II, perundang-undangan paten gantinya perlindungan bagi para penemu

dapat digunakan untuk melindungi monopoli-monopoli ‘terhadap’ inovasi teknis yang mengancam posisi mereka (Wertheim 1947).

Elias bisa saja benar dalam memberi penekanan atas efektivitas relatif dari penemuan manusia dalam hubungan-hubungan sosial, tetapi menurut pendapat saya klaimnya bahwa kebanyakan perubahan sosial terjadi dalam suatu ‘cara yang tidak-terarah’ (Elias, N.1971: 164, 173), adalah sesuatu yang dilebih-lebihkan. Misalnya saja, perlindungan legal bagi kerja industrial sebagaimana itu telah berkembang selama abad ke XX, dengan kian meningkatnya daya tawar-menawar gerakan pekerja untuk pemberlakuannya, telah sangat banyak mengubah struktur sosial Eropa Barat. Jelas sekali, kemungkinan konsekuensi-konsekuensi setiap legislasi yang disarankan, termasuk khususnya, jalan-jalan yang terbuka untuk menghindarinya, selalu mesti diperhitungkan pada tingkat perancangannya.

Seperti sudah kita ketahui, legislasi tidak beroperasi dalam suatu kekosongan, tetapi dapat situasi-situasi sosial yang sangat kompleks. Sedangkan, mengenai ‘efek-efek sosial’ dari perundang-undangan, saya sarankan untuk membicarakan khusus mengenai legislasi yang relatif baru dengan maksud merekonstruksi latar-belakang sosial dan politiknya, maupun mengenai sasaran-sasaran eksplisit dan implisitnya.

Legislasi Emansipatorik di Dunia Ketiga

Khususnya dalam kaitan dengan wilayah-wilayah Dunia Ketiga. Saya akan membatasi diskusi ini pada legislasi yang relatif baru, yang khususnya ditujukan pada peningkatan emansipasi kelompok-kelompok yang terkebelakangan hak-haknya. (Bab. 5, “Negara dan Dialektika Emansipasi,” merupakan perbincangan mengenai konsep emansipasi).

Konsep saya mengenai emansipasi tidak dimaksud untuk mencakup tindakan-tindakan legislatif atau keputusan-keputusan pengadilan yang ditujukan untuk mempromosikan pengakuan dan penguatan ‘hak-hak obyektif’ para individu, Ini bukan permasalahan inti yang diperbincangkan dalam bab ini, yang saya definisikan sebagai berikut: “Dapatkah legislasi atau bentuk lain apapun dari pembuatan undang-

undang, membantu mencapai sasaran-sasaran gerakan-gerakan emansipasi kolektif, atau adakah itu cuma akan menghalang-halangi?"

Di sini kembali kita menghadapi timbulnya masalah-masalah dari kemungkinan diskrepansi-diskrepansi (selisih-selisih) antara konsekuensi-konsekuensi jangka panjang dan jangka pendek Legislasi yang menguntungkan emansipasi kadang-kadang –dalam jangka panjangnya– dapat menghasilkan efek kebalikan ketimbang yang dimaksud semula; perlawanan dari pihak kelompok-kelompok konservatif bahkan mungkin membawa pada peningkatan represi. Sebaliknya, legislasi konservatif yang ditujukan terhadap emansipasi kadangkala justru menambah kekuatan pada gerakan emansipatorik.

Perbedaan pertama yang sangat mencolok antara negeri-negeri Barat dan Dunia Ketiga adalah bahwa, lazimnya, pada yang disebut belakangan, legislasi pada umumnya mempunyai dampak psikologik yang jauh lebih kecil atas khalayak umum. Di negeri-negeri ini pengetahuan umum mengenai hukum berada pada suatu tingkat sebanding yang terdapat di dunia Barat di masa lalu yang jauh. Pengetahuan seperti itu untuk sebagian besar terbatas pada pihak-pihak yang berlatar-belakang judicial, atau pada kepentingan-kepentingan bisnis yang sangat berkuasa yang mempunyai akses pada para ahli hukum. Kehidupan bagi banyak orang di Dunia Ketiga dijalani menurut sistem-sistem legal tradisional, dengan undang-undang negara yang tertulis memainkan peranan yang tidak lebih daripada marjinal semata. Di bawah hukum adat mayoritas perselisihan diselesaikan oleh pengadilan-pengadilan rakyat atau majelis-majelis desa, dan tidak dengan pengadilan-pengadilan resmi pemerintah. Penduduk-penduduk yang sebagian terbesar agrarik ini hidup dalam suatu keadaan relatif terisolasi, di mana yang berlangsung di ibu kota nyaris tidak mencapai kesadaran rakyat. Negara-negara nasional mungkin telah menggantikan rezim-rezim kolonial pra-perang-dunia, tetapi jarak spiritual antara para penguasa dan yang dikuasai serngkali masih sama besarnya seperti di masa kolonial.

Pada awal abad ke XX, ahli Belanda terkemuka mengenai hukum kebiasaan (*adat*) Indonesia, Cornelis van Vollenhoven, menguraikan suatu jalan pemikiran yang mengingatkan kita pada ide-ide 'Aliran

Historis' Jerman. Van Vollenhoven sangat skeptis mengenai efektivitas perundang-undangan kolonial dalam usahanya mempengaruhi sebuah masyarakat kolonial lewat toindakan-tindakan hukum berdasarkan konsep-konsep Barat, yang tidak memperhitungkan hukum *adat* penduduk bumiputera. Menurut pendapatnya usaha-usaha seperti itu tidak lebih merupakan bertinju-bayang-bayang, bahkan jika efektif, hal ini terutama dengan jalan mencabut kelembagaan-kelembagan lokal dari akar-akarnya. Van Vollenhoven tidak menentang 'semua' perundang-undangan; ia sendiri telah menyusun sebuah *Kode Hukum Adat* ringkas-lengkap – tetapi suatu kodifikasi seperti itu didasarkan pada hukum sebagaimana yang berkembang di dalam masyarakat Indonesia. Menurut Van Vollenhoven: “Menengok kembali ke abad XIX dengan yurisdiksinya yang berjiwa Barat dalam berurusan dengan kaum Oriental mendemonstrasikan citra ketidak-mampuan dan pembohongan-diri yang mengejutkan.”³

Cara ketidak-mengertian akan peraturan-peraturan hukum yang dipaksakan oleh negara pada penduduk agrarik Dunia Ketiga, yang dapat menghambat diberlakukannya perundang-undangan yang dirancang untuk memajukan emansipasi, digambarkan oleh contoh-contoh berikut ini.

Katakanlah bahwa Indonesia boleh dikata sebuah kediktatoran militer, dengan lembaga-lembaga perwakilan yang tidak memiliki kekuasaan nyata apapun dan suatu judisiari yang nyaris tidak pernah bersikap kritis terhadap pihak eksekutif, penduduk pedesaan nyaris tidak mempunyai perangkat untuk menyatakan hak-hak legalnya. Sejak tahun 1965, ketika Jenderal Suharto mengambil kekuasaan, telah sangat sedikit –kalaupun ada– wilayah-wilayah sosial yang bersemi-otonomi (*semi-autonomous social fields* – SASF) yang bebas dari pemerintah. Bahkan lebih dari itu, perundang-undangan dari tahun 1985 secara efektif memaksa semua organisasi sosial menerima ideologi negara, yaitu *Pancasila*, sebagai *azas tunggal* – yang di dalam prakteknya berarti mereka itu diharuskan mendukung kebijakan pemerintah. Undang-undang tidak lagi mengakui serikat-serikat buruh, serikat-serikat tani atau organisasi-organisasi wanita bebas. LBH (Lembaga Bantuan Hukum), yang berusaha batas

tertentu kemandirian, dan kadang-kadang diminta pendampingannya oleh kaum tani yang berjuang terhadap tindakan-tindakan sewenang-wenang pihak pemerintah, hanya bisa bebas bergerak dalam batas-batas yang sangat sempit. Kelompok-kelompok religius yang kecil (seperti gerakan-*Usroh* muslim yang meletakkan kepatuhan pada Koran di atas kepatuhan pada otoritas pemerintahan, secara tidak kenal ampun dikejar-kejar, dan para pemimpinnya dijatuhi hukuman-hukuman penjara yang berat.

Dalam karangannya, *Istana-istana Kosong yang dibangun di Udara: Mengenai Patologi Reform-reform Legal Agraria di Negeri-negeri Berkembang*, Franz von Benda-Beckmann, mendiskusikan sejumlah pengalaman, yang dialaminya bersama isterinya, Keebet, selama riset mereka berdua di sebuah desa di Sumatera Barat. Sebuah undang-undang yang disahkan kurang-lebih limabelas tahun yang lalu sebelum kunjungan mereka itu “tiada seorangpun dari desa itu yang telah mendaftarkan tanahnya.” Namun, mereka diberi kepastian, bahwa “*Pendaftaran itu adalah bertentangan dengan adat,*” karena menurut adat Minangkabau, memperkenankan para pemilik tanah untuk mendaftarkan kepemilikan tanah yang diperuntukkan pembudayaan beras tidaklah bersifat individual, tetapi adalah milik keluarga.

Beberapa bulan kemudian, kepala adat dari majelis desa yang telah mengisahkan kepada para peneliti itu, “dengan cara yang teramat meyakinkan” mengenai perlawanan orang-orang desa itu, mengungkapkan: “...bahwa dengan cara yang amat rahasia, orang-orang tua dan dirinya sendiri adalah orang-orang pertama yang telah mendaftarkan tanah-tanah sawahnya. Tetapi, jangan sampai ada orang yang mengetahui hal ini, kalau diketahui hal itu akan menimbulkan pertengkaran.” Kemudian ternyata bahwa seorang pejabat kantor pendaftaran, yang tinggal di desa itu, justru menjadi yang paling pertama mendaftarkan sebidang tanah yang menjadi miliknya! (Benda-Beckmann 1986).

Von Benda-Beckmann memakai contoh ini untuk melukiskan pandangannya mengenai “patologi reform-reform legal agraria di negeri-negeri berkembang.” Pendaftaran tanah adalah, menurut

pendapatnya, suatu bentuk politik pembangunan yang ditakdirkan untuk gagal, semata-mata karena perundang-undangan yang bersangkutan tidak sesuai dengan *adat*, maupun dengan kesadaran (rasa) keadilan yang terdapat di kalangan penduduk desa, yang demi mereka itulah perundang-undangan itu dikeluarkan.

Saya menyarankan sebuah penafsiran alternatif atas pengalaman Von Benda-Beckmann itu. Kisahnya itu menjelaskan bahwa hanya elit desa yang memperoleh informasi secukup tentang perundang-undangan baru itu sehingga mereka dapat menarik keuntungan darinya. Kepala adat telah “melakukan pendaftaran itu hanya untuk mendapatkan landasan legal yang kuat kalau-kalau ayahnya meninggal dunia”; karena menurut hukum adat Minangkabau yang matrilinear, seorang putera tidak dapat secara normalnya mewarisi tanah persawaan dari ayahnya!!

Betapapun saya tidak dapat menerima bahwa kemungkinan pendaftaran tanah mesti memajukan/menguatkan emansipasi. Pendaftaran pemilikan perseorangan atas tanah tidak dapat, karenanya saja, melayani kepentingan-kepentingan seluruh komunitas yang bisa membenarkan tindakan bersangkutan. Ia hanya menciptakan peluang-peluang bagi para individu untuk memperkuat, baik secara legal maupun secara ekonomi, kedudukan para calon pemilik tanah. Sebagaimana dengan tepat dilihat oleh Von Benda-Beckmann, pendaftaran hak pemilikan perseorangan mengandaikan bahwa penguatan hak-hak pengusaha pertanian individual yang sudah memiliki tanah melayani “idola ekonomi dalam meningkatkan produksi.” Ini bukan bukti bahwa reformasi tanah yang benar-benar legal di negeri-negeri berkembang hanya berarti “membangun istana-istana di udara.”

Efek-efek sosial reform tanah di India di tahun-tahun 1950-an bahkan memberikan suatu contoh yang lebih baik mengenai cara di mana penyimpangan terhadap undang-undang itu dapat menghambat sasaran-sasaran emansipatorik yang sesungguhnya. Sebagai sekutu emansipasi, gubernur pusat di Delhi memprakarsai agar sejumlah negara memberlakukan sebuah perundang-undangan sewa baru pada *Hari Penggarap*, tahun 1957. Riset yang dilakukan di tahun 1962-3 oleh ahli sosiologi C. Baks, di negara Gujerat, (yang untuk sebagian didasarkan

pada sejumlah publikasi yang telah muncul di India) memungkinkan saya untuk melukiskan hasil-hasil perundang-undangan itu dengan kata-kata berikut ini:

Di bagian-bagian tertentu India reform tanah secara legal didefinisikan sebagai suatu larangan atas sewa-menyewakan tanah dan sebagai penciptaan suatu prosedur tertentu di mana para penyewa tanah, dengan melakukan suatu pembayaran tambahan, akan dapat mengganti hak-hak sewa mereka menjadi hak milik. Literatur bersangkutan menunjukkan bahwa perundang-undangan ini sudah menghasilkan suatu efek yang tidak diniatkan, yang jelas, bahkan sebelum perundang-undangan itu diberlakukan. Di beberapa wilayah, para penyewa itu *atau* telah digusur dalam jumlah-jumlah besar, *atau* mereka telah 'secara sukarela' melepaskan hak-hak mereka atas tanah. Ini hanya bisa berarti bahwa para tuan-tanah telah mempunyai cukup kesempatan untuk lolos dari akibat-akibat undang-undang itu. 'Efek' ini, untuk sebagian besar disebabkan oleh sistem sosial yang berlaku, yang memperkenankan kelas pemilik tanah yang berdominasi secara ekonomi, untuk meluaskan pengaruhnya hingga ke aparat pemerintahan dan judisiasi (Wertheim 1965: 340).

Di sini, karenanya, kita mendapati penghindaran dari hukum, yang sebanding dengan yang dilakukan tuan-tuan tanah Belanda yang mengetahui bagaimana caranya untuk melepaskan diri dari perlindungan pada penyewa-penyewa rumah, atau para pemberi pekerjaan yang mengetahui caranya untuk lolos dari penjaminan pada kaum pekerja terhadap pemecatan.

Disertasi doktoral Baks pada tahun 1969, *Penghapusan Persewaan*, – sebuah sumbangan penting pada sosiologi hukum– mencatat secara rinci, konsekuensi-konsekuensi, di sejumlah wilayah Gujerat-Selatan, perundang-undangan baru yang berkaitan dengan persewaan (Baks 1969). Sebuah publikasi yang lebih baru, dalam bahasa Inggris, dengan jelas sekali melukiskan keadaan-keadaan sosial yang membawa perundang-undangan 1957 beroperasi, khususnya di antara *Adivasis* (kelompok-kelompok tribal), dengan cara yang merupakan kebalikan dari apa yang sesungguhnya dimaksudkan:

Hari Penggarap memprakarsai penghapusan persewaan, kecuali beberapa kasus yang terpancang dalam akta itu. Namun seorang Adivasi nyaris tidak menemukan jalan dalam dunia legal ini. Bagi rata-rata orang biasa dunia legal itu merupakan suatu labirin. Untuk memahami peraturan-

peraturan yang beraneka-ragam itu agar berhasil, seseorang tidak dapat menganggap segala sesuatu itu sudah dengan sendirinya tanpa panduan juridis secukupnya. Bagi Adivasi dalam suatu kedudukan sosial yang lemah adalah nyaris tidak mungkin untuk menyewa seorang 'wakil' atau pengacara yang membela hak-hak mereka. [...] Bahkan jika seorang Adivasi bisa mendapatkan [...] bukti, ia akan berpikir dua kali sebelum mengambil keuntungan dari kemungkinan itu. Seorang tuan-tanah, sebaliknya, dengan mudah dapat melakukan ketiadaan-kegiatan yang tercela, misalnya, mengubah nama-nama demi keuntungannya di dalam Catatan-catatan Desa.

Baks mengakhiri tulisannya dengan kalimat berikut ini: "... kebanyakan Adivasis kini dipekerjakan sebagai pekerja-pekerja agrikultur, umumnya dengan upah harian, dan diperlakukan sebagai kaum pekerja, – dan ini sekalipun kenyataan bahwa riset historis Baks itu telah membuktikan para Adivasi ini asal-mulanya adalah pemilik atas tanah mereka! (Baks 1985).

Kesimpulan-kesimpulan Baks diteguhkan oleh riset antropologik belum lama berselang yang dilaporkan oleh Olga Nieuwenhys dalam *Emansipasi untuk Survival: Akses pada tanah dan kerja kaum Thandan di Kerala*. Dikisahkan di situ bagaimana sebuah undang-undang reformasi tanah yang disahkan di tahun 1969, dan yang dimaksudkan agar kaum tani tidak-bertanah –di antara mereka kaum Thandan– yang tergolong pada kasta-kasta paling rendah, dapat menjadi pemilik atas bidang-bidang tanah yang kecil sekali, dalam kenyataan telah menghancurkan basis subsistensi tradisional mereka sebagai 'pemanjat-pemanjat' pohon-pohon kelapa di atas tanah tuan-tuan tanah yang lebih besar. Kesimpulan-kesimpulannya adalah sebagai berikut:

Aksi-aksi kaum tani-tak-bertanah untuk memperoleh hak pemilikan atas bidang-bidang minimal tanah, walaupun berhasil, tidak dapat diambil sebagai bukti perbaikan nasib mereka. Efek-efek sebaliknya dalam memberlakukan hak-hak seperti itu, seperti pemberian dasar legal pada suatu proses *pemagaran* dan dari situ proletarisasi, hingga kini telah kurang diperhitungkan. Kita berhadapan dengan sebuah paradoks: perolehan hak-hak legal atas tanah dan hilangnya hak-hak adat dalam pemungutan hasilnya tampak sebagai dua sisi dari mata-uang yang sama. Apakah perlindungan legal yang diberikan pada lapisan-lapisan paling lemah dari masyarakat desa adalah cukup untuk mengkompensasi kehilangan hak-hak istimewa (*privilese*) yang menjadi kelaziman adalah meragukan, bahkan apabila tekanan dari aksi terorganisasi memberikan dukungan secara terus-menerus (Nieuwenhys 1991).

Sekalipun tidak ada kediktatoran militer di India, struktur sosial, ekonomi dan politik adalah sedemikian rupa sehingga legislasi yang dimaksudkan untuk memajukan perjuangan untuk emansipasi itu seringkali lebih berhasil dalam mengukuhkan ketimbang melemahkan sistem kekuasaan yang ada.

Ahli sosiologi Swedia yang termashur, Gunnar Myrdal, menghitung berbagai negara Asia di antara ‘negara-negara lunak.’ Mereka mungkin galak terhadap massa luas kaum tani dan penghuni kota, tetapi selunak mentega terhadap kelompok-kelompok berkuasa dan yang kaya-raya di dalam masyarakat. Inilah yang menjelaskan tingkat korupsi yang begitu tinggi di ‘negara-negara lunak’ ini, ke dalam mana Myrdal juga menggolongkan India. Dalam kaitannya dengan ini cuma sedikit saja yang membedakan kediktatoran militer dari demokrasi-demokrasi parlementer seperti India (Myrdal 1970: 208/9).

Karakterisasi kebanyakan negara Dunia Ketiga sebagai ‘negara-negara lemah’ telah diuraikan lebih lanjut oleh Joel S. Migdal. Menurut analisis Migdal di dalam *Strong Societies and Weak States*, negara-negara seperti itu tentu saja mempunyai suatu dampak atas rakyat yang tunduk pada otoritas mereka—tetapi kebanyakan bukan dalam cara yang dibayangkan dalam kebijakan-kebijakan mereka. Sedang mengenai seni legislasi, kutipan berikut dari kata-pengantar Migdal membuat orang berpikirk-pikir:

Sesungguhnya, adakah negara-negara mengubah kehidupan rakyat yang mereka coba perintah? Tanpa ragu lagi, memang benar. Bahkan di sudut-sudut paling jauh masyarakat-masyarakat ini dengan negara-negara yang paling baru, para personil, lembaga-lembaga dan sumber-sumber negara telah mengubah situasi-situasi politik dan sosial. Adakah peta-peta masyarakat diubah—sedikit atau banyak—seperti yang dibayangkan oleh para pemimpin negara? Di sini aku mesti mengelak: hanya dalam sejumlah kasus yang dapat dihitung dengan jari-jari tangan, dan dalam bidang-bidang yang menyangkut beberapa masalah lebih daripada masalah-masalah lainnya (Migdal 1988: xii).

Dalam semangat yang sama, tetapi khususnya lebih merujuk pada efek-efek legislasi, saya telah menulis dalam kata-pengantar untuk thesis doktoral Bak, “*Abolition of Tenancy*” (1969):

.....sama pandirnya seperti gagasan bahwa kata seorang legislator akan mencukupi bagi diadakannya perubahan-perubahan sosial yang radikal, adalah pikiran para pengacara dari 'aliran historis' bahwa seorang legislator yang tidak secukupnya memperhatikan hubungan-hubungan sosial yang berlaku, akan sepenuhnya tidak berdaya. Sekalipun legislasi sewa-menyewa baru di India secara tidak meragukan lagi telah menghasilkan sejumlah perubahan sosial penting - namun seringkali tidaklah dalam arah yang ada dalam pikiran sang legislator itu (Baks 1969: Kata-pengantar).

Sebuah analisis menarik mengenai efek-efek di India berkat usaha-usaha pemerintah untuk menggunakan legislasi dan keputusan-keputusan pengadilan guna mencapai 'diskriminasi kompensatori' untuk kepentingan kelompok-kelompok yang dikesampingkan hak-haknya, bisa dijumpai dalam karya ahli sosiologi hukum, Marc Galanter, *Competing Equalities: Law and the Backward Classes in India*:

Sejak Kemerdekaannya, India telah menjalani yang secara kasar dapat dirisalahkan sebagai perkembangan bagi golongan atas dan kemacatan pada golongan bawah. Dengan dorongan yang diberikan oleh diskriminasi kompensatori, suatu sektor dari SC (*Scheduled Castes* = Kasta-kasta yang Dijadwalkan) dan ST (*Scheduled Tribes* = Suku-suku yang Dijadwalkan) telah terjamin jalan-masuknya ke dalam kelas modern yang mengawaki sektor terorganisasi itu. Apakah maknanya ini bagi jumlah besar kasta-bawah dan suku-suku yang tetap dikucilkan dan tertindas? Adakah mereka dalam keadaan lebih baik atau lebih buruk berkat kenyataan bahwa ada anggota dari kelompok keturunan mereka telah mendapat suatu bagian dari kemujuran-kemujuran India modern? (Galanter 1984: 551).

Terbukti bahwa efektivitas perundang-undangan, atau akibat dari ketidak-adaannya, di negara-negara baru di Dunia Ketiga, tidak berbeda jauh dari kasus-kasus yang diambil Van Vollenhoven dari masyarakat-masyarakat kolonial.

Bahkan legislasi yang ditujukan pada emansipasi lewat jalan reform tanah, dan didukung oleh suatu gerakan emansipasi yang kuat di kalangan kaum tani, kadang-kala mungkin menghasilkan kebalikan dari yang dimaksudkan. Pada tahun-tahun sebelum 1965, Indonesia di bawah Presiden Sukarno, menyajikan jangkauan gerakan emansipasi yang pasti, dengan serikat-serikat petani radikal dan serikat-serikat buruh perkebunan yang mampu mengajukan tuntutan-tuntutan mereka.

Undang-undang reform agraria Sukarno tahun 1960 tidaklah radikal, tetapi, betapapun seandainya undang-undang itu sungguh-sungguh menjadi efektif, ia dapat menghasilkan suatu distribusi tanah yang lebih adil. Tetapi sabotase birokratik terhadap undang-undang ini mengakibatkan serikat-serikat tani yang ada pertautan dengan Partai Komunis yang berusaha menjalankan reform-reform tanah mereka sendiri, melalui 'Aksi Sepihak.' Sebuah analisis yang terperinci dan terdokumentasi dengan baik dari 'Aksi Sepihak' di Jawa dapat dijumpai dalam –yang hingga kini belum diterbitkan– disertasi doctoral Kusni Sulang, "Contestation rurale en Indonesie" (1992) yang dipertahankannya di *Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales* di Paris (Kusni 1992).

Hasil akhirnya adalah kontra-revolusi tahun 1965, yang membawa pembalikan total dari proses reform tanah, dan pembantaian ratus-ribu kaum tani (Cribb 1990), yang dituduh telah mendukung 'Aksi Sepihak' itu. Di Brazil, reform tanah Presiden Goulart tahun 1964 telah mengalami nasib yang sama.

Tegasnya, emansipasi, jika dilaksanakan dengan cara radikal, sangat mungkin mengakibatkan represi/penindasan. Selama banyak tahun sesudah 1965, ketika pihak militer merebut kekuasaan di Indonesia, kaum tani miskin tidak berpeluang untuk berorganisasi secara kolektif, untuk menjalankan hak-hak dan kepentingan bersama mereka. Perampasan tanah agrikultur memberikan banyak contoh mencolok tentang cara jawatan-jawatan resmi beroperasi, secara sewenang-wenang, terhadap kepentingan-kepentingan kaum tani. Gantinya merundingkan ganti-rugi yang menjadi hak pemilik tanah, para penguasa menentukan, secara sepihak, harga yang harus dibayar, yang di dalam prakteknya adalah jauh di bawah nilai semestinya. Manakala kaum tani berprotes, baik secara kolektif ataupun secara perorangan, mereka langsung dituduh bersimpati pada PKI, yang Partai Komunis yang dilarang; kadang-kala, untuk mengintimidasi mereka, dijatuhkan hukuman penjara pada mereka.

Baru pada akhir tahun-tahun 1980-an kaum tani, di sejumlah wilayah mulai berorganisasi secara kolektif untuk melawan jenis perampasan tanah ini. Dalam beberapa kasus hal ini dibenarkan karena diperlukan

untuk membangun tanki-tanki air yang dibutuhkan bagi pembangunan irigasi, tetapi dalam kasus-kasus lainnya tanah yang dirampas itu cuma sekedar diperlukan bagi pembangunan sebuah lapangan golf. Ada kalanya, tanah yang sebelum perang dunia kedua menjadi milik sebuah perkebunan teh yang dikuasai pihak asing dan yang tidak kembali ke Indonesia sesudah perang, direklamasi setelah tanah itu digarap oleh kaum tani selama hampir empat-puluh tahunan. Perampasan (tanah) juga telah terjadi atas nama sebuah perusahaan di Sumatra Selatan, di mana keluarga-keluarga dekat Suharto telah menanamkan uang mereka.

Kini, untuk pertama kalinya sejak kontra-revolusi 1965, kaum tani dalam kasus-kasus aksi kolektif, mendapatkan dukungan legal dari LBH (Lembaha Bantuan Hukum) dan dari Lembaga Hak-hak Manusia Indonesia, ditambah dukungan moral yang diberikan para mahasiswa, kelompok-kelompok wanita dan pemimpin-pemimpin agama. Protes kaum tani secara kolektif yang paling luarbiasa terjadi pada awal Agustus 1995; tanah subur di Jawa Timur, yang telah disewakan sebelum perang pada sebuah perusahaan tembakau Belanda, telah diklaim oleh kaum tani, yang sesungguhnya membudayakan tembakau sebagai buruh perkebunan, sebagai tanah yang menurut hukum adat mesti dikembalikan kepada mereka. Ketika, di tahun 1994, tanah itu dialihkan pada perusahaan negara yang pada akhir tahun-tahun 1950-an mengambil alih hak sewa-pakai perusahaan perkebunan partikelir itu, seribu kaum tani, pria dan wanita, selama empat hari lamanya, membakar 6 gudang tembakau, menghancurkan bagian dalam sejumlah bangunan milik perusahaan, menganiaya para penanggungjawab perusahaan negara itu, dan mengadakan suatu demonstrasi besar. Sejumlah surat kabar bereaksi dengan bersimpati pada 'kaum tani yang marah,' mendesak agar dicari jalan kompromi.

Sekalipun, seperti nyatanya sekarang, kadangkala para pejabat agaknya bersedia untuk berkompromi, sungguh terlampau dini untuk berbicara tentang emansipasi yang didukung oleh pemerintah. Persis seperti di India, adalah jauh lebih mudah bagi sebuah perusahaan besar untuk menjalan hak-haknya atas tanah ketimbang bagi kaum tani miskin yang diusir dari tanahnya untuk membuktikan hak-hak mereka yang diperoleh secara sah. Bahkan dengan pendaftaran sebagaimana kasusnya dalam

konflik di Sumatra Selatan, atau bukti dokumenter lainnya, pembesar-pembesar lokal atau regional masih bisa berulah-tingkah, dan secara sewenang-wenang menolak mengakui hak-hak yang diklaim itu.

Faktor-faktor yang Menentukan Efektivitas legislasi

Data historis yang berkaitan dengan efektivitas legislasi di negeri-negeri Dunia Ketiga mengungkapkan tiga faktor pokok.

a. Jarak antara pemerintah dan rakyat.

Pertanyaan pertama sederhana sekali: hingga seberapa jauh pemerintah memiliki otoritas nyata di mata pihak-pihak yang untuk merekalah legislasi itu dimaksudkan? Dengan kata-kata lain: bagaimana penduduk pada umumnya bereaksi terhadap undang-undang yang diturunkan dari atas?

Tidak lama sesudah Republik Indonesia menjadi sebuah negara berdaulat dan merdeka di tahun 1949, ahli sosiologi pedesaan, H. ten Dam, dosen senior mengenai sosiologi pedesaan pada Fakultas Pertanian di Bogor (Jawa Barat), dengan bantuan sekelompok asisten dan mahasiswa Indonesia, membangun sebuah proyek penelitian di sebuah desa pegunungan, Cibodas, di Jawa Barat. Desa ini seringkali dikunjungi oleh Dinas Perluasan Pertanian regional, yang memandangnya sebagai semacam model. Riset itu –namun– mengungkapkan, bahwa dinas itu cuma memperhatikan para tuan-tanah kaya, yang tidak hanya memiliki tanah di sepanjang jalan raya yang dapat dilewati kendaraan bermotor, tetapi juga memiliki cukup modal untuk dapat menindak-lanjuti setiap nasehat yang mungkin diberikan. Mayoritas penduduk desa yang papa-miskin hidup, jauh dari pusat, dalam gubug-gubug reyot yang berlokasi di sepanjang gang-gang sempit, yang tidak dapat dilewati lalu-lintas kendaraan bermotor. Pengalaman akan pemerintahan sangat berbeda bagi kaum tani miskin dan kaum pekerja tidak-bertanah ini. Bagi mereka, pemerintah itu, sebaliknya daripada memberikan bantuan, merupakan sebuah otoritas yang ‘melarang melulu.’ Manakala ‘wong cilik’ ini, misalnya, bermaksud mengumpulkan kayu di hutan-hutan yang dimiliki pemerintah, mereka menanggung resiko ditangkap dan dijatuhi

hukuman-hukuman berat.⁴

Di tahun 1956, selagi ikut-serta dalam sebuah proyek riset sosiologis di sebuah daerah tak-subur yang berbukit-bukit di Jawa Timur, saya dapat menyaksikan betapa kaum tani yang menderita kekurangan tanah, berulang-ulang terpaksa melakukan ‘pendudukan ilegal’ atas tanah hutan, baik itu untuk menanam bahan makanan atau kopi, atau untuk mengumpulkan kayu. Pejabat kehutanan yang menjadi tuan rumah kami menceritakan bahwa, berulang-kali ia telah mengeluarkan surat perintah untuk bertindak terhadap para pelanggar itu, tetapi kadangkali berlalu setahun penuh sebelum pengadilan-penadilan yang tunggakan perkaranya bertimbun dapat memproses perkara-perkara seperti itu, dan selama waktu itu para pelanggar dengan diam-diam melanjutkan pendudukan secara ilegal itu. “Dan apakah yang mereka lakukan setelah mereka menjalani hukuman mereka?” saya bertanya pada pejabat kehutanan itu. “Sudah tentu mereka mulai kembali dengan pekerjaan ilegal mereka itu,” demikian jawabannya.

Contoh-contoh seperti itu menunjukkan bagaimana kaum tani yang mendapatkan diri mereka berhadapan dengan hukum yang tidak adil, lari pada, secara individual ataupun kolektif, ‘senjata kaum lemah’ – tidak melakukan perlawanan terbuka, melainkan sabotase diam-diam terhadap perintah-perintah larangan itu (Scott 1985). Von Benda-Beckmann, dalam *Scape-goat and Magic Charm* (terbit tahun 1989), melukiskan cara rakyat di Dunia Ketiga memandang undang-undang yang mesti dipatuhi itu:

Penduduk desa dihadapkan dengan model-model pembangunan normatif seperti itu melalui banyak jalur komunikasi, melalui media massa, melalui ngrumpi dan rasan-rasan, dan melalui interaksi langsung dengan birokrat pembangunan. Pada umumnya dapat dikatakan bahwa dalam proses pengalihan dari konteks yang menjadi asal-sumbernya rencana-rencana dan proyek-proyek itu, bagi para birokrat di tingkat lokal yang terlibat di dalam pelaksanaannya, model-model asli proyek-proyek itu mengalami sederetan re-interpretasi, penerjemahan atau transformasi, oleh berbagai pelaku dan di tatanan sosial yang berbeda-beda pula (Benda-Beckmann 1989).

b. Diferensiasi di dalam sebuah pemerintahan

Kita sampailah kini pada faktor kedua: 'negara' itu bukan sebuah konsep uniter. Dalam setiap negara terdapat sejumlah variasi dan gradasi, ditentukan oleh faktor-faktor geografik maupun watak aparat pemerintahan. Tidak setiap cabang pemerintahan mempunyai sasaran yang sama seperti para legislator di pusat. Dalam sebuah kediktatoran militer, seperti Indonesia di bawah Suharto, baik pejabat kehakiman/judisiari maupun regional dan lokal, terutama mengikuti garis kekuasaan militer di Jakarta.

Di India, sebagai perbandingan, negara-negara bagian mempunyai legilasi regionalnya sendiri-sendiri, yang menjadi suplemennya yang di pusat. Menurut kedudukan-kedudukan kekuasaan relatif dari partai-partai politik di tingkat regional, ideologi yang berkuasa pada tingkat ini mungkin saja berbeda dari yang ada di pusat. Di negara-negara (bagian) tertentu, suasana yang berdominasi lebih menguntungkan bagi pendukung emansipasi daripada yang ada di ibukota, New Delhi. Kerala dan Bengal untuk suatu jangka waktu yang lama telah mengalami dampak kuat dari partai-partai yang berorientasi Marxis. Tesis doctoral Hans Schenk tahun 1986, *Views on Alleppey* melukiskan efek perundang-undangan perburuhan yang secara relatif maju di India sejak Kemerdekaan, ketika Kerala mendapatkan dukungan efektif organisasi-organisasi buruh dalam menjamin pelaksanaannya. Tetapi jalan-jalan yang ditempuh berbeda dari negara yang satu dari negara lainnya:

... serikat-serikat buruh telah aktif dalam pelaksanaan perundang-undangan, dengan derajat-derajat keberhasilan yang berbeda-beda. Di Travancore-Cochin dan di Kerala pelaksanaan ini diberlakukan secara intensif, jika dibandingkan dengan kebanyakan negara bagian India lainnya. Hal ini berlaku pula bagi Allepsey, jika dibandingkan dengan kebanyakan kota-kota lainnya di Travancore (-Cochin) dan di Kerala (Schenk 1986:119).

Dalam jangka panjangnya, keberhasilan-keberhasilan yang dicapai oleh gerakan emansipasi dapat membawa pada hilangnya hak-hak yang diperoleh, dan bahkan dapat membawa pada kemerosotan ekonomi. Tingkat upah yang meningkat di Alleppey, berpadu dengan turunnya permintaan dari luar negeri, mengakibatkan penutupan sejumlah pabrik goni.

Yang tetap bertahan –dan kebanyakan pengusaha itu mesti bertahan– harus berakomodasi dengan kondisi-kondisi yang berubah dan ini mereka lakukan dengan persyaratan-persyaratan yang sebaik mungkin [...] Serikat-serikat buruh hingga derajat tertentu dapat mengontrol ekonomi lokal, sejak tahun-tahun 1960-an, tetapi kian mereka mencapai tahapan ini, kian berkurang yang mesti dikontrol itu. Lowongan-lowongan pekerjaan menghilang ketika mereka makin dihargai, tambahan-tambahan pendapatan di samping upah dsb. kian menguap bagaikan fata-morgana. 'Penghormatan' diperoleh, atau dipaksakan berlakunya, tetapi peluang-peluang untuk hidup secara terhormat kian langka (Schenk 1986: 104).

Kesimpulan akhir Schenk berbunyi sebagai berikut: “Kemiskinan meliputi seluruh Alleppey.” Penjelasan nya adalah sebagai berikut:

Kemiskinan di Alleppey dan di Kerala penuh dengan kontras dan anomali. Pendapatan yang luar-biasa rendahnya bergandengan dengan kesadaran politik yang tinggi; produktivitas rendah bergandengan dengan infra-struktur medikal dan pendidikan yang secara relatif sangat berkembang. Kemiskinan disembunyikan dibalik sebuah layar 'kehormatan,' di balik kejayaan karena dihormati setelah suatu perjuangan emansipasi yang panjang di antara kasta-kasta rendah yang merupakan mayoritas penduduk Alleppey (Schenk 1986: 131/2).

Dalam kasus yang lebih umum, pembesar-pembesar regional dan lokal kurang simpatik daripada pemerintah pusat terhadap emansipasi lapisan-lapisan penduduk paling miskin. Demikianlah halnya di Indonesia dalam periode –1957-1965– *Demokasi Terpimpin* (Lev 1966; Nasution 1992), ketika kian meningkatnya pengaruh Presiden Sukarno atas kebijakan pemerintahan membawakan dukungan dari pusat bagi emansipasi lapisan-lapisan penduduk yang lebih miskin, yaitu yang disebut kaum *marhaen* (Worsley 1967: 128-130), pada suatu tingkat lebih tinggi ketimbang kabinet-kabinet pada awal tahun-tahun 1950-an. Persis seperti di India, legislasi radikal, yang diperkenalkan di tahun 1957 untuk mengubah undang-undang tuan-tanah dan pesewa, gagal mencapai sasaran, hanya karena kedua lembaga pemerintahan dan peradilan memberikan pada tuan-tuan tanah kaya kesempatan untuk menghindarinya.

Maka, dalam kesimpulannya, di negeri-negeri Dunia Ketiga, kenyataan bahwa baik para pejabat maupun para hakim umumnya tergolong pada suatu klas atau kasta sosial yang khusus, terbukti menjadi halangan terkuat di jalan pemberlakuan legislasi yang dimaksudkan untuk

memajukan emansipasi kelas-kelas yang lebih miskin. Karena alasan-alasan ideologi, ekonomi dan sosial, para pejabat dan hakim seperti itu nyatanya berada di pihak kaum tani kaya, dan tidak di pihak mereka yang dimaksudkan agar diuntungkan oleh legislasi itu. Menurut analisis perbandingan Joel Migdal atas sejumlah nasion Dunia Ketiga, 'kelemahan' mereka adalah disebabkan oleh penghormatan eksekutif para birokrat pada 'orang-orang kuat' yang tergolong pada kelompok-kelompok sosial seperti kaum tani kaya atau sedang. Ini menjelaskan judul bukunya: *Masyarakat-masyarakat Kuat dan Negara-negara Lemah* (Migdal 1988).

c. Pendidikan dan Pengajaran

Pendidikan dan pengajaran bagi massa luas kaum tani dan kaum pekerja merupakan suatu faktor ketiga yang dapat –sekurang-kurangnya dalam teori– menjadikan legislasi yang mendukung emansipasi di negeri-negeri Dunia Ketiga lebih efektif. Berbagai studi Gerrit Huizer mengenai Amerika Latin membuktikan betapa pelatihan yang diberikan oleh organisasi-organisasi petani dan gerakan petani telah memperkuat kedudukan kaum tani miskin, dan memungkinkan mereka –berulangkali– mengukuhkan hak-hak mereka melalui aksi-aksi kolektif. Bersamaan dengan itu, *Establishment* (tatanan yang berkuasa) mempunyai sejumlah cara, seperti 'budaya kekerasan,' untuk menjamin bahwa kemenangan-kemenangan seperti itu tidak lebih daripada bersifat sementara. Kontra-revolusi Brasil tahun 1964 cuma satu di antara banyak contoh (Huizer 1972: 180-183).

Lebih dari itu, contoh-contoh yang sudah disebutkan menunjukkan betapa, dalam sistem-sistem sosial yang karakteristik kebanyakan nasion Dunia Ketiga, pendidikan dan pengajaran massa luas dari penduduk tidak mencukupi untuk menjembatani jarak yang menganga antara mereka dan pemerintah.

Analisis Schenk mengenai perkembangan sosial di kota Alleppey di negara bagian Kerala (India) menunjukkan bagaimana pendidikan dan pengajaran kelas pekerja kota melengkapi legislasi emansipatorik. Sekalipun, di bawah pemerintahan Kerala yang berorientasi Marxis,

pendidikan klas pekerja didukung oleh otoritas regional maupun kota, kekuatan gerakan emansipasi terbukti tidak cukup untuk merealisasi sasaran-sasaran legislasi emansipatorik itu. Karena –dalam analisis akhirnya– kaum pekerja industrial dari Alleppey bergantung pada strategi-strategi yang dijalankan oleh para pengusaha swasta lokal, pada akhirnya mereka dihadap-hadapkan dengan pengangguran dan kemiskinan.

Di Indonesia hasil-hasil organisasi-organisasi sayap-kiri, seperti PKI, serikat tani dan serikat-serikat buruh dalam memberikan pendidikan politik dan kultural pada massa luas petani dan pekerja pertanian di bagian-bagian pulau Jawa, sungguh luar biasa. Metode yang dijalankan dikenal dengan nama ‘turba,’ sebuah singkatan dari ‘turun ke bawah.’ Namun, sebagaimana sudah dinyatakan di atas, para pejabat regional dan lokal, yang asalnya dari klas sosial yang ksama kseperti kaum tani yang lebih makmur, menghalangi implementasi perundang-undangan reform tanah tahun 1960. Pada akhirnya, gerakan emansipasi itu ditindas dengan suatu kontra-revolusi dan pembantaian.

Baks, di dalam disertasi doktoralnya pada tahun 1969, *Abolition of Tenancy*, mengutip M.L. Darling: “... orang tidak dapat diselamatkan dengan Akta Parlemen, dan sesuatu yang lain diperlukan untuk membebaskan penggarap dari belenggunya...” Bagaimana mesti kita tafsirkan sesuatu yang lain ini?

legislasi Emansipatorik dan Revolusi Sosial

Dalam sebuah negeri Dunia Ketiga, sebuah revolusi sosial yang berhasil mungkin merupakan satu jalan untuk mempersekutukan hukum dan yurisdiksi dengan emansipasi. Ini dapat memungkinkan lahirnya suatu legislatur dan suatu birokrasi yang mungkin memihak pada massa luas yang membutuhkan emansipasi, sambil –bersamaan waktu– membatasi, jikapun tidak melenyapkan kekuasaan bisnis swasta, dan lebih khusus lagi, modal asing. Karenanya menjadi mendasar sekali untuk melihat pada pengalaman-pengalaman di Tiongkok sesudah revolusi sosial 1945-1949.

Di dalam bukunya, *Peasant Wars of the Twentieth Century* (1969), ahli antropologi kebudayaan Eric Wolf menyatakan bahwa, pada umumnya, sebuah gerakan tani hanya dapat dilakukan oleh kaum tani miskin dan kaum pekerja tak-bertanah dengan dukungan suatu 'kekuatan eksternal' yang mampu menantang para penguasa yang dominan. Kaum tani menengah, yang menikmati suatu kemerdekaan ekonomik tertentu, dapat menjadi, dalam keadaan-keadaan tertentu, pemimpin gerakan emansipasi pedesaan seperti itu. Menurut Wolf, demikian halnya dengan revolusi Tiongkok – jelas sekali Wolf memandang *Tentara Merah* Tiongkok sebagai suatu 'kekuatan eksternal' seperti itu (Wolf 1969: 290-293). Analisis ahli sinologi, Barbara Hazard yang kaya-informasi dan mendalam mengenai potensi untuk emansipasi kaum tani miskin yang diciptakan oleh perkembangan-perkembangan agrarian di Tiongkok dari tahun 1945 dan seterusnya, menyangsikan tafsiran Wolf. Kondisi-kondisi yang membuat kaum tani bersedia meninggalkan sikap dan prilaku mereka yang individualistik dan menggabungkan diri dalam koperasi, atau setidaknya-tidaknya dalam aksi kolektif, merupakan masalah pokok dalam disertasi doctoral Hazard, *Peasant Organization and Peasant Individualism* (Hazard 1981).

Hipotesis dasar Hazard, yang dikonfirmasi lewat analisisnya mengenai sumber-sumber historis adalah, bahwa prilaku kaum tani untuk bagian besar tidak ditentukan (sebagaimana kadangkala dianggap di dalam literatur yang ada) oleh emosi-emosi tidak rasional, tetapi oleh kalkulasi-kalkulasi rasional dari suatu perspektif jangka panjang. Manakala kaum tani menolak untuk ikut-serta secara aktif dalam suatu gerakan yang mengarah pada reform tanah, hal ini tidaklah disebabkan oleh faktor-faktor psikologis, yang dianggap sebagai tipikal bagi kaum tani Dunia Ketiga. Hazard, dengan merujuk pada pandangan-pandangan dua ahli antropologi, George Foster – yang menyatakan bahwa kaum tani puas dengan "suatu bayangan (citra) kesejahteraan terbatas," dan Charles Erasmus, –yang membuat penemuan istilah *Encogido Syndrom*– menegaskan bahwa, di antara kaum tani yang bergantung, keberhati-hatian ini lahir dari suatu ketakutan yang rasional sekali akan balas dendam bekas tuan-tuan tanah mereka, yang mendorong mereka, 'secara individualistik,' memilih jalan keberhati-hatian itu. Di pihak lain,

pertimbangan rasional yang sama –ketakutan akan balas-dendam di masa mendatang– dapat menimbulkan kekerasan ekstrim terhadap kaum tuan tanah yang ditakutkan kembalinya. Akar-akar perilaku ‘individualistik’ seperti itu mungkin terletak pada kekurangan kepercayaan pada organisasi kolektif.

Namun dalam pandangan Hazard, pelajaran dari pengalaman aktual di Tiongkok adalah, bahwa masalah mendasar bukanlah bersifat sosio-ekonomik ataupun psiko-kultural, tetapi ditentukan oleh hubungannya dengan situasi ‘politik dan administratif.’ Dengan menerapkan strategi-strategi yang meyakinkan kelompok-kelompok luas bahwa, dalam jangka panjangnya, organisasi kolektif dan saling-bantu menawarkan suatu perspektif realistik bagi perbaikan yang tahan lama, Partai Komunis Tiongkok akhirnya berhasil dalam menanggulangi kecenderungan-kecenderungan ‘individualistik.’ Ini mengharuskan Partai dan organ-organnya menjalani suatu proses belajar yang terus-menerus, yang sedemikian beratnya sehingga mengingatkan pada siksaan Sisyphus. Berulang kali, dalam berlangsungnya proses kolektivisasi, strategi-strategi yang direncanakan dengan baik diperlukan untuk mengkontra-aksi kecenderungan-kecenderungan ‘individualistik’ yang menjadi nyata, baik itu dengan suatu penolakan untuk bergabung pada Tim-tim Saling Bantu atau koperasi-koperasi, atau dengan pengunduran diri dari tim atau koperasi tersebut.

Prospek realistik akan perubahan lestari dalam hubungan-hubungan kekuasaan dapat, dalam proses sebuah revolusi, mengubah kaum tani miskin atau kaum pekerja tak-bertanah, yang bergantung pada tuan-tuan tanah dan para lintah-darat, menjadi suatu kekuatan revolusioner yang penting, yang berkomitmen pada suatu ideologi sosialis dengan akar-akarnya pada solidaritas berbasis kelas. Memang benar, transformasi seperti itu pertama-tama sekali mensyaratkan bahwa kaum tani mengakui kekuasaan para tuan-tanah, yang telah menjadi pengayom-pengayom mereka, tetapi juga yang mengeksploitasi mereka, kini digantikan oleh organisasi revolusioner yang berkomitmen pada kepentingan-kepentingan mereka.

Kesalahan Wolf, dalam pandangan saya, ialah melihat *Tentara Merah*,

yang memberikan keamanan seperti itu pada kaum tani miskin, sebagai suatu 'kekuatan eksternal,' karena justru kaum tani miskin itu, dan sering kaum tani yang tak-bertanah itulah, yang menjadi inti (tentara merah itu).

Pelajaran dari Tiongkok, sejak 1945, ialah, bahwa legislasi perubahan tanah di sebuah nasion Dunia Ketiga tidak dengan sendirinya membangun sebuah 'istana di udara.' Pendidikan dan pelatihan tetap penting – tetapi, jelas, tanpa suatu transformasi radikal dari sistem pemerintahan, mereka tidak dapat mencapai hasil-hasil yang lestari.

Penting sekali dalam periode (awal tahun-tahun 1950-an) yang dirujuk Hazard, Tiongkok memiliki sedikit hukum tertulis. Dekkers, seorang profesor hukum Belgia, yang menulis di tahun 1967, menyatakan bahwa di dunia hukum sivil, secara relatif tidak banyak undang-undang yang dikeluarkan: *Pokok-pokok legislasi sipil Tiongkok masih harus ditemukan dalam ketiga kode berikut ini: Undang-undang Perkawinan (1950), Konstitusi (1954), dan Undang-undang Perburuhan (1957)* (Dekkers 1967). Peraturan-peraturan Komune-komune Rakyat didasarkan pada tidak lebih daripada rekomendasi-rekomendasi pemerintah (1958) dan penerimaannya oleh kaum tani. Dekkers melanjutkan: "Ini kedengarannya asing bagi telinga-telinga Barat." Lalu, bagaimanakah penjelasannya?

Dekkers menulis:

Tiongkok bersetia pada azas tradisionalnya, yang berpedoman bahwa hukum tidak lain daripada sebuah pemecahan darurat, yang dianggap berada jauh di bawah ideal moral. Baik dalam perkara-perkara civil dan kriminal terdapat suatu ikhtiar untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan konflik-konflik, sebelum mereka berlanjut ke peradilan. Untuk tujuan inilah yang disebut 'komite-komite rekonsiliasi' dibentuk, yang merupakan bagian dari 'komite-komite perempatan' di kota-kotaiga dan dari 'brigade-brigade' di Komune-komune Rakyat di daerah pedesaan [...] Dengan partai-partai mereka mengadakan diskusi-diskusi di tempat mengenai apa saja yang mungkin menimbulkan masalah. Tiada pengacara atau penuntut yang terlibat di dalamnya (terjemahan saya, W.W.).

Oleh karenanya bisa dipertanyakan apakah perkembangan-perkembangan revolusioner dan pasca-revolusi di Tiongkok dapat benar-benar memberikan contoh-contoh mengenai efek-efek legislasi

atas sistem sosial itu. Sungguh sangat menarik betapa sedikitnya perkembangan seperti itu dilahirkan oleh tindakan-tindakan legal selama periode ketika Mao Zedong menjadi pemimpin utama dari Partai dan dari pemerintahan. Ini khususnya dalam hubungan dengan reform tanah dan perubahan sosial. Di pedesaan, walaupun sangat kuatnya tekanan moral dan politik untuk mendirikan, mula-mula, Tim-tim untuk Saling Bantu, dan secara berturut-turut diikuti oleh pendirian koperasi-koperasi tingkat rendah, koperasi-koperasi tingkat tinggi yang menyamai pertanian-pertanian kolektif, dan akhirnya pembentukan Komune-komune Rakyat, tidak ada –sejauh pengetahuan saya– undang-undang yang memaksa kaum tani untuk mengikuti langkah-langkah itu. Pada dasarnya dipertahankan kebijakan bahwa bentuk-bentuk kerja-sama seperti itu sepenuhnya bergantung pada keputusan-keputusan sukarela dari mereka yang terlibat di dalamnya. Tidak ada perorangan yang dipaksa untuk bergabung, dan bahkan jika ia bergabung, ia bebas untuk kapanpun mengundurkan diri/meninggalkannya. Namun, mereka yang bergabung dapat mengandalkan diri pada segala macam fasilitas yang tidak diberikan pada mereka yang menolak bergabung: dalam jangka panjangnya, karenanya, yang tersebut belakangan ini akan mengalami kerugian-kerugian serius, baik secara ekonomi maupun sosial, di dalam komunitas desa itu.

Kebijakan-kebijakan pemerintah Tiongkok di bawah pemerintahan Mao dapat dibandingkan dengan yang terdapat di negeri-negeri Dunia Ketiga lainnya. Jangkauan yang terbatas yang dimungkinkan bagi legislasi di Tiongkok sudah disinggung di depan. Pendidikan massal, yaitu, tekanan psikologis secara langsung, merupakan wahana utama dalam memotivasi perilaku warga.

Kunjungan saya yang kedua ke Tiongkok, di tahun 1964, memberikan gambaran tipikal mengenai pentingnya kebijakan ini. Pada sebuah pesta perpisahan, yang diselenggarakan bagi saya oleh dewan Lembaga Hubungan Kebudayaan dengan Luar Negeri di Canton (Guangzhou), saya diminta (sebagaimana lazimnya pada peristiwa-peristiwa seperti itu) hal-hal apa saja yang saya catat selama kunjungan-kunjungan saya ke kurang-lebih duabelas komune rakyat dan perusahaan-perusahaan pertanian negara di Tiongkok, yang menimbulkan kritik-kritik saya.

Saya telah menyatakan sejumlah kritik, tetapi juga menambahkan sejumlah kesan positif. Saya menanyakan mengapa jalan-jalan di Canton tampak begitu bersih, sedangkan, selama kunjungan saya ke Tiongkok yang lalu, kdi tahun 1957, saya dicengangkan oleh kenyataan bahwa orang Tionghoa terbiasa meludah di jalan-jalan, dengan akibat-akibat yang mencolok sekali.

Tuan-rumah saya, di antaranya seorang wanita, tertawa terbahak-bahak. Saya bertanya apakah mereka menganggap pertanyaan saya itu ganjil. "Oh, sama sekali tidak," jawab ketua setempat. Ternyata, beberapa hari sebelumnya, seorang tamu asing lain telah mengucapkan hal yang sama, dan kemudian menanyakan apakah ada undang-undang yang melarang meludah (secara sembarangan) di jalan-jalan. Ketua itu, yang kadangkala mengunjungi keluarganya di Hong Kong (yang adalah normal-normal saja ketika itu bagi orang-orang yang berasal dari bagian Tiongkok itu) menceritakan kisah berikut ini:

Di Hong Kong ada peraturan yang melarang orang meludah di jalan-jalan. Seorang polisi menangkap seorang Tionghoa kaya yang meludah di jalan, dan membawanya ke pos polisi, dimana orang itu harus membayar denda sebesar 10 dollar Hong Kong. Orang itu meletakkan selembar uang kertas 100 dollar di atas meja dan sudah mau berjalan keluar meninggalkan pos polisi tersebut. Ia dipanggil kembali dengan kata-kata, "Tunggu sebentar, anda cuma harus membayar 10 dollar, sehingga anda akan menerima kembalian 90 dollar." Jawab orang tersebut, "Tidak, aku menginginkan izin untuk meludah sembilan kali lagi tanpa mendapat urusan!" Nah, anda lihat betapa larangan-larangan legal itu tiada berharga sepeser pun; hanya dengan mendidik warga dapat kami capai sasaran kami!

Pada kunjungan saya yang ketiga di Tiongkok, di tahun 1970-71, selama Revolusi Kebudayaan, saya mendapat kesan bahwa penolakan terhadap paksaan legal bahkan telah mengambil bentuk-bentuk yang lebih ekstrem lagi, sehingga, –misalnya– seorang anak yang tidak mau pergi ke sekolah, tidak boleh dipaksa untuk melakukannya, baik itu oleh para orang-tuanya ataupun oleh pembesar-pembesar negeri. Bujukan secara sabar yang mesti meyakinkan anak itu bahwa adalah lebih bijaksana untuk pergi bersekolah.

Pada tahun-tahun 1970-an, ketidak-hadirnya peraturan-peraturan perundang-undangan yang jelas telah menimbulkan reaksi. Tribunal-

tribunal Rakyat tidak memutuskan sesuai norma-norma legal, tetapi berdasarkan kaidah-kaidah politik. Perjuangan sengit di antara faksi-faksi yang timbul selama Revolusi Kebudayaan telah melahirkan suatu perasaan ketiadaan jaminan hukum yang kuat dan perlawanan terhadap anarki dan kesewenang-wenangan yang merajalela di banyak tempat, berpadu dengan suatu hasrat kuat akan berlakunya supremasi hukum. Segera setelah wafatnya Mao di tahun 1976, perundang-undangan mulai dibuat yang memberikan jaminan yang diinginkan oleh rakyat.

Selama kunjungan saya yang keempat di Tiongkok, di tahun 1979, saya nyaris tidak mempercayai pendengar saya ketika menerima jawaban: “Oh, kami baru saja memberlakukan undang-undang terhadap pencemaran itu.” Ketika saya bertanya apa yang telah dikerjakan bagi perlindungan hutan-hutan di landaian-landaian pegunungan terhadap penebangan pohon-pohon secara tidak bertanggung jawab oleh kaum tani, jawabannya adalah: “*Kami sedang merumuskan sebuah undang-undang yang akan melarang penebangan secara ilegal ini*” (Stiefel 1983: 101). Hanya sekedar mencetak undang-undang itu, menurut pendapat para pembesar, agaknya dapat memecahkan permasalahannya. Saya mencoba menjelaskan bahwa persoalan utamanya bukanlah isi/kandungan sebuah undang-undang, tetapi sampai sejauh mana penduduk akan mematuhi. Saya mengingatkan mereka bahwa di masa Mao, ‘garis massa,’ yang berarti partisipasi aktif rakyat secara besar-besaran, yang adalah jaminan utama bahwa peraturan-peraturan tidak cuma ada di atas kertas.

Pada tahun yang sama itu pula, tahun 1979, kepercayaan pemerintah pada peraturan mencapai titik dilaksanakannya sebuah undang-undang yang pelarang pasangan-pasangan melahirkan lebih daripada seorang anak per keluarga, dengan ancaman hukuman ... Bertangsur-angsur telah menjadi pengetahuan umum betapa kengerian-kengerian –seperti pembunuhan besar-besaran atas bayi-bayi perempuan yang baru dilahirkan– yang ditimbulkan oleh ‘kebijakan’ baru ini, yang telah menggantikan pendidikan secara sabar dengan sanksi-sanksi hukum. Selama tahun-tahun 1970-an, perencanaan keluarga melalui himbuan oleh para ‘dokter bertelanjang kaki,’ yang banyak di antaranya adalah kaum perempuan, telah mencapai keberhasilan luar biasa di daerah

Lompatan Jauh Ke Depan secara nekad-nekadan pada legislasi sebagai sebuah obat-mujarab-bagi-segala-penyakit untuk menyembuhkan penyakit-penyakit sosial di Republik Rakyat Tiongkok ternyata tidak memenuhi harapan-harapan yang digayutkan padanya.

catatan:

¹ Saya merujuk pada Wertheim, 1935, dan Wertheim, 1961.

² Pandangan-pandangan Norbert Elias secara khusus berpengaruh di kalangan para ahli sosiologi Belanda. Buku kecilnya, *Wat is Sociologie?* (1971) menjadi bacaan wajib akademik.

³ Cornelis van Vollenhoven, *Het Adatrecht van Nederlandsch-Indie*, Jilid I (1918), hal. 68; Jilid II (1931), hal. 817.

⁴ H. ten Dam, *Desa Tjibodas*, (1951); H. ten Dam, "Cooperation and Social Structure in the Village of Tjibodas," dalam Wertheim dll (eds.), *Indonesian Economics*, (1961), hal. 379.

Kesimpulan: Akhir Mitos Tahun-Tahun 1970-an: Kemenangan Mammon Dengan Biaya Terlalu Mahal

Krisis Kapitalisme

Dalam sebuah tulisan, yang diterbitkan di bulan Maret 1987, *Global Economic Debacle and Corporate Power*, dua ahli ekonomi Kanada, Frederick F. Clairmonte dan John Cavanach, meramalkan krisis ekonomi dan keuangan yang serius yang terjadi pada akhir tahun itu juga. Mereka juga sudah melihat bahwa 'Krisis Hutang' tidak akan terbatas pada Dunia Ketiga, dengan menekankan bahwa, sebagai akibat 'gunung hutang Amerika Serikat,' konsekuensi keambrokan perekonomian Dunia Ketiga akan dirasakan di seluruh dunia kapitalis.

Hutang-hutang mematikan seperti itu, yang berasal dari kebijakan-kebijakan suatu oligarki korporasi-politik yang tolol, yang gagal memahaminya kekat kepentingan-kepentingan nasional yang lebih dalam, akan menimbulkan kekacau-balauan tidak saja atas perekonomian Amerika Serikat, tetapi oleh implikasi-implikasi sendiri bagi perdagangan internasional dan finans-kapital atas semua pangsa perekonomian global – dan itu dalam runtu yang amat cepat. Kesimpulan mereka adalah 'bahwa kapitalisme Amerika Serikat dalam keseluruhannya hidup atas waktu pinjaman dan uang pinjaman' (Clairmont 1987: 569 ff.).

Dalam introduksi yang disisipkan pada studi klasiknya tahun-tahun '1960-an, *The Rise and Fall of Economic Liberalism*, Clairmont (sebagaimana pengarang itu sekarang menyebut dirinya) telah meng-update analisisnya sebagai berikut:

Pengangguran dan kemerosotan sosial yang menyeluruh dunia telah mencapai tingkat-tingkat yang melampaui Kehancuran Besar (Krisis Besar th. 1930, Per.), dan kapitalisme kembali tidak berdaya untuk menanggulangi katalisme buaatannya sendiri (...). Sebenarnya, yang dialami kapitalisme, dengan untuk sementara membuang fantasi-fantasi dan pikiran-kusut para ahli mitologi korporasi, adalah bahwa perekonomian dunia, dan teristimewa perekonomian Amerika Serikat, berada dalam 'pemulihan' siklus paling lemah sejak 1945 (...). Jelasnya, laba-laba perusahaan telah mencapai puncak ketinggian sepanjang massa (1994), tetapi tidak demikian dengan upah-upah kerja yang terpukul bertubi-tubi. Pertumbuhan ketiadaan-pekerjaan telah bergerak bergandengan tangan dengan habisnya kerja-administrasi, membusuknya kualitas-kerja dan upah rendah

Menghadapi depresi gawat, yang secara pelunakan bahasa disebut 'resesi,' yang dalam beberapa tahun terakhir ini telah melanda perekonomian-perekonomian Amerika maupun Eropa-Barat, menjadi lebih tepat untuk bertanya apakah kita mestinya berbicara tentang suatu krisis gawat dari kapitalisme, dari pada tentang kemenangan kapitalisme atas sosialisme.

Sudah sejak zamannya Marx dan Engels, kaum marxis telah meramalkan 'ambruknya kapitalisme.' Namun, selama satu setengah abad yang telah berlalu sejak ramalan-ramalan Bapak-bapak Pendiri Marxisme itu, kapitalisme telah berhasil bertahan hidup bahkan dalam krisis-krisisnya yang paling gawat. Sistem itu telah berulang-kali diselamatkan oleh peperangan atau persiapan peranmg melalui produksi persenjataan secara besar-besaran! Seperti telah saya jelaskan dalam Introduksi saya pada karya ini, ilmu-ilmu sosial tidak dapat didasarkan pada suatu kepercayaan akan 'hukum-hukum yang tidak dapat dilawan.'

Selama paroh kedua abad ke XX pemerintahan-pemerintahan Amerika telah melakukan segala yang dapat mereka lakukan untuk mendestabilisasi sistem-sistem ekonomi pesaing, khususnya yang berada di bawah dominasi komunis. Tujuan mereka adalah mencegah komunitas dunia menjadi sadar bahwa komunisme atau sosialisme munmgkin menawarkan suatu jalan alternatif bagi pengendalian urusan-urusan ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi, yang bahkan mungkin menjadi pesaing efektif bagi kapitalisme. Antara tahun 1965 dan 1975 perang terbuka, yang dilancarkan oleh Amerika Serikat, telah memporak-porandakan tiga negeri yang jauh lebih kecil, Vietnam, Laos dan Kampuchia, tetapi bahkan setelah kemenangan militer telah diperoleh oleh Vietnam, kerusakan yang diderita negeri itu adalah terlampau berat untuk memungkinkannya menjadi sebuah contoh alternatif sistem pembangunan ekonomi non-kapitalis. Lebih-lebih pula, berlawanan dengan niatnya yang dinyatakan selama perundingan-perundingan Paris di tahun 1972, pemerintah Amerika, dengan dalih bahwa ribuan tawanan perang Amerika yang hilang masih ditahan di Vietnam, menolak untuk mendukung negeri itu secara ekonomis dalam

usaha memperbaiki kerusakan yang disebabkan oleh sepuluh tahun perang itu. Hanya setelah tahun 1995, ketika pemerintah Vietnam menyetujui untuk menggantikan sosialisme dengan suatu ekonomi 'pasar bebas,' pihak Amerika akhirnya bersedia untuk memulihkan hubungan-hubungan politik dan ekonomi.

Barangkali karena pelajaran yang diperolehnya dari perang di Vietnam, pemerintah-pemerintah Amerika mulai mencari cara-cara lain dalam mendestabilisasikan negara-negara yang menganut ideologi komunis atau ideologi komunis-semu. Sejak awal tahun-tahun 1960-an, Kuba telah menjadi korban suatu boikot ekonomi yang melumpuhkan, yang didukung oleh Angkatan Laut Amerika Serikat dan oleh basis strategik Amerika di Guantanamo. Di Nikaragua, di tahun-tahun 1980-an, suatu cara lain telah dipakai: dukungan finansial dan politik yang kuat diberikan pada pihak 'kontra,' sebuah kelompok yang menentang pemerintah yang syah, yang terutama terdiri atas bekas anggota Garda Nasional diktator sayap kanan, Djenderal Somoza, yang telah ditumbangkan oleh kaum Sandinista, yang di tahun 1984 telah menang secara amat meyakinkan dalam pemilihan umum yang benar-benar demokratik, untuk membangun suatu masyarakat non-kapitalis yang bertahan hidup (Vilas 1986).

Usaha-usaha pihak negara-negara Barat untuk mendestabilisasi 'Dua Besar'-nya komunisme dunia, Uni Sovyet dan Republik Rakyat Tiongkok, selama banyak tahun kurang berhasil. Ukuran mereka yang luar-biasa besarnya dan nyaris berswa-sembadanya mereka dalam hal bahan-bahan mentah untuk jangka waktu lama memberikan kekuatan yang diperlukan untuk menghadapi usaha-usaha dari luar yang bertujuan menumbangkan pemerintahan-pemerintahan mereka yang berorientasi komunis. 'Perang Intervensi,' di mana pada akhir Perang Dunia Pertama, Kekuatan-kekuatan Sekutu mendukung para 'Jenderal Putih' sesudah berhasilnya Revolusi Sosialis Oktober 1917, telah dimenangkan oleh 'Tentara Merah,' yang didukung oleh kaum pekerja industrial maupun kaum tani. Dukungan Amerika bagi usaha sia-sia rezim Chiang Kaishek yang hengkang ke Taiwan untuk merebut kembali Tiongkok telah diupahi ketidak-berhasilan serupa. Setelah kehancuran Perang Dunia

Kedua, Uni Sovyet muncul, menang, sebagai suatu imperium yang kuat dan berkuasa.

Begitu peperangan usai, struktur monolitik negara Sovyet dan Partai Komunis yang berkuasa semakin menjadi rem bagi usaha-usaha emansipasi selanjutnya, dan suatu sumber kemacatan dalam masalah-masalah ekonomi. Sejumlah ahli politik berpengaruh di Amerika Serikat, yang di dalamnya termasuk Henry Kissinger, merancang sebuah konsep baru untuk memerangi komunisme. Pada tahun-tahun awal tugas intelijen *Central Intelligence Agency* A.S. pernah dilukiskan oleh seorang ilmuwan politik Amerika dengan kata-kata berikut ini: “Kami mesti mempelajari kaum elit Dunia Ketiga. Kami harus mengetahui siapa yang mesti dibeli dan siapa yang mesti dibunuh.”¹ ‘Siapa yang mesti dibunuh,’ berarti kaum komunis. Tetapi setelah kekalahan di Vietnam, suatu strategi baru dirancang, sedemikian rupa sehingga kaum komunis tidak perlu lagi dibunuh, tetapi dibeli. Di Tiongkok ‘politik pingpong’ Henry Kissinger merambah jalannya di awal tahun-tahun 1970-an. Pengakuan Republik Rakyat Tiongkok sebagai anggota penuh Perserikatan Bangsa-bangsa maupun Dewan Keamanan, pada waktu telah sudah ada, selama sepuluh tahun, perpecahan serius antara Beijing dan Moskow, adalah cukup untuk menarik Tiongkok Merah dan untuk memulihkan, secara berangsur-angsur, hubungan persahabatan dengan Amerika Serikat. Bagi para anggota Pakta Warsawa, yang termasuk dalam orbit Uni Sovyet di Eropa Timur, sebuah strategi serupa, yang untuk sebagian besar berdasarkan penguluran kredit secara besar-besaran, telah dikembangkan.

Karena Uni Sovyet tidak mampu mensuplai pemerintah-pemerintah Eropa Timur dengan teknologi maju yang diidam-idamkan oleh mereka, mereka mulai meminjam secara besar-besaran dari lembaga-lembaga perbankan Barat agar dapat membelinya dari Barat. Menjelang akhir tahun-tahun 1970-an mereka menghadapi masalah-masalah yang sama seperti negeri-negeri Dunia Ketiga yang didominasi Barat: tingginya secara menggila tingkat-tingkat bunga di pasar dunia membuat mereka tidak mungkin membayar kembali pinjaman-pinjaman mereka. Karenanya, pada tahun-tahun 1980-an, bank-bank Barat dan IMF masuk untuk mendikte kebijakan-kebijakan penyesuaian perekonomian sebagai

persyaratan akan pinjaman-pinjam baru/segar, tepat sebagaimana yang mereka lakukan dengan negeri-negeri Dunia Ketiga.²

Selama tahun-tahun 1980-an Polandia erupakan sebuah contoh bagus mengenai penghematan yang dipaksakan oleh IMF itu. Terjadilah di sana keonaran tenaga kerja yang serius, yang akhirnya membawa pada ditumbangannya rezim komunis. Pemilihan seorang paus (bangsa) Polandia menjadi sebab tambahan dari kekacauan sosial dan politik.

Mengenai usaha pendestabilisasian Uni Sovyet, pemerintah-pemerintah Amerika secara berturut-turut, dan memundcak pada pemerintahan Reagan di tahun-tahun 1980-an, masih memiliki suatu strategi lagi: perlombaan persenjataan. Pada masa Breznev kepemimpinan Sovyet bekerja keras untuk mencapai kesetaraan militer dengan Amerika Serikat. Pada tahun-tahun 1980-an itu ancaman Reagan Perang Bintang telah memaksa militer Sovyet merancang tindak-tindak penangkalan yang begitu mahalnya sehingga mengakibatkan –jika diterapkan– kehancuran total perekonomian Sovyet. Gorbachev, dengan dukungan Shevardnadze, yaitu Menteri Luar-negerinya, menolak Perang Dingin, dan dengan begitu mengakhiri permusuhan Sovyet terhadap dunia Barat. Ini sebuah keberhasilan politik yang penting, karena pemerintah Amerika tidak mempunyai pilihan lain kecuali mengikutinya dan meninggalkan Perang Dingin itu.

Inilah titik menentukan dalam situasi dunia sekarang. Disintegrasi Uni Sovyet, bubarnya Pakta Warsawa dan buyarnya semua rezim komunis di Eropa Timur dilihat sebagai, dan ini tidak hanya di dunia Barat, sebagai suatu kekalahan total bagi komunisme maupun bagi sosialisme, dan sebagai suatu kemenangan bersih bagi kapitalisme – ‘Akhir Sejarah’ (*The End of History*) dalam impian gila Fukuyama!

Yang sebenarnya ialah bahwa kepemimpinan Amerika telah terjerumus ke dalam perangkap yang telah dipasangnya untuk Uni Sovyet. Apabila Russia dan bekas negara-negara anggota Uni Sovyet masih harus menemukan jalan mentransformasi suatu perekonomian yang terutama didasarkan pada produksi perlengkapan militer, menjadi sebuah perekonomian yang memproduksi untuk perdamaian, maka Amerika

Serikat, dengan warisan “produksi persenjataan terentang hingga batas-batas paling jauh selama tahun-tahun 1980-an, masih mesti menemukan jalannya sendiri untuk memproduksi untuk perdamaian.” Di sini tidak ada jalan mulus bagi pemerintahan Bush ataupun Clinton, karena mereka menghadapi masalah-masalah pengangguran yang terus menggunung di banyak negara bagian Amerika.

Ramalan Clairmonte dan Cavanagh, yang dibuat di tahun 1987, bahwa ‘gunung hutang Amerika Serikat’ akan berarti ‘bahwa kapitalisme A.S. hidup dari waktu pinjaman dan uang pinjaman,’ kembali menjadi lebih penad. Pada tahun 1987 mereka tidak bisa membayangkan runtuhnya Tembok Berlin, juga tidak mengetahui bahwa, dalam beberapa tahun saja, peperangan, atau persiapan untuk perang, tidak akan lagi memberikan cara untuk menyelamatkan kapitalisme dari keambrokan. Sungguh penting, negara-negara kapitalis yang maju, yang hingga sejauh ini tidak terlalu menderita karena depresi ekonomi tahun-tahun belakangan ini, adalah Jepang dan Jerman, kedua-duanya dilarang, sejak akhir perang dunia kedua, untuk ikut ambil bagian dalam perlombaan persenjataan.

Kapitalisme masih mesti menemukan suatu strategi pembangunan yang bisa berjalan untuk Russia dan negara-negara Eropa Timur lainnya. Sudah dapat diperkirakan, kedua obat-manjur-untuk-segala-penyakit yang diresepkan itu, yaitu suatu ‘ekonomi pasar bebas’ dan suatu ‘demokrasi parlementer model barat’ yang diintroduksikan secara tiba-tiba itu, tidak juga bekerja lebih baik ketimbang yang dilakukan di negeri-negeri Dunia Ketiga. Di dunia Barat kedua sistem itu berkembang secara berangsur-angsur, dengan sebuah ekonomi pasar bebas yang menerima dukungan kuat dari negara, yang –sekaligus– dapat menjamin sekedar keadilan sosial; sedangkan demokrasi parlementer bertumbuh subur dalam sebuah masyarakat yang mengakui toleransi terhadap kelompok-kelompok sosial, etnik dan agama yang berbeda pendirian sebagai inti utama demokrasi.

Cara bekas anggota-anggota Pakta Warsawa diperlakukan oleh kapitalisme Barat, yang beroperasi lewat Dana Moneter Internasional (IMF) dan lembaga yang sepenuhnya Barat, yang lazimnya, tetapi secara

menyesatkan dikenal sebagai *Bank Dunia*, tidaklah berbeda jauh dari cara kapitalisme, sepanjang abad-abad yang lalu, memperlakukan negeri-negeri Dunia Ketiga. Hasil, sejauh ini, ialah bahwa bekas *Dunia Kedua* dengan cepat ditransformasi menjadi sebagian dari Dunia Ketiga.

Asia Timur yang Bangkit Kembali?

Sejarahwan Belanda, Jan Romein, menyebutkan abad ke XX *Abad Asia* (Romein 1962). Dalam *China in World History* (diterbitkan pada tahun 1958) ia sampai sebegitu jauh meramalkan bahwa Tiuongkok, dalam waktu duapuluh, atau paling lama, tigapuluh tahun akan menjadi sebuah nasion industrial dalam skala yang akan menjadikannya, di dalam sistem dunia modern kita, kekuatan terbesar di Timur Jauh, apabila bukannya di seluruh dunia (Romein 1958).

Dalam sebuah tulisan yang diumumkan pada tahun 1967, saya menyatakan persetujuan saya dengan konsep Romein mengenai *Abad Asia* itu:

Pada pergantian abad ini, nasib Eropa sudah ditentukan. 'Kurun Eropa' – dominion dunia yang dilakukan oleh semenanjung Asia yang ajaib, dinamik dan penuh pergolakan itu – telah berlalu untuk selamanya.³

Peralihan menuju suatu era baru telah tiba. Untuk sesaat tampaknya seperti kepemimpinan dunia, baik politikal maupun spiritual, akan bergeser ke arah dua kekuatan dunia, yang kedua-duanya adalah pewaris Eropa lama: Amerika Serikat dan Rusia. Tetapi pandangan ke depan Jan Romein menjangkau yang lebih jauh lagi: ia menamakan abad ke XX kita ini *Abad Asia*. Sekitar pergantian pertengahan-abad suatu peralihan segar terjadi. Pusat gravitas perpolitikan dunia telah bergeser dari dunia Atlantik ke arah Asia. Hasil sesungguhnya dari Perang Korea telah membuat para peninjau menyadari berakhirnya supremasi nasion-nasion kulit putih. Baru pada tahun-tahun belakangan ini menjadi jelas bahwa yang aslinya tampak sebagai sekedar suatu episode, menjadi sebanding dengan dikalahkan Rusia Tsar oleh Jepang pada awal abad sekarang, atau dengan pukulan atas Pearl Harbour di titik awal Perang Pasifik, dalam kenyataannya melambangkan suatu pembalikan dalam sejarah dunia (Wertheim 1967: 633).

Impotensi militer Amerika di hadapan rakyat Vietnam, dan peledakan bom hidrogen Tiongkok di tahun 1964, merupakan faktor-faktor baru, terhitung pada tahun-tahun 1960-an, yang disebut dalam tulisan saya.

Kini, kurang-lebih 30 tahun setelah wafatnya Romein, laporan-laporan surat kabar berulang-kali menyatakan bahwa bagian-bagian besar Asia sedang mempersiapkan, tidak hanya untuk mengejar ‘Barat,’ tetapi bahkan melampauinya. Kalau begitu, adakah Romein benar dalam prediksi-prediksinya?

Saya masih menerima bahwa ini adalah *Abad Asia*, tetapi kita mesti menyadari bahwa bagian-bagian besar Asia, termasuk kebanyakan negeri di Asia Selatan dan Tenggara (negeri-negeri itu saya agak mengenalnya), masih menderita –dalam kata-kata Andre Gunder Frank– suatu ‘perkembangan dari kurang-berkembangan.’ Pesaing-pesaing sejati dunia Barat berada di Asia Timur, di mana, dalam dasawarsa-dasawarsa yang lalu, nasion-nasion tertentu telah mencapai pertumbuhan ekonomi, dengan terutama bersandarkan kekuatan-kekuatan mereka sendiri.

Di sini nasional pertama yang terpikirkan adalah Jepang. Seperti sudah disinggung dalam bab-bab di muka, keberhasilan Jepang dalam menjadi salah-satu kekuatan kapitalis dunia yang paling kuat, adalah dari dukungan kuat yang diberikan bagi industrialisasi, dari awal-awalnya pada akhir abad ke XIX, oleh pemerintah imperial Jepang. Chomsky melukiskan Jepang pasca-Perang Dunia ke II sebagai berikut:

Jepang, dengan menolak nasehat ekonomi neo-klasik yang baku, merancang suatu bentuk kebijakan industrial yang menugaskan suatu peranan predomnan pada negara, menciptakan sebuah sistem yang ‘agak mirip dengan organisasi birokrasi industrial di negeri-negeri sosialis dan tampaknya tidak mempunyai kesetaraannya di negeri-negeri maju Eropa lainnya,’ demikian ahli ekonomi Universitas Tokyo, Ryutaro Komiya menegaskan dalam introduksinya pada sebuah studi mengenai kebijakan-kebijakan ekonomi pasca-perang Jepang yang dilakukan oleh sekelompok ahli ekonomi terkemuka Jepang. Mereka membahas berbagai tindakan yang dilakukan untuk meningkatkan ‘produksi, investasi, riset dan perkembangan, modernisasi atau restrukturisasi’ di sejumlah industri sambil menguranginya di sejumlah lainnya, memodifikasi alokasi sumber-sumber dan tingkat kegiatan ekonomi yang ditentukan oleh pasar. Chomsky juga mengutip pandangan seorang ahli ekonomi Jepang bahwa kebijakan industrial Jepang dalam periode awal pasca perang tidak didasarkan pada perekonomian neo-klasik atau pemikiran Keynesian, tetapi lebih bersandar pada garis neo-merkantilis (Chomsky 1994: 146).

Secara sama, keberhasilan-keberhasilan ekonomi kedua ‘Macan Kecil,’

Korea Selatan dan Taiwan, juga dapat dijumpai pada asosiasi positif antara intervensi negara dan percepatan pertumbuhan ekonomi, sebagaimana yang dirumuskan oleh Alice Amsden dalam *Asia's Next Giant* (Amsden 1989).

Bagaimana mengenai Tiongkok? Sebenarnya, selama tigapuluh tahun pertama sesudah proklamasi Republik Rakyat, Tiongkok telah berhasil, melalui usaha yang luar-biasa, dalam mencapai suatu tingkat perkembangan pedesaan yang dapat berlaku sebagai suatu landasan sehat bagi industrialisasi, yang dilaksanakan sepenuhnya dengan kekuatan-kekuatan sendiri. Negara Tiongkok, seperti sudah disinggung sebelumnya, telah berfungsi sebagai sebuah motor bagi perkembangan ekonomi maupun sebagai suatu pendukung kuat emansipasi massa rakyat.

Perkembangan ekonomi sekarang yang serba pesat, dan agak berlebihan dalam pengerahannya, lazimnya dijumpai pada sistem kapitalis yang, sejak awal tahun-tahun 1980-an, telah menyebar bagaikan api-liar, sekalipun Partai Komunis, yang secara nominal masih berkuasa, terus melakukan *lip-service* pada suatu 'perekonomian pasar sosialis.' Dengan demikian, apakah Jan Romein benar, ketika di tahun 1958 ia memprediksi bahwa Tiongkok akan menjadi sebuah negeri industrial maju dalam waktu paling lama tigapuluh tahun, untuk menjadi kekuatan terbesar di Timur Jauh, walaupun bukannya di seluruh dunia?

Di sini kita mesti bercadang. Romein, melihat kampanye untuk kebebasan spiritual yang lebih besar di Tiongkok yang dimulai di tahun 1958, mengharapkan bahwa, dalam jangka panjangnya, modernisasi secara tidak dapat dihindari akan dibarengi peningkatan kadar kebebasan intelektual dan artistik, yang mencerminkan 'mekarnya seratus bunga dan bersaingnya seratus aliran pikiran' (Romein 1958). Pada pokoknya ia membayangkan suatu masa depan di mana Timur akan melampaui Barat dalam menciptakan sebuah masyarakat di mana tidak saja individu-individu berhak-istimewa yang mendapatkan jalan masuk pada keberhasilan-keberhasilan di wilayah spiritual, tetapi massa rakyat akan juga berpeluang penuh untuk mengembangkan bakat-bakatnya.

Betapapun, jenis 'perubahan' yang diharapkan Romein dari derap

kemajuan Tiongkok menuju –setidak-tidaknya– persamaan dengan kekuatan-kekuatan Barat, ternyata tidak terjadi. Transisi pada yang oleh kepemimpinan Tiongkok secara eufimistik dinamakan ‘sosialisme pasar,’ telah jelas tidak menyimpang pada tipe emansipasi manusia yang dibayangkan oleh Romein. ‘Perubahan’ seperti itu mungkin bisa terjadi apabila orang Tiongkok berkukuh dengan strategi pedesaan yang sejak awal tahun-tahun 1960-an telah dijalankannya dengan keberhasilan luar biasa. Tetapi pembalikan ke suatu arah kapitalis yang terjadi di bawah Deng Xiaoping telah membuat strategi pembangunan Tiongkok terhempas total di luar keseimbangan. Seperti disinggung dalam bab di depan, distribusi di antara rumah-rumah tangga individual dari apa yang tadinya tanah ‘kolektif’ telah mengakibatkan fragmentasi/penyerpihan (Hinton berbicara tentang “*noodle land*” [tanah mie] sehingga kelanjutan mekanisasi agrikultura tertunda hingga *Calends Yunani* [tidak kapanpun. Pen.]).⁴ Sama gawatnya adalah kian meningkatnya ketak-pedulian akan konservasi air, yang diberikan kesaksiannya oleh banjir besar di Tiongkok Selatan pada bulan Juli 1996.

Kini sudah ada laporan-laporan mengenai kegaduhan gawat di antara kaum tani Tiongkok; ini untuk sebagian akibat korupsi yang merajalela di kalangan kaum birokrat regional dan lokal, yang banyak di antaranya mengikuti nasehat Deng bahwa ‘menjadi kaya itu sesuatu yang terhormat.’ Pendidikan, khususnya bagi kaum wanita, juga telah sangat merosot. Kebijakan ‘satu anak,’ dengan akibat-akibatnya atas kedudukan sosial kaum wanita (yang, menurut Mao, ‘semestinya menopang separuh langit’), adalah salah-satu akibat terburuk dari kebijakan ‘kontra-emansipasi’ yang dijalankan oleh kepemimpinan Tiongkok sejak tahun-tahun 1980-an.

Tiongkok tampaknya mengambil sifat-sifat terburuk dari kapitalisme Barat. Di Timur Jauh, juga, Mammon sedang naik-daun, dan macan-macan, yang kecil maupun yang besar, tidak bisa tidak akan terpancang macet dalam suatu krisis dunia yang tiada terkendalikan lagi.

Punyakah Sosialisme suatu Hari Depan?

Setelah rubuhnya Tembok Berlin di bulan Nopember 1989, tidak hanya

di dunia Barat yang membela ekonomi kapitalis yang mengalami kesadaran euforia yang kuat, berbarengan dengan harapan bahwa seluruh dunia akan berkembang dalam arah kapitalis. Yang disebut dapatnya masyarakat manusia diolah, melalui perencanaan negara, dibuang jauh-jauh sebagai sebuah konsep yang termasuk dalam utopia yang ketinggalan zaman. Secara psikologis, baik para orang yang percaya pada sistem-sistem pemerintahan komunis maupun kaum sosial-demokrat Barat mendapatkan diri mereka dalam keterpojokan defensif, sesungguhnya tidak saja dalam teori, tetapi juga dalam politik praktis, sehingga mereka merasa terpaksa untuk sedikit atau banyak menyesuaikan pandangan-pandangan mereka dengan cara berpikir yang dominan dalam arti perekonomian pasar.

Kini, di pertengahan tahun-tahun 1990-an, kita sudah dapat menyaksikan reaksi yang mencolok terhadap euforia yang berdasarkan prospek suatu pasar yang beroperasi bebas dari kontrol pemerintah. Di dunia Barat terdapat peningkatan kritik terhadap privatisasi yang tak terbatas, sedangkan rentetan-rentetan peleburan (*merger*) perusahaan-perusahaan besar nasional atau multinasional sama-sama menghadapi perlawanan yang kian meningkat. Para ahli mengenai masalah-masalah Dunia Ketiga, khususnya, menolak serangan yang terus-menerus terhadap 'negara' dan pengkramatan 'pasar bebas,' sebagai sebuah karikatur, yang berlawanan dengan pembuktian ilmiah yang diterima secara luas. Di negeri Belanda, sebuah peringatan terhadap pemaksaan 'perekonomian pasar bebas' pada negeri-negeri Dunia Ketiga, dan yang ditandatangani hampir tigapuluh ahli, telah diumumkan dalam sebuah surat-kabar berprestise.

Hasil-hasil pemilihan umum di banyakj negeri Eropa juga menguatkan bahwa ide-ide sosialis sedang menguat kembali. Di Eropa Timur, termasuk Russai, pemberian suara untuk partai-partai komunis meluas, tidak hanya di negeri-negeri Balkan yang terutama agrarian, tetapi bahkan di Polandia dan Jerman Timur, di mana rakyat merasa kehilangan jaminan sosial dan pendapatan teratur yang mereka nikmati di bawah suatu rezim komunis. Bahkan di beberapa negeri Eropa Barat, partai-partai sayap kiri telah menfdapatkan keberhasilan yang tidak diduga-duga dalam pemilihan-pemilihan umum belakangan ini. Teristimewa

di Kerajaan Inggris, pemerintahan konservatif John Major menderita sangat parah di tempat-tempat pemungutan suara, sekalipun mesti diakui bahwa Tony Blair, dalam mengejar kemenangan, telah meninggalkan banyak dari program sayap kiri Partai Buruh yang tradisional. Juga partai-partai sayap-kiri di Italia, Perancis dan Belgia memperoleh keberhasilan-keberhasilan yang mengacu diperbaruinya dukungan bagi ide-ide dan gerakan-gerakan sosialis.

Isu yang paling bersilangan adalah, apakah di Dunia Ketiga, gerakan-gerakan emansipasi radikal telah melampaui berakhirnya Perang Dingin, sehingga mampu menantang supremasi Mammon, baik di 'Utara' maupun di Timur Jauh. Lenyapnya, boleh dikata, kedua negara besar, Uni Sovyet dan Tiongkok Maois, yang umumnya dipandang sebagai juara-juara kuat dari sosialisme radikal telah, paling tidak untuk sementara ini, melemahkan gerakan-gerakan yang untuknya kedua negara itu telah menunaikan suatu fungsi keteladanan. Dunia Ketiga masih memiliki sejumlah gerakan-gerakan protes yang berarti. Di negara bagian Chiapas Meksiko, kaum Zapatista menentang persetujuan-persetujuan NAFTA. Di India, di tahun 1994, terjadi protes kuat dari kaum tani terhadap 'kekuasaan-kekuasaan yang baru saja diberikan kepada para pedagang benih multinasional dalam putara terakhir GATT' (*The General Agreement on Tariffs and Trade*). Vandana Shiva, tak sangsi lagi, telah mengatakannya dengan tepat: "Protes benih itu akan tampak seperti mars garam Gandhi terhadap pajak yang kejam."

Sekalipun saya tidak mengetahui akan adanya suatu gerakan protes internasional, yang dilandasi teori dan solidaritas, yang meliputi Dunia Ketiga, saya tetap yakin bahwa bangsa manusia memerlukan suatu bentuk hubungan-hubungan sosial baru, yang menuntut suatu pembalikan total dari kecenderungan-kecenderungan yang ada dalam sikap-sikap produksi dan politik. Jika kita mau lolos dari bahaya-bahaya besar di hadapan kita, termasuk kemungkinan pemusnahan bangsa manusia, kita mesti menyadari betapa mendesak langkah-langkah ke suatu arah seperti itu. Pemecahannya tidak harus dicari dalam 'pasca-modernisme' yang bergaya, sebagai penemuan baru para pemikir barat yang jelas-jelas tidak pernah memikirkan nasib rakyat-rakyat Dunia Ketiga. Rekonstruksi perekonomian global tidak akan dicapai melalui

suatu sistem ekonomi yang didasarkan pada individualisme ekstrim dan persaingan nekad-nekadan, tetapi harus melalui suatu sistem baru secara radikal di mana koperasi dan emansipasi kolektif merupakan unsur-unsur dasarnya. Sistem itu mesti mendapat dukungan suatu sistem politik yang memiliki kapasitas untuk membatasi pencarian-keuntungan individual dan menetapkan dan memnberlakukan kepedulian akan lingkungan. Sistem politik itu tidak saja mempersyaratkan lembaga-lembaga demokratik formal, tetapi juga, sebagai kenyataan praktek keseharian, partisipasi aktif dari massa rakyat.

Keberhasilan suatu gerakan emansipatorik inovatif seperti itu dalam sekala global, berdasarkan landasan teoretikal yang manapun, di bawa bendera sosialisme, komunisme atau Marxisme, sangat diragukan, berdasarkan kebangkrutan-kebangkrutan ideologi-ideologi ini yang telah menghancurkan banyak daya-tarik mereka bagi massa banyak. Dihidupkannya kembali suatu gerakan emansipatorik di negeri manapun yang telah melalui suatu revolusi sosialis, melihat cita-cita aslinya dikhianati dalam proses sejumlah Thermidor, juga sama-sama bersifat problematik. Adalah menjadi paradoks abad sekarang bahwa di kebanyakan negeri di mana suatu revolusi sosialis telah berhasil, cepat atau lambat perkembangan-perkembangan terjadi untuk menahan daya gerak emansipatorik dan menandakan suatu kebalikan pada sikap-sikap dan praktek-praktek pra-revolusioner. Kemunduran pada sikap-sikap dan hubungan-hubungan seperti itu, yang orisinilnya menjadi tujuan revolusi sosialis untuk dilenyapkan, dipadukan dengan suatu kebalikan pada kebijakan-kebijakan yang membawa pada bentuk-bentuk represi dan bukan bergambahnya kebebasan, menjadikan tidak mungkinnya negeri-negeri ini menyaksikan suatu pengidupan-kembali secara segera dari simpati-simpati sosialis radikal. Massa luar rakyat akan justru mengingat kebijakan-kebijakan otoritarian yang kadangkala lebih buruk daripada yang terhadapnya revolusi itu diarahkan.

Kritik mengenai perkembangan yang begitu mendasar dan seringkali keras di masyarakat-masyarakat pasca-revolusioner tidak membenarkan disingkirkannya daya-gerak emansipatorik di balik revolusi sosialis yang berhasil sebagai kepalsuan atau penipuan belaka. Unsur-unsur tertentu dalam gerakan-gerakan revolusioner itu bisa mempunyai dampak

bertahan lama atas perkembangan-perkembangan lebih lanjut di negeri-negeri itu dan bahkan di seluruh dunia.

Bangkitnya kembali gerakan-gerakan emansipatorik radikal terutama dapat diharapkan di negeri-negeri dimana suatu gerakan seperti itu sudah ada dan mempunyai akar-akar kuat, tetapi masih harus mencapai suatu tingkat di mana ia dapat mengerahkan kekuatan politik yang berdaultan – sehingga resiko bahwa kekuasaan mutlak ‘mengkorupsi’ dapat dihindari. Suatu situasi yang menjanjikan seperti itu telah dilukiskan bagi negara bagian Kerala India dalam karya Franke dan Chasin *Kerala: Radical Reform as Development in an Indian State* (Franke 1994). Saya mengutip sebuah kesimpulan penting dari para pengarang itu:

Para perencana dan penduduk desa Kerala berusaha menciptakan partisipasi, pemberdayaan, keadilan/persamaan, keswa-mandirian, dan kepedulian akan lingkungan hidup yang sejati, yang dapat menghasilkan perkembangan yang berkelanjutan. Kerala bukan satu-satu tempat di mana alternatif-alternatif bagi suatu hari depan yang suram sedang dikerjakan; tetapi pelajaran-pelajaran yang dapat kita teliti dengan mempelajari pengalaman Kerala kini merupakan suatu urgensi bagi semua kaum miskin dunia dan bagi kita semua di negeri-negeri kaya yang mau bekerja dengan mereka untuk menjadikan kehidupan-kehidupan mereka –dan kita punya– lebih baik ... Pemerintah Kerala, lebih-lebih daripada kebanyakan pemerintahan nasional atau lokal di dunia ketiga, secara lansung bertanggung-jawab pada partai-partai politik, serikat-serikat buruh, kelompok-kelompok perempuan, dan serikat-serikat kaum tani yang militan, terorganisasi baik, terpimpin baik dan siap jika perlu untuk beraksi apabila kepentingan-kepentingan para anggotanya terancam. Karena kekuatan organisasi-organisasi rakyat itu, banyak dari reform-reform dilanjutkan dan diperluas bahkan di bawah pemerintahan-pemerintahan konservatif, walaupun mereka lebih sejahtera ketika partai-partai kiri berkuasa (Franke 1994: xxi, 105).

Perspektif saya akan hari-depan bersumber dari keyakinan saya bahwa, jika dalam jangka panjangnya, gerakan-gerakan emansipatori ini akan berhasil, walaupun hanya dalam batas-batas tertentu, gerakan-gerakan itu dapat menunjukkan jalan menuju suatu pembalikan dari kecenderungan-kecenderungan yang ada di dalam sejarah umat manusia. Jika kecenderungan inovatif ini menjadi efektif pada suatu skala global, ia mungkin tidak hanya mempengaruhi hari-depan Dunia Ketiga, tetapi bahkan meluaskan dampaknya pada bagian dunia yang telah berkembang secara industrial – dengan sepenuh-penuh harapan, sebelum kesemuanya

terlambat jadinya.

catatan:

¹ Dikutip oleh sejarawan Perancis dan spesialis-Asia, Jean Chesneaux dalam Bulletin of Concerned Asian Scholars, Jilid I No.4 (1969), hal. 34.

² Saya merujuk pada sebuah Tesis Master yang tidak dipublikasikan oleh Gunaretnam Rajaratnam, *The Emergence of Democracy Movements 'in the Socialist Systems*, Institute of Social Sciences, The Hague, 1990, hal. 60 ff.; lihat juga Raymond Lotta, "Crisis in Eastern Europe," *Revolutionairy Worker*, Jilid II, No. 40, 5 Febr. 1990.

³ *Aera van Europa* adalah sebuah buku lebih dini oleh Jan Romein, dengan kerja-sama Anie Romein-Verschoot, 1954.

⁴ William Hinton, *The privatization of China: The Great Reversal*, London, 1991, hal. 15-17; Hinton melukiskan bidang-bidang tanah itu sebagai carik-carik yang demikian sempitnya, sehingga bahkan roda kanan sebuah kereta tidak dapat melewati tanah seseorang tanpa roda kirinya menggelinding di atas tanah seorang lainnya.

Bibliografi

- Airey, W.** 1970. *A Learner in China: A Life of Rewi Alley*, Caxton Press (Christchurch).
- Amsden, A.** 1989. *Asia's Next Giant: South Korea and Late Industrialization*, Oxford University Press (Oxford).
- Bairoch, P.** 1993. *Economics and World History: Myths and Paradoxes*, Harvester/Wheatsheaf (New York).
- Baks, Ch.** 1969. "Afschaffing van Pacht: Een onderzoek naar de sociale gevolgen van afschaffing van Pacht in twee dorp[en] in Zuid-Gujerat, India" (Abolition of tenancy: An examination of the social effects of abolition of tenancy in two villages in Sout Gujerat, India), doct. Diss. University of Amsterdam.
- _____ 1985. "An Interpretation of Growing Landlessness among Adivasis of South Gujerat, India," dalam V. Sutlive et.al.(eds.), *Modernization and the Emergence of a Landless Peasantry*, College of William and Mary (Williamsbury).
- Barratt Brown, M.** 1974. *The Economics of Imperialism*, Penguin (Harmondsworth).
- Baum, R. dan F. Teiwes.** 1968. *Ssu-Ch'ing: The Socialist Education Movement of 1962-1966*, University of California Press (Berkeley).
- Beijing.** 1981. *Beijing Review*, 16/3/'81, merujuk pada sebuah karangan oleh Wu Deduo, diterbitkan dalam *Wanhui Bao*.
- Benda-Beckmann, F. von.** 1981. "Leegstaande luchtkasteelen: Over de Pathologie van gronden-rechtshervormingen in ontwikkelingslanden," *Rechtantwik-kelingen: Tien agrarisch-rechtelijke opstellen*, Kluwer (Deventer), hal.91-109.
- _____ 1989. Scapegoat and Magic Charm: Law in Development Theory and Practice, *Journal of Legal Pluralism*, Jilid 28, hal.129-148.
- Bentham, J.** 1931. *Theory of Legislation*, International Library of Psychology, Phylsophy andf Scientific Method, London.
- Bernstein, Th.** 1977. *Up to the Mountains and Down to the Village: The Transfer of Youth From Urban to Rural China*, Yale University Press (New Haven/London).
- Bettelheim, Ch.** 1973. *Revolution culturelle et organisation industrielle en Chine*, Maspero (Paris).
- _____ 1973. *Les luttes de classes en URSS — Iere periode 1917-1923*, Seuil/Maspero (Paris).
- Blecher, M.** 1977. Consensual Politics in Rural Chinese Communities: The Mass Line in Theory and Practice, *Moderne China*, Jilid 15, No.1 (Jan.).

- Boeke J.H.** 1940. *Indische Economie, I. De theorie der Indische economie*, Tjeenk Willink (Haarlem).
- _____ 1940. *The Structure of Netherlands Indian Economy*, Institute of Pasific Relations (New York).
- _____ 1948. *The Interests of the Voiceless Far East: Introduction to Oriental Economics*, University Press (Leiden).
- Breman, J.** 1985. *Of Peasants, Migrants and Paupers: Rural Labour Circulation and Capitalist Production in West India*, Oxford University Press (Delhi).
- Breman, J. et al. (eds.)**. 1989. *Imperial Monkey Business: Racial supremacy in social Darwinist theory and colonial practice*, VU University Press.
- Brewer, J.** 1989. *Sinews of Power: War, Money and the English State, 1688-1783*, Knopf (New York).
- Brinton, C.** 1965. *The Anatomy of Revolution*, Random (New York), (orig. 1938).
- Brugger, B dan S. Reglar.** 1994. *Politics, Economy and Society in Contemporary China*, Macmillan (Houndmills/London).
- Cantillon, R.** 1952. *Essai sur la nature du commerce en general*, Institut National d'Etudes Demographiques (Paris), (orig. 1755).
- Chomsky, N.** 1993. *World Orders Old and New*, Pluto (London).
- _____ 1993. *Year 501: The Conquest Continues*, Verso (London).
- Clairmont, F.F.** 1996. *The Rise and Fall of Economic Liberalism: The Making of the Economic Gulag*, Southbound (Penang).
- Clairmonte, F., dan J. Cavanagh.** 1985. "The World debt: The approaching Holocaust," *Economic and Political Weekly*, Jilid 21, hal. 1361-4.
- _____ 1986. "Global Economic Debacle and Corporate Power," *Economic and Political Weekly*, Jilid 22, hal. 559-563.
- Cox, O.C.** 1968. *Caste, Class and Race: A Study of Social Dynamics*, Modern Reader Paperbacks (New York/London), (orig.1948).
- Cribb, R. (editor)**. 1989. *The Indonesian Killings 1965-1966: Studies from Java and Bali*, Centre of SEAsian Studies, Monash University (Clayton), 1990.
- Crook, D.** 1973. "The quantity of Oil and the Quality of Life," *Eastern Horizon*, Jilid 14, No.6.
- Crook, I. & D. Crook.** 1965. *The First Years of Yangyi Commune*, Routledge/Kegan Paul (London).
- Crouzet, F.** 1985. *The First Industrialists: The Problem of Origin*, Cambridge University Press (Cambridge).
- Dam, H. ten.** 1951. "Desa Tjibodas," tidak diterbitkan, Bogor.

- _____ 1961. "Cooperation and Social Structure in the Village of Chibodas," dalam: Wertheim a.o. (editors), *Indonesian Economics: The concept of dualism in theory and policy*, Van Hoeve (The Hague), hal. 345-382.
- Dekkers, R.** 1993. "Het Chinese rechtsleven" (The Chinese Legal Life), *De Nieuwe Stem*, Jilid 21, hal. 329-337.
- Dore, R.** 1973. *The Diploma Disease: Education, Qualification and Development*, University of California Press (Berkeley-LosAngeles).
- Dumont, R.** 1957. *Revolution dans les campagnes chinoise*, Seuil (Paris).
- _____ 1961. *Terres vivantes*, Plon (Paris).
- _____ 1965. *La Chine surpeuplee - Tiers Monde Affame*, Seuil (Paris).
- _____ 1973. *L'utopie ou la mort*, Seuil (Paris).
- _____ 1973. *Chine: La revolution culturelle*, Seuil (Paris).
- Dutt, R., C.I.E.** 1965. *The economic history of India*, Jilid I, Under Early British Rule, Franklin (New York), (orig. 1904)
- Eisenstadt, S.N.** 1965. *Modernization: Protest and Change*, Prentice (Englewood Clifff).
- Elias, J.E.** 1903. *De vroedschap van Amsterdam, 1578-1795*, Jilid I, Loosjes (Haarlem).
- _____ 1968. *Wat is Sociologie?*, Spectrum (Utrecht/Antwerpen).
- Enzensberger, H.M.** 1993. *Aussichten auf den Burgerkrieg*, Suhrkamp (Frankfurt a/M).
- Falk Moore, S.** 1973. "Law and Social Change: The semi-autonomous social field as an appropriate subject of study," *Law and Society Review*, Summer, hal.719-745.
- Frank, A.G.** 1968. *Latin America: Underdevelopment or Revolution? Essays in the Development of Underdevelopment and the Immediate Enemy*, Monthly Review Press (New York).
- Franke, R.W. dan B.H. Chasin.** 1993. *Kerala: Radical Reform as Development in an Indian State*, Institute for Food and Development Policy (Oakland).
- Friedman, E., P.G. Pickowitz, M. Selden.** 1989. *Chinese Village, Socialist State*, Yale University Press (New Haven/London).
- Friedrich, C.J.** 1948. *The New Image of the Common Man*, Harvard University Press (Cambridge, Mass.).
- Galanter, M.** 1981. *Competing Equalities: Law and the backward classes in India*, Oxford University Press (Delhi).
- Geertz, Cl. (editor).** 1961. *Old Societies and New States: The quest for Modernity in Asia and Africa*, Free

Press (New York).

Geertz, Cl. 1961. *Agricultural Involution: The Process of Ecological Change in Indonesia*, University of California Press (Berkeley/Los Angeles).

_____ 1961. *The Social History of an Indonesian Town*, The M.I.T. Press (Cambridge, Mass.).

George, S. 1985. *Third World Debt: The Moral and Physical Equivalent of War, Who Owes Whom?*, Musim Semi, hal. 3-10.

Gerschenkron, A. 1961. *Economic Backwardness in Historical Perspective*, Bellknap (Cambridge, Mass.).

Gourou, P. 1940. *L'utilisation du sol en Indochine française*, Paul Hartmann (Paris).

_____ 1948. "Notes on China's Unused Uplands," *Pacific Affairs*, Jilid 21.

Gray, J. 1985. *Rebellions and Revolutions: China from the 1800s to the 1980s*, Oxford University Press (Oxford).

Green, D. 1968. *The Containment of Latin America: A History of the myths and realities of the Good Neighbor Policy*, Quadrangle (Chicago).

Griffiths, J. 1985. "De sociale werking van rechtsregels en het emancipatoire potentieel van wetgeving" (The social effect of legal rules and the emancipatory potential of legislation), dalam Havinga, hal. 27-46.

Gunaretnam, R. 1985. "The Emergence of Democracy Movements in the Socialist Systems: The case of Hina Since Mao Tsetung," Tesis Master tidak diterbitkan, Institute of Social Studies.

Han Suyin. 1961. *A Mortal Flower: China, Autobiographical History*, Cape (London).

Havinga, T. dan B. Sloat (eds.). 1989. *Recht: bondgenoot of barriere by emancipatie* (Law: ally or obstacle for emancipation), VUGA (The Hague).

Hazard, B.P. 1981. *Peasant Organization and Peasant Individualism: Land Reform, Cooperation and The Chinese Communist Party*, Breitencach (Saarbrucken).

Hinton, W. 1961. *Fanshen: A Documentary of Revolution in a Chinese Village*, Monthly Review Press (New York).

_____ 1968. *Hundred Day War: The Cultural Revolution at Tsinghua University*, Monthly Review Press (New York).

_____ 1983. *Shenfan: The Continuing Revolution in a Chinese Vallage*, Random (New York).

_____ 1989. *The Privatization of China: The Great Reversal*, Earthscan (London).

Ho Ping-ti. 1961. *Studies on the Population of China, 1368-1953*, Harvards University Press (Cambridge,

Mass.), (origin.1959).

Houten, S.van. 1883. *Bijdragen tot den strijd over God, Eigendom en Familie* (Contributions to the dispute around God, Ownership en Family), Van Looy (Amsterdam).

Huizer, G. 1970. *The Revolutioary Potential of peasants in Latin America*, Heath (Lexington).

Hyma, A. 1940. *The Dutch in the Far East: A History of the Dutch Commercial and Colonial Empire*, Wahr (Ann Arbor)

Ilf, I. & E. Petrov. 1922. *A Millionaire in Soviet Russia*, dengan kata-pengantar oleh A. Lunarcharsky (diterbitkan dalam terjemahan bhs. Belanda, Amsterdam).

Kap, K.W. 1971. *The Social Costs of Private Enterprise*, Schocken (New York). (orig. 1950).

_____ 1969. *Environmental Policies and Development Planning in Contemporary China, and Other Essays*, Mouton (The Hague/Paris).

Karol, K.S. 1971. *La deuxieme revolution chinoise*, Laffont, (Paris).

Kemp, T. 1981. *Industrialization in Nineteenth-century Europe*, Longmans (London/Harlow), orig.1969.

King, F.H. 1911. *Farmers of Forty Centuries or Permanent Agriculture in China, Korea and Japan*, Mrs. F.H. King (Madison, Wis.).

Kolko, G. 1988. *Confronting the Third World: United States Foreign Policy 1945-1980*, Pantheon (New York).

_____ 1993. "Vietnam since 1975: Winning the War and Losing the Peace," *Journal of Contemporary Asia*, Jilid 25, hal.3-49.

Kothari, R. 1993. *Poverty: Human Conciousness and the Amnesia of Development*, Led Books (London/New Jersey), orig. 1993, dengan judul *Growing America*.

Kula, W. 1960. "Les debuts du capitalisme en Pologne dans la perspective de l'histoire comparee," teks ceramah dibaca di depan Polish Academi di Roma.

Laski, H.J. 1946. *Reflections on the Revolution of our Time*, Allen and Unwin (London).

Lenin, V.I. 1931. *The State and Revolution*, International Publishers (New York), (orig. 1917).

Lev, D. 1965. *The Transition to Guided Democracy: Indonesian Politics, 1957-1959*, Cornell University Press (Ithaca).

Lipset, S.M. 1961. *The First New Nation: The United States in Historical and Comparative Perspective*, Basic Books (New York).

List, F. 1928. *The National System of Political Economy*, Longmans (London).

- Loi, M.** 1971. *L'intelligence au pouvoir – Un monde nouveau, la chine*, Maspero, (Paris).
- _____ 1973. "Les femmes chinoises et la quatrieme corde," *Questions feministes*, Nr. 6 (Sept.).
- Lotta, R.** 1988. "Crisis in Eastern Europe: Why Gorbachev Needs to Remake an Empire," *Revolutionary Worker*, Jilid II, Nr. 40, 5 Febr.
- Lundberg, E.** 1937. *America's Sixty Families*, Vanguard (New York).
- Lynd, R.S. & H.M. Lynd.** 1928. *Middletown*, Harcourt (New York).
- _____ 1937. *Middletown in Transition*, Harcourt (New York).
- Mao Zedong.** 1961. Where do correct ideas come from?
- Meisel, J.H.** 1957. *The Myth of the Ruling Class: Gaetano Mosca and the 'Elite'*, University of Michigan Pres (Ann Arbor).
- Migdal, J.S.** 1969. *Strong Societies and Weak States: State-Society Relations and State Capabilities in the Third World*, Princetown University Press (Princetown).
- Mills, C.W.** 1956. *The Power Elite*, Oxford University Press (Oxford).
- Milton, D. & N.D. Milton.** 1969. *The Wind Will not Subside: Years in Revolutionary China, 1964-1969*, Pantheon (New York).
- Moore, B., Jr.** 1972. *Reflectrions on the Causes of Human Misery amd Upon Certain Proposals to Eliminate Them*, Beacon Press (Boston).
- Mukherjee, R.** 1958. *The Rise and Fall of the East India Company: A Sociological Appraisal*, VEB Deutscher Verlag der Wissenschaften (Berlin).
- Myrdal, G.** 1969. *The Challenge of Worlds Poverty: A World Anti-Poverty Program in Outline*, Pantheon (New York).
- Nasution, A.B.** 1991. "The Aspiration for Constitutional Government in Indonesia: A Socio-Legal Study of the Indonesian Konstituante 1956-1959," doct.diss. Utrecht University (Utrecht).
- Nederveen Pieterse, J.** 1988. *Empire and Emancipation: Power and Liberation on a World Scale*, Praeger (New York).
- Nederveen Pieterse J. (editor).** 1988. *Emancipations, Modern and Postmodern*, Sage (London).
- Nehru, J.** 1956. *The Discovery of India*, Meridian (London).
- Nieuwenhuys, O.** 1988. "Emancipation for Survival: Access to land and labour of Thandans in Kerala," *Modern Asian Studies*, Jilid 25, No. 3, hal. 599-619.
- Nolan, P.** 1989. "Assessing Economic Growth in the Asian NIC," *Journal of Contemporary Asia*, Jilid 20, hal.

- Nolan, P. & G. White.** 1981. "Distribution and Development in China," *Bulletin of Concerned Asian Scholars*, China Special, No. 2.
- Ortega y Gasset, J.** 1960. *The Revolt of the Masses*. Allen and Unwin (London), (orig. dalam 1930 dalam bhs. Spanyol).
- Pareto, V.** 1965. *The Rise and Fall of the Elites: An Application of Theoretical Sociology*, Badminster (New York), orig. 1902 dlm. Bhs. Perancis.
- Pepper, S.** 1981. "China's Egalitarian Experiments in Education," *The Asian Wall Street Journal*, 16/9/1981.
- Petras, J.** 1988. "Contradictions of Market Socialism in China," Bag. I, *Journal of Contemporary Asia*, Jilid 18 (1), hal. 3-23.
- Robison, R.** 1981. *Indonesia: The Rise of Capital*, Allen and Unwin (Sidney).
- Romein, J.** 1952. *Aera van Europa* (European Era), Brill (Leiden).
- _____ 1956. "China in World History," *Comprendre*, No. 19, hal. 85-92.
- _____ 1960. *The Asian Century: A History of Modern Nationalism in Asia*, Allen & Unwin (London).
- Rostow, W.W.** 1956. "Rostow on Growth," *The Economist*, 15 dan 22 Augustus.
- _____ 1957. *The Stages of Economic Growth: A Non-Communist Manifesto*, Cambridge University Press (Cambridge).
- Ruge, G.** 1969. *Begegnung mit China: Eine Weltmacht im Aufbruch*, Econ (Dusseldorf/Wien).
- Rutten, M.** 1988. *Asian Capitalism in the European Mirror*, VU University Press (Amsterdam).
- Sartori, G.** 1965. *International Encyclopedia of the Social Sciences*, Jilid IV, sub 'Democracy', Macmillan/Free Press (New York).
- Sauvy, A.** 1956. *De Malthus a Mao Tse-toung*, Denoel (Paris).
- Savigny, F.C. von.** 1840. *Vom Beruf unserer Zeit fur Gesetzgebung und Rechtswissenschaft*, Mohr (Heidelberg), (orig. 1814).
- Schendel, W. van & A.H. Faraizi.** 1984. *Rural Labourers in Bengal, 1880 to 1980*, CASP (Rotterdam).
- Schenk, H.** 1985. Views on Alleppey: Socio-historical and socio-spatial perspectives on an industrial port town in Kerala, South-India, Department of Planning and Demography, University of Amsterdam (Amsterdam).
- Schenk-Sandbergen, L.** 1971. Vuil werk, schone toekomst? Het leven van straatvegers en vuilnisruimers: een onderzoek in Bulsar (India), verkenningen in Peking, Shanghai, Tientsin en Tangshan (China),

(Dirty work, clean future? The life of streetsweepers and scavengers) Van Genneep (Amsterdam).

Schenk-Sandbergen, L. & D. Choulamany-Khampoui. 1988. *Women in Rice Fields and Offices: Irrigation in Laos – Gender specific case-studies in four villages*, Empowerment (Heiloo).

Schram, Stuart R. (editor). 1972. *Authority, Participation and Cultural Change in China*, Cambridge University Press (Cambridge).

Schurmann, E. 1972. *Ideology and Organization in Communist China*, University of California Press (Berkeley).

Scott, J.C. 1965. *Comparative Political Corruption*, Prentice (Englewood Cliffs).

_____ 1985. *Weapons of the Weak: Everyday Forms of Peasant Resistance*, Yale University Press (New Haven/London).

_____ 1988. *Domination and the Arts of Resistance: Hidden Transcripts*, Yale University Press (New Haven/London).

Shils, E. 1960. "On the Comparative Study of the New States," dalam: Geertz (ed.).

Silberman, L. 1956. Hung Liang-chi: A Chinese Malthus, *Population Studies*, Jilid 13, hal. 257 ff.

Skidmore, T. 1987. *The Politics of Military Rule in Brazil, 1964-1985*, Oxford University Press (New York/Oxford).

Skocpol, R. 1973. *States and Social Revolution: A Comparative Analysis of France, Russia and China*, Cambridge University Press (Cambridge).

Smith, A. 1975. *An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations*, Canner (Chicago), (orig. 1776).

Snow, E. 1964. *The Other Side of the River: Red China Today*, Gollancz (London).

Stavis, B. 1976. *People's Communes and Rural Development in China*, Cornell University, Rural Development Committee (Ithaca).

Stiefel, M & W.F. Wertheim. 1982. *Production, Equality and Participation in Rural China*, Elsevier (Amsterdam).

Stokvis, J.E. 1922. *Van wingewest tot zelfbestuur in Nederlandsch-Indie*, Elsevier (Amsterdam).

Sutherland, H. 1974. *The Making of a Bureaucratic Elite: The Colonial Transformation of the Javanese Priyayi*, Heinemann (Singapore).

Tawney, R.H. 1932. *Land and Labour in China* (London).

Tichelman, E. 1975. *The Social Evolution of Indonesia: The Asiatic Mode of Production and its Legacy*, Nijhoff

(The Hague/Boston/-London).

Trial. 1976. *A Great Trial in Chinese History*, dengan Kata-Pengantar oleh Professor Fei Hsiao Tung, New World Press (Beijing).

Utrecht, E. 1964. *Land Reform in Indonesia*, *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, Jilid 5 (3), hal. 71-88.

Vandergeest, P. & EN. Buttel. 1983. "Marx, Weber and Development Sociology: Interpreting the Impasse," *World Development*, Jilid 13, hal. 683-695.

Vandermeersch. 1969. *La reforme des universites en Chine La Nouvelle Chine*, No. 1.

Vermeer, E.B. 1977. *Water Conservancy and Irrigation in China: Social, Economic and Agrrotechnical Aspects*, Leiden University Press (Leiden).

Vilas, C.M. 1984. *The Sandinista Revolution*, Monthly Review Press (New York).

Vogel, E.E. (editor). 1965. *The Cultural Revolution in the Provinces*, Harvard University Press (Cambridge/Mass.).

Vollenhoven, C. van. 1918. *Het adatrecht van Nederlandsch-India*, Brill (Leiden), Jilid I

_____ 1930. *Het adatrecht van Nederlandsch-Indie*, Brill (Leiden), Jilid II.

Wallerstein, I. 1978. *The Capitalist World Economy: Essays*, Cambridge University Press (Cambridge).

_____ 1983. *The Politics of the World Economy*, Cambridge University Press (Cambridge).

Warner, W.I. & P.S. Lunt. 1941. *The Social Life of a Modern Community*, Yale University Press (New Haven).

Weber, M. 1926. *Max Weber: Ein Lebensbild*, Mohr (Tubingen).

_____ 1956. *The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism*, Allen and Unwin (London), (orig. 1904/5).

_____ 1922. *Gesammelte Aufsätze zur Wissenschaftslehre*, Mohr (Tubingen).

Wertheim, W.F. 1935. "Kernvragen van wetgeving," dalam *Rechtskundige Opstellen*, Felicitation Volume for Prof. E.M. Meijers, Tjeenk Willink (Zwolle), hal. 716-792.

_____ 1947. "Stimuleeren of remmen onze octrooien den vooruitgang?" (Do our patents stimulate or retard progress?) *Nederlands Juristenblad*, Nr. 6, hal. 81-92; Nr. 7, hal. 101-113.

_____ 1956. *Indonesian Society in Transition: A Study of Social Change*, Van Hoeve (The Hague/Bandung).

_____ 1958. *Indonesian Society in Transition: A Study of Social Change*, Van Hoeve (The Hague/Bandung) [2nd. Rev.ed.].

- _____ 1961. "De maatschappelijke werking van het recht" (The social effect of law), *Mens en Maatschappij*, Jilid 36, hal. 255-270.
- _____ 1963. "Rechtsnorm of sociale werkelijkheid" (Legal norm or social reality), *Mens en Maatschappij*, Jilid 38, hal. 337-343.
- _____ 1963. *East-West Parallels: Sociological Approaches to Modern Asia*, Van Hoeve (The Hague).
- _____ 1967. "Brave New World," *De Nieuwe Stem*, Jilid 22, hal. 639-651.
- _____ 1974. *Evolution and revolution: The Rising Waves of Emancipation*, Penguin (Harmondsworth).
- _____ 1983. *Emancipation in Asia: Positive and negative lessons from China*, CASP (Rotterdam).
- _____ 1985. "The State and the Dialectics of Emancipation," dalam Nederveen Pieterse (ed.).
- _____ 1985. *Comparative Essays on Asia and the West*, VU University Press, Amsterdam.
- Wertheim, W.F. & S.G. The.** 1962. "Social Change in Java, 1900-1930," *Pacific Affairs*, Jilid 35, hal. 223-247.
- Wieringa, S.E.** 1995. "The Politicization of Gender Relations in Indonesia: The Indonesian Women's Movement and Gerwani until the New Order State," doct.diss. University of Amsterdam.
- Wolf, E.** 1965. *Peasant Wars of the Twentieth Century*, Harper and Row (New York).
- Worsley, P.** 1967. *The Third World*, Weidenfeld and Nicolson (London).
- _____ 1984. *The Three Worlds: Culture and World Development*, Weidenfeld and Nicholson (London).
- Zinkin, M.** 1953. *Asia and the West*, Chatto and Windus (London).

DENJELASAN

Bab-bab yang masuk dalam penerbitan ini, sebagian besar ditulis selama tahun-tahun 1990-an, setelah Runtuhnya Tembok Berlin. Dua bab di antaranya telah, dalam bentuk yang agak berbeda, sudah diterbitkan sebelumnya.

Bab IV, "The State and the Dialectics of Emancipation," didasarkan pada teks sebuah makalah, yang disiapkan untuk sebuah Bengkel Kerja yang diselenggarakan di bulan Januari 1991 pada Institute of Social Studies di Den Haag. Sebuah koleksi dari makalah-makalah itu telah dimuat dalam *Emancipations, Modern and Postmodern*, disunting oleh Jan Nederveen Pieterse, Sage (London), 1992.

Bab III, "Lasting Significance of the Mao-model for Third World," didasarkan atas teks sebuah makalah, yang disiapkan untuk Seminar Internasional dalam Peringatan Se-abad Mao, yang dilangsungkan di Gelsenkirchen dalam bulan November 1993. Suatu koleksi dari makalah-makalah itu telah muncul dalam *Essays in Commemoration of Mao's Centennial: Mao Zedong Thought Lives*, Jilid I, disunting oleh Jose Maria Sison dan Stefan Engel, Neuer Weg (Essen), 1995. Juga teks ini telah direvisi sepenuhnya untuk penerbitan ini.

Bab VI, "Betting on the Elites or Betting on the Masses," memuat bagian-bagian yang sebelumnya telah dimasukkan dalam *Emancipation in Asia: Positive and Negative Lessons from China*, CASP (Erasmus University Rotterdam), 1983.

oooOooo